

Akreditasi LIPI Nomor : 408/AU2/P2MI-LIPF/04/2012

ISSN1412-663X

# HARMONI



Volume XI, Nomor 1, Januari - Maret 2012

Jurnal Multikultural & Multireligius

## PENYIARAN AGAMA DAN DINAMIKA SOSIAL DALAM MASYARAKAT PLURAL

Merekonstruksi Gerakan Dakwah Masa Depan  
*M. Yusuf Asry*

Islam, Pluralitas dan Pembentukan Masyarakat  
Madani di Indonesia  
*Lukmanul Hakim*

Peran Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil  
Indonesia (YPPi) Batu Dalam Pengelolaan Dana  
dan Aset Sosial Keagamaan bagi Pemberdayaan  
Umat Beragama  
*Agus Mulyono*

Dinamika Perkembangan Komunitas Dayak  
Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu  
*Nuhrison M Nuh*

Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Gereja  
(Paroki) Katedral Jakarta  
*Abdul Jamil*

Membangun Harmoni melalui Kebersamaan: Studi  
Kasus Dampak Sosial Penentuan Awal Ramadhan  
dan 1 Syawal terhadap Umat Islam di Kota Padang  
*Zaenal Abidin*

Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Honorar  
di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor  
*Taufik Hidayatullah*

Potensi Kerukunan dan Konflik Umat Beragama  
di Kota Madiun Jawa Timur  
*Suhanah*

Jurnal Harmoni	Nomor 1	Volume XI	Halaman 173	Jakarta Januari - Maret 2012	ISSN 1412-663X
-------------------	------------	--------------	----------------	---------------------------------	-------------------

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI



ISSN 1412-663X

# HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

## Penyiaran Agama dan Dinamika Sosial dalam Masyarakat Plural

# HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

Volume 11, Nomor 1, Januari - Maret 2012

## PEMBINA:

Kepala Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

## PENGARAH:

Sekretaris Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

## PENANGGUNG JAWAB:

Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

## MITRA BESTARI:

Rusdi Muchtar (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Endang Turmudzi (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dwi Purwoko (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

M. Ridwan Lubis (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Lukmanul Hakim (LaKIP Jakarta)

## PEMIMPIN REDAKSI:

Haidlor Ali Ahmad

## SEKRETARIS REDAKSI:

Reslawati

## DEWAN REDAKSI:

Yusuf Asry (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Ahmad Syafi'i Mufid (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Nuhrison M. Nuh (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Koeswinarno (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Bashori A. Hakim (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Mursyid Ali (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Kustini (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Ibnu Hasan Muchtar (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)

Rikza Khamami (IAIN Semarang)

## SIRKULASI & KEUANGAN:

Nuryati & Fauziah

## SEKRETARIAT:

Achmad Rosidi, Akmal Salim R dan I Nyoman Suwardika

## REDAKSI & TATA USAHA:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI, Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta

Telp. 021-3920425/Fax. 021-3920421 Email : jurnalharmoni@yahoo.com

## SETTING & LAYOUT

Achmad Rosidi

## COVER

Mundzir Fadli

PENERBIT: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

*Pimpinan Redaksi* \_\_\_5

### **Gagasan Utama**

Merekonstruksi Gerakan Dakwah Masa Depan

*M. Yusuf Asry* \_\_\_8

Setelah Jihad dan Bom: Diskursus Dakwah pada Masyarakat Plural

*Ahmad Syafi'i Mufid* \_\_\_18

Islam, Pluralitas dan Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia

*Lukmanul Hakim* \_\_\_26

### **Penelitian**

Peran Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia (YPPII) Batu dalam Pengelolaan Dana dan Aset Sosial Keagamaan bagi Pemberdayaan Umat Beragama

*Agus Mulyono* \_\_\_34

Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Gereja (Paroki) Katedral Jakarta

*Abdul Jamil* \_\_\_44

Membangun Harmoni melalui Kebersamaan: *Studi Kasus Dampak Sosial Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap Umat Islam di Kota Padang*

*Zaenal Abidin* \_\_\_56

Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Honorer di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

*Taufik Hidayatullah* \_\_\_67

Survei Keberagamaan Pelajar SLTA: *Paham Ke-Islam-an Pelajar SMA dan MA dalam Kehidupan Sosial*

*Suprpto* \_\_\_86

Dinamika Perkembangan Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu

*Nuhrison M Nuh* \_\_\_101

Dinamika Sosial Keagamaan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Pusat di Kota Surakarta Jawa Tengah

*Wakhid Sugiyarto* \_\_\_115

# HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius  
Volume 11, Nomor 1, Januari - Maret 2012

Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): *Studi Kasus Pelaksanaan PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006 di Jakarta Utara*

*Asnawati* \_\_\_129

Potensi Kerukunan dan Konflik Umat Beragama di Kota Madiun Jawa Timur

*Suhanah* \_\_\_138

## **Telaah Pustaka**

Membangun Peradaban Dunia yang Damai: *Pentingnya Pembaruan dan "Kearifan" Barat*

Tinjauan Buku "Masa Depan Islam" karya John. L. Esposito

*Asep Saefullah* \_\_\_147

**Pedoman Penulisan** \_\_\_155

**Lembar Abstrak** \_\_\_158

**Indeks Penulis** \_\_\_171

**Ucapan Terima Kasih** \_\_\_173

## PENYIARAN AGAMA DAN DINAMIKA SOSIAL DALAM MASYARAKAT PLURAL

Kedatangan dan kemunculan agama baru senantiasa bertemu dengan iman atau agama yang sudah ada sebelumnya. Hal tersebut menghasilkan hubungan antara harmoni dan konflik pada tataran yang berbeda-beda. Tidak jauh berbeda dengan Islam dan Kristen/Katolik, sejak kedatangannya ke nusantara mempertemukannya dengan agama dan kepercayaan masyarakatnya lokal. Islam dan Kristen datang ke Indonesia bertemu dengan penganut Hindu, Buddha dan penganut animisme dan dinamisme.

Di kemudian hari, Islam menjadi agama mayoritas penduduk negeri ini disebarkan melalui beberapa jalur, yakni jalur perdagangan, jalur perkawinan, jalur tasawuf (spiritual), jalur pendidikan, jalur kesenian dan jalur politik. Islam datang ke nusantara dikenalkan oleh para pedagang (da'i /muballigh) dari Arab, Persia dan India. Para pedagang asing itu mula-mula fokus pada urusan dagang hingga menetap di daerah pesisir. Dari menetap sementara hingga kawin mawin dengan penduduk pribumi (penganut agama Hindu, Buddha dan kepercayaan), kemudian melahirkan generasi-generasi muslim.

Demikian pula, Kristen/Katolik datang melalui para misionaris dari Eropa memperoleh simpati dari penduduk negeri di beberapa daerah. Tak pelak, klaim kebenaran pun muncul dari masing-masing yang rentan melahirkan konflik. Kasus benturan dan konflik intern dan antarumat beragama. Inilah tantangan bagi negara-bangsa yang majemuk, seperti negara kita ini. Untuk itu perlu kiat pengembangan dan peningkatan hidup saling pengertian dan saling menghormati satu dengan yang lain agar dapat "hidup berdampingan dalam kemajemukan, bersama dalam perbedaan".

Semua agama memiliki dimensi ritual, mistik, intelektual dan sosial. Dimensi ritual berupa ritus-ritus penyembahan kepada Tuhan dengan tata cara tersendiri. Dimensi mistik berkenaan dengan tata cara mendekati diri pada Tuhan yang memberikan pengalaman kepada umatnya secara spesifik. Dimensi intelektual berkenaan dengan pengetahuan dan kepercayaan dengan agama yang diyakini. Dimensi sosial merupakan aturan-aturan untuk hidup di masyarakat.

Refleksi spiritual yang ada pada masing-masing agama di dunia dan sikap keberagamaan yang tinggi memberikan implikasi yang signifikan pada penganutnya untuk menempatkan pada dua posisi, yakni sebagai hamba Tuhan dan mengabdikan kepada-Nya. Pada posisi sebagai makhluk, manusia diciptakan bersama-sama dengan makhluk lainnya. Sebagai hamba yang sempurna dalam penciptaan, manusia menyembah dan menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Dan sebagai makhluk yang lemah, ia membutuhkan peran serta makhluk lain dan saling menyayangi.

Dalam Islam perintah Allah SWT kepada orang-orang beriman berupa ibadah sholat, secara simultan diperintah pula untuk mengeluarkan harta benda yang dimiliki kepada orang lain (zakat, infaq dan shadaqah). Perintah ibadah *mahdlah* (ritual menyembah Allah) dalam Islam memiliki dimensi sosial, yakni ibadah amal shaleh yang memiliki dampak sosial. Ibadah mahdlah dan ibadah sosial bermuara pada pengabdian secara kaffah kepada Allah swt.

Agama Kristen mengajarkan umatnya berupa dogma peribadatan pada Tuhan, di sisi lain juga memerintahkan untuk mengasihi sesama

yang diimplementasikan dalam berbagai kegiatan sosial (diakonia). Dalam kegiatan sosial itu, baik umat Islam maupun Kristen/Katolik ada yang menggunakan jalur langsung (*direct*) atau melalui lembaga keagamaan yang dikelola oleh umat. Dana tersebut diambil dari umat, kemudian dikumpulkan, dikelola dan didistribusikan dengan tujuan untuk aksi dan kegiatan sosial.

Bangsa Indonesia terdiri dari beranekaragam ras dan keyakinan sehingga para penyeru agama mesti memahami kondisi tersebut. Untuk mewujudkan negeri yang aman dan damai, perlu menyatukan semangat yang sama yakni mewujudkan misi sebagai khalifatullah. Pada kondisi masyarakat yang plural tersebut, dakwah atau misi yang elegan dan santun menjadi pilihan yang tepat. Bagi umat Islam, definisi konsep dakwah yakni untuk mencapai perubahan seperti yang menjadi harapan, yakni Islam sebagai rahmat seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*). Dakwah dipandang sebagai jalan jihad untuk mewujudkan kedamaian yang universal itu.

Dakwah bagi umat Islam merupakan upaya memberikan makna keberagaman sebagai pencerahan spiritual secara individu dan dapat melahirkan kerukunan dan kedamaian bagi lingkungan. Para aktivis dakwah kian mengkristal dalam sebuah organisasi dan kepemimpinan. Secara jujur diakui bahwa para aktivis dakwah berjalan pada *manhaj* organisasinya sendiri-sendiri. Misi dakwah Islam yang dibangun untuk mengembangkan kebersamaan dalam perbedaan dirasakan mulai melemah, pun kalangan internal Islam sendiri, karena masing-masing *manhaj* tersebut biasanya memiliki tokoh sentral yang berbeda-beda di level paling atas.

Kegiatan dan gerakan dakwah sangat erat kaitannya dengan kemampuan manajerial para da'i atau pelaku dakwah. Pada masa yang akan datang, dalam berdakwah sangat urgen dibutuhkan da'i/mubaligh yang memiliki modal semangat dan kemampuan retorika

serta ketrampilan manajemen dakwah. Strategi yang ditempuh yakni dengan menggunakan metode dan manajemen yang tepat untuk pengembangan dan tujuan dakwah.

Era global saat ini bagi penduduk dunia makin menguatkan kondisi plural masyarakat sehingga dapat dikatakan nyaris tidak ada lagi bangsa yang terdiri dari satu entitas dan identitas primordial, seperti etnik dan agama. Kondisi plural ini merupakan sunnatullah bagi tatanan kehidupan sosial umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat di sebuah kawasan dunia, dalam beberapa dekade telah menjadi milik seluruh umat manusia. Perbedaan antara kemajuan semakin tipis. Satu-satunya perbedaan yang menonjol saat ini adalah warna kulit dan ciri fisik lainnya (ras), agama, lingkungan kultural dan perbedaan semangat untuk maju atau tidak. Ranah agamapun telah berkembang melampaui batas budayanya yang disebabkan oleh berbagai hal. Hambatan relasi umat manusia disebabkan oleh kekhawatiran akan keselamatan bersama dari ketidakpastian yang disebabkan oleh sifat-sifat manusia yang tidak bertanggungjawab. Akibatnya lingkungan menjadi rusak, tempat tinggal tidak lagi nyaman dan iklim pun menunjukkan gejala berubah.

Agama sejatinya menyerukan perdamaian sesuai dengan tuntunan nurani manusia sebagai hamba Tuhan. Untuk menuju perdamaian, nampaknya formula dialog menjadi metode yang tepat digunakan untuk berbagai jenis persoalan keagamaan antar umat. Dialog itu disebut dengan dialog antar iman karena dilakukan oleh penganut agama atau doktrin keagamaan yang heterogen. Perdamaian yang didasari oleh dialog kebersamaan dan komitmen nurani akan berkembang sinergi mewujudkan kesejahteraan manusia di muka bumi.

Pada nomor ini Jurnal Harmoni tampil dengan ukuran berbeda dengan nomor-nomor tahun sebelumnya. Mengacu pada ketentuan yang

dikeluarkan oleh UNESCO terkait majalah ilmiah, ukuran standar baku yaitu sesuai dengan ukuran kertas A4 (21 cm x 29.7 cm). Format tampilan tiap artikel terpisah menjadi dua kolom pada tiap halaman, kecuali abstrak dan daftar pustaka. Hal tersebut tentunya dengan maksud mengedepankan estetika dan kenyamanan para pembaca untuk memperoleh informasi.

Jurnal HARMONI Volume 11 Nomor 1 ini, -masih mengacu pada format yang lama- menampilkan secara keseluruhan sebanyak 13 artikel, baik gagasan maupun hasil penelitian lapangan. Secara terperinci, sebanyak 3 (tiga) artikel memuat studi gagasan, yakni: a) artikel yang ditulis oleh M. Yusuf Asry dengan judul: *"Merekonstruksi Gerakan Dakwah Masa Masa Depan"*; b) Ahmad Syafi'i Mufid menulis: *"Setelah Jihad dan Bom: Diskursus Dakwah pada Masyarakat Plural"*; c) Lukmanul Hakim: *"Islam, Pluralitas dan Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia"*.

Selain gagasan, juga memuat 9 (sembilan) artikel hasil penelitian lapangan (*field research*) dari seluruh bidang kajian Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Dari bidang Pelayanan Keagamaan, terdapat 5 (lima) artikel yakni: a) *"Peran Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia (YPPH) Batu dalam Pengelolaan Dana dan Asset Sosial Keagamaan bagi Pemberdayaan Umat Beragama"* yang ditulis oleh Agus Mulyono; b) *"Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Gereja (Paroki) Katedral Jakarta*

*dalam Pemberdayaan Umat Katolik"* ditulis oleh Abdul Jamil; c) *"Dampak Sosial Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam di Kota Padang"* oleh Zaenal Abidin; d) *"Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Honoror di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor"*, oleh Taufik Hidayatullah; dan e) *"Survei Keberagamaan Pelajar SLTA: Paham Ke-Islaman Pelajar SMA dan MA dalam Kehidupan Sosial"* ditulis oleh Suprpto.

Bidang Pemikiran, Paham dan Aliran Keagamaan Dinamika terdapat 2 (dua) buah artikel, yakni: a) *"Perkembangan Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu"*, oleh Nuhri M Nuh; b) *"Dinamika Sosial Keagamaan Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) Pusat di Kota Surakarta Jawa Tengah"* oleh Wakhid Sugiyarto.

Dan bidang Hubungan Antarumat Beragama terdapat 2 (dua) buah artikel, yakni: a) *"Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Studi Kasus Pelaksanaan PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006 di Jakarta Utara"* oleh Asnawati, dan; b) *"Potensi Kerukunan dan Konflik Umat Beragama di Kota Madiun Jawa Timur"* oleh Suhanah. Review buku ditulis oleh Asep Saefullah dengan judul: *"Membangun Peradaban Dunia yang Damai: Pentingnya Pembaharuan Islam dan "Kearifan" Barat (Tinjauan Buku "Masa Depan Islam" karya John L. Esposito)*. Mudah-mudahan memberikan manfaat pencerahan dan wawasan bagi para pembaca.

## Merekonstruksi Gerakan Dakwah Masa Depan

**M. Yusuf Asry**

Staf Pengajar, Peneliti Sosial dan Agama

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta

Email: yusufasry49@yahoo.go.id

### **Abstract**

*The Islamic Dakwah needs to apply appropriate methods so it is well orientated and in line with its objectives, it is conveying religious messages. At the beginning of the 20th century in Indonesia had started appearing several social-religious organizations that apply the principles of modern organizations, such as the Syarikat Dagang Islam (SDI), Islam SI (SI), followed by Persyarikatan Muhammadiyah and NU. In general, these organizations deliver four ideas that become the spirit and ideology, which are: religion, sociology, education and economy. The development of the community-based Islamic da'wah management was understood to be implemented as new measures to facilitate the community in order to formulate the principles of the missionary program, by and for the community itself.*

**Keywords:** *tolerance, social change, religion, rahmatan lil'alam*

### **Abstrak**

*Dakwah Islam perlu menggunakan metode yang tepat sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya, yakni menyampaikan pesan agama. Pada awal abad ke-20, di nusantara muncul beberapa organisasi sosial keagamaan yang menerapkan prinsip-prinsip organisasi modern, seperti Syarikat Dagang Islam (SDI), Sarekat Islam (SI), menyusul Persyarikatan Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Secara umum organisasi-organisasi tersebut mengusung empat hal yang menjadi spirit dan ideologi, yaitu: keagamaan, sosial, pendidikan dan ekonomi. Pengembangan manajemen dakwah Islam berbasis komunitas perlu ditempuh sebagai langkah baru untuk memfasilitasi masyarakat merumuskan program dakwah dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri.*

**Kata kunci:** *toleran, perubahan sosial, ajaran agama, rahmatan lil'alam*

### **Pendahuluan**

Sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban penting keagamaan yang merupakan ekspresi dan refleksi akidah ialah dakwah (Ismail Nawawi, 2008:IX). Dakwah di sini berarti mendorong manusia agar melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh berbuat kebajikan dan meninggalkan kemungkaran agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat (Syekh Ali Mahfuzh, 1957:17).

Dengan spirit dakwah, Islam tersiar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke seluruh penjuru republik ini. Dengan kedatangan para suadagar dari Gujarat India dan Arab tersiarlah Islam dari pulau Sabang di Provinsi Aceh bagian barat Indonesia hingga Merauke Provinsi Papua di bagian timur. Akibatnya muncullah para da'i yang terbina dan terdidik yang berperan penting dalam upaya penyiaran Islam.

Kesuksesan penyiaran Islam di Jawa merupakan peran besar Wali Songo (sembilan ulama), yakni Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel (Raden Rahmat), Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus (Maulana Ja'far Shodiq), Sunan Muria (Maulana Raden Umar Said), Sunan Drajat (Maulana Syarifuddin), Sunan Kalijaga (Maulana Syahid) dan Sunan Gunungjati (Maulana Syarif Hidayatullah). (Alwi Shihab, 2009: 38-39).

Dakwah Wali Songo tersebut tercatat dalam sejarah mencapai hasil yang gemilang, yang ternyata Islam menjadi anutan masyarakat Jawa, mulai dari perkotaan, pedesaan hingga pegunungan. Proses Islamisasi di seluruh kepulauan Nusantara dan khususnya di Pulau Jawa berjalan dengan aman dan damai, tanpa pergolakan dan kegoncangan psikologis dan sosial yang berarti.

Hal ini karena para Wali menggunakan pendekatan mistik dan kultural yang kental dengan simbol-simbol kebudayaan lokal, seperti melalui media perwayangan dan gamelan. Menurut Purwadi, bahwa akulturasi kebudayaan yang dipelopori oleh Wali Songo itulah dilanjutkan oleh para juru dakwah generasi berikutnya, sehingga praktik Islam terlihat khas di Jawa. Di sini agama dan budaya berjalan secara selaras, serasi dan seimbang (Purwadi dan Enis Niken H, 2007:V).

Dakwah memperkenalkan Islam di tengah-tengah masyarakat yang telah memiliki kepercayaan dan keyakinan relatif tidak ada masalah. Namun bukanlah hal mudah merubah keyakinan dan budaya masyarakat yang telah berakar di hati pemeluknya. Secara historis sejak lama bangsa Indonesia menganut kepercayaan yang dikenal dengan animisme dan dinamisme, kemudian datang agama Hindu dan

Buddha dari India. Penyiar dan penganut agama Hindu dan Buddha mengadopsi kepercayaan asli lokal. Demikian pula menyusul Islam datang menghadapi keadaan yang tidak jauh dari pengalaman Hindu dan Buddha, juga melakukan akomodasi yang berlangsung secara damai. Dengan demikian dakwah telah dimulai dan diwariskan oleh para da'i terdahulu dan para wali masih dalam proses Islamisasi, dan seyogyanya menjadi pekerjaan rumah ("PR") dilanjutkan oleh para mubaligh dan da'i berikutnya.

Hasil dakwah disadari dan diakui bahwa Islam tersiar, ukhuwah Islamiyah terbangun, hidup rukun dan perbaikan dalam kehidupan dan peradaban masyarakat. Namun dakwah bukanlah tanpa tantangan dan hambatan atau kendala. Fenomena strategis yang merupakan kendala dakwah hingga dewasa ini, antara lain: *Pertama*, dakwah Islamisasi para da'i dan wali penyiar Islam masih menyisakan sinkritisme dan sedikit-banyak pengaruh ajaran Hindu dan Buddha dalam perkembangan agama Islam. Jadilah sisa-sisa lama tersebut muncul dalam "baju" yang dinamakan dengan "tradisi", oleh kalangan paham modern dan kelompok salafi menjadi sasaran untuk dimurnikan atau puritanisasi. *Kedua*, dakwah belum menyentuh seluruh lapisan umat Islam secara intens sehingga terbuka peluang lahirnya pemahaman agama yang berbeda, dan di antaranya muncul kelompok-kelompok, antara lain yang dikenal dengan aliran sempalan. *Ketiga*, ada dakwah yang tegar menegakkan "dakwah amar ma'ruf nahi munkar", yang biasanya memperlihatkan sikap kritis, "tegas", eksklusif, bahkan agresif. *Keempat*, ada dakwah yang mempertahankan tradisi sosial keagamaan secara ketat dan kaku sehingga membuahkan fanatisme sempit yang menganggap tradisi merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan

sebagai kebenaran, sekaligus segala yang menghambatnya dianggap salah, dan justeru harus dibenarkan. Semua itu merupakan hambatan dan tantangan dakwah, sekaligus mengandung potensi konflik.

Namun sejalan dengan perubahan sosial, di lingkungan komunitas umat yang terdapat kendala dan hambatan tersebut seperti yang dikemukakan di atas tampak lamban menerima segala bentuk perubahan sosial dan kehidupan pada umumnya, sekalipun untuk kemajuan yang sesungguhnya merupakan tuntutan zaman dan keadaan, serta akibat perkembangan pesat dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di sisi lain terjadi fenomena "kejumudan". Kondisi seperti yang digambarkan adalah berpotensi konflik sebagaimana pengalaman masa lalu terjadi benturan antara kaum tradisionalis dengan reformis, antara kaum muda dengan kaum tua, antara organisasi Islam yang satu dengan yang lainnya, antara mereka yang bermazhab dan nonmazhab, dan antara yang yang berpaham keagamaan moderat dengan yang radikal.

Polarisasi tersebutlah yang mengusik harmonisasi hubungan internal umat Islam, dan kerukunan hidup antarumat beragama. Issu sentral yang mengemuka ialah pada masalah "khilafiyah", seperti soal *ushalli* dalam shalat, tahlilan kematian, dan pembacaan adzan pada jenazah di liang lahad. Perkembangan lebih lanjut dari masalah khilafiyah yang melahirkan polarisasi umat juga memasuki ranah persaingan kepentingan dan kekuasaan politik.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, dakwah yang seyogyanya memberikan pencerahan, kerukunan dan kedamaian tampak mengalami stagnan

dalam mencairkan perbedaan paham dan pengamalan ajaran agama, serta kepentingan politik di kalangan umat Islam. Dakwah yang mengembangkan kebersamaan dalam perbedaan, keekaan dalam kebhinnekaan dirasakan mulai melemah, karena masing-masing aktivis dakwah berjalan sendiri-sendiri, menutup diri dari paham yang berbeda, tersekat dalam organisasi yang berlainan misinya, sekalipun sama-sama mengusung dakwah Islamiyah.

Sehubungan dengan kendala dan tantangan dakwah dengan segala konsekwensinya tersebut, maka diperlukan pendekatan yang memperkuat pengembangan dakwah yang menurut penulis harus mengacu pada tiga hal strategis, yaitu: manajemen, multikultural, dan komunitas. Dengan demikian dakwah akan berorientasi sebagai rahmat bukan hanya bagi umat Islam, tetapi bagi umat manusia, yang dalam terminologi al Qur'an disebutkan dengan "*rahmatan lil'alamin*".

Permasalahannya ialah: a) Bagaimana fenomena dakwah saat ini ditengah masyarakat multikultural? b) Prinsip dan basis dakwah bagaimana yang ideal dikembangkan di tengah masyarakat multikultural ke depan? Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut menarik diungkapkan kaitannya dengan realitas gerakan dakwah dewasa ini, dan bagaimana rekonstruksi dakwah yang diharapkan di tengah masyarakat multikultural dengan tema: Rekonstruksi Gerakan Dakwah Masa Depan.

### Realitas Dakwah Kini

Dalam catatan sejarah, awal abad ke-20 adalah masa kelahiran organisasi sosial keagamaan Islam. Sebagaimana dikemukakan oleh Atho Mudzhar,

bahwa organisasi sosial keagamaan yang menerapkan prinsip-prinsip organisasi modern muncul di kepulauan Nusantara ini. Di antaranya pada tahun 1905 Syarikat Dagang Islam (SDI) didirikan oleh R.M. Tirta Adipuro. Ketika HOS Cokroaminoto bergabung dengan SDI terjadi perubahan SDI menjadi Sarekat Islam (SI) pada tahun 1911. Selanjutnya menyusul berdiri organisasi sosial keagamaan dan pendidikan Islam.

Di antaranya pada tahun 1912, K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, dan pada tahun 1926 Nahdlatul Ulama didirikan. Tiap organisasi memiliki orientasi gerakan yang berlainan. Secara umum semua organisasi sosial keagamaan mengusung empat kegiatan utama yang strategis, yaitu: keagamaan, sosial, pendidikan dan ekonomi. Keempat aspek itulah yang menjadi spirit dan ideologi organisasi sosial keagamaan pada waktu itu (M. Yusuf Asry dan Amiur Nuruddin, 2009:19).

Tiap organisasi sosial Islam memiliki misi khusus sebagai bagian dari ciri khasnya. SDI dan SI umpamanya lebih pada pengembangan ekonomi umat dan bangsa, sedangkan Muhammadiyah berkonsentrasi pada pendidikan, sosial dan kesehatan, dan NU pada pendidikan pondok pesantren dan sosial. Dari segi agama ada organisasi yang bercorak pembaharuan pemikiran dalam Islam dengan orientasi pemurnian (puritanisasi) ajaran Islam dari tradisi yang dinilai kurang relevan.

Orientasi inilah yang diperankan oleh dakwah organisasi Islam seperti Persyarikatan Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan Al Irsyad serta gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) pada awalnya di Indonesia. Sementara kalangan tradisionalis-pun mempertahankan sebagian ciri khas

(tradisional) juga mendirikan organisasi, dan lahir organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan Jam'iyatul Khair (Kuntowijoyo, 1991:49).

Ada yang menyatakan berdirinya NU adalah juga sebagai respon atas lahirnya Muhammadiyah yang mengusung paham keagamaan mengikuti Rasulullah SAW di pulau Jawa, sama halnya lahirnya PERTI di Bukit Tinggi terkait dengan adanya gebrakan gerakan pembaharuan di Sumatera Barat.

Namun semua organisasi sosial keagamaan Islam dengan segala aspek kegiatannya adalah dalam kerangka dakwah Islam, baik di bidang keagamaan, sosial-kesehatan, pendidikan dan kepesantrenan, maupun ekonomi. Dakwah yang menuju pada kehidupan masyarakat yang makin sejahtera, baik rohani maupun jasmani, kehidupan dunia dan akhirat nanti yang diredhoi Allah swt.

Modernisasi dibawa dan diperkenalkan oleh kolonialisme barat, yang kedatangannya ke persada pertiwi ini bukan hanya mencari rempah-rempah, tetapi kemudian menguasai dan menjajah bangsa Indonesia, sekaligus menyiarkan agama Kristen (Protestan) dan Katolik (Aqib Suminto, 1984:160). Dalam kaitan dengan kebijakan bidang agama dan negara para penjajah seperti Belanda menerapkan politik "netral agama". Selanjutnya masuk paham liberalisme, yang juga memasuki ranah agama seperti yang dibidani oleh kalangan Jaringan Islam Liberal (JIL).

Di sisi lain juga terdapat pelapisan sosial umat Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Clifford Geertz melalui penelitiannya di Mojokuto (1960), yang dimuat dalam bukunya *The Religion of Java*, bahwa dari praktik

pengamalan Islam muncul apa yang disebut masyarakat Islam yang beliau sebut dengan kaum “Islam abangan” dan “Islam santri” (1991:172). Demikian pula dalam konteks perjuangan bangsa, faktor agama juga berperan, yang kemudian melahirkan polarisasi pada golongan “nasionalis Islam” dan “nasionalis Islam sekuler” yang berbasis pada penganut paham netral agama.

Jadi, di kalangan umat Islam Indonesia terdapat kemajemukan. Kemajemukan dalam memahami dan menganut, serta mengamalkan ajaran Islam, yang membentuk komunitas: santri versus abangan, sunni versus sunni salafi, sunni versus liberalisme seperti Jaringan Islam Liberal (JIL), tradisional versus modern/reformasi, nasionalis Islam versus nasionalis Islam sekuler. Kemajemukan tersebut di satu sisi merupakan kekayaan umat dan bangsa yang tidak banyak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini, dan dalam pandangan teologi disebut sebagai takdir Ilahi “*sunnatullah*”.

Namun jika tidak dirawat atau dikelola dengan baik akan menjadi malapetaka, karena merupakan sumber benturan dan konflik terbuka (*manifest*) atas nama agama.

Sayangnya dakwah saat ini baik pribadi maupun organisasi tampak berjalan sendiri-sendiri seakan ingin eksis sendiri di tengah kemajemukan, dan nyaris hampir tanpa koordinasi. Masing-masing saling merasa wajib berdakwah, dan yang penting menjalankan salah satu perintah agama yaitu berdakwah. Akibatnya penduduk Indonesia yang mayoritas Islam sejak terbentuknya Negara Kasatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam capaian hasil dakwah belum menggembirakan, sekalipun syairnya cukup menggema dan

membanggakan terutama di kota-kota besar seperti di ibukota negara, Jakarta.

Apalagi jika peran umat dilihat di bidang kekuasaan dan panggung politik tampak pasrah dengan apa adanya karena masih kental ego kepentingan pribadi, golongan, organisasi, politik dan paham keagamaan.

Sesungguhnya dari segi kuantitas hingga saat ini posisi jumlah umat Indonesia masih terbesar di Indonesia, bahkan terbanyak di antara negara-negara di dunia. Seperti terungkap dari hasil Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Indonesia berjumlah 237.641.326 jiwa, dan bagian terbesar adalah Islam yaitu 207.176.162 jiwa (87.18%). Namun dalam kancah kekuasaan dan perpolitikan pada tataran nasional dan di beberapa daerah dirasakan oleh sementara pengamat adalah kandas dalam pengembangan misinya, dan tidak berlebihan ada yang menyatakan kemenangan suara kalangan Islam politik yang berbendera Islam seakan “Islam hanya unggul di sekitar masjid”.

Di tengah kemajemukan umat Islam dakwah terus berkembang yang bernuansa kelompok atau komunitas Islam. Dalam realita adakalanya dalam pelaksanaan dakwah terjadi kompetisi antar individu da’i dan antarorganisasi gerakan dakwah, yang pada masa lalu hingga saling menyalahkan satu dengan lain dalam masalah keagamaan “*khilafiyah*”, yang berpengaruh hingga pada dunia perpolitikan dan kekuasaan, dan masih terasa dampaknya hingga saat ini sebagaimana terlihat penggunaan simbol-simbol keagamaan dan keorganisasian. Dakwah juga nampak masih terbatas pada pengembangan paham masing-masing, terkesan tertutup, eksklusif dari paham dan pemikiran lain yang berbeda.

Dalam temuan penelitian yang Penulis lakukan tentang Gerakan Dakwah Islam di Kota Bandung dan Bekasi Provinsi Jawa Barat tahun 2011 memang nampaknya masalah khilafiyah tidak lagi menjadi sember utama benturan dan konflik antar ormas Islam secara intens sebagaimana pada masa lalu, seperti antara Persis dan Muhammadiyah dengan NU dan Persatuan Umat Islam (PUI).

Namun masing-masing dakwahnya selama ini lebih pada berjalan sendiri-sendiri sehingga ketertutupan dan pengkotakan atau eksklusifitas masih terlihat dominan. Karena itu masih menyimpan potensi tersembunyi (*latent*) muncul benturan hingga konflik sewaktu-waktu. Seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2011, yaitu kasus unjuk rasa elemen masyarakat Islam untuk menghentikan Pengajian Tahunan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) di Baciro, Yogyakarta tanggal 13 Januari 2011, dan kasus kerusuhan antara sunni dan syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur tanggal 29 Desember 2011.

Demikian pula masih terjadi konflik antarumat beragama di beberapa tempat, terutama menjelang berakhirnya pemerintahan orde baru yang represif dan otoriter yang digantikan oleh orde reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 yang mengusung kebebasan. Di antaranya kasus kerusuhan dan konflik Kristiani-Islam di Ketapang DKI Jakarta (1999), di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (1999), di Ambon, Provinsi Maluku (1999 dan 2011), di Maluku Utara, di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dan di Temanggung, Provinsi Jawa Tengah (2011). Kasus konflik antaretnis dan agama, terjadi antara Dayak-Madura di Sambas Provinsi Kalimantan Barat (1999), dan di Sampit Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (7 Maret 1999).

Sekalipun semua agama mengajarkan kerukunan dan kedamaian tetapi masih muncul kasus benturan dan konflik intern dan antarumat beragama. Inilah tantangan bagi negara-bangsa yang majemuk, seperti negara kesatuan ini. Untuk itu perlu kiat pengembangan dan peningkatan hidup saling pengertian dan saling menghormati satu dengan yang lain agar dapat “hidup berdampingan dalam kemajemukan, bersama dalam perbedaan”.

### Dakwah yang Dibutuhkan ke Depan

Dakwah ialah aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia untuk melakukan proses rekayasa sosial melalui usaha mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntunan sosial dan norma ajaran agama Islam (Miftah Faridl dalam A. Darun Setiady, 2006: 243). Tujuan dakwah ialah membentuk pribadi muslim, rumah tangga yang Islami, dan terwujudnya tatanan Islam dalam kehidupan masyarakat untuk menuju peradaban dunia yang diridhoi Allah SWT.

Untuk mencapai tujuan dakwah tersebut perlu merekonstruksi dakwah saat ini sebagaimana deskripsi dinamika dakwah yang telah digambarkan di atas tadi, karena kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik terus mengalami perubahan. Merekonstruksi berarti membangun kembali dakwah yang peduli multikultural sebagai suatu keniscayaan di atas prinsip manajemen modern, dan yang fokus berbasis komunitas.

Dakwah multikultural adalah sangat penting. Karena bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang sangat majemuk dalam etnis, serba ganda dialek bahasa, adat istiadat, budaya dan agama. Yang dibutuhkan bagaimana dalam

kondisi kemajemukkan itu terbangun dan terpelihahara kerukunan dan hidup harmoni. Ini adalah tugas mulia dari dakwah multikultural. Multikultural meliputi intern umat Islam dengan segala paham keagamaan dan kepentingan masing-masing. Demikian pula antarumat beragama yang berbeda. Intinya dalam kehidupan bangsa Indonesia yang plural adalah sangat dibutuhkan dakwah multikultural, baik intern umat maupun antarumat beragama, yang antara lain bercirikan inklusif dan kerukunan.

Menurut Muhammad Ali, bahwa keberagaman multikultural merupakan keberagaman yang tidak kering dan tidak terlalu basah sehingga nilai-nilai keagamaan menjadi hilang (2003:79). Dengan dakwah multikultural akan terbangun interaksi intern dan antarumat beragama yang tidak hanya berkoekstensi secara harmonis dan damai, tetapi juga bersedia aktif dan pro-aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama dengan landasan kemanusiaan. Dakwah multikultural berorientasi pada peningkatan dan pengembangan dakwah yang mengacu pada kerukunan antarmasyarakat dan antarumat beragama, toleransi sosial-keagamaan, penyelesaian konflik, demokrasi, masalah HAM, pluralitas dan kemanusiaan yang universal.

Dalam hal komunitas dalam dakwah, mengapa penting?. Dewasa ini dakwah sebagaimana di media televisi hanya bersifat umum hampir melulu bidang "keagamaan". Tidak dikaitkan secara khusus yang berorientasi kebutuhan dan pemecahan masalah pada berbagai aspek kehidupan nyata. Umumnya hanya berkutat di seputar bidang keagamaan dalam pengertian terbatas dan sempit. Masalah komunitas dengan kekhasannya masing-masing kurang menjadi pendalaman sebagai bagian dari agama-agama, dan atau

bagian dari suatu agama, dan bisa jadi dilihat seperti dari segi mata pencaharian, dari segi paham keagamaan, dan dari segi kebudayaan. Hal ini penting agar dakwah fokus pada komunitas tertentu yang tentu memiliki permasalahan, cara-cara pendekatan dan penyelesaian masalah yang sedikit berbeda dari komunitas lainnya.

Dalam hal manajemen dakwah adalah sangat penting. Manajemen dakwah dalam arti " sebuah pengaturan secara sistematis dan koordinatif dalam aktivitas dakwah yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan dakwah (M. Munir dan WahyuIlaihi, 2006:36-37). Fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry adalah sangat relevan diterapkan pada aktivitas dakwah, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*).

Pengembangan manajemen dakwah di sini melalui pemetaan (*mapping*) sebagai suatu kebutuhan mendesak dan berkelanjutan, berkaitan dengan permasalahan, potensi maupun solusi dan aksi dakwah yang diperlukan.

Dinamika gerakan dakwah (*hayawiyatul harakah*) sangat terkait dengan kemampuan manajerial para da'I atau pelaku dakwah. Dakwah yang dibutuhkan saat ini dan ke depan, da'i dan mubaligh yang diharapkan bukan hanya sekedar modal semangat dan kemampuan humoris, tetapi juga sangat penting memiliki ketrampilan manajemen dakwah.

Para aktivis dakwah telah banyak menulis buku secara khusus tentang dakwah. Di antara M. Natsir (Ketua Dewan dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Yusuf Qardhawy, dan Mustafa Manshur. Organisasi gerakan Islam yang

besar kepeduliannya dan menuliskan tentang dakwah ialah Ikhwanul Muslimin. Tulisan dari Ikhwanul Muslimin bukan hanya pada tataran teori, tetapi hasil studi empiris pengalaman dakwahnya di lapangan pada berbagai negara. Umat ini harus belajar dan membacanya dengan seksama.

Dalam konteks Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Azyumardi Azra, bahwa tak akan ada sebuah entitas bangsa dan negara Indonesia yang disebut Indonesia jika tidak ada kemajemukan. Tidak ada Indonesia jika hanya ada ke-eka-an, ketunggalan atau monokulturalisme. Karena itulah kemajemukan negara-bangsa ini harus dipelihara, dirawat dan diberdayakan, dan difungsionalisasikan untuk hari ini dan masa depan negara bangsa yang lebih baik (2007:5). Kemajemukan paham, pengamalan dan kepentingan umat Islam, dan kemajemukan penduduk Indonesia dalam budaya dan agama sangat memerlukan dakwah multikultural bukan hanya monokultural.

Pembahasan ini kurang lengkap rasanya tanpa mengungkapkan informasi kegiatan "Workshop Pengembangan Manajemen Dakwah Islam Berbasis Komunitas" yang dirintis dan dilaksanakan oleh Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI. Pada tahun 2011 di selenggarakan "Workshop Pengembangan Manajemen Dakwah Islam" yang pertama di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, bertempat di Pondok Pesantren Turus, Jln. Raya Rangkas Bitung KM 2,5 Kelurahan Kebayan.

Pada tahun 2012 kegiatan yang lebih intensif dilanjutkan pada beberapa daerah, seperti di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa

Barat. Sepanjang pengetahuan penulis kegiatan tersebut merupakan gebrakan baru yang berani untuk memulainya, para birokrasi dan administrasi turun "gunung", melihat realitas dakwah di lapangan, mendengar dan memfasilitasi masyarakat dalam perumusan program dakwah dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri, melalui pendekatan *focus group discussion* (FGD). Kebetulan Penulis dipercayakan sebagai konsultan sekaligus fasilitator pada kegiatan dimaksud.

Kegiatan workshop tersebut menghasilkan antara lain: tiap kegiatan workshop menghasilkan 50 da'i multikultural, yang berarti hingga tulisan ini disusun ada alumni workshop 150 da'i multikultural. Dai tersebut pada akhir kegiatan diserahkan langsung oleh Direktur Penerangan Agama Islam kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk dikordinasikan, pembimbingan dan fasilitasi kegiatannya. Selain itu pada masing-masing workshop menghasilkan dua rencana aksi (*action plan*) manajemen dakwah multikultural berbasis komunitas, yang biasanya mendapat dana stimulan untuk merealisasikannya, dan tentunya dalam pemantauan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat. Diharapkan rencana aksi tersebut pada waktunya dapat dihimpun dalam sebuah buku yang berisi berbagai rencana aksi pada berbagai komunitas, yang bisa diaplikasikan pada daerah lain yang memiliki kesamaan kondisi. Alangkah indahnya seperti yang dilontarkan oleh Direktur Penerangan Agama Islam yang dalam sejarah kementerian agama pertama kali dijabat oleh seorang perempuan seperti direktur saat ini. Dalam sambutan beliau mendambakan pada waktunya dapat dibentuk organisasi dakwah yang menaungi "Da'i Multikultural", seperti halnya da'i pembangunan.

## Penutup

Pada prinsipnya dakwah multikultural terbagi dua. *Pertama*, dakwah multikultural umat Islam atas realita multipaham keagamaan, organisasi keagamaan dan aspirasi politik serta berbagai kepentingan individual. *Kedua*, dakwah multikultural antarumat beragama atas realita masyarakat Indonesia yang plural dalam agama dan multikultural. Dakwah bukan mengagamakan orang yang telah beragama, melainkan saling memperkenalkan ajaran agama masing-masing untuk menemukan titik kesamaan yang dapat dikembangkan, seperti soal pendanaan dalam Islam ada konsep zakat, infaq dan sadakah (ZIS) pada agama lain ada punia dan paramita, dalam kehidupan keluarga yang ideal pada Islam ada konsep keluarga sakinah, sedangkan pada agama lain terdapat konsep keluarga sejahtera (Katolik), keluarga bahagia (Kristen), keluarga rukun dan sehat (Buddha), dan keluarga sukhinah (Hindu).

Pada dakwah multikultural hendaknya dilaksanakan atas prinsip manajemen modern agar efektif dan efisien, serta dan berbasis komunitas agar fokus sesuai kebutuhan sasaran dakwah dan terukur (*accountable*). Dengan dakwah multikultural diharapkan terbangun dan terpelihara keindahan persaudaraan Islam (*ukhuwah Islamiyah*), persaudaraan kebangsaan (*ukhuwah wathaniyah*) dan persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah basyariyah*), dan ke-eka-an dalam

kebhinekaan, kehidupan berbangsa yang tidak hanya sebatas selogan dan jargon melainkan benar-benar aktua. dan luhur penuh ketulusan.

Dakwah dewasa ini masih lebih bernuasa pada internal paham keagamaan, masing-masing kelompok dan organisasi, serta berlangsung nyaris tanpa koordinasi. Dakwah berorientasi lebih pada monokultural. Ke depan secara berangsur-angsur tetapi pasti hendaknya dikembangkan pada dakwah multikultural dengan perinsi manajemen modern yang berbasis komunitas. Gagasan tersebut memerlukan penelitian lebih lanjut, serta pembahasan bersama secara khusus dan serius oleh para peneliti, akademisi, aktivis organisasi, dan praktisi dakwah. Di sinilah menurut hemat penulis salah satu upaya untuk merawat kemajemukan dan kedamaian, sekaligus merawat Indonesia dengan dakwah multikultural, baik intern umat beragama maupun antarumat beragama. Hal ini mengingat Islam merupakan rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil'alam).

Semua pihak ingin kembali kepada kemurnian ajaran Islam, sesuai firman Allah swt: "Dan berpeganglah kamu sekalian kepada tali Allah, dan janganlah kamu berpecah belah" (Qs. Ali Imran, 3:103). Sabda Rasulullah saw, "Telah aku tinggalkan pada kamu sekalian dua perkara, yang kamu tidak akan tersesat apabila berpegang teguh kepada keduanya, yaitu: kitabullah dan sunnah nabi-Nya." (HR Ibnu Abdibar).

## Daftar Pustaka

Ali, Muhammad, *Teologi Puralis-Multikulturalis*. Jakarta: Kompas, 2003.

Asry, Yusuf dan Amiur Nuruddin, (Ed.), *Pemberdayaan Lembaga Keagamaan dalam*

*Kehidupan Ekonomi dan Sosial*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2009.

Asry, Yusuf, "*Gerakan Dakwah Ormas Islam dalam Masyarakat Pluralistik di Kota Bandung dan Bekasi, Provinsi Jawa Barat*", Makalah Hasil Penelitian yang dipresentasikan pada seminar yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, tanggal 1 Nopember 2011 di Jakarta.

Azra Azyumardi, *Merawat Kemajukan Merawat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Geertz, Clifford, *The Religion of Java*, terjemahan Aswab Mahasin, *Abangan, Santri, Priyai dalam Masyarakat Jawa*, Pustaka Jaya, (t.th).

Ismail, Nawawi, *Pedoman Juru Dakwah*, Surabaya: Karya Agung, 2008.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interaksi untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1991.

Mahfuzh, Ali, *Hayatul Mursyidin*. Cairo: 1957.

Muhtadi, Asep Saeful dan Maman Abdul Djaliel, *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.

Purwadi dan Enis Niken, *Dakwah Wali Songo: Penyebaran Islam Bebas Kultural di Tanah Jawa*. Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.

Saefullah, Asep, *Merukunkan Umat Beragama*. Jakarta: Grafindo, 2007.

Setiady, A. Darun, *Revitalisasi Peran PI dalam Pemberdayaan Umat*. Bandung: 2006.

Shihab, Alwi. *Akar Tasawuf di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Iman, 2009.

## Setelah Jihad dan Bom: Diskursus Dakwah pada Masyarakat Plural

**Ahmad Syafi'i Mufid**

Peneliti Utama Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta

Email: ahmadsyafiimufid@yahoo.com

### **Abstract**

*Jihad is the doctrine or the call of God towards earnest accomplishment. A number of Muslims examine Qur'an and Hadith texts on order above law because of the unavailability of qath'i quotations. This effort is called ijihad and the person undergoing thr process is is called mujtahid. In Islamic communities there are also people who are trying earnestly to become pure through a series of repentance and remembrance, they are called mujahadah. At this time, the word jihad is much more popular than the word ijihad and mujahadah. However, the fact is the words are a form of application of Islamic Teachings which has proved to change the mentality of the Muslim Nations from the act of unjust, immorality, and hostility towards each other to be the superior race (khaira umma) and contribute to humanity, justice and prosperity. In regards of the doctrine of jihad, it is often absent of the spirit of ijihad and mujahadah, thus its impact and acknowledgement is less experienced by neither Muslims nor the whole human race. Preaching is the right choice for fulfilling the mission as khalifatullah in plural societies in the globalization era. By preaching, Muslims can make changes as required by Islam. It is proven that dogmas and Islamic Jihad movements with a qital approach is left behind as compared to Islamic movement which prioritizes the preaching approach. Progress after progress has been made by the missionary movement, while the failures have been experienced by the jihadist movements. History is a wise and yet objective teacher.*

**Keyword:** jihad, ijihad, mujahadah, preaching and plurality.

### **Abstrak**

*Jihad adalah ajaran atau panggilan Allah untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Sebagian muslim mengkaji nash Al Qur'an dan Hadis untuk mengambil hukum karena belum tersedianya dalil qath'i. Upaya ini disebut ijihad dan orangnya disebut mujtahid. Dalam komunitas Islam terdapat juga orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh agar jiwanya menjadi suci melalui serangkaian pertobatan dan zikir, mereka disebut mujahadah. Pada saat ini, kata jihad jauh lebih populer daripada kata ijihad dan mujahadah. Padahal kata-kata tersebut merupakan bentuk penerapan ajaran Islam yang terbukti telah merubah mentalitas bangsa-bangsa muslim dari kejahiliahan, ketidakadaban, dan saling bermusuhan menjadi umat yang unggul (khaira ummah) dan memberi sumbangan bagi kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan. Sehubungan dengan ajaran jihad seringkali tidak disertai dengan semangat ijihad dan mujahadah sehingga dampaknya dan maslahatnya kurang dirasakan oleh umat Islam apalagi umat manusia. Pada era globalisasi dakwah adalah pilihan tepat untuk mewujudkan misi sebagai khalifatullah pada masyarakat plural. Dengan dakwah, umat Islam dapat melakukan perubahan seperti yang dikehendaki oleh Islam. terbukti paham dan gerakan Islam yang berjihad dengan pendekatan qital jauh tertinggal dari gerakan Islam yang mendahulukan pendekatan dakwah. Kemajuan demi kemajuan telah dicapai oleh gerakan dakwah, sedangkan kegagalan demi kegagalan dialami oleh gerakan jihadis. Sejarah adalah guru yang arif dan objektif.*

**Kata kunci:** jihad, ijihad, mujahadah, dakwah dan pluralitas.

## Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir ketakutan terhadap gerakan Islam transnasional menjadi wacana baru di Indonesia setelah *geger* bom dan Laskar Jihad. Gus Dur dalam buku *Ilusi Negara Islam* menyampaikan pesan kekhawatiran akan bahaya gerakan transnasional yang anti demokrasi. Begitu juga dengan tokoh-tokoh Islamis Indonesia seperti Buya Ahmad Syafii Ma'arif dan Kyai Hasyim Muzadi.

Ketakutan tersebut sangat beralasan karena demokrasi yang tidak kunjung memenuhi janji yakni terpenuhinya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di dunia Islam mengakibatkan munculnya resistensi dan perlawanan dari kelompok Islamis militan terhadap demokrasi. Islam adalah solusi untuk semua problema kemanusiaan. Syaratnya, dilaksanakannya ajaran dan pemahaman Islam "kaffah" yang berarti menyeluruh atau holistik. Kelompok Islamis militan juga mendorong dilakukannya jihad untuk mewujudkan cita-cita kejayaan. Masyarakat menjadi sangat akrab dengan istilah ini. Konsep jihad bagi masyarakat Indonesia memiliki konotasi yang berubah-ubah.

Pada masa perang mempertahankan kemerdekaan, kata "jihad" populer setelah keluar fatwa yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asy'ari untuk melawan Belanda. Jihad pada kemerdekaan memiliki arti dan romantisme sejarah kepahlawanan. Sayangnya, konsep jihad yang disosialisasikan dalam satu dasawarsa terakhir ini memiliki kesan sangat menakutkan.

Pada era Orde Baru, masyarakat Indonesia kembali diperkenalkan dengan istilah jihad, oleh munculnya gerakan apa yang dinamakan "Komando Jihad". Frasa Komando Jihad juga sangat menakutkan karena memiliki kesan militeristik. Kesan ini tidak saja bagi mereka yang tidak mengenal Islam, sebagian umat Islam yang menjadi lawan politik kelompok ini juga was-was.

Pada masa reformasi kita juga terkesima dengan derap dan langkah Laskar Jihad yang berbondong-bondong menuju Ambon dan terlibat konflik antarumat beragama di wilayah tersebut. Jihad juga dipergunakan dan dikaitkan dengan bom yang diledakkan oleh organisasi bawah tanah (*tanzim sirri*) al Jama'ah al Islamiyah di berbagai sasaran untuk tujuan terror. Akibatnya, banyak pihak yang salah paham tentang jihad, sebagai salah satu ajaran dalam Islam yang sangat luhur.

Dalam rangka meluruskan makna jihad, Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2003 mengeluarkan fatwa bahwa teror itu bukan jihad. Sementara kelompok Islamis arus utama memberikan makna jihad yang lebih luas, tidak hanya bermakna perang (*qital*), tetapi juga membangun sistem sosial melalui reformasi masyarakat secara bertahap, dari bawah ke atas yakni *dakwah*. Pemaknaan konsep jihad yang lebih luas seperti itulah yang sering disampaikan dalam berbagai khutbah dan ceramah agama.

Belajar dari sejarah, aktivis Islam mesti membaca kembali perkembangan, kemajuan dan kemunduran masyarakat muslim dari masa ke masa. Mengapa Islam diterima sebagai agama dan menjadi pandangan hidup masyarakat sehingga melahirkan puncak-puncak kemajuan peradaban? Di sisi lain, kita juga dapat melakukan pembacaan ulang tentang runtuhnya peradaban Islam sebagaimana jatuh banggunya *daulah Islamiyah* atau *khilafah* seperti dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Fatimiyah dan Usmaniyah.

Semua ini adalah fenomena dari aktifitas dakwah dan sekaligus aktifitas jihad. Jadi, jihad memang memiliki ragam makna, tetapi esensi makna jihad secara harfiyah adalah "bersungguh-sungguh". Sifat keras, pesimis, dan tidak sabar terhadap perubahan sebagaimana premis-premisnya dibangun oleh bapak Islamis militan modern, Sayyid Qutb, menjadi salah satu acuan utama dalam gerakan jihadis. Dalam karyanya yang sangat fenomenal, *Ma'alim fi al-Thariq*, Qutb

mendorong apa yang harus dilakukan oleh kaum Islamis, yang mirip dengan gagasan mengenai perebutan kekuasaan dengan cara revolusioner (Bubalo, dkk, 2012: 7). Tulisan ini selanjutnya akan mendiskusikan kedua konsep ini, jihad dan dakwah dan aplikasinya di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir.

### Pasang Surut Gagasan Jihad

Setelah Imam Khomainsi, pemimpin tertinggi kaum Syi'ah, berhasil memimpin revolusi Iran dan Juhaiman al Utaibi, inspirator Salafi jihadis, menduduki Masjid al Haram Mekkah pada tahun 1979, maka wacana jihad dan revolusi Islam marak kembali. Ratusan pemuda Indonesia, dan ribuan pemuda dari negeri-negeri muslim yang lain, terpanggil menjadi mujahidin di Afganistan setelah Uni Soviet menginvasi negara tersebut. Semangat jihad ini memiliki tujuan tidak saja dalam kerangka solidaritas Islam tetapi sebagai persiapan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Islam (*daulah Islamiyah* dan *khilafah*).

Kalau Imam Khomeni mengumandangkan revolusi dalam kerangka melawan dominasi kapitalis, terutama Amerika Serikat, dan sekutu Barat lainnya, aktivis Islam Suni meneriakkan jihad Islam atau jihad fi sabilillah untuk membangun daulah dan khilafah.

Motivasi utama dalam jihad adalah untuk mewujudkan sebuah tatanan politik, ekonomi dan sosial berdasarkan syari'at Islam. Negara-negara nasional yang dibangun berdasarkan sekularisme, pemerintahan otoriter dan ekonomi kapitalis model barat menjadi bahan olok-olok dan kecaman. Pada masa ini makna jihad hanya dibatasi pada hal-hal yang terkait dengan politik. Padahal kalau kita menelusuri nash Al-Qur'an maupun As Sunnah jihad itu memiliki banyak makna dan tujuan.

Makna jihad itu sendiri sangat luas. Jihad berasal dari kata *jahada* yang berarti

berusaha secara bersungguh-sungguh, atau *jaahada* yang berarti mencurahkan segala kemampuan. Memang benar jika kata jihad diberikan tambahan *al makrifat* (al jihad) maka artinya perang atau perjuangan. Tetapi dari akar kata yang sama (*jahada*) dapat juga menjadi *ijtahada*, bentuk masdarnya *ijtihadan* (ijtihad) berarti pencurahan pikiran untuk mengambil hukum yang bukan *qot'y*.

Allah SWT memberikan penghargaan yang sangat luar biasa kepada mereka yang berjihad fi sabilillah seperti janji untuk mendapatkan surga (Q.S. Al Taubah (9): 111), derajatnya lebih tinggi dibanding dengan orang mukmin yang tidak berjihad (Q.S. An Nisa (4): 95), dan orang-orang yang berjihad mendapatkan ampunan atas dosa-dosa mereka (Q.S. as Shaf (61): 10). Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amal perbuatan yang paling utama, jawaban beliau adalah beriman kepada Allah dan RasulNya, kemudian berjihad di jalan Allah (H.R. Muttafaq alaih dari Abi Hurairah RA). Jihad juga dikatakan oleh Nabi sebagai perbuatan yang paling disukai oleh Allah setelah shalat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada orang tua (HR. Muttafaq alaih dari Abdullah ibnu Mas'ud).

Bagaimana serangkaian kegiatan mengajak umat manusia menuju kepada jalan kebenaran dan menghindarkan diri dari kerusakan yang disebut dakwah? Apakah kegiatan dakwah dapat dilaksanakan sepintas selalu, atau dengan tidak sungguh-sungguh? Sejarah dakwah di Indonesia sungguh merupakan bagian dan bahkan hakikat jihad dalam arti yang sesungguhnya.

Bagaimana tidak, sebuah wilayah yang penduduknya secara kultural telah menganut agama-agama besar dunia dapat berubah menjadi masyarakat muslim baru? Itulah salah satu bukti kedahsyatan dakwah. Kalau pada masa pra modern manusia mengalahkan kelompok manusia dengan peperangan, maka pada masa modern perang itu sendiri sudah berubah menjadi perang

pemikiran (*ghazwu al fikr*) atau benturan peradaban (*clash of civilization*). Apalagi jika mereka yang dianggap musuh adalah pandangan hidup atau isme-isme, maka jihad untuk menghadapi masalah ini bukan qital tetapi dakwah.

Secara harfiah dakwah berarti doa, seruan, panggilan dan ajakan. Jika kata dakwah ditambah dengan al Islam (*dakwah ila al Islam*) berarti seruan (dakwah) untuk memeluk Islam. Dari akar kata yang sama, dari kata kerja *da'aa*, berubah dalam bentuk masdar, *ad di'ayah* atau *ad di'awah* memiliki arti yang lebih spesifik yakni propaganda (Kamus Al Munawir, 1997: 407). Dengan pengertian yang demikian maka dakwah Islamiyah adalah institusi untuk perubahan menuju kepada sebuah tatanan sosial yang diharapkan dengan taktik propaganda.

Misi dakwah sebagaimana Rasulullah SAW adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia yang juga berarti perdamaian dan kerjasama kemanusiaan (*wa maa arsalnaaka illa rahmatan lil alamin*).

Dakwah adalah rahmat, yang berarti menegakkan keadilan, membangun kesejahteraan, perdamaian dan kebajikan. Sebaliknya, dakwah bukan permusuhan, penindasan, pemerasan dan kesewenang-wenangan. Dakwah dalam konteks yang pertama, menjadi rahmat untuk semua, merupakan bagian dari jihad yang sangat dihargai oleh Allah SWT.

### **Antara Jihad Qital dan Jihad Dakwah**

Perjuangan mewujudkan sebuah masyarakat Islam atau tatanan pemerintahan berdasarkan Islam telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1945 terjadi perbedaan pandangan antara kelompok Islamis yang menghendaki negara berdasarkan syari'at Islam dengan kelompok sekuler yang menghendaki Indonesia merdeka berdasarkan pada nasionalisme, humanisme dan demokrasi dalam sidang-sidang Badan Penyelidik

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hasilnya adalah kesepakatan bersama (*mu'ahadah al ijtima'iyah*) negara berdasarkan Pancasila.

Konstituante yang melakukan serangkaian sidang pada tahun 1959 dan Sidang-sidang MPR pasca reformasi beberapa tokoh dan partai dari kalangan Islamis masih mewacanakan Islam sebagai dasar negara, atau sekurang-kurangnya menyuarakan diakuinya Piagam Jakarta sebagai bagian tak terpisahkan dari kesepakatan penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. Inilah upaya yang dilakukan oleh kelompok yang berjuang melalui jalur musyawarah (demokrasi).

Disamping mereka, terdapat kelompok yang tetap mencita-citakan berdirinya sebuah negara dengan dasar Islam secara sepihak. Mereka inilah yang pada awal kemerdekaan Indonesia membentuk Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dari sebagian pejuang yang tergabung dalam laskar Hisbullah dan Sabilillah, semula didirikan untuk wadah para pemuda santri dan alim ulama melawan pemerintah kolonial Belanda. Kelompok ini dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo, seorang Islamis, aktifis politik sejak zaman sebelum kemerdekaan.

Mereka memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia setelah wilayah Jawa Barat dengan daerah penyangga utama (Garut, Tasikmalaya dan Ciamis) ditinggalkan oleh tentara nasional hijrah ke Jogjakarta, dan daerah tersebut secara *de facto* dan *de jure* kembali dikuasi oleh Belanda pasca perjanjian Renville. Sayangnya, DI/TII tidak serta merta bubar setelah RI mendapatkan kembali kedaulatannya. Gerakan ini oleh pemerintah RI dipandang sebagai pemberontakan (*bughah*).

Militer akhirnya dapat melemahkan gerakan dan menangkap pemimpinannya, SM Kartosuwiryo, pada tahun 1962. DI/TII sebagai gerakan dapat ditumpas, tetapi ideologinya tetap berkembang hingga kemudian melahirkan kelompok

atau organisasi bawah tanah (*tandzim sirri*) seperti Komando Jihad pada tahun 1970-an dan al Jamaah al Islamiyah pada tahun 1990-an. Kelompok inilah yang kemudian mengajarkan paham dan gerakan jihad dengan berbagai tindakan teror dan peledakan bom.

Kelompok Islamis lainnya, seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdhatul Ulama, Nahdhatul Wathan, Al Wasliyah, Al Khairat dan beberapa organisasi sejenis yang berkembang hanya pada level lokal terus berupaya melanjutkan misi dakwah yang telah dilakukan oleh para pendahulu.

Mereka memetik hasil yang cukup membanggakan. Muhammadiyah telah memiliki ratusan perguruan tinggi termasuk universitas terkemuka seperti Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Muhammadiyah di hampir seluruh ibu kota provinsi. Di samping perguruan tinggi, Muhammadiyah juga memiliki rumah sakit yang juga terus berkembang untuk pelayanan umat dan masyarakat. Begitu juga dengan NU yang memiliki ribuan pondok pesantren, madrasah dan lembaga pengembangan masyarakat.

Organisasi Islam lainnya juga mengembangkan amal usaha organisasi yang dapat dikategorisasikan sebagai usaha dakwah. Melalui organisasi dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh organisasi Islam ini Indonesia banyak mengambil manfaat, termasuk di dalamnya tentang kepemimpinan. Berkat aktifitas organisasi Islam yang memilih jalan dakwah, akidah umat dapat dipelihara, syariat dapat secara tahap demi tahap dilaksanakan dan akhlak terus terjaga. Tentu saja banyak indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dakwah di Indonesia dibandingkan dengan kegagalannya.

Itulah sebgaaian dari keanekaragaman pemaknaan jihad dalam masyarakat Islam. Semua ulama sepakat jihad adalah salah satu pokok ajaran Islam. Perbedaannya adalah pemaknaan

dan pelaksanaan jihad. Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa pemikiran dan gerakan jihad sesungguhnya merupakan akumulasi pemikiran (*ijtihad*), peperangan (*qital*) dan usaha sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang suci hati dan tindakan (*mujahadah*). Ketiga cara pandang tentang jihad inilah yang menjadi fondasi (rukun) kemajuan tamadun Islam. Sayangnya, dalam perkembangan sejarah, masing-masing kelompok (*mujahidin*, *mujtahidin* dan *salikin*) tidak muncul dalam satu sosok pribadi tetapi seringkali muncul menjadi kelompok yang terbelah.

Masing-masing menganggap bahwa pendapat dan sikap kelompoknya yang paling benar (*kullu hizbin bimaaladaihim farihun*). Pandangan seperti ini adalah wajar adanya, tetapi jika kita mau melakukan refleksi terhadap ajaran (*sir'ah*) dan paradigma (*manhaj*) jihad dikaitkan dengan signifikansi terhadap misi "*kuntum khaira ummah*" maka kita harus berfikir ulang.

Umat, sebagaimana dibangun oleh Rasulullah SAW adalah kumpulan atau jamaah muslimin yang berpengetahuan, memiliki kekuatan ekonomi, politik dan pertahanan yang kuat. Apakah kondisi muslimin sekarang sebagai "*khaira ummah*"? Diantara negara-negara berpenduduk muslim, mungkin hanya beberapa saja memiliki keunggulan dalam bidang-bidang tersebut. Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab dan Kuwait memang merupakan negara dengan *income* percapita tinggi. Kemakmuran negara-negara tersebut berbeda dengan Turkey dan Malaysia karena jihad mereka di bidang pendidikan dan ekonomi.

Di antara negara-negara muslim, Iran merupakan fenomena yang lain. Negara dengan model *Imamah ala Syi'ah Istna Atsariyah* memiliki etos yang sangat kuat dalam melawan dominasi Barat. Semboyan revolusi Iran 1979 "*la syarkiyata wala gharbiyata walakinnal Islam*" yang berarti "bukan Timur dan Barat, tetapi Islam" benar-benar dibuktikan. Negara ini mampu membangun dirinya

dalam bidang ekonomi, tanpa berhutang dengan Barat, mampu membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi hingga dapat mengendalikan pesawat tanpa awak milik AS untuk didaratkan di Iran, dan berani melawan provokasi Israel.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ditunjang oleh kemampuan ekonomi menjadi prasyarat *izzul Islam wal muslimin*. Negara-negara Islam yang lain masih dalam kendali Barat, karena ketidakmandirian di bidang ekonomi, pengetahuan dan teknologi. Negara-negara Arab yang sekarang sedang dilanda apa yang disebut "Arab Spring" menyisakan pertanyaan bagaimana akhir dari riwayat revolusi tersebut? Bagaimana masa depan Tunisia, Mesir, Libia, Yaman dan Syria?

Bagaimana pula dengan masa depan Afganistan dan Irak jika mereka tidak mampu mandiri di bidang IPTEK dan ekonomi? Apakah negara-negara muslim tersebut bisa membebaskan diri dari cekeraman serta ketundukan terhadap dominasi Barat? Sejarah akan memberikan jawaban terhadap apa yang akan terjadi setelah runtuhnya khilafah, berdirinya negara kebangsaan dan negara-negara Arab dengan dominasi Barat.

Pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia mesti belajar dari keberhasilan dan kegagalan masa lalu dan pengalaman negara-negara muslim yang lain. Potensi, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki mesti dikelola dan dikembangkan untuk melanjutkan cita-cita atau misi sebagai hamba Allah SWT (*abdillah*) dan *khalifatullah* yakni menebar benih "Islam rahmatan lil alamin. Kalau upaya-upaya dakwah dan *amar makruf nahi mungkar* yang dilakukan oleh para ikhwan oleh sebagian kalangan dianggap sebagai "terror" tentu ada sesuatu yang memang tidak tepat.

Pertama, terkait dengan cara atau pemahaman kita tentang Islam dan implementasinya dalam masyarakat

plural. Menganggap Islam adalah satu dalam pemahaman dan penafsiran serta gerakan adalah kekeliruan sosiologis dan historis.

Kedua, metode yang kita gunakan dalam menyampaikan "al Islam" sebagai agama yang marah juga tidak memiliki referensi yang dapat dipertanggungjawabkan baik diukur dari Al Qur'an maupun As Sunnah. Ketiga, terkait dengan penunjang dakwah yakni sarana dan prasarana dakwah umumnya masih terbatas pada komunikasi verbal. Perubahan cara pandang perlu dilakukan, mereka yang dianggap sebagai "musuh", kita ubah menjadi sasaran dakwah.

Kekuatan akidah dan akhlak Islamiyah menjadi modal dalam dakwah. Kekayaan alam dan terutama sumber daya manusia yang berlimpah menjadi "kapital" dalam menebar salam atau perdamaian. Insya Allah dengan cara demikian, komunitas Islam (*Jamaah muslimin*) dapat meraih kembali kejayaan setelah sekian abad tenggelam dalam kegelapan, kebodohan dan kemiskinan.

### Dakwah Pada Masyarakat Plural

Trend globalisasi masyarakat dunia tentu semakin menguatkan pluralitas masyarakat bangsa. Tidak ada lagi bangsa yang hanya terdiri dari satu identitas primordial seperti etnik dan agama. Keanekaan etnik, agama dan budaya merupakan fenomena yang biasa dalam sebuah negara bangsa. Globalisasi dalam arti ekonomi, informasi, transportasi, dan bahkan *life style* telah diterima dan menjadi pola perilaku sehari-hari. Hampir-hampir tidak ada beda antara gaya hidup masyarakat dan gemerlapnya kota Dubai, Jeddah, Istambul, Kualalumpur dengan Moskow, New York, Beijing, Tokyo dan Seoul.

Begitu juga ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat di Barat dalam beberapa abad yang lalu juga telah menjadi milik seluruh umat manusia.

Perbedaan antara kemajuan Barat dan Timur sudah semakin sedikit. Satu-satunya perbedaan yang menonjol pada komunitas umat manusia abad 21 adalah warna kulit dan ciri fisik lainnya (ras), agama dan lingkungan kulturalnya. Agamapun telah berkembang melampaui batas kulturalnya, baik disebabkan oleh migrasi penduduk maupun penyiaran agama. Dengan demikian, masyarakat umat manusia menjadi semakin plural.

Hambatan relasi umat manusia tidak lagi karena perbedaan ras dan kebudayaan, tetapi lebih disebabkan oleh kekhawatiran akan keselamatan bersama dari ketidakpastian akibat tangan-tangan manusia itu sendiri (*manufactured uncertainty*). Gejala pemanasan bumi, polusi dan perusakan lapisan ozon adalah akibat dari ulah manusia. Berbagai macam hama baru muncul akibat perkembangan teknologi pertanian, tidak menentunya iklim, eksploitasi sumber daya alam yang melampaui batas toleransi mendorong terjadinya krisis energi, air dan makanan di muka bumi. Begitu juga ancaman senjata nuklir yang sangat mengerikan bagi kelangsungan hidup manusia di bumi ini.

Akhir-akhir ini suara perdamaian datang dari tokoh-tokoh agama antara lain Knitter yang menulis buku *Satu Bumi Banyak Agama (One earth many religions: multifaith dialogue and global responsibility)*. Menurutnya, dialog multi iman adalah dialog yang didasarkan atas suatu komitmen bersama untuk mengembangkan kesejahteraan manusia dan ekologi-bumi dan kemanusiaan (Knitter, 2006: 259). Pandangan ini meskipun simpatik, dan memiliki prepektif masa depan, dan pluralistik, tetapi apakah akan bersesuaian dengan pemahaman tradisional keagamaan. Alih-alih kerukunan atau perdamaian, saling curiga dan sikap permusuhan masih menggejala dalam kompleksitas relasi antarmanusia beragama.

Rupanya berperang mengatasnamakan Tuhan masih dipandang suci oleh kaum fundamentalis agama. Akan

tetapi apakah tujuan mereka berperang benar-benar untuk Tuhan atau kebenaran, atau mereka berperang, sesungguhnya, hanya untuk memperebutkan energi, air dan pangan. Tuhan, agama dan kitab suci dijadikan pembenar dalam praktik keserakahan dan kesewenang-wenangan.

Akhirnya Tuhan pun mengingatkan kepada umat-Nya “ dan di dalam dirimu, mengapa tidak kalian pikirkan”. Apa yang ada dalam pikiran manusia yang lagi marah, merusak dan membenci sesamanya? Dan apa pula yang menjadi dasar pemikiran mereka yang ingin memaksakan keyakinan, paham, aliran dan gerakan kepada orang lain agar diikuti? Semua itu adalah nafsu kemanusiaan yang tetap dalam keserakahan dan tidak pernah puas. Inilah sumber malapetaka dunia yang menjadi musuh bersama para agamawan.

## Penutup

Mana yang mesti didahulukan dalam mewujudkan cita-cita beragama (Islam), apakah jihad atau dakwah? Siapapun berhak untuk menjawab secara berbeda. Namun sejarah perjuangan menunjukkan bahwa dakwah ternyata telah menorehkan tinta emas kesuksesan. Memang di tengah-tengah gerakan dakwah, jihad sesekali muncul. Jika dibandingkan dengan eksistensi dakwah pada masa lalu dengan masa kini dilihat dari sudut sasaran, pesan yang disampaikan dan siapa yang harus menyampaikan ternyata tidak ada perbedaan.

Sasaran dakwah adalah perubahan motivasi tindakan manusia dari kecenderungan merusak menjadi membangun dan membuat manfaat serta kebajikan. Pesan-pesan yang disampaikan tetap terkait dengan keadilan, kebajikan, kedermawanan, dan menghindari tindakan-tindakan *destruktif (munkarat)*. Siapa saja yang memiliki kesadaran akan tanggungjawab kemanusiaan dan berupaya untuk memakmurkan bumi maka merekalah para pelaku dakwah.

### Daftar Pustaka

- Knitter, Paul F. (2006). *Satu Bumi Banyak Agama; Dialog Multi-Agama dan Tanggung Jawab Global*. Jakarta, BPK. Gunung Mulia. Terj. Nico.A. Likumahuwa.
- Quthub, Sayyid, (1992). *Ma'ālim fī al-Tharīq*, Cairo: Dār Syurūq.
- Trofimov, Yaroslav, *Kudeta Mekkah Sejarah yang Tak Terkuak*. Jakarta, Pustaka Alvabet. 2007 (terj. Saidiman).
- Wahid, Abdurrahman (2010). *Ilusi Negara Islam*, Jakarta, The Wahid Institute.
- Warson (2006). *Kamus al Munawir*, Yogyakarta,

# Islam, Pluralitas Agama, dan Pembentukan Masyarakat Madani di Indonesia

**Lukmanul Hakim**

Peneliti LaKIP Jakarta

Gd. Menara Era Lt 15 Unit 01 Jl. Senen Raya No 135-137 Jakarta Pusat

Email: elhakim.cordova@gmail.com

## **Abstract**

*Plurality is inevitable in Indonesia. Plurality of religions is an asset of Indonesia. Plurality covers various aspects of social and religious life for both are related and inseparable. The socio-religious life has had many variety and is not always associated with positive values based upon the reality in the society. Friction and conflicts also occasionally occur, both among religious followers, and also fellow believers which commonly ends with disagreements. In order to result in positive impacts upon plurality or diversity, a good conflict management is needed. In relation to the establishment of civil society in Indonesia, good conflict management will provide a wide range of sphere for each individual to develop their creativeness and ideas for a better social and religious life.*

**Keywords:** *Islam, Plurality of Religion / Belief, Civil Society.*

## **Abstrak**

*Di Indonesia, pluralitas merupakan hal yang tidak dapat disangkal. Pluralitas agama merupakan asset bangsa Indonesia. Pluralitas mencakup berbagai aspek dalam kehidupan sosial dan agama karena kedua berhubungan dan tidak dapat dipisahkan (integrated). Dalam realitasnya di masyarakat, kehidupan sosial keagamaan memiliki banyak ragam dan tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang positif. bahkan gesekan dan konflik juga kadangkala terjadi, baik antar pemeluk agama, dan juga sesama pemeluk agama yang berakhir dengan keributan. Karenanya agar pluralitas atau keragaman memberikan dampak positif, maka diperlukan manajemen konflik yang baik. Dalam kaitannya dengan pembentukan masyarakat madani di Indonesia, manajemen konflik yang baik akan memberikan ruang yang luas bagi tiap individu untuk mengembangkan kreativitas dan ide-ide mereka untuk kehidupan sosial dan keagamaan yang lebih baik.*

**Kata kunci:** *Islam, Pluralitas Agama/ Kepercayaan, Masyarakat Madani.*

## **Pendahuluan**

Islam merupakan agama yang menghargai pluralitas masyarakat. Dalam Islam, pluralitas atau kemajemukan masyarakat adalah suatu sunnatullah yang tidak dapat dielakkan. Berkaitan dengan hal ini, menurut Islam, manusia secara beragam diciptakan untuk saling mengenal. (Qur'an al Hujurat 13).

Konsep saling mengenal ini berarti adalah menghargai identitas masing-masing kelompok atau golongan sebagai suatu yang harus diterima sebagai kenyataan dalam kehidupan. Dari ayat ini, terlihat jelas, bahwa pada dasarnya Islam memandang bahwa pluralitas masyarakat merupakan suatu keniscayaan. Namun demikian dalam

kaitannya dengan pandangan Islam tentang hal ini, tidak berarti bahwa Islam memandang seluruh agama sama. Dalam Islam, pluralitas tidak berkaitan dengan kebenaran akan ajaran agama-agama. (Qur'an surat al Kafirun:6)

Dalam Islam pluralitas masyarakat dipandang sebagai suatu eksistensi sosial dan budaya yang harus dihargai dan dihormati. Dalam kaitannya dengan pembentukan masyarakat Madani atau masyarakat yang berperadaban dimana masing-masing masyarakat dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas tanpa paksaan, Islam telah memberikan contoh yang konkrit dalam masa nabi sampai masa sesudahnya. (Lings, Martin, 1991:123-134, Harun, Salam, 2003:149-154)

Dalam kasus Islam di Indonesia yang memiliki berbagai kepercayaan sebelum Islam. Sejarah Islam di Indonesia juga telah memberikan gambaran, bagaimana Islam telah masuk ke Indonesia dengan damai dan tanpa paksaan dan dapat hidup berdampingan dengan agama dan kepercayaan lain yang ada di Indonesia, seperti Hindu dan Buddha. Hal itu karena peran kaum Sufi dan para pedagang yang sangat luwes dalam menyebarkan ajaran Islam (Shihab, Alwi, 2001:1, K.K. Beri, 1994: 339, Alfian, Teuku Ibrahim, 2005:1. Feith, 1959:156-159, J.G.E. Casparis, I.W.Mabbett, 1992:330-339, O.Wolters, 1976:199-230.)

### **Islam dan Pluralitas: Perspektif al Qur'an dan Sejarah Islam**

Dalam memandang pluralitas yang ada dalam masyarakat, Islam memberikan tuntunan untuk merujuk pada Al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT dan hadist nabi atau tradisi nabi baik perkataan maupun perbuatan. (Mubarakfuri, Safiur Rahman, 1996:181-198). Hal ini sesuai dengan khutbah nabi pada waktu haji wada' atau haji perpisahan. (Said Ramadan al Buthy,

2003:179-184, 442). Ini menjadi penting, karena dalam pandangan dan keyakinan umat Islam, al-Qur'an dan Hadist adalah sumber kebenaran dalam pelaksanaan ajaran agama Islam untuk kehidupan kaum muslimin.

Menurut pandangan Islam, Allah SWT menciptakan keragaman atau pluralitas berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Qur'an dalam surat Hujurat ayat 33 menyatakan:

*"Wahai umat manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, berbangsa bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia disisi Tuhanmu adalah yang paling bertaqwa."*

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa konsep mengenal diri dan penciptaan adalah untuk menyadarkan manusia bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang satu yaitu nabi Adam dan Hawa. Jadi tidak dibenarkan untuk saling mencera dan menghina karena kemuliaan dari mereka adalah karena urusan-urusan agama. Artinya karena ketakwaan mereka. Dengan demikian, secara hak-azasi manusia, Islam menetapkan kesamaan kedudukan seluruh umat manusia dalam konteks kemanusiaan. (Katsir, Ibnu, 2002:391). Berkaitan dengan ketakwaan atau urusan agama ini, Qur'an surat al Kafirun:6 menyatakan:

*"Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku."*

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah dalam hal peribadatan atau penyembahan kepada Tuhan yang diyakini. Dalam hal ini, sebagai umat Islam, *lakum dinukum* berarti penekanan bahwa agama kamu adalah sesuai dengan yang kamu yakini, sehingga umat Islam dan agama lain tidak akan melakukan kerjasama dalam hal penyembahan kepada Tuhan, karena tanggung jawab

amal perbuatan dalam hal keyakinan penyembahan akan ditanggung sendiri-sendiri sesuai keyakinan masing-masing. (Katsir, Ibnu, 2002, jilid 8:478). Dengan demikian, Islam menekankan pentingnya menghormati keyakinan atau agama orang lain.

Namun demikian, untuk mewujudkan kebenaran ini, kaum muslimin dituntut untuk memberikan interpretasi yang tepat agar ajaran Islam dapat dilaksanakan dalam kaitannya dengan realitas sosial masyarakat muslim. Secara historis, penghargaan terhadap pluralitas agama dan keyakinan masyarakat pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang selanjutnya dilaksanakan oleh khalifah-khalifah sesudah Rasulullah SAW serta masyarakat Islam selanjutnya. Beberapa contoh konkrit dalam sejarah yang dapat dicermati misalnya adalah kasus nabi di Madinah, (Peters, FE, 1994:74-76, Aziz, Abdul, 2011: 214-337) sampai Islam di Spanyol.

Kedatangan Islam di Spanyol misalnya merupakan titik balik (*turning point*) yang mengakhiri otoritarianisme penguasa sebelumnya. Dalam kurun waktu sekitar 7 abad, para penguasa muslim telah menciptakan masyarakat Spanyol yang pluralistik, yaitu masyarakat yang menghargai kebebasan individu untuk menentukan pilihan keyakinan atau agamanya. Hal ini misalnya tercermin dalam realitas sosial masyarakat di Spanyol yang pluralistik yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Ketiga agama ini dapat hidup saling berdampingan. Penguasa Islam memberikan kebebasan bagi masyarakat yang memiliki keyakinan berbeda seperti Kristen dan Yahudi untuk hidup dalam konstelasi masyarakat Islam. (Ibrahim Khalil, Samarani dkk, 2000, Durant, Will, 1950:291-312, Hassan Shiddique, Amir, 1987, Brockelmann, Carl, 1949:180-227, Ahmad, Jamil, 1993, National Commission for UNESCO, 1993).

Oleh karena itulah, suatu keharusan bagi masyarakat Islam saat ini untuk belajar dengan serius dari sejarah Islam dalam kaitannya dengan interaksi masyarakat Islam dengan umat selain Islam. Dengan pemahaman sejarah yang mendalam, diharapkan dapat melahirkan kearifan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang menghargai pluralitas dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan akidah Islam. Bahkan, konsep akidah Islam dapat terwujud dalam wajah Islam yang sesuai dengan pesan Qur'an yaitu Islam sebagai (*rahmatan lil Alamin*) Rahmat bagi semesta alam. Artinya kearifan yang mendalam akan mendorong terwujudnya masyarakat plural yang menghargai hak dan kewajiban masing-masing pemeluk agama.

Pluralitas sendiri merupakan kata bahasa Inggris *plurality* yang berarti: *State of being plural, sedangkan plural berarti form of word used with reference to more than one.* (Hornby, AS, 1987:643). Dengan demikian pluralitas berarti keadaan suatu bentuk yang merujuk pada sesuatu yang lebih dari satu bentuk.

Berkaitan dengan hal ini dalam konteks bangsa Indonesia yang plural, maka agenda yang harus dikembangkan oleh umat Islam Indonesia adalah menjadikan konsep pluralitas dalam pandangan Islam sebagai pendorong untuk menjalankan ajaran agama Islam dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pesan inti al-Qur'an yaitu menjadi rahmat bagi semesta alam. Artinya kaum muslimin dalam menjalankan seluruh aktivitas keagamaannya juga berusaha untuk memberikan kesejahteraan, kedamaian dan kebaikan, tidak hanya bagi kelompok umat Islam tetapi juga bagi kelompok-kelompok agama lain yang berbeda.

Dengan demikian, realitas plural dalam masyarakat Indonesia selayaknya dipahami sebagai suatu wahana untuk merealisasikan ajaran agama Islam dalam

kehidupan sosial kemasyarakatan ketika berinteraksi dengan para pemeluk agama yang berbeda. Dengan kesadaran inilah, masyarakat Islam dapat memberikan kontribusi yang amat besar dalam pembentukan masyarakat Madani di Indonesia.

Untuk mewujudkan hal ini, maka para pemuka agama dan cendekiawan Islam dituntut untuk dapat mengembangkan pesan-pesan agama dalam konteks kehidupan bermasyarakat yaitu agar agama Islam membumi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu peran para pemuka agama dan cendekiawan amat penting untuk melakukan pencerahan kepada masyarakat, sehingga pesan-pesan yang di bawa agama menjadi fungsional serta ajaran keadilan, toleransi dan cinta kasih yang terkandung dalam agama menjadi *implementatif* dan *integratif* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **Pluralitas Agama: Fungsi Agama dan Peran para pemuka agama dalam pembentukan masyarakat Madani**

Dalam konteks pluralitas masyarakat di Indonesia, perlu disadari bahwa hal ini juga berkaitan erat dengan pluralitas agama dan keyakinan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, fungsi agama menjadi amat penting dan sentral dalam pembentukan masyarakat Madani yang terdiri dari pluralitas masyarakat beragama. Untuk memahami realitas ini, perlu kiranya disadari bahwa agama pada hakekatnya merupakan masalah iman dan keselamatan. Selain itu, adalah sumber semangat dan nilai perubahan dalam masyarakat.

Dengan demikian agama adalah kerangka etis yang memberikan batasan moral untuk menggunakan kekuatan. Selanjutnya, agama memimpin orang

untuk melakukan hal yang benar dan baik untuk kehidupan masyarakat. Karena alasan ini yang dapat dikatakan agama adalah kekuatan pendorong untuk menciptakan masyarakat Madani dan mewujudkan nilai-nilai baik untuk kehidupan masyarakat seperti keadilan, kesejahteraan dll. (Alfred, Benedictus, (ed):2005)

Secara teologis, agama menjanjikan keselamatan bagi penganutnya di alam akhirat, agama juga berfungsi sebagai sumber nilai-nilai universal yang baik dalam kehidupan ini. Sebagai nilai yang baik, maka agama menjadi kerangka etika untuk membangun moralitas kekuasaan dan masyarakat sipil karena agama diyakini sebagai pesan Tuhan. Sebagai pesan Tuhan, agama adalah kekuatan pendorong untuk mengubah kondisi sosial dalam masyarakat dengan yang lebih baik. Agama, mengubah, moralitas, kekuasaan dan masyarakat sipil adalah urusan manusia dan kemanusiaan. Agama cenderung untuk masalah manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dan masyarakat sipil adalah hubungan manusia dengan manusia lain (Hidayat, Komaruddin, 1998:9).

Sehubungan dengan ini, karena itu, para pelaku agama yang diharapkan menjadi pemicu perubahan kearah yang lebih baik dengan menghadirkan kebajikan baik dalam hidup mereka dan mendorong orang untuk mempraktekkan kebajikan-kebajikan, baik yang didasarkan pada ajaran agama. Karena pembentukan masyarakat sipil memiliki banyak hubungannya dengan kekuatan dan masyarakat, para pelaku agama harus mampu mendorong mereka yang berkuasa untuk memiliki etika, dan sebuah *counciousness* moral berdasarkan semangat religius. Sebagai sumber nilai, agama menjadi aspirasi untuk melakukan keadilan, membuat masyarakat sipil dan pemerintahan yang bersih. (Kramkowski, John, 2005).

Seperti iman, agama adalah sumber nilai yang dipraktekkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Nilai agama atau ajaran agama diyakini nilai yang Tuhan ingin orang-orang untuk berlatih. Agama adalah sumber utama kebajikan bagi penganutnya. Dari zaman kuno, religiusitas menjadi elemen penting dari kehidupan sosial. Hal ini didasarkan pada ajaran agama yang penganutnya mencoba untuk menyebarkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan. (Durkheim, Emile, 1915).

Selanjutnya, agama juga berperan untuk mendorong orang untuk mewujudkan keadilan dengan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan umat manusia. Dengan demikian, agama juga berfungsi sebagai kekuatan pendorong bagi pembentukan masyarakat sipil. Agama kemudian memimpin pembangunan agar budaya dan sosial yang ideal masyarakat. Sebagai, penawaran iman agama dengan melakukan kebajikan baik dengan keselarasan kondisi psikologis baik dalam dan luar dari penganut. Ini adalah roh yang mengilhami pikiran orang untuk melakukan segala sesuatu dengan ketulusan demi Tuhan dan kemanusiaan. (Sponville, Andre comte, 2003:195-210). Dalam konteks Asia termasuk Indonesia, secara historis, nilai-nilai agama menjadi faktor perubahan sosial di banyak masyarakat. Di Asia Tenggara Misalnya, agama adalah salah satu faktor penting dalam perubahan sosial dan politik. (Tarling, Nicholas (ed), 1999:201-256).

Ajaran Agama misalnya dapat diubah menjadi idiom politik modern seperti definisi keadilan yang berhubungan dengan posisi moderasi dan toleransi. Moderasi adalah solusi dari kesalahpahaman yang sering terjadi di kalangan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Agama kemudian mendorong masyarakat majemuk untuk mengubah kondisi ke masa depan lebih bagus, karena mendorong orang untuk

memecahkan masalah kehidupan adil, terutama dalam hubungan sosial untuk life. (Malik, Dedy Jamaluddin & Idy Subandy, 1998: 220).

Dalam hal ini, setiap agama mengajarkan kebajikan dan bagaimana memiliki kehidupan yang lebih baik dalam hubungan dengan Allah SWT Pencipta manusia. Hal ini berhubungan dengan pelaksanaan melakukan pengabdian kepada Allah SWT, melakukan keadilan sosial dalam masyarakat, hidup harmonis dengan orang lain. (Gwilym Berckerlegge, 1998).

Fungsi agama dalam kehidupan masyarakat dan sosial sangat penting. Agama mengakomodasi kepentingan duniawi dan pesan Tuhan untuk rakyat. Jika agama dapat melakukan fungsinya sebagai entitas sempurna, maka dapat diterima sepenuhnya oleh rakyat. Agama dapat memberikan dampak positif jika unsur-unsur ajaran agama dapat mendukung kehidupan masyarakat. Memang, ini sebenarnya menggambarkan bahwa agama adalah dasar untuk pengembangan peradaban yang dimulai dari pembentukan society. 8 Penjelasan comprehensif tentang agama-agama, sejarah mereka, ajaran, fungsi dan peran dalam kehidupan masyarakat. (Eliade, Mircea, (ed), 1987).

Dalam pandangan Majid, penganut agama perlu mengembangkan pandangan dunia yang inklusif agama untuk ambil bagian dalam mewujudkan agenda kegiatan besar dan luas yang manfaatnya untuk semua kelompok masyarakat, tidak hanya terbatas pada satu kelompok. Karena alasan ini bahwa aktor agama sebagai pemicu perubahan ditantang untuk memperjuangkan yang universal kepentingan seperti membuat keadilan dan kemanusiaan untuk rakyat tanpa afiliasi agama, ras, etika dan kelompok. (Dikutip dari Ali, Fachry, dalam pengantar Nurcholish, Madjid, 1998:XLV-XLVI).

Secara teologis, konsep ini memiliki hubungan erat antara nilai-nilai iman dan masyarakat yang demokratis yang diwujudkan dalam masyarakat sipil. Ini adalah tatanan kehidupan masyarakat berdasarkan kemanusiaan atau kepentingan umum. (Madjid, Nurcholish, 1999:118-119).

Kata kunci untuk hubungan-hubungan para pelaku agama dalam membangun masyarakat Madani adalah dialog. Sebuah dialog harus terbuka dan tulus serta terus-menerus. Dialog, tentu membutuhkan ketulusan, simpati dan apresiasi dari para peserta dialog, bukan untuk memalukan penganut agama lain. (Reat, N. Ross, , 1983:472, Küng, Hans, Islam, 2007:485-503).

## Penutup

Islam merupakan sumber nilai-nilai mencakup semua aspek kehidupan manusia. Agama Islam berfungsi sebagai inspirasi moral dan etika kekuasaan harus mampu mewujudkan keadilan membangun konstalasi politik bersih

dan pemerintahan yang bersih. Dalam kaitannya dengan pluralitas masyarakat di Indonesia dan pembentukan masyarakat Madani, maka para pemuka agama Islam, cendekiwaan dan para ulamanya dituntut untuk dapat bekerja sama dengan pemuka-pemuka agama lain dalam mewujudkan tatanan masyarakat Madani. Untuk mewujudkan hal ini, langkah pertama yang harus dilakukan secara intensif adalah dialog antar seluruh elemen bangsa yang berbeda agama dan latar belakang sosial dan budaya dengan keterbukaan dalam merumuskan langkah-langkah untuk membentuk masyarakat Madani untuk kemajuan bangsa. Pembentukan masyarakat Madani atau sipil menjadi penting karena merupakan masyarakat yang demokratis dan yang menghargai kepentingan umum. Hal ini didasarkan bahwa agama Islam amat menghargai konsep pluralitas dan dialog untuk kebaikan bersama dalam kehidupan dengan menempatkan konsep keadilan, nilai-nilai universal, persaudaraan, nilai-nilai moral dan etika ke dalam tindakan kehidupan nyata.

## Daftar Pustaka

- Aziz, Abdul, *Chiefdom Madinah, Salah Paham Negara Islam*, Jakarta, Pustaka Alvabet, 2011.
- Ali, Fachry, dalam pengantar Nurcholish, Madjid, *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Diskursus Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Jakarta, Paramadina, 1998.
- AS Hornby, *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*, Oxford University Press, 1974.
- Benedictus Alfred, (ed) *Sejarah, Teologi Dan Etika Agama-Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Brokelmann, Carl, *History of the Islamic Peoples* (London: Routledge&Kegan Paul Limited, 1949).
- Durkheim, Emile, *The Elementary Forms of the Religious Life* (1915), diterjemahkan dari bahasa Prancis oleh Joseph Ward Swain, George Allen & Unwin, London, 1915.

- Eliade, Mircea (Ed.in kepala), *The Encyclopedia of Religion*, Macmillan Publishing Company, London dan New York, 1987.
- F. E. Peters A Reader on classical Islam, 1994 by Princeton University Press Published by Princeton University Press, 41 William Street, Princeton, New Jersey
- Feith, Herbert, *Indonesia in Governments and Politics of Southeast Asia* edited by George Mc Turnan Kahin ( Ithaca: Cornell University Press, 1959).
- Gwilym Berckerlegge, *Dunia Pustaka Agama*, Universitas Terbuka, 1998.
- Harun, Abdussalam, *Tahzib Sirah Ibnu Hisyam*, penterjemah Abu Ihsan al Atsari al Madani, Jakarta, Darul Haq, 2003.
- Hidayat, Komaruddin, *Tragedi Raja Midas moralitas Agama Dan Krisis Modernitas*, Paramadina, Jakarta: 1998.
- Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al 'Adzim*, Jjilid 7, Dar al Hadist, Cairo, 2002.
- Ibrahim Khalil, Samarani dkk, 2000, *Tarikhul Arab wa hadlaratuhum fil Andalus, Dar al Kutub al Wataniyyah, Banghazi, Libya.*
- KH. Jamil Ahmad, *Hundred great Great Muslims*, terjemahan Tim Pustaka Firdaus, Jakarta 1993)
- K.K. Beri, *History and Culture of Southeast Asia: Ancient and Medieval* ( New Delhi: Sterling publishers Private limited, 1994).
- Kramkowski, John dkk (eds) *Agama dalam Kehidupan Publik, Vol. Aku Agama, Moralitas, dan komunikasi Antara Rakyat, Dewan Penelitian di Nilai dan Filsafat*, 2005.
- Küng, Hans, *Islam, Masa Depan Masa Lalu, Kini, dan*, Diterjemahkan oleh John Bowden, Buku Oneworld, Diterbitkan oleh Publikasi Oneworld 2007, Diterjemahkan oleh John Bowden dari Jerman, *Der Islam: Geschichte, Gegenwart, Zukunft*, 2007.
- Madjid, Nurcholish, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, Paramadina, Jakarta, 1999.
- Malik, Dedy Jamaluddin & Idy Subandy, *Zaman Baru Islam Indonesia Pemikiran dan Aksi Politik, Zaman Wacana Mulia*, Bandung, 1998.
- Martin Lings, Muhammad : *His Life based on the Earliest Sources*, *The Islamic Text society*, Cambridge University Press, 1996.
- DR. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Sirah Nabawiyah, Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah SAW*, Alih Bahasa oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Lc, Jakarta: Rabbani Press, 1999.
- Reat, N. Ross, the Outsiders, *Jurnal American Academy of Religion*, Vol. 51, No 3 (September, 1983), hlm 459-476 Diterbitkan oleh: Oxford University Press URL Stabil: <http://www.jstor.org/stable/1463101>.
- Safi'ur Rahman Al-Mubarakpuri, *Ar-Raheeq Al-Makhtum, Biography of The Noble Prophet*, Islamic University, Al Madina Al Munawara, 1996
- Shihab, Alwi, *Al-Tasawwuf al-Islamī wa Âtsaruhu fī al-Tasawwuf al Indonesī al Mu'āsir*, PhD thesis, *Islam*, terjemahan Indonesia Muhammad Nursamad (Bandung: Mizan , 2001).

Siddique, Amir Hassan, *Studies in Islamic History*, terjemahan HMJ Irawan, Bandung al Maarif, 1987.

Sponville, Andre comte, *Sebuah risalah singkat tentang Kebajikan Besar: Menggunakan of Philosophy dalam Kehidupan sehari-hari*, Translated dari bahasa Perancis oleh Catherine Temerson, Vintage, London, 2003, pp.195-210.

Tarling, Nicholas (ed), *Sejarah Asia Tenggara*, Vol.4 Cambridge Uni Press, 1999.

Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah* ( Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005 ).

Will Durant, *The Story of Civilization: The Age of Faith* (New York: Simon and Schuster, 1950).

# Peran Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia (YPPII) Batu dalam Pengelolaan Dana dan Asset Sosial Keagamaan bagi Pemberdayaan Umat Beragama

**Agus Mulyono**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  
Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta  
Email: agusmulyono78@yahoo.com

## **Abstract**

*The area managed by YPPII Batu in funding management and religious social assets includes education area, diaconal service and orphanage care. The establishment of YPPII foundation was inspired by the many children who suffer from the violence. The case of Poso led to ± 20 thousand children lost their parents and their future, and so YPPII takes care of some children of Poso riot victims. This study used a qualitative approach in the form of descriptive case studies. Qualitative research emphasizes the researcher as the main instrument of the data collection and analysis.*

**Keywords:** donator, empowerment education, funding distribution, diaconal service.

## **Abstrak**

*Bidang yang dikelola oleh YPPII Batu dalam pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan meliputi diantaranya bidang pendidikan, pelayanan diakonia dan pelayanan panti asuhan. Pendirian yayasan YPPII ini diantaranya terinspirasi oleh banyaknya anak-anak yang menderita akibat kerusuhan itu. Kasus Poso menyebabkan ± 20 ribu anak kehilangan orang tua dan masa depan mereka, dan YPPII mengambil peran mengasuh beberapa anak korban kerusuhan Poso. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam bentuk studi kasus. Penelitian kualitatif menekankan pada peneliti sebagai instrumen pokok pengumpulan dan analisis data.*

**Kata kunci:** donatur, pemberdayaan pendidikan, penyaluran dana, pelayanan diakonia.

## **Pendahuluan**

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada peran Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia (YPPII) Batu dalam pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan bagi pemberdayaan umat beragama. Konsep teologis agama-agama memberikan tuntunan moralitas kepada manusia untuk merefleksikan ketaatan pada Tuhan dengan mengasihi sesama manusia. Agama-agama besar di Indonesia memiliki ajaran memberikan dana untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan (filantropi). Agama Kristen mengajarkan

agar umat Kristen memberikan persembahan melalui lembaga-lembaga keagamaan Kristen (gereja, yayasan dan lembaga keagamaan Kristen lainnya) bagi keperluan kegiatan sosial (diakonia). Seperti pada ayat-ayat Al kitab dalam Perjanjian Lama tertulis “kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (Imamat 19:18) dan “lebih berbahagia memberi daripada menerima” (Kisah 20:35) yang tentunya tertanam dalam kesadaran kolektif umat Kristiani. Sebagai salah satu yayasan keagamaan Kristen, Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia (YPPII) Batu, juga

melakukan pengelolaan (pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian) dana dan aset sosial keagamaan Kristen. Tujuannya adalah agar terlaksana dengan baik dan maksimal tugas bhakti sosial (diakonianya).

Dalam agama Kristen dikenal beberapa bentuk persembahan yang merupakan salah satu bagian dari diakonia, ada persembahan keuangan, ilmu, pengetahuan, keterampilan, barang bergerak maupun tidak, seperti mobil atau tanah, namun secara umum terlebih dalam zaman maju sekarang pada kebaktian-kebaktian, bentuk persembahan-persembahan tersebut adalah persembahan keuangan. Jenis-jenis persembahan tersebut, antara lain persembahan ucapan syukur, persembahan kolektif, persembahan iuran pembangunan, persembahan persepuluhan dan persembahan sukarela. Salah satu pertanyaan yang umum ditanyakan, persembahan mana dari beberapa jenis persembahan tersebut yang peruntukannya untuk kegiatan sosial (diakonia)? Jawabannya adalah persembahan sukarela/donatur, karena YPPII Batu bukan gereja, sebab secara umum, gerejalah yang memiliki kewenangan untuk mengumpulkan kolektif.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut, maka penelitian ini dilakukan, dengan beberapa permasalahan dan pembahasan, antara lain bagaimana persepsi komunitas agama Kristen terhadap dana dan aset sosial keagamaan di YPPII Batu; bagaimana mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian (pemanfaatan), pengawasan dana dan aset sosial kepada lembaga keagamaan tersebut; apakah pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan oleh lembaga sosial keagamaan tersebut dapat berperan dalam memberdayakan umat beragama; dan faktor-faktor apakah yang menjadi

pendorong dan penghambat pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan oleh lembaga sosial keagamaan tersebut dalam memberdayakan umat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi komunitas agama Kristen terhadap dana dan aset sosial keagamaan di YPPII Batu; mengetahui mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian (pemanfaatan), pengawasan dana dan aset sosial oleh lembaga keagamaan tersebut; mengungkap peran lembaga sosial keagamaan dalam mengelola dana dan aset sosial keagamaan bagi pemberdayaan umat beragama, dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat menjadi bahan masukan bagi Kementerian Agama RI, khususnya Ditjen Bimas Kristen dalam merumuskan kebijakan, pembimbingan, dan mendorong (sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya) lembaga-lembaga keagamaan Kristen, dalam hal ini YPPII untuk dapat lebih baik dan bersemangat serta akuntabel dalam pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan bagi pemberdayaan umat beragama.

Untuk memperjelas konsep peran dalam penelitian ini, M. Ali mengartikan peran sebagai suatu yang memegang pimpinan utama pada terjadinya suatu hal (M.Ali, tt, hal. 304). Pendapat lain mengatakan peranan sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan (Bambang Marhiyanto, tt, hal. 460).

Menurut Wrightman seperti dikutip Subarman peranan merupakan serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu (Khaidarman Syah: 1995, hal. 11). Peran dalam kajian ini dapat diartikan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan (peran serta – karakter yang diperankan) dalam suatu kegiatan dan berfungsi ikut

menentukan arah dan pencapaian suatu tujuan yaitu terciptanya pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan secara baik dan mampu memberdayakan umat beragama.

Menurut R. M. Mat Iver menyatakan lembaga (institusi) adalah prosedur yang tetap (pasti) bentuknya dalam melakukan kegiatan-kegiatan kelompok", sejalan dengan pengertian itu Bronislow Malinowski mengemukakan bahwa lembaga (institusi) adalah organisasi sistem kegiatan manusia dalam arti luas tetap, universal dan tidak terikat satu dengan yang lain sebagai komponen-komponen yang terdapat secara nyata di dalam suatu unit kebudayaan. (Khaidarman Syah: 1995, hal. 11)

Dari berbagai definisi di atas, peran lembaga pengelola dana dan aset sosial keagamaan dalam penelitian ini adalah keikutsertaan YPPI Batu dalam mengelola sistem kegiatan manusia dalam penggunaan dana dan aset sosial keagamaan secara tetap dan universal.

Gery Dasley (1995) secara rinci mengartikan pemberdayaan dapat dipahami sebagai memberikan wewenang dan memungkinkan masyarakat atau individu untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan Astrid S Susanto dalam sosiologi pembangunan (1984) memberikan penekanan dalam tataran konseptual bahwa istilah pemberdayaan dapat dikaitkan dengan proses transformasi sosial ekonomi bahkan politik, sehingga pemberdayaan juga merupakan proses perubahan kekuasaan atau kemampuan diri.

Dengan demikian pengertian pemberdayaan umat beragama dalam penelitian ini adalah proses transformasi dalam rangka penguatan diri maupun kelompok masyarakat atau umat beragama dengan upaya penumbuhan kekuasaan atau kemampuan yang dilakukan melalui pemberian wewenang

untuk melakukan suatu pekerjaan. Dengan kata lain upaya menumbuhkan umat beragama meningkatkan kemampuan mereka dalam mengubah masa depan, dilakukan atas pilihan sendiri sehingga meningkat kehidupan ekonomi, pendidikan, kesehatan mereka. Dengan kondisi semacam ini diharapkan akan dapat mendorong mereka untuk mengoptimalkan pengamalan ajaran agamanya.

Penelitian terkait dana dan aset sosial keagamaan yang dikelola oleh lembaga-lembaga sosial keagamaan dan pemerintah telah banyak dilakukan, salah satu diantaranya hasil studi yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya kini bernama *Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)* pada tahun 2003-2004. Menurut penelitian ini, dana filantropi yang disumbangkan oleh masyarakat muslim Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun per tahun. Belum lagi dana yang dilakukan oleh lembaga lain yang tidak dikategorikan umat seperti dana *corporate social responsibility (CSR)* di Indonesia mencapai Rp.1-2 triliun lebih yang tercatat dari 200 perusahaan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Informasi diperoleh dari masyarakat yang tinggal di kawasan Kota Batu dekat YPPII berada.

Narasumber adalah Pengurus YPPII Batu. Pada tahap awal riset, peneliti menggali informasi dari berbagai sumber baik media, buku-buku, dan melalui internet guna mencari dan menyeleksi data dan informasi dari YPPII Batu yang menjadi subyek penelitian. Di samping itu juga dimintakan masukan dari perwakilan Direktorat Urusan Agama Kristen Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung kepada sejumlah informan yang mengetahui pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan YPHI Batu. Secara garis besar, dalam proses analisis data ditempuh cara pengorganisasian data melalui pengumpulan catatan lapangan, komentar peneliti, dokumen, laporan, artikel dan sebagainya untuk dideskripsikan sesuai konteks masalah, diinterpretasi untuk memperoleh pengertian baru sebagai bahan temuan.

Penelitian ini dilakukan di YPHI Batu yang beralamat di Jl. Trunojoyo 12 Batu, Jawa Timur Indonesia.

### **Profil Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia (YPHI) Batu**

#### *Sejarah YPHI*

Ada beberapa periode penting dalam pertumbuhan YPHI di antaranya: *satu*, periode pra embrio (1954-1957). Pada tahun 1954 beberapa orang Kristen mulai tergerak untuk mengabarkan injil secara teratur di Kota Malang, dan berkembang dengan baik. Dalam masa ini ada dua kegiatan dalam gerak Injil yang searah, sejenis tapi tak saling bertemu/ tak saling bekerjasama dia antaranya kegiatan pelayanan misi WEC di bawah pimpinan pendeta German Eddey yang dimulai di Kediri lalu pindah ke Batu dan kebaktian-kebaktian khusus yang diadakan dalam SGA Kristen di bawah pimpinan P. Octavianus (sejak tahun 1954). (lebih lanjut Peran dan Pemikiran Pdt. DR. Petrus Octavianus, 1998, hal. 58-73)

*Kedua*, periode embrio (1957-1960), pada tahun 1957, terjadi peristiwa pertobatan Petrus Octavianus (waktu itu sebagai Direktur SMA dan SGA Kristen Malang, serta Rektor Akademi Pendidikan Guru Nasional Malang),

melalui suatu kebaktian kebangunan rohani. Pertobatannya menjadikan ia seorang pekabaran injil, sehingga membawa kemajuan atas usaha penginjilan yang sedang berlangsung.

*Ketiga*, periode penemuan bentuk organisasi (1960-1961). Untuk menolong masyarakat setempat dan menunjang usaha penginjilan didirikan SMP Kristen yang perlu diwadahkan dalam suatu yayasan. Atas nasehat Bapak R. Rasjid Padmosoerdiro, Pembimas Kristen Protestan Kanwil Dep. Agama (sekarang Kemenag) Jawa Timur, lahirlah Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia (YPHI) di bawah pimpinan Bpk Petrus Octavianus (waktu itu kegiatan diakonia (kegiatan sosial) juga sudah dilakukan. Kegiatan diakonia ditangani/ dipercayakan kepada Pdt. Heini Germann Edey, yang terbentuk secara resmi pada tahun 1961. Jalur-jalur pertumbuhan ini ditentukan oleh Anggaran Dasar, antara lain: sebagai persekutuan interdenominasional-internasional; bekerjasama dengan semua gereja yang mau bekerjasama dengan tujuan menaati dan melaksanakan Amanat Agung; tidak mendirikan gereja/denominasi sendiri; dan mengutamakan tiang-tiang rohani.

*Keempat*, periode penemuan landasan dan janji-janji Tuhan untuk pelayanan (1961-1964), pelayanan PI baik melalui KKR ke gereja-gereja maupun ke desa-desa mulai berkembang. Kendati demikian, dirasakan belum ada satu landasan rohani (Yesaya 45:2-3) yang kokoh dan sekaligus sebagai janji dan pengaruh dalam pelayanan YPHI.

*Kelima*, periode kerjasama dengan gereja-gereja, KKR dan misi dalam negeri (1964-1968), di antara kerjasama tertulis diadakan antara lain dengan GKJW pada tahun 1964, dengan GMIT pada tahun 1964-1965, dengan GPIB pada tahun 1967 dan menjadi lebih luas sesudah kerjasama dengan PGI (dahulu DGI) dan juga KKR pada tahun 1966. Puncak lain

ialah lahirnya Gekisus (Gereja Injili di Sumatera bagian Selatan) pada tanggal 16 Agustus 1964 di bawah pimpinan Bapak Oktavianus.

*Keenam*, periode *worldwide mission* (1968-1974), konperensi bersama antara Misi WEC dan YPPII pada bulan Februari 1968 di Batu telah menentukan dalam *take off misi* YPPII ke Luar Negeri dengan pengutusan tim-tim PI ke Luar Negeri membawa api kebangunan Rohani diantaranya ke tujuh Negara Asia antara lain: Singapore, Malaysia, Thailand, Kamboja, Hongkong, Taiwan dan Jepang pada bulan Juli-Nopember 1968. Kemudian ke Asia Barat (Afganistan dan Pakistan). Juga ke Eropa dan Afrika dalam tahun 1969-1972. Pada tahun 1972 mulai ke Jerman Barat dan tahun 1974 ke Suriname.

*Ketujuh*, periode era pelayanan YPPII secara nasional dan internasional diakui dan diterima (1974-1978), YPPII merintis dan memelopori lahirnya PII secara resmi tahun 1974, Pdt. Oktovianus menjadi Ketua pendiri Persekutuan Injili Indonesia dari tahun 1974-1983. Pelayanan dan kerjasama diadakan pula dengan Gereja Pantekosta dan Gereja Baptis. Pada tahun 1974 Pdt. Oktovianus dipilih duduk dalam Dewan Eksekutif dari World Evangelical Fellowship dan Vice President World Evangelical Fellowship (1974-1980).

*Kedelapan*, periode peranan YPPII sebagai jembatan (1978-1981. Dengan keluarnya SK Menag No 70 Tahun 1978, SK Menag 77 Tahun 1978, dan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1979. Dalam menggalang kesatuan umat Kristen, YPPII menghadapi berbagai rintangan. YPPII terus mengevaluasi diri sendiri, menemukan dirinya dalam menghadapi berbagai hambatan.

*Kesembilan*, pelayanan multi kompleks (1981-1984), penambahan

keanggotaan yang makin membesar sesuai dengan pelayanan yang multikompleks itu tak dapat dibendung. Pada sisi lain, terasa kurangnya penanganan secara professional tugas-tugas yang sedang berjalan. Pelayanan yang multikompleks itu meliputi 6 Departemen yang sudah beroperasi, selain itu bertambah pula pelayanan ekstra YPPII yang tumbuh di luar YPPII tetapi berkaitan dengan YPPII misalnya: kedudukan Ketua Umum dalam Yayasan Maf Indonesia, RS Bethesda di Serukam, di samping Lembaga Pelayanan Kristen Indonesia, World Vision Indonesia dan Ketua Asian Mission Association. Dengan pelayanan yang multi kompleks ini terasa kurangnya penataan yang tepat.

*Sepuluh*, periode konsolidasi (1983-1986), konsolidasi penyesuaian organisasi dan personalia sudah harus segera ditangani. Sudah terasa kurangnya keterpaduan antara Departemen dengan Departemen lain, antara satu komisi dengan komisi lain. YPPII sekarang ini membutuhkan konsolidasi dan reorganisasi. Itulah sebabnya disusun kerangka Organisasi Fungsional terpadu YPPII oleh Ketua Umum. Sementara itu berbagai faktor lain baik ekstern maupun intern sangat mempengaruhi pertumbuhan YPPII. Faktor-faktor ekstern seperti berbagai peraturan pemerintah (SK Dirjen Bimas Kristen), lahirnya Undang-undang Ormas dengan segala tafsiran dan implikasinya, sikap gereja terhadap YPPII karena pertumbuhannya (kalau dianggap gereja bukan gereja, kalau dianggap hanya satu badan PI (Yayasan PI) rupanya daya jangkauan pelayanannya melampaui batas yang ditentukan gereja atau pemerintah. Faktor intern, lahirnya gereja atau gereja-gereja di beberapa pelayanan, karena tidak adanya *follow-up* yang memadai para petobat baru. Berbagai faktor ini telah menuntut YPPII, memperluas visi dan wawasannya tanpa meninggalkan identitas.

Visi yang diusung yakni melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil kepada segala suku bangsa. Sedangkan misinya adalah mendirikan, menyelenggarakan, membina dan membimbing lembaga-lembaga pendidikan umum, pendidikan keagamaan theologia Kristen, pendidikan formal dan non formal, dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Selain itu juga mendirikan dan mengembangkan perpustakaan dan mendirikan literature Kristen. YPII bersinergi dengan badan-badan pemerintah dan swasta di dalam maupun di luar negeri dan juga menyelenggarakan penelitian di bidang ilmu pengetahuan serta menyelenggarakan pelayanan diakonia anak asuh dan panti asuhan. (Wawancara tanggal 20 September 2011 di ruang sekretariat YPPII Batu dengan Pdt. Tommy O. Lengkong).

Motto yang dimiliki yaitu "satu misi satu langkah" tujuan dapat dicapai dan diwujudkan melalui kebersamaan, baik internal YPPII maupun dengan lembaga-lembaga keagamaan Kristen, dan seluruh elemen dan anak bangsa lintas suku, budaya dan agama.

Secara hukum, YPPII Batu tercatat dalam Akta Notaris Nomor 15/1961 tanggal 4 Maret 1961 tentang pendirian Yayasan Persekutuan Pekabaran Injil Indonesia (YPPII). Sedangkan dasar hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sebagaimana termaktub dalam Keputusan Dirjen Bimas (Kristen) Protestan Dep. Agama Nomor: 168 tanggal 19 September 1991. Lembaga ini diketuai oleh Pdt. Roland M. Octavianus.

### Jaringan YPPII Batu

Sebagai salah satu lembaga pelayanan yang bergerak dalam bidang pekabaran Injil di bumi Indonesia, YPPII

menghargai usaha dan pendapat para pemimpin dan tokoh gereja-gereja di Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kerjasama dari semua gereja yang ada. Sejak tahun 1965 YPPII Batu bekerjasama dengan Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (DGI) telah menelorkan naskah kerjasama secara resmi yang selalu berusaha memupuk saling pengertian, dan saling membantu secara positif dan efektif baik dalam bidang keagamaan maupun pekabaran Injil. (W.S.T Pondaag, tt: 38)

Hubungan YPPPII dengan organisasi lain terjalin baik dengan cara saling mengunjungi antara pimpinan masing-masing pihak, konsultasi berbagai persoalan seperti dengan GPIB, GKMI, GMIT, HKBPA, GEP-Sultra, GKJW, KINGMI, GKLK, GKJTU, GEKISUS, GKPII dan juga terus didjajaki kerjasama dengan GHE, GKT, Gereja Mentawai, GMI, GKI-Jatim. Eksistensi YPPII turut menolong dan mempersatukan berbagai anggota dalam tugas bersama untuk memberitakan Injil. (W.S.T Pondaag, tt: 40)

Selain pelayanan di Dalam Negeri, YPPII telah mengembangkan kemahnya ke beberapa Negara: Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, Gambia, Suriname dan Brasilia. YPPII juga menjalin kerjasama dengan WEC Internasional, NLM, Japan Antioch Mission dan Korean Internasional Mission.

Hubungan YPPII dengan pemerintah khususnya dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, selalu membantu YPPII dalam kegiatannya dan sebaliknya, YPPII terkadang memberi laporan dan informasi mengenai kegiatan-kegiatannya kepada Kementerian Agama. Konsultasi sering diadakan antara pimpinan YPPII dengan pihak Kementerian Agama dalam rangka peningkatan hubungan dan pemberian informasi. Hubungan dengan masyarakat setempat dan desa

terpelihara dengan baik. YPPII juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat dan desa. (Wawancara tanggal 20 September 2011 di ruang sekretariat YPPII Batu dengan Pdt. Tommy O. Lengkong).

### **Sistem Pengelolaan Dana dan Sasaran Penggunaan**

Dalam Kristen, dana dihimpun dari umat berupa kolekte/persembahan keuangan, persembahan ucapan syukur (berupa uang dan barang), persepuluhan, persembahan sosial (berupa uang dan barang). (Wawancara dengan Pdt. Tommy O. Lengkong dan Pontus Sitorus, tanggal 20 September 2011). Pengumpulan dana dan asset sosial menurut mereka merupakan ajaran langsung dari Injil sebagaimana termaktub dalam Matius 22:37-40 "Kasihilah Tuhan, Allahmu dan sesamamu manusia, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu".

Tafsirnya yakni seseorang beragama/bertuhan/mengasihi Tuhan adalah ketika seseorang itu mengasihi sesama, membantu orang miskin, susah, papah dan tak berdaya, dan termarginalkan (Wawancara dengan Pdt. Tommy O. Lengkong).

Sejak awal hingga pertengahan tahun 2011 dalam pengelolaan dana, masih menggunakan sistem yang sederhana dengan membukukan berupa pemasukan dan pengeluaran. Sejak pertengahan tahun 2011 (setelah adanya restrukturisasi lembaga), YPPII berbenah dan mulai menggunakan sistem manajemen pengelolaan yang modern sesuai sistem akunting dan UU Yayasan. Keuangan dan asset Yayasan diaudit oleh auditor publik. (Wawancara dengan BP, Ny. Srm tanggal 20 September 2011).

Dana dihimpun berasal terutama jika akan mengadakan kegiatan atau

program seperti Kebaktian Tahunan Nasional (KTN). Sebagai lembaga sosial keagamaan YPPII sering mengajukan permohonan bantuan dana sponsor, perorangan, perusahaan maupun gereja yang selama ini telah mengenal dan menjalin relasi dengan YPPII. Dana yang masuk secara rutin berasal dari sumbangan bulanan anggota jamaah.

Sumbangan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk barang sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. Misalkan untuk pembangunan dan pelebaran bangunan YPPII ada yang menyumbang tanah dan lain-lain. Saat ini tanah-tanah yang berada di lingkungan YPPII Batu masih belum memiliki status hukum yang jelas, sehingga YPPII belum sepenuhnya dapat memiliki asset yang ada.

(Wawancara tanggal 20 September 2011 di sekretariat YPPII Batu dengan Pdt. Tommy O. Lengkong)

### *Sasaran Penyaluran Dana*

Dana yang dihimpun digunakan untuk pelayanan umat dan kegiatan sosial lainnya untuk umat Kristen. Selain itu juga digunakan untuk bantuan belajar bagi umat yang beragama non-Kristen (diakonia). Bantuan sosial lainnya berupa pembagian sembako, donor darah dan penanganan bencana alam. Sesuai pelayanan YPPII, dana yang didapat diprioritaskan untuk pengembangan misi keagamaan, pembiayaan dan pengembangan pendidikan. Di bidang pendidikan, YPPII telah mengembangkan pendidikan umum dari mulai SD-SMA di Sumatera Selatan (Tanjung Enim) dan Kalimantan Barat (Ketapang dan Sintang). (Wawancara dengan Pdt. Tommy O. Lengkong tanggal 20 September 2011).

Besaran dana untuk pemberdayaan umat tergantung pada beberapa hal sesuai pelayanan yang direncanakan oleh YPPII Batu, antara lain seperti

memberikan beasiswa anak yatim piatu korban bencana alam Nias untuk belajar dari SD sampai SMA dan bantuan belajar seperti dalam pelayanan diakonia. Sampai sekarang pemberian beasiswa dan bantuan masih dapat berjalan dengan baik, walau kadang tertatih-tatih. Untuk itu YPPII Batu sejak awal berdirinya mendasarkan pendirian dan pelayanan ini adalah untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Dalam menyalurkan bantuan, YPPII menggunakan jaringan kepengurusan dan anggotanya yang tersebar sampai di pelosok (Sumsel dan Kalbar).

Pemanfaatan dana dari donatur YPPII memang variatif, ada yang digunakan untuk kegiatan administrasi, melakukan pelayanan ke berbagai daerah, bantuan belajar, serta beasiswa, konsumsi maupun produksi. Seperti untuk renovasi bangunan "Bukit Zaetun", membeli peralatan sekolah, memberi tunjangan kesejahteraan pendeta, membantu operasional/transpor pendeta. Usaha produktif seperti program pemberdayaan masyarakat dengan memberi bibit sapi, kambing, dan pengembangan lele.

Bantuan dana dari YPPII bermanfaat untuk pendeta maupun umat di daerah. Bagi pendeta, jangkauan ceramah pembinaan umat lebih luas karena bantuan fasilitas seperti tiket perjalanan. (Wawancara dengan Ny. Y). Kesejahteraan pendeta dan umat juga lebih baik dengan model pemberdayaan seperti pemberian ternak dan perikanan kepada masyarakat. Namun sayangnya hal itu tidak berlanjut lama.

Dalam bidang pendidikan, selama ini yang digarap antara lain pemberian beasiswa dan dana bantuan untuk anak-anak sekolah dari SD sampai SMA/K. Untuk pendidikan umum bekerjasama dengan sekolah-sekolah di daerah Batu dengan memberi beasiswa untuk anak sekolah dari keluarga yang kurang mampu.

Tujuan pelayanan diakonia adalah untuk membantu sebanyak mungkin anak dari keluarga yang kurang mampu (Kristen-Non Kristen) agar mereka mengenyam pendidikan paling rendah sampai tingkat SMU/K. Sampai saat penelitian berlangsung ada 638 anak yang mendapatkan pelayanan ini. Pada tahun 2011, jumlah anak didik dalam diakonia sebanyak 638 anak.

Untuk anak-anak tingkat SD yang mendapat bantuan sebanyak 320 anak. Setiap murid yang sekolah di lembaga swasta diberi bantuan sebesar Rp. 35.000/bulan dan yang sekolah negeri diberi bantuan sebesar Rp. 25.000/bulan. Untuk anak jenjang pendidikan SMP diberikan bantuan sebesar Rp. 45.000/bulan ditambah uang pangkal sekolah. Dan jenjang SMA setiap anak diberi bantuan sebesar Rp. 50.000/bulan.

Selain dana untuk iuran bulanan (SPP) para siswa dalam diakonia juga mendapatkan dana konsumsi tiap kali mereka datang pada waktu pembinaan. Dan bagi siswa yang tempat tinggalnya jauh, diberikan uang tambahan transportasi dengan besaran disesuaikan dengan lokasi rumah masing-masing.

Para siswa dalam diakonia adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terdaftar sebagai anak asuh yang berdomisili di Batu dan sekitarnya. Mereka berasal dari keluarga atau wali anak yang bermasalah.

Selain pelayanan diakonia, penyaluran dana juga diarahkan pada penanganan korban kerusuhan seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia (Ambon dan Poso). Saat meletusnya kerusuhan di daerah tersebut pada tahun 1997-2000, sekitar 20.000 anak kehilangan orang tua dan masa depan mereka. Pdt. Octavianus berinisiatif mendirikan Panti Asuhan "Peduli Kasih" di Batu, Jawa Timur pada Mei 2001 untuk mengasuh anak-anak korban kerusuhan di atas.

Pada saat penelitian ini berlangsung, anak korban kerusakan Ambon dan Poso yang tinggal di panti asuhan sebanyak 34 anak, semula jumlah mereka yang ditampung sebanyak 91 anak. Kendala yang dihadapi dalam menangani mereka yakni SDM pengelola panti asuhan sebanyak 10 orang berganti-ganti sehingga menyebabkan anak-anak itu perlu harus beradaptasi. (Wawancara dengan Ny. Tr tanggal 21 September 2011)

### **Pandangan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana dan Aset Sosial**

Umat Kristiani masih lebih suka memberikan dana ke pendeta, karena pendeta memang penghidupan kesehariannya melayani umat menyebarkan ajaran agama demi kebahagiaan umat. Untuk itu kebutuhan hidupnya kebanyakan berasal dari dukungan umat. Selain ke pendeta, umat juga lebih suka memberikan dana ke lembaga pendidikan, kelompok atau orang yang kondisinya memprihatinkan. (Wawancara dengan BS tanggal 21 September 2011)

Para donatur kebanyakan lebih memilih membantu kelompok yang sudah besar dan diakui oleh masyarakat. Sebagai wujud terima kasih kepada donatur, lembaga sosial keagamaan seharusnya menggunakan dana dan aset sosial keagamaan dengan profesional dan transparan. Tujuan donatur mengeluarkan dana adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan guna kebahagiaan umat. Jika masyarakat mengetahui hasil pemanfaatan donatur dari masyarakat tidak digunakan sebagaimana mestinya seharusnya masyarakat (auditor) dapat mengaudit dengan transparan dan akuntabel, agar tidak memunculkan permasalahan. Seperti halnya dana yang didapat tidak semua digunakan untuk program yang seharusnya, karena misalnya untuk keperluan administrasi

dan operasional juga diperlukan anggaran yang memadai agar dalam pengelolaan yayasan profesional, walaupun memang keikhlasan menjadi dasar pengelolaan. (Wawancara dengan Tr, Ys dan Ny. Sr tanggal 21 September 2011)

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor pendukung dapat terhimpunnya dana yakni kesadaran yang tinggi dari para donatur (jemaat gereja) untuk mengasihi sesama sebagai hamba Tuhan. Kesadaran tersebut memunculkan semangat berlomba-lomba untuk membantu dan berbagi dengan sesama.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat antara lain masih kurangnya kemampuan dan wawasan pengelola yang telah ada, ditambah lagi sikap amanah yang rendah para pengelola sehingga mencoreng citra yayasan. Dampaknya umat belum terlayani secara maksimal panti asuhan mengalami vakum dalam menangani persoalan umat.

### **Penutup**

Dari hasil penelitian di YPPII Batu dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut; a) Menurut persepsi beberapa penganut agama Kristen, wujud pemberdayaan dana dan aset sosial keagamaan itu merupakan bukti bahwa umat Kristen masih meneladani Yesus dalam berderma seperti dalam Yesaya 45 dan Matius 22:37-40; b) Dalam pengumpulan dana, YPPII Batu telah bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, individu bahkan perusahaan; c) Penyaluran dana bantuan YPPII Batu masih lebih banyak berbentuk karitatif; d) Pemberdayaan pendidikan dan panti asuhan di YPPII Batu telah berjalan sesuai program, namun untuk pemberdayaan yang lain baru bersifat karitatif; e) Faktor

pendukung dalam pengelolaan dana dan asset sosial keagamaan di YPPII Batu antara lain persepsi para menyumbang/donatur yang baik tentang berderma seperti dalam Yesaya 45 dan Matius 22:37-40. Kendala dalam pelayanan diakonia antara lain keterbatasan SDM padahal banyak problem siswa dan orang tua yang dikonsultasikan ke pembimbing. Kemudian kendala terhadap pelayanan panti asuhan antara lain SDM yang terbatas dan kurang profesional dalam menangani berbagai perbedaan karakteristik anak-anak.

Penelitian ini merekomendasikan:  
a) Nama YPPII dalam papan nama yang terpampang agar diganti dengan YPPII Batu agar sesuai dengan penamaan baru yang sudah disetujui Kemenkumham; b) Pembenahan pembukuan YPPI Batu perlu secepatnyadilakukanuntukmemudahkan pihak luar mengaudit; c) Pemberdayaan YPPII Batu kepada masyarakat perlu ditingkatkan, tidak hanya secara karitatif; d) Kementerian Agama RI perlu aktif dalam bermitra dengan YPPII Batu agar sasaran pemberdayaan YPPII tidak hanya berbentuk karitatif, namun ke arah umat yang lebih berdaya.

### Daftar Pustaka

- Shaleh, Abdul Rahman dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2004)
- Marhiyanto, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Surabaya: Bintang Timur, tt.
- M. Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Amani, tt.
- Syah, Khaidarman, *Fungsi dan Peranan Widyaiswara Studi Kasus pada Diklat X*, 1995, Jakarta. Tesis Program Pasca Sarjana IKIP Jakarta.
- Sanapiah, Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, CV Rajawali Jakarta: 2003
- Mantra, Ida Bagus, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Pustaka Pelajar: 2004.
- Tim. *Peran dan Pemikiran Pdt. DR. Petrus Octavianus*, diterbitkan oleh: Yayasan Persekutuan Injil Indonesia, cet. Pertama 1998.
- W.S.T Pondaag, *Mengenal YPPII, Persekutuan Sahabat-Sahabat Injil YPPII (PERSIL YPPII)*, 1982.
- Azra, Azyumardi, *Berderma Untuk Semua*, Jakarta: Mizan, Tahun 2003.

# Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Gereja (Paroki) Katedral Jakarta dalam Pemberdayaan Umat Katolik

**Abdul Jamil**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  
Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta  
Email: ajamilwahab@yahoo.com

## **Abstract**

*Religious institutions have given much contribution to the society through fund management and social asset. One of the religious institutions is the Church (PAROKI) cathedral in Jakarta. Through the research with a qualitative approach, it is revealed this institution has implemented a system and mechanism for social religious funding management effectively and efficiently, with healthy, transparent and accountable management system. The distribution of collected funds, for the social activities carried out by the church, was done through the Social Section of the Paroki (SSP) or Social-Economic Development (PSE) in the form of charitable/ consumptive aid, and the empowerment of education institutions under the Vincent association. The empowerment through the educational programs are considered successful, because it accomplishes the indicators of empowerment, while another program is merely a stimulant because it was charitable / consumptive.*

**Keywords:** Jakarta Cathedral, religious social funds, people empowerment.

## **Latar Belakang**

Semua agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha Hindu, dan Konghucu menempatkan kedermawanan sebagai salah satu ajaran penting. Namun demikian dalam kenyataannya masih ada kesenjangan yang mencolok antara cita dan fakta, seperti masih banyak orang miskin yang belum mendapat perhatian sesuai harapan.

## **Abstrak**

*Lembaga keagamaan telah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui pengelolaan dana dan asset sosial. Salah satu lembaga keagamaan tersebut ialah Gereja (Paroki) Katedral di DKI Jakarta. Melalui penelitian dengan pendekatan kualitatif diketahui bahwa lembaga ini telah menerapkan sistem dan mekanisme pengelolaan dana sosial keagamaan secara efektif dan efisien, dengan sistem manajemen pengelolaan yang sehat, transparan dan accountable. Penyaluran dana kolekte untuk kegiatan sosial oleh Gereja dilakukan melalui Seksi Sosial Paroki (SSP) atau Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) dalam bentuk bantuan karitatif/ konsumtif. dan pemberdayaan lembaga pendidikan di bawah perhimpunan Vincentius. Pemberdayaan melalui program pendidikan ini bisa dikatakan berhasil, karena dapat memenuhi indikator-indikator dalam pemberdayaan, sementara program yang lainnya baru sebatas stimulan karena masih bersifat karitatif/konsumtif.*

**Kata Kunci:** Katedral Jakarta, dana sosial keagamaan, pemberdayaan umat.

Untuk mengukur kemiskinan Biro Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, artinya kemiskinan dipandang sebagai kemampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai kelompok miskin. Saat ini ditetapkan pemerintah bahwa pengeluaran

perkapita orang miskin perbulan adalah Rp. 211.726,-. Jika angka tersebut dijadikan patokan maka menurut BPS permaret 2010 jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 31,02 juta orang atau 13,33%. Hal ini menjadi persoalan sebab angka yang digunakan pemerintah dalam menetapkan garis kemiskinan tersebut tidak bisa diterima banyak pihak. Sangat tidak logis bila angka itu dijadikan patokan jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup perbulan masyarakat Indonesia saat ini. Angka tersebut adalah angka politis sebab jika diubah atau dinaikkan sedikit saja maka jumlah orang miskin menjadi meningkat. Jika dinaikkan misalnya menjadi Rp 450.000,- maka jumlah orang miskin menjadi dua kali lipat, padahal angka tersebut masih logis, karena orang yang memiliki pengeluaran dengan angka tersebut dipastikan juga belum dapat mencukupi kebutuhan hidupnya perbulan sehingga masih layak disebut miskin.

Jika dilihat dari faktor penyebab tingginya angka kemiskinan bisa disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya adalah karena lemahnya etos kerja dan berusaha, lemahnya solidaritas di kalangan masyarakat, dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi dan membantu masyarakat terutama si miskin. Meskipun saat ini banyak berdiri lembaga-lembaga sosial dan keagamaan yang fokus pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin, namun menurut laporan beberapa penelitian, dari aspek manajemen sistem pengelolaan di lembaga-lembaga sosial dan keagamaan tersebut dapat dikategorikan masih lemah. Lemahnya manajemen pengelolaan dana sosial di banyak organisasi keagamaan ini adalah karena beberapa faktor, yaitu : *Pertama*, kurangnya kesadaran para pemeluk agama dalam mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama sehingga pengumpulan dana tidak

maksimal. *Kedua*, lemahnya manajemen pengelolaan lembaga-lembaga agama dalam mengelola dana sosial keagamaan, sehingga berdampak pada kurangnya kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keagamaan tersebut.

Lembaga keagamaan sesungguhnya telah banyak memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Indonesia. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakannya baik di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, keagamaan, serta berbagai kegiatan lainnya telah bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Lembaga keagamaan telah terbukti berkontribusi nyata bagi terwujudnya kesejahteraan bangsa, memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan umat baik dari sisi sosial ataupun dari sisi ekonomi.

Salah satu lembaga keagamaan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dana sosial keagamaan di DKI Jakarta adalah Gereja Katedral. Gereja milik umat Katolik ini memiliki peran dalam membangun komunitas umat beragama di DKI Jakarta dan sekitarnya, baik dalam hal keagamaan, pendidikan maupun sosial ekonomi. Hal ini tidak lepas dari adanya peran komunitas Katolik yang mempercayakan sebagian harta yang mereka miliki, untuk disumbangkan bagi kegiatan sosial keagamaan melalui Gereja Katedral.

Adalah sangat penting dilakukan penelitian terkait pengelolaan dana sosial keagamaan oleh Gereja Katedral di DKI Jakarta dan perannya dalam pemberdayaan umat. Hal ini penting guna mengidentifikasi model pengumpulan, pengelolaan, maupun pemanfaatan dana sosial keagamaan oleh lembaga tersebut dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini akan menjadi masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan

pengelolaan dana sosial keagamaan ke arah yang lebih baik dan profesional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

### Rumusan Masalah dan Tujuan

Dalam penelitian ini dibatasi pada peran Gereja Katedral sebagai paroki, bukan sebagai gereja Keuskupan Agung Jakarta (KAJ). Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: a) Bagaimana mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian (pemanfaatan), pengawasan dana sosial keagamaan oleh Gereja Katedral?; b) Apakah pengelolaan dana sosial keagamaan oleh Gereja Katedral telah berperan dalam memberdayakan umat Katolik?; c) Faktor-faktor apakah yang menjadi pendorong dan penghambat pengelolaan dana sosial keagamaan oleh Gereja Katedral dalam memberdayakan umat Katolik?

Penelitian ini bertujuan untuk: a) Mengetahui mekanisme pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian (pemanfaatan), pengawasan dana sosial keagamaan oleh Gereja Katedral; b) Mengungkap peran lembaga sosial keagamaan Gereja Katedral dalam mengelola dana sosial keagamaan bagi pemberdayaan umat katolik; c) Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana sosial keagamaan oleh Gereja Katedral.

### Kerangka Konseptual

Ada beberapa istilah dalam penelitian ini yang perlu dipahami yaitu istilah peran, pengelolaan dan pemberdayaan. Secara konseptual istilah tersebut masih bersifat umum, karena itu pengertian dan batasan masing-masing perlu terlebih dahulu diperjelas guna menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian dan konsep tersebut.

### Peran

Secara bahasa M. Ali mengartikan peran sebagai suatu yang memegang pimpinan utama pada terjadinya suatu hal (Memiliki sikap dermawan dan mau membantu kaum lemah terdapat dalam ajaran semua agama (M. Ali, t.th:304). Pendapat lain mengatakan peranan sebagai bagian dari tugas yang harus dilaksanakan (Bambang Marhiyanto, tt: 460). Menurut Wrightman seperti dikutip Subarman peranan merupakan serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan, dan dilakukan dalam situasi tertentu (Khaidarman Syah, 1985:11). Kata lain memiliki arti sepadan dengan peran adalah partisipasi. Partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "*participate*", yang berarti mengambil bagian, dan berperanserta. Berger dan Luckmann (1972) mengatakan peranan mewakili tata institusional (*institutional order*) suatu lembaga.

Baratha (1982) menyebutkan bahwa berperan serta adalah mengikut sertakan faktor-faktor kecerdasan, minat, dan bakat serta kreatif yang ada dalam kelompok untuk merencanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang ada dalam kelompok masyarakat (Krech, D, Cruntchfild, RS dan Ballachey, EL, 1962: 169).

Dari beberapa pendapat di atas maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan peran adalah keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu kegiatan dan berfungsi ikut menentukan arah dan pencapaian suatu tujuan kegiatan tersebut.

### Pengelolaan

Pengelolaan ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap suatu kegiatan. Dalam hal ini kegiatan pengelolaan dana sosial keagamaan.

### *Pemberdayaan*

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Konsep pemberdayaan mulai nampak ke permukaan sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (Pranarka & Moeljarto. 1996:44). Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan digunakan dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Dalam perspektif pembangunan ini disadari betapa pentingnya kapasitas manusia dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas dasar sumber daya materi dan nonmateri.

Pemberdayaan didefinisikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri, untuk menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (Payne, 1997: 266).

Sementara itu Ife memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi komunitas mereka (Ife Jim, 1995: 182).

Pengertian pemberdayaan umat beragama dapat diartikan sebagai proses transformasi dalam rangka penguatan diri atau kelompok masyarakat atau umat beragama dengan upaya penumbuhan kekuasaan atau kemampuan yang dilakukan melalui pemberian wewenang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Upaya menumbuhkan umat beragama ini adalah dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengubah masa depan, dilakukan atas pilihan sendiri sehingga meningkatkan kehidupan ekonomi, pendidikan, kesehatan mereka. Kondisi demikian pada akhirnya akan mengoptimalkan umat dalam pengamalan ajaran agama.

Gereja (Paroki) Katedral sebagai lembaga keagamaan merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan bidang agama khususnya umat Katolik di DKI Jakarta dan sekitarnya. Pertanyaannya apakah eksistensi lembaga tersebut sampai saat ini telah sepenuhnya mampu menunjukkan performa seperti yang diharapkan masyarakat dalam hal pemberdayaan umat melalui pengelolaan dana sosial keagamaan?

Penelitian ini berusaha menggali informasi mengenai bagaimana peran Gereja (Paroki) Katedral dalam pelaksanaan pengelolaan dana sosial keagamaan untuk pemberdayaan umat, yaitu melalui usaha membantu klien untuk memperoleh daya guna, mengambil keputusan, dan menentukan tindakan yang akan dilakukan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan metode kualitatif, hasil kajiannya bersifat deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Subyek penelitian adalah lembaga Gereja (Paroki) Katedral Jakarta.

Data dihimpun melalui studi pustaka, wawancara dan observasi. Data terdiri dari data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan sejumlah informan yaitu Pastor Kepala Gereja Katedral, dan beberapa pengurus gereja, Perhimpunan Vincentius dan lembaga pendidikan Vincentius. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen, literatur, majalah, surat kabar, website

resmi Katedral dan Vincentius, dan surat-surat keputusan Gereja Katedral dan Perhimpunan Vincentius.

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisa data. Data yang telah diperoleh terlebih dahulu dikelompokkan, dikategorikan, dan dihubungkan antara satu data dengan lainnya, tujuannya adalah untuk memperoleh data yang lebih komprehensif. Selanjutnya dilakukan analisis data yaitu mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyingkat data. Tujuan menganalisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah dibaca dan ditafsirkan, dan diambil kesimpulan.

### **Sekilas tentang Gereja Katedral**

Gereja Katedral adalah salah satu tempat ibadat umat Katolik. Gereja ini terletak di Jalan Katedral, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sebenarnya, nama resmi gereja ini adalah "De Kerk van Onze Lieve Vrowe ten Hemelopneming - Gereja Santa Maria Diangkat Ke Surga". Secara gamblang orang banyak yang menyebut gereja ini dengan nama Gereja Katedral saja. Gereja ini diresmikan tahun 1901, diresmikan dan diberkati oleh Mgr. Edmundus Sybradus Luypen, SJ, seorang Vikaris Apostolik Jakarta pada tanggal 21 April 1901. Dalam upacara peresmian tersebut banyak dihadiri para pejabat dan umat.

Gereja ini dibangun dengan gaya arsitektur neo-gotik dari Eropa. Gaya arsitektur ini memang sangat sering dipakai untuk membangun gedung-gedung gereja di masa lalu, gedung gereja yang kita lihat sekarang ini, bukanlah gedung gereja asli. Gedung Gereja Katedral yang asli diresmikan pada Februari 1810. Tapi pada 27 Juli 1836, gedung gereja itu terbakar bersama dengan 180 rumah penduduk di sekitarnya. Jadi, gedung gereja itu dibangun kembali dan kemudian diresmikan pada tahun

1901. Yang mengagumkan ialah bahwa Badan Pengurus Gereja bersama umat dengan usahanya sendiri sanggup mengumpulkan seluruh biaya.

Pada tahun 1988 pernah dilakukan pemugaran untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan dan membersihkan lumut serta pengecatan ulang. Disamping itu juga dibangun gedung Pastoran dan gedung pertemuan yang baru dibagian belakang gereja. Pada 13 Agustus 1988, purnakarya pemugaran Gereja Katedral diresmikan oleh Bapak Soepardjo Roestam yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat R.I, hadir mewakili Presiden Soeharto. Pada malam natal 24 Desember 2000, Gereja ini menjadi salah satu lokasi yang terkena serangan ledakan bom.

Gereja ini layak disebut Katedral, karena di dalamnya terdapat katedral, yakni Tahta Uskup Gereja Katedral pernah dikunjungi oleh Paus Paulus VI (1970) dan Paus Johannes Paulus II (1989) yang disambut oleh Mgr Leo Soekoto. Ibadat dirayakan dengan meriah oleh Paus Paulus VI bersama banyak Uskup di Katedral.

Gereja Katedral sendiri termasuk berada di bawah Keuskupan Agung Jakarta (KAJ). Dibawah KAJ kini ada 56 paroki, 5 rumah retri. Berdasarkan data tahun 2003 dari total penduduk Jakarta yaitu 11.279.332 jiwa, jumlah umat Katolik adalah 434.762 jiwa (Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2005:103-111).

### **Perspektif Komunitas Katolik terhadap Dana sosial Keagamaan**

Dalam pandangan ajaran agama Katolik berbagi adalah ungkapan cinta kasih, dan perintah utama Tuhan Yesus. Dalam Lukas 10: 27 disebutkan "Cintailah sesamamu manusia seperti

dirimu sendiri". Cinta itu harus lebih diwujudkan dengan tindakan dari pada kata-kata, dan letak cinta adalah dalam tindak saling member dari kedua pihak artinya yang mencintai memberi kepada yang dicintai seluruh atau sebagian dari milik atau kepunyaannya.

Dibalik ajakan untuk berbagi terdapat pemahaman bahwa apa yang dimiliki adalah anugrah Tuhan yang perlu disyukuri, dan digunakan untuk kesejahteraan diri dan sesama, khususnya orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Hak milik kita itu hak milik Tuhan juga sebenarnya, bukan hak milik mutlak kita, tapi hak milik yang dipercayakan kepada kita untuk dipelihara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan kita dan sesama.

Bagi umat Katolik sudah selayaknya berkat dan kasih yang diterima dari Allah itu dibagikan kepada sesama. Memberi kepada mereka yang membutuhkan, sangat penting dilakukan, karena Allah sudah terlebih dahulu memberi. (Wawancara dengan Yd, 40 tahun)

### **Pemasukan dan Pengelolaan Keuangan Gereja**

Setiap hari Sabtu dan Minggu Gereja Katedral didatangi jemaat yang akan melaksanakan ibadah. Ibadah pada setiap hari Sabtu dan Minggu tersebut diikuti oleh 7 angkatan/rombongan jemaat. Pada hari Sabtu ada 2 rombongan jemaat, angkatan pertama dimulai sejak pukul 18.00 WIB. Sedangkan pada hari Minggu pelaksanaan ibadah terdiri dari 5 angkatan/rombongan jemaat yaitu pukul 07.30 wib, 09.00 wib, 10.30 wib, dan sore hari pukul 17.00 wib dan 19.00 wib. Jumlah umat Katolik yang melaksanakan ibadah di Gereja (Paroki) Katedral setiap minggunya sekitar 800 orang.

Pada saat melaksanakan ibadah tersebut umat Katolik memberikan derma

atau dana kolekte mingguan kepada gereja, disamping dana sumbangan. Besarnya dana kolekte yang dihimpun pada setiap ibadah sekitar Rp 7 juta s.d. Rp 10 juta, jadi jika rata-rata pengumpulan dana kolekte per-ibadat adalah Rp. 8.5 juta maka pada setiap minggunya dana kolekte yang terkumpul adalah sekitar Rp 59.5 juta.

Pemberian dana ke gereja juga dilakukan pada saat paskah, umat Katolik diharuskan berpuasa selama 40 hari, yakni mengurangi kecenderungan nafsu duniawi. Umat Katolik biasanya mengurangi pengeluaran yang bersifat konsumtif dan menyisihkannya untuk kemudian diberikan kepada sesama yang membutuhkan melalui gereja. Untuk itu Gereja (Paroki) Katedral banyak menerima dana selama ibadah Paskah. Dana tersebut disebut Dana Puasa Pembangunan, yang relatif lebih besar dibanding dengan dana yang diperoleh gereja lewat ibadah mingguan.

Secara umum distribusi dana kolekte, dan untuk lebih memahami sistem pengelolaan keuangan tersebut, berikut beberapa penjelasan terkait sistem pengelolaan keuangan Gereja (Paroki) Katedral. Dana yang terhimpun kemudian dicatat dalam pembukuan gereja (Karya) dan Pembukuan Pastoran (Rumah Tangga). Sumber keuangan diperoleh dari Gereja/Paroki/Karya (Kolekte dan sumbangan) dan pastoran Rumah Tangga (Stipendia; Iura Stolae dan Honoraria Sumbangan).

Proses penghimpunan dana berasal dari pemasukan dan pengeluaran uang yang dibukukan oleh karyawan bagian keuangan. Kemudian Bendahara PGDP memeriksa dan mengoreksi laporan pembukuan. Sementara itu, Pengurus PGDP tiap semester (triwulan) dan akhir tahun melaporkan keadaan keuangannya ke KAJ. Tugas KAJ adalah memeriksa dan mengoreksi laporan (audit) pada waktunya. Gereja sebagai lembaga

memiliki ketentuan dan ketetapan yang diatur oleh keuskupan disebut paroki sehingga dan semua tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Gereja dan Dana Papa (PGDP).

## Penghimpunan Dana

### *Kolekte Mingguan*

Dalam waktu satu tahun ada kegiatan pengumpulan kolekte yang terbagi dalam sepuluh pos besar penerimaan dan peruntukannya. Kolekte Mingguan yang diterima Gereja (Paroki) Katedral sebanyak 5% diperuntukkan bagi pembinaan generasi muda, 25% untuk Seksi Sosial Paroki (SSP) atau Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE), 40% untuk Dana Solidaritas Pastoral (DSP), dikirim ke Keuskupan dan 30% untuk Gereja/Karya Katedral.

### *Kolekte Kaum Muda*

Dana ini sebesar 5% digunakan untuk mendukung kegiatan kaum muda. Kaum muda oleh gereja dihargai sebagai generasi yang akan melanjutkan karya-karya gereja, maka kaum muda perlu diperhatikan dan dipersiapkan.

Bentuk perhatian gereja diwujudkan dalam anggaran keuangan yang disediakan yaitu 5% dari kolekte mingguan. Anggaran yang disediakan oleh gereja diperuntukkan pada kegiatan yang bersifat kaderisasi atau pelatihan-pelatihan.

### *Kolekte SSP/PSE (25%)*

Dana ini diperuntukkan bagi mereka yang sangat membutuhkan, karena kesulitan sosial dan ekonomi, dalam implementasinya antara lain diberikan untuk membantu membiayai lembaga pendidikan/Panti Asuhan

Vincentius, disamping itu juga digunakan untuk; beasiswa (pendidikan), kesehatan, karitatif, perbaikan perumahan, bantuan bencana, modal usaha kecil dan lain sebagainya.

### *Kolekte Gereja (30%)*

Dana ini untuk membiayai kegiatan kehidupan menggereja di Katedral yaitu gaji karyawan, kendaraan/transport, listrik, air, telephon, majalah, keorganisasian, kesekretariatan, seksi dan kelompok-kelompok, kesehatan, perawatan bangunan dan lain-lain.

### *KAJ /Dana Solidaritas Pastoral (40%)*

Dana ini (40%) disetor ke Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) untuk Dana Solidaritas Pastoral (DSP), diperuntukkan bagi bantuan paroki-paroki miskin, mobilitas Kendaraan paroki, Membeli tanah persiapan gereja dan Membangun gedung gereja.

### *Pastoran*

Para pastor hidup dan tinggal di Pastoran. Para Pastor bekerja untuk Gereja, maka hidupnya menjadi tanggungan umat yang dilayaninya, yaitu dalam wujud sumbangan uang natura (berupa bahan makanan dan kebutuhan pokok). Sementara itu, kehidupan rumah tangga pastoran ditopang oleh umat sebesar 50% dari stipendia dan iuran stolae. Juga berupa sumbangan in natura (dalam bentuk barang; seperti misalnya makan siang).

Stipendium adalah sumbangan yang diberikan oleh umat beriman untuk misa yang dipersembahkan imam untuk ujud atau intense tertentu. Sedangkan iura stolae adalah sumbangan umat beriman kepada imam yang menerima Sakramen atau pelayanan pastoral

lainnya. Honoraria adalah honor yang diberikan oleh umat kepada imam dalam pelayanan non-sakramen (ceramah, seminar, dll)

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa Gereja (Paroki) Katedral menerima dana umat yang berasal dari kolekte derma yang dikumpulkan ketika umat Katolik menjalankan ibadat dan sumbangan. Dana tersebut kemudian didistribusikan berdasarkan persentase yang telah ditetapkan oleh keuskupan. Dari dana yang terkumpul, sebagian ada yang digunakan untuk kepentingan Seksi Sosial Paroki (SSP) atau Pengembangan Sosial ekonomi (PSE) yaitu sebesar 25% dari total dana kolekte.

#### *Bantuan karitatif/konsumtif*

Sejauh ini SSP dan PSE telah memanfaatkan dana tersebut untuk membantu masyarakat yang tidak mampu melalui bantuan yang bersifat karitatif (konsumtif) yaitu memberikan bantuan dalam bentuk uang kepada masyarakat yang tidak mampu, saat ini jumlah yang menerima bantuan sekitar 40 orang dalam setiap bulan. Kepada mereka diberikan bantuan dalam bentuk uang yang besarnya antara Rp 300.000 sampai Rp. 400.000 .

#### *Bantuan Produktif*

Disamping bantuan yang bersifat karitatif di atas juga terdapat beberapa program kegiatan yang bersifat produktif, antara lain untuk program beasiswa, kesehatan, perbaikan rumah, dan perbaikan tempat usaha. Dana SSP dan PSE juga dimanfaatkan untuk membantu perhimpunan Vincentius yang mengelola beberapa panti asuhan dan sekolah.

### **Perhimpunan Vincentius**

Perhimpunan Vincentius Jakarta didirikan pada tanggal 29 Agustus 1855 dengan nama Dana Bantuan Santo Vincentius a Paulo Di Batavia (pada tahun 1909 diubah menjadi Batavia's Vereeniging) oleh beberapa orang Katolik seperti Mgr. PM. Vrancken (Vikaris Apostolik Djakarta), Pastor Van der Grinten (Notaris JR. Klein, PA Toillez dan E. Van Polanen Petel). Notaris J.R. Kleijn yang menyiapkan akta pendirian dan memperoleh pengakuan dari pemerintah (1856), menjadi presiden pertama (1856-1859). Tujuan utama saat itu adalah membantu anak-anak keturunan Belanda (Indo-Eropa) yang menjadi masalah sosial di masyarakat. Usaha sosial ini awalnya lebih bersifat home-care, karena Perhimpunan Vincentius Jakarta belum memiliki rumah.

Pada bulan April 1862 barulah diperoleh sebuah rumah sewa di Bazaar Baroe (sekarang Pasar Baru) yang hanya mampu menampung sekitar 25 anak puteri. Pada bulan April 1864 karena kekurangan biaya, masa sewa rumah tersebut tidak dapat diperpanjang. Syukurlah para Suster Ursulin bersedia menampung mereka di Biara Ursulin. Akhirnya pada tahun 1885 didirikan rumah khusus di Jalan Pos untuk menampung anak-anak itu. Bulan Nopember 1893 diperoleh rumah di Gang Kurni (sekarang jalan Kwini), yang menampung 29 anak putera yang diasuh oleh para Pastor Jesuit (SJ).

Baru pada tahun 1910 sebuah rumah bisa dibangun di Jalan Kramat Raya No.134 Jakarta. Inilah permulaan berdirinya Kompleks Kramat Raya seperti sekarang ini. Maka mulailah anak-anak puteri maupun anak-anak putera dari kedua rumah terdahulu menempati rumah milik sendiri. Para Suster Ursulin yang telah mengurus mereka selama 46 tahun, ikut pindah ke Kramat Raya. Sesudah itu jumlah anak-anak bertambah terus.

Tahun 1929 tugas para Pastor Jesuit dalam hal pendidikan anak-anak putera dialihkan kepada para Pastor Fransiskan (OFM) hingga sekarang. Bulan Oktober 1939, setelah berkarya di Kramat selama 28 tahun, para Suster Ursulin akhirnya pindah ke Bidaracina. 300 anak puteri bersama dengan 12 suster pindah dari kompleks Kramat ke rumah baru di Jalan Otto Iskandardinata 76, yang kini dikenal dengan nama Panti Asuhan Vincentius Puteri. Sedangkan anak putera tetap menempati kompleks Kramat, kini disebut Panti Asuhan Vincentius Putera.

Tahun 1942-1945 keadaan menjadi kacau karena dalam masa penjajahan Jepang, para Pimpinan Panti, baik Pastor, Bruder maupun Suster Belanda masuk ke kamp-kamp tahanan. Sedangkan perumahannya digunakan oleh serdadu Jepang sebagai markas. Sementara anak-anak asuh dititipkan di Biara Ursulin dan diasuh oleh Suster-Suster Ursulin.

Atas permintaan Pemerintah Indonesia, pada tanggal 30 Juni 1947 Perhimpunan Vincentius Jakarta mendirikan Panti Asuhan Desa Putera. Tujuannya untuk menampung anak-anak terlantar dan anak-anak gelandangan korban perang kemerdekaan. Panti ini dipercayakan kepada Bruder Budi Mulia (BM) dan menempati rumah di kompleks Srengseng Sawah, Pasar Minggu.

Batavia's Vincentius Vereeniging secara resmi diubah menjadi Perhimpunan Vincentius Jakarta pada tanggal 31 Maret 1950. Sejak itu Panti Asuhan Vincentius memberi prioritas pelayanan kepada anak-anak yatim piatu dan terlantar, setelah itu barulah anak-anak yatim atau piatu maupun anak-anak dari keluarga *broken home* serta penyandang masalah sosial lainnya (anak dari keluarga retak/miskin/sakit).

Tahun 1972 Perhimpunan Vincentius Jakarta mendirikan rumah panti keempat, yakni Panti Asuhan

Pondok Si Boncel di Jalan Raden Saleh Raya No.7. Panti ini khusus menampung anak-anak balita (bawah lima tahun). Pengelolaannya dipercayakan kepada para Suster Dominikanes (OP). Dengan semakin bertambahnya jumlah anak asuh dan terbatasnya daya tampung panti, maka pada tanggal 1 April 1981 Panti Asuhan Pondok Si Boncel pindah ke kompleks baru di Srengseng Sawah Pasar Minggu, yang lebih luas serta memadai.

### Visi dan Misi

Gereja Katedral memiliki visi "Membentuk manusia Indonesia mandiri, yang beriman, berakhlak tinggi, berbudi pekerti luhur dan berpendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia". Sedangkan misinya yakni: a) Melaksanakan salah satu karya sosial Keuskupan Agung Jakarta yaitu mengasuh, mengajar dan mendidik anak yatim piatu, yatim, piatu, terlantar dan anak lain yang membutuhkannya dengan meneladani kehidupan Kristus dalam terang Iman Katolik; b) Menyelenggarakan kegiatan sosial yang sah dan tidak bertentangan dengan azas dan tujuan Perhimpunan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Struktur Organisasi



## Panti Sosial

### *Panti Asuhan Vincentius Putera*

Panti Asuhan Vincentus Putera beralamat di Jl. Kramat Raya 134, Jakarta memberi prioritas pelayanan kepada anak-anak yatim piatu dan terlantar, setelah itu barulah anak-anak yatim atau piatu maupun anak-anak dari keluarga *broken home* serta penyandang masalah sosial lainnya (anak dari keluarga retak/miskin/sakit). Di lembaga ini disamping terdapat asrama putra juga disediakan pendidikan untuk para penghuni panti mulai tingkat SD, SMP, dan SMK.

### *Panti Asuhan Vincentus Puteri*

Panti Asuhan Vincentus Putri beralamat di Jl. Otto Iskandardinata No.76, Jakarta Timur juga memberi prioritas pelayanan kepada anak-anak yatim piatu dan terlantar, anak-anak yatim atau piatu maupun anak-anak dari keluarga *broken home* serta penyandang masalah sosial lainnya (anak dari keluarga retak/miskin/sakit). Di lembaga ini remaja putri dididik dan diasramakan. Lembaga ini juga membuka pendidikan tingkat SD dan SMP, sedangkan untuk tingkat SLTA para penghuni panti biasanya bersekolah di luar.

### *Panti Asuhan Desa Putra*

Panti Asuhan Desa Putra kini beralamat di jl. Desa Putera No. 24, Srengseng Sawah, Pasar Minggu, Jakarta Selatan membuka pendidikan dari tingkat SD, SMP, dan SMK. Kini Desa Putera diakui sebagai SMK Grafika terbaik dengan percetakan modern yang menghasilkan cetakan bermutu. Anak yang tidak mendapatkan pendidikan formal dilatih dalam *Graphic Training Centre* (1993). Usaha lain adalah klinik sederhana untuk anak-anak asrama (1956), yang kemudian menjadi poliklinik

(1970) untuk umum juga, yang dikelola oleh yayasan Melania sejak 1973, kini (sejak 1992) dikelola oleh yayasan Budi Mulia sebagai Balai Kesehatan Masyarakat dengan dokter dan perawat.

### *Panti Asuhan Pondok Si Boncel*

Panti Asuhan Pondok Si Boncel beralamat di Jl. Desa Putera No. 5 Rt.01/06 Srengseng Sawah, Pasar Minggu Jakarta didirikan untuk mengurus secara khusus anak-anak yatim piatu yang masih di bawah umur 7 (tujuh) tahun. Para anak-anak yatim tersebut mendapat perawatan dan pendidikan dari Panti Asuhan. Kini di Panti Asuhan Pondok Si Boncel juga terdapat sekolah TK yang dimanfaatkan oleh penghuni panti juga dari luar panti.

## Faktor Pendukung dan Penghambat

Secara umum dalam upaya pengelolaan dana sosial keagamaan oleh Gereja (Paroki) Katedral terdapat hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung dan penghambat. Adapun hal-hal yang menjadi faktor pendukung adalah; a) Nilai dan ajaran Katolik yang mendorong sebagian umat Katolik untuk mau berderma. Menyadari bahwa semua adalah anugerah Tuhan yang perlu disyukuri, dan digunakan untuk kesejahteraan diri dan sesama, khususnya orang miskin yang membutuhkan pertolongan; b) Ketetapan keuskupan sangat jelas tentang persentase pembagian dana kolekte untuk kegiatan sosial yaitu 25% sehingga memudahkan gereja dalam mendistribusikan/memanfaatkan dana kolekte melalui SSP/PSE; c) Letak geografis Gereja Katedral yaitu di tengah kota Jakarta Pusat.

Adapun hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai faktor penghambat diantaranya; a) Masih rendahnya kesediaan sebagian jemaat gereja dalam

memberikan dana kolekte, hal tersebut tidak seimbang jika dibanding dengan gaya hidup sebagian mereka yang cenderung mewah, misalnya ketika melangsungkan perkawinan, maka biasanya mampu menyelenggarakannya dengan biaya yang relatif besar; b) Jumlah masyarakat kurang mampu di DKI Jakarta cukup besar, sedangkan dana yang dimiliki gereja terbatas, sehingga bentuk bantuan yang dipilih adalah yang bersifat karikatif karena cakupannya bisa lebih luas, akibatnya hanya sebagian kecil saja dari masyarakat kurang mampu yang dapat dibantu dengan program pemberdayaan.

### Penutup

Penulis menyimpulkan beberapa hal berikut: a) Gereja (Paroki) Katedral sebagai pengumpul dan pengelola dana kolekte umat Katolik, telah memilih sistem dan mekanisme pengelolaan dana sosial keagamaan secara efektif dan efisien, dengan sistem manajemen pengelolaan yang sehat, transparan dan *accountable*. Pelaporan juga dilakukan secara periodik kepada Keuskupan Agung Jakarta. Bagi umat Katolik dan pihak lainnya terbuka untuk mengakses laporan tersebut; b) Proporsi penyaluran dana kolekte oleh Gereja telah ditetapkan Keuskupan yaitu Dana Kepemudaan 5%, Dana Papa 25%, Dana KAJ 40%, dan Dana Paroki 30%. Adapun untuk kegiatan sosial yaitu Dana Papa disalurkan melalui SSP/PSE dalam bentuk program bantuan karikatif/konsumtif, dan pemberdayaan

melalui bidang pendidikan dengan memberikan bantuan ke lembaga di bawah perhimpunan Vincentius; c) Pemberdayaan oleh Gereja (Paroki) Katedral baru berhasil pada program pendidikan, karena telah memenuhi indikator dalam pemberdayaan, yaitu adanya proses transfer daya terhadap masyarakat sasaran dalam meningkatkan keswadayaan, peningkatan kemampuan kelompok sasaran dengan daya yang dimiliki untuk mampu menentukan pilihan hidupnya. Adapun program bantuan ekonomi, bantuan yang diberikan baru sebatas memperbaiki rumah/warung tempat usaha, belum ada pendampingan dan pemberian modal. Indikator pemberdayaan belum terlihat dan belum bisa diukur, karena program ini baru sebatas stimulan.

Sebagai rekomendasi, dapat disebutkan beberapa hal berikut: a) Internalisasi ajaran berderma kepada seluruh umat Katolik hendaknya lebih diintensifkan, sehingga dapat meningkatkan pemberian bantuan melalui gereja kepada masyarakat yang tidak mampu; b) Penyaluran/pemanfaatan dana sosial keagamaan (kolekte) oleh Gereja (Paroki) Katedral sudah berjalan berupa bantuan yang bersifat karikatif dan bantuan di bidang pendidikan agar dapat dimaksimalkan pemanfaatannya.

Pada program pemberdayaan ekonomi umat hendaknya disediakan pendampingan ekonomi disertai pemberian modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan.

### DAFTAR PUSTAKA

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2010. *Pemberdayaan Lembaga Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi dan Sosial*.

\_\_\_\_\_. 2006. *Regulasi dan Implementasi Perda Zakat*.

- Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI. 2005. *Buku Petunjuk Gereja Katolik Indonesia 2005*.
- Dermawan, B. Hardijantan, Sr. Magdalena Rini, et.al. 2010. *Mari Berbagi, Perjalanan Rohani Menanti Kebangkitan*. Sekretariat Komisi PSE/APP-KAJ Bekerja Sama dengan LDD-KAJ dan Komisi PSE-KWI.
- Ife, Jim. 1995. *Community development: Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practice*. Australia, Longman Pty Ltd.
- Khaidarman Syah, *Fungsi dan Peranan Widyaiswara Studi Kasus pada Diklat X*, 1995, Jakarta. Tesis Program Pasca Sarjana IKIP Jakarta.
- Krech, D, Cruntchfield, RS, and Ballachey, EL, 1962, *Indivisidual in Society: a Sextbook of Sosial Psychology*, Calofornia: Mo Grow, Hiel Kagohusha, LTD.
- Payne. 1997. *Modern Sosial Work Theory*.
- Pranarka & Moeljarto. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, dan Implementasi*. CSIS.

# Membangun Harmoni Lewat Kebersamaan: Studi Kasus Dampak Sosial Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam di Kota Padang

**Zaenal Abidin**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  
Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta  
Email: zaenal\_ssss@yahoo.com

## **Abstract**

*This research was aimed to explore more about the social impact caused by the initial determination of Ramadhan and 1st Syawwal towards the Muslims in Padang. Sociologically the city of Padang is composed of various groups of society and though relatively modern, of course the phenomenon of many congregational groups had no diversity and enlivening the community, particularly in the Muslim community. So far here is to trace how much the positive and negative impact toward Muslims society on the difference in the initial determination of Ramadan and 1st Syawal.*

**Keywords:** social impact, Muslim community, initial determination of the first Ramadhan and 1st Syawwal, the city of Padang

## **Latar Belakang**

Fokus penelitian ini adalah dampak sosial penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal di Kota Padang. Hal ini karena penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal merupakan masalah penting berkaitan dengan ibadah kepada Allah swt, yaitu ibadah puasa dan shalat Idul Fitri, di mana penetapannya didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits. Penentuan awal bulan Ramadhan dan 1 Syawal jika keliru, maka akan berdampak pada sah tidaknya pelaksanaan ibadah puasa.

Yang menjadi persoalan jika muncul perbedaan, khususnya masyarakat awam

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih jauh tentang dampak sosial yang disebabkan oleh penentuan awal ramadhan dan 1 syawal terhadap umat islam di Padang. Secara sosiologis kota Padang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat dan meskipun relatif modern tentu fenomena dari banyaknya kelompok jamaah disana yang tidak beragam dan meramaikan masyarakat, terutama dalam masyarakat islam. Sejauh ini penelitian dilakukan untuk mengungkapkan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat islam pada perbedaan dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal.*

**Kata kunci:** dampak sosial, umat islam, penentuan awal ramadhan dan 1 syawal, kota padang

akan memunculkan kebingungan. Di satu sisi, jika masih berpuasa padahal sudah masuk pada tanggal 1 Syawal, maka puasa itu merupakan pelanggaran, karena dilakukan pada hari yang diharamkan. Sebaliknya, jika tidak berpuasa padahal belum masuk 1 Syawal, maka berhutang puasa 1 hari. Maka, penyatuan metode penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal menjadi sangat penting bagi umat Islam Indonesia dan mendesak untuk segera diselesaikan.

Dalam menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal, setidaknya ada dua kelompok yang berbeda. Perbedaannya

pada penggunaan metode, yakni metode *ruk'yatu-hilal* dan metode *hisab*. Secara konstitusi, di republik ini yang berwenang menetapkan awal puasa dan Hari Raya Idul Fitri adalah Menteri Agama RI, sebagaimana tertuang dalam salah satu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004. Fatwa tersebut mengamanatkan penentuan awal bulan Qomariyah diserahkan kepada Pemerintah (Menteri Agama).

Di Kota Padang, kasus perbedaan datangnya awal Syawal (hilal) yang masih baru terjadi pada tahun 2011. Pemerintah melalui Menteri Agama pada tahun 2011 menetapkan 1 Syawal 1432 H pada hari Selasa, 30 Agustus 2011. Beberapa kelompok elemen masyarakat mendahului berhari raya sehari sebelumnya, yakni pada hari Senin, 29 Agustus 2011. Seperti Muhammadiyah, beberapa pondok pesantren salaf dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sementara NU dan sebagian umat Islam lainnya mengikuti ketetapan pemerintah. Mengacu pada persoalan di atas, penelitian ini menjadi signifikan untuk dilakukan.

### Masalah dan Tujuan Penelitian

Fokus studi ini adalah; a) Bagaimana pandangan dan respon dan sikap tokoh agama dan para pejabat pemerintah Kota Padang terhadap perbedaan penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal?; b) Bagaimana dampak psikologi dan sosial masyarakat Kota Padang atas perbedaan penetapan awal Ramadhan dan 1 Syawal?; c) Bagaimana respon masyarakat Kota Padang terkait dengan adanya pihak-pihak yang tidak mengikuti ketetapan pemerintah dalam menjalankan ibadah pada awal Ramadhan dan 1 Syawal?

Penelitian ini bertujuan menggali informasi mengenai pandangan dan sikap tokoh agama dan para pejabat pemerintah mengenai perbedaan penetapan awal

Ramadhan dan 1 Syawal. Perbedaan itu berdampak secara sosio kultural, psikologi sosial dan kondisi intern umat Islam. Untuk menghindari persoalan sosial, maka perlu ditemukan solusinya.

### Sekilas Kota Padang

Kota Padang merupakan kota terbesar di pesisir barat pulau Sumatera dan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Luas wilayah Kota Padang adalah 694, 96 km<sup>2</sup> atau setara dengan 1, 65% dari luas Provinsi Sumatera Barat.

Sejak masa kolonial Hindia-Belanda, Kota Padang telah menjadi pelabuhan utama dalam perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Memasuki abad ke-20, ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan melalui Pelabuhan Teluk Bayur.

Kota Padang menjadi pusat pendidikan dan kesehatan, karena jumlah perguruan tinggi dan fasilitas kesehatan yang ada di kota ini, jauh lebih banyak dan lebih baik dibandingkan dengan kota-kota lain di Sumatera Barat. Jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 875. 750 jiwa (sumber Kanwil Kemenag Prov. Sumbar 2010). Jumlah mayoritas penduduk Kota Padang berasal dari etnis Minangkabau, menyusul etnis lain seperti Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh dan Tamil. Agama mayoritas penduduk adalah Islam.

Data penduduk berdasarkan penganut agama yakni sebagai berikut: Islam 848. 916 jiwa (96, 94 %), Kristen 8. 708 jiwa (1, 00 %), Katolik 13. 208 jiwa (1, 50 %), Hindu 987 jiwa (0, 11%), dan Buddha 3. 931 jiwa (0, 45 %). Jumlah rumah ibadah adalah sebagai berikut: Masjid 631 buah, Gereja Kristen 5 buah, Gereja Katolik 3 buah dan Vihara 4 buah. Bangunan Pura belum ada. (Kanwil Kemenag Prov. Sumbar 2010).

Ormas Islam yang tumbuh dan berkembang mayoritas adalah Muhammadiyah. Banyak tokoh nasional Muhammadiyah berasal dari ranah Minangkabau, seperti Buya Hamka, M. Natsir, Dt. Panglimo Kayo, St. Mansur, Mansur Malik, Syafi'i Maarif, dan lain-lain. Ormas-ormas lainnya seperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Nahdhatul Ulama (NU) dan Jami'ah Ahlith Thariqah Al-Muktabarah juga tumbuh. Di Sumatera Barat tarekat-tarekat terhimpun di bawah perkumpulan *Jami'ah Ahlit Thariqat al-Mu'tabarah*.

### Perbedaan Awal 1 Syawal di Kota Padang

Perbedaan penentuan awal bulan Ramadhan dan 1 Syawal ada pada tiga kelompok keagamaan, yaitu Muhammadiyah, Naqsabandiyah (khusus di Pauh Kota Padang), dan Syatariyah. Pada ketiganya setiap tahun sering terjadi perbedaan dengan pemerintah dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan 1 Syawal. Pengikut tarekat Naqsabandiyah di tempat lain mengikuti pemerintah.

Shalat Idul Fitri khususnya pada tahun 2011M/1432 H yang lalu, seperti tahun-tahun sebelumnya di Kota Padang, terjadi 4 waktu berbeda penyelenggaraan shalat Idul Fitri. Peristiwa itu diketahui oleh penduduk nusantara. Kelompok pertama yang mendirikan shalat Ied dua hari sebelum ketetapan pemerintah (tanggal 28 Agustus 2011). Mereka adalah pengikut Tarekat Naqsabandiyah yang berada di Pauh Kota Padang. Kemudian kelompok lain yang menyelenggarakan shalat satu hari sebelum ketetapan pemerintah (Selasa, 29 Agustus 2011), yaitu beberapa warga Muhammadiyah dan warga-warga lain yang sependapat dengan keputusan Pimpinan Muhammadiyah Pusat.

Kemudian kelompok yang menunggu dan mengikuti keputusan

pemerintah (Rabu, 30 Agustus 2011). Mereka adalah warga Tarbiyah Islamiyah, NU dan umat Islam pada umumnya. Kelompok yang terakhir yaitu yang menyelenggarakan shalat Ied satu hari setelah ketetapan pemerintah (tanggal 31 Agustus 2011), yaitu kelompok dari Tarekat Syatariyah.

Khusus ormas Muhammadiyah dan NU di Padang Sumatera Barat, keduanya memiliki anggota yang tergolong besar sehingga perbedaan itu sangat besar sekali. Meski demikian, pelaksanaan awal Syawal dan Shalat Idul Fitri bagi kedua kelompok berbeda ini berlangsung tenang dan damai.

Pada pelaksanaan awal Syawal (penyelenggaraan shalat Ied) lapisan masyarakat yang melaksanakan dapat dikelompokkan dalam: a). mengikuti ketetapan pemerintah. Mereka adalah anggota TNI dan POLRI serta masyarakat yang tidak berafiliasi dengan ormas Islam; b). Mengikuti pimpinan ormas/mursyid/khalifah masing-masing, yakni warga Muhammadiyah (walaupun tidak semuanya), penganut Tarekat Syatariyah dan Warga Naqsabandi (khusus di Pauh Kota Padang); c) Warga masyarakat yang melihat aspek yang mudah dan ringan. Mereka disebut berprinsip: *awal puasa ikut yang belakangan dan ketika lebaran ikut yang duluan*. (Wawancara dengan H. Rinalfi Yusran, SH. MM, Kasi Kemitraan Umat Islam Bidang Urais Kanwil Kemenag Prov. Sumbar).

Secara kuantitas jumlah kelompok yang berbeda dan yang sama dengan ketetapan pemerintah hampir berimbang ( $\pm 50\%$ ) antara yang Shalat pada hari Selasa dan yang Shalat pada hari Rabu. Hal yang menarik yakni kedua kelompok tersebut sama-sama mengadakan takbir keliling pada malam hari sebelum melaksanakan Shalat Idul Fitri. (Wawancara dengan pimpinan daerah Muhammadiyah dan NU Kota Padang).

Perbedaan penyelenggaraan sholat Ied itu karena keterlambatan pemerintah pusat dalam mengumumkan penetapan tanggal 1 Syawal, setelah menyebarnya isu-isu sehingga menyebabkan terjadinya kesimpangsiuran. Pemerintah mengeluarkan pengumuman dengan "kata bersayap" seperti memberikan ruang untuk berbeda. Tanpa kata bersayap pun kelompok yang memiliki keyakinan pada suatu ajaran yang mereka anut, akan tetap memunculkan perbedaan. Dengan demikian perlu ketegasan pemerintah agar wibawa di hadapan umat dan masyarakat tetap terjaga. Masyarakat saat ini sangat terbuka dan berani untuk menyatakan pendapatnya yang berbeda dengan pemerintah.

Di tempat lain, biasanya kelompok yang berbeda dengan ketetapan pemerintah tidak melakukan takbir keliling dan shalatnya pun diadakan di tempat khusus. Tetapi di Kota Padang berlangsung sebaliknya, bahkan aparat pemerintah (Bupati/Walikota) mensponsori pelaksanaan Shalat Idul Fitri mereka.

Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan cukup dengan "wujud al-hilal", atau dengan kata lain disebut juga dengan "rukayah bil-'ilmi" tanpa harus melihat bulan. Sementara bagi kalangan Tarbiyah dan NU khususnya tidak cukup dengan wujud al-hilal, tetapi harus dengan "rukayah al-hilal" atau dengan kata lain disebut juga dengan "rukayah bil-'aini".

Kedua ormas sependapat bahwa ibadah (puasa dan Iedul Fitri) menjadi sah jika dilakukan pada waktu yang telah ditentukan. Sementara dari golongan yang lain juga sependapat dengan itu, hanya saja untuk meyakini dengan metode hisab, harus ditopang dengan «rukayah bil-'aini» sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis. Bagi Muhammadiyah seperti yang dikatakan hadis itu adalah *bayan* dari surah al-Baqarah ayat 185

yang artinya: "Barang siapa di antara kamu yang telah menyaksikan bulan, maka berpuasalah). (Wawancara dengan Prof. Dr. H. Edi Syafri, MA (Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Padang).

Kelompok yang berpedoman pada hisab, ketika *bayannya* itu sudah dapat dilakukan dengan menggunakan hisab yang akurasi mendekati 100 %, maka melihat itu sudah tidak diperlukan lagi. Sedangkan yang berpegangan pada *ru'yatul hilal*, mereka berpedoman pada hadis karena *nash* (hadis) tidak dapat dikalahkan oleh ilmu pengetahuan. Pada zaman Nabi bukan tidak ada ahli hisab. Ahli hisab atau disebut juga dengan ahli perbintangan telah ada sejak masa jahiliah, walau tidak semaju sekarang. Tetapi Rasulullah saw dalam menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal ternyata tidak mengandalkan kemampuan ahli hisab semata.

Sistem dan kaedah yang digunakan dalam menentukan awal bulan merupakan hasil ciptaan manusia. Sistem yang digunakan pada dasarnya mendekati kepada kebenaran. Tetapi sistem dan kaedah itu tidak selamanya akurat, apalagi yang menyangkut dengan ilmu dan teknologi. Sistem apapun yang diciptakan dan digunakan oleh manusia pada masanya, tidak ada yang sempurna dan tetap ada kelemahan dan kekurangannya.

Ketika masing-masing bersedia saling memahami dan melihat kepada kepentingan umat atau berendah hati, sebenarnya bisa saja yang berbeda itu berdialog menetapkan kaedah baru dengan bantuan alat teknologi baru dan disepakati bersama dalam menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal. Sayangnya sampai saat ini masing-masing masih bersikukuh dengan pendiriannya.

Pengikut tarekat Naqshabandiah sangat fanatik pada silsilah yang mereka terima dari gurunya, walaupun sistem

yang mereka gunakan sudah tidak akurat dan tidak rasional. Demikian pula jama'ah Syatariah, mereka juga fanatik kepada sistem yang telah dibuat ulama mereka terdahulu, walau sebenarnya sistem tersebut juga sudah *out of date* (ketinggalan zaman atau kadaluarsa). Rujukan yang mereka pegang pun tidak valid dan sulit dipertanggung jawabkan kesahihannya.

Dalam Islam, mentaati Ulil Amri (pemerintah) menjadi bagian ajaran agama yang penting. Jika Ulil Amri memutuskan/menetapkan suatu perkara yang masih diperselisihkan, umat wajib mengikutinya (putusan pemerintah adalah mengikat). Sesuai dengan tuntunan Sunnah Rasulullah, jika umat Islam tidak sepakat dalam sebuah keputusan, maka urusan diserahkan kepada negara/pemerintah.

Masalah perbedaan (khilafiyah) tidak akan pernah selesai, karena masing-masing memiliki dasar dan *hujah* yang dianggap paling tepat dan paling benar. Pesolannya adalah, apakah masing-masing memiliki i'tikad dan kemauan untuk bersatu demi kemaslahatan dan kepentingan umat. Masing-masing mengakui kelemahan metode yang dipakai dan tidak memaksakan diri. Di kalangan ahli hisab itu sendiri, sistem yang digunakan pun berbeda-beda. Begitu juga golongan yang menggunakan metode rukyat juga memiliki kelemahan, karena kemampuan mata atau alat untuk melihat hilal sangat terbatas. (Wawancara dengan Prof. Dr. H. Sasriwarni, MA, Rois Suriah NU Sumbar dan Purek III IAIN Imam Bonjol).

Untuk menghindari dampak perbedaan (khilafiyah), suatu persoalan harus disampaikan secara transparan dalam forum dialog (diskusi). Dalam wadah ini, diperbolehkan beradu argumen (bertengkar). Akan tetapi setelah diputuskan, pihak yang berselisih harus menerima keputusan itu dengan

pertimbangan kemaslahatan umat. (Wawancara dengan Prof. Dr. H. Syamsul Bahri Khatib (Ketua MUI Prov. Sumbar).

Agenda pengumuman oleh pemerintah dengan menayangkan perdebatan secara terbuka sebelumnya di layar televisi, juga sangat disayangkan. Pemerintah sebaiknya tidak mempertontonkan perdebatan tersebut kepada khalayak ramai. Pemerintah cukup mengumumkan kata akhirnya saja dari diskusi yang dilakukan bersama ormas-ormas keagamaan. Perdebatan dalam Sidang Itsbat 1432 H di Kantor Kementerian Agama RI mengesankan bahwa umat terpecah belah, tidak satu dan pemerintah tidak netral.

Perbedaan tersebut harus dikelola dengan baik dan merupakan tugas berat yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia. Jika perbedaan itu mengancam integrasi, ulama yang berada di garda depan akan kehilangan kharismanya di tengah-tengah umat. Ulama dinilai tidak mampu lagi menyatukan umat. Wadah komunikasi dengan ormas-ormas keagamaan di bawah komando MUI seperti mati suri. Akhirnya ulama dan pemerintah tidak lagi memiliki wibawa di depan masyarakat dan umat beragama.

Masyarakat dari kalangan manapun sebenarnya masih sangat berharap bila pelaksanaan awal Ramadhan dan 1 Syawal (khususnya) dapat dilaksanakan secara bersama. Masyarakat masih berharap banyak pada peran pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal. Masyarakat mengerti aturan/hukum bahwa tidak ada lembaga lain kecuali pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal. Kalau pemerintah lemah, akibatnya umat Islam akan lebih terpecah belah lagi.

Keputusan pemerintah (Peradilan Agama) dalam itsbat rukyat hilal ini

diatur dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 52A disebutkan: "*Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Pelaksanaan rukyatul hilal hakim agama yang berada di 359 peradilan agama dan 30 pengadilan tinggi agama di seluruh Indonesia harus memberikan sumpah kepada orang yang bertugas untuk merukyat*". (Wawancara dengan Drs. H. Alizar Jas, SH, MH, Hakim Tinggi PTA Padang).

Menurut Duski Samad selayaknya MUI berperan secara aktif dalam menyatukan umat sebagai wadah komunikasi, sedangkan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menetapkan awal Ramadhan dan 1 Syawal bila terjadi perbedaan di kalangan umat.

### **Dampak Dari Perbedaan Penentuan 1 Syawal**

Secara lahiriah kenyataan yang terjadi khususnya di Kota Padang, memang tidak menimbulkan konflik dan benturan di antara kelompok yang berbeda. Hubungan personal dan hubungan kekeluargaan antara kelompok yang berbeda tetap berjalan sebagaimana biasa tanpa ada hambatan. Satu sama lain bergaul dengan normal, walau ada juga ucapan-ucapan seloroh dan senda gurau antara kelompok yang berbeda, sebagai nada pembelaan dan penyesalan atas kejadian tersebut. Ada yang mengucapkan kata-kata dengan nada senang, karena ketupatnya tidak basi dan berhari raya sesuai dengan rencana, dan ada yang menyesalkan karena perkiraannya tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga ketupat yang sudah dibuat akhirnya basi dan tidak jadi dimakan. Fenomena ini setidaknya memberikan gambaran bahwa perbedaan pelaksanaan 1 Syawal dapat menjadi bibit-bibit konflik yang mengganggu keharmonisan kehidupan beragama dimasyarakat.

Dampak serius yang ditimbulkan dari perbedaan ini menurut Awis Karni, Duski Samad, Salmadani, Edi Syafri, Firdaus AN dari berbagai tokoh yang berbeda paham, pada umumnya menyampaikan hal yang sama, seperti: *pertama*, masyarakat menjadi terpecah, walau tidak menimbulkan konflik. *Kedua*, kemesraan dan kesemarak dalam berhari raya (Idul Fitri) menjadi berkurang. Dapat disaksikan dalam kehidupan bermasyarakat, ketika kelompok yang satu melaksanakan Shalat, kelompok yang lain masih berpuasa. Sebaliknya ketika kelompok yang lain melaksanakan Shalat, kelompok yang lain hilir mudik di jalanan. Acara saling mengunjungi antara tetangga, keluarga dan karib kerabat menjadi terganggu. Karena banyak terjadi antara keluarga (seperti anak dan orang tua serta sanak famili yang lain) berbeda dalam berhari raya. Ketika sang anak datang ke rumah orang tuanya untuk berlebaran, didapati orang tuanya masih berpuasa, atau sebaliknya. Begitu juga ketika berkunjung ke rumah karib kerabat, ternyata ada yang tidak sama dalam berhari raya, sehingga kemesraan dan kemeriahan dalam berhari raya menjadi terganggu. *Ketiga*, orang lebih banyak mempertimbangkan dimensi sosialnya ketimbang mengikuti kaedah syar'iah (ketentuan fiqih). Para khatib, karena sudah dijadwal jauh-jauh hari di tempat tertentu misalnya, terpaksa mengikuti kehendak masyarakat setempat, semata-mata dengan pertimbangan menjaga hubungan sosial. Bahkan ada khatib yang berkhotbah dua kali pada hari yang berbeda karena alasan: hari pertama karena sudah terjadwal, dan yang hari kedua karena khatibnya tidak ada, maka demi menjaga hubungan sosial yang bersangkutan akhirnya naik mimbar lagi (jadi khatib). Kasus-kasus seperti itu benar-benar terjadi dan diakui oleh kedua golongan yang berbeda dalam berhari raya. Inilah yang dikatakan oleh Duski Samad sebagai sikap "*ambivalen*" dan "*kehilangan identitas*".

Kalau sikap para khatib yang dianggap orang yang lebih tahu dalam persoalan keagamaan sudah seperti itu, akan seperti apa perilaku keberagaman dalam masyarakat. *Keempat*, muncul gesekan antara pengurus PHBI/pengurus masjid dengan khatib yang tidak bersedia mengikuti kehendak masyarakat yang mengundang karena berbeda dengan keyakinan yang dimilikinya (khatib yang konsekwen). Sehingga dengan demikian ada umat yang tidak jadi Shalat karena khatibnya tidak ada. *Kelima*, umat Islam - khususnya para da'i saat ini seperti sudah kehilangan identitas. Mereka sudah sangat pragmatis dalam hidup. Bila mereka tidak mengikuti kehendak masyarakat, mereka takut akan kehilangan lahan dan sumber kehidupannya. *"Mereka sudah memperkuda agama demi kepentingan diri dan kelompoknya"* (Istilah Duski Samad). *Keenam*, para mubalig dan para da'i tidak lagi memperlihatkan keteladan dan moralitasnya dalam membina umat. Karena kepentingan-kepentingan yang bersifat sesaat (masalah duniawi) para da'i, mubalig, dan khatib menjadi tidak mandiri dan mudah memihak pada satu kelompok atau menjadi da'i pembawa pesan sponsor.

Menurut Prof. Dr. H. Salmadani, MA dampak lain yang juga serius bila perbedaan semacam ini selalu dibiarkan – terutama kelompok seperti Naqsabandi di Pauh yang lebih awal 2–3 hari dari pemerintah, dan kelompok Syatari yang belakangan 2–3 hari dari pemerintah, dengan alasan-alasan dan dalil-dalil yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan, akan membahayakan akan kehidupan keagamaan. Pada akhirnya pemerintah tidak mempunyai alasan untuk melarang bila ada satu kelompok keagamaan yang mengaku Islam, tetapi mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan akan kebenarannya.

Membahayakan kehidupan keagamaan yang beliau maksud dapat dilihat dari 3 sisi/dimensi: *pertama*, dilihat dari dimensi sosial akan menimbulkan perpecahan, mengganggu kerukunan intern umat Islam, mengurangi kemeriahan dan kemesraan dalam beribadah dan berlebaran. *Kedua*, dilihat dari dimensi syariah akan merusak dan melemahkan dalam pengamalan ajaran keagamaan. Dimensi syariahnya akan dikalahkan oleh dimensi sosialnya. *Ketiga*, dilihat dari dimensi keilmuan akan melestarikan pembodohan dan ketertutupan (tidak mau belajar kecuali hanya kepada gurunya saja, dan tidak sah menerima ilmu dari orang selain gurunya).

Kelompok Naqsabandi di Pauh Kota Padang walaupun jamaahnya tidak seberapa, dan kelompok Syatari di Padang dan Pariaman walaupun sifatnya lokal, tetapi bila dibiarkan terus mereka melaksanakan ibadah baik puasa maupun Shalat Idul Fitri dengan perbedaan yang begitu jauh dengan ketetapan pemerintah akan tetap membahayakan kepada kehidupan keagamaan, khususnya agama Islam. Hal itu seperti memberi peluang kepada orang atau kelompok tertentu untuk eksis mengembangkan suatu ajaran yang merusak dan menodai agama Islam itu sendiri.

Menurut Prof. Dr. Edi Syafri, MA (Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah) bahwa dampak yang ditimbulkan akibat perbedaan khususnya dalam penentuan awal Ramadhan dan 1 Syawal, selain sepakat dengan para tokoh lain seperti diungkap di atas, beliau menambahkan hal-hal lain sebagai berikut: *pertama*, perbedaan 1 Syawal masyarakat mengalami kebingungan, mana yang benar dan mana yang tidak benar dalam memilih dan menentukan 1 Syawal/Idul Fitri. *Kedua*, terjadi di kalangan warga Muhammadiyah yang tidak berpuasa pada hari raya yang ditetapkan, tetapi

Shalat Idul Fitri bersama dengan golongan yang belakangan. *Ketiga*, terdapat khatib dari warga Muhammadiyah yang menjadi khatib dua kali (2 x), yang pertama karena sudah terjadwal dan yang kedua ketika pulang kampung di minta lagi untuk berkhotbah di kampung halamannya. *Keempat*, Muhammadiyah seolah-olah menjadi warga yang tertuduh, dianggap tidak taat kepada pemerintah, dan dianggap sebagai golongan yang sesat. *Kelima*, ada golongan lain yang memprovokasi masyarakat untuk menyalahkan Muhammadiyah yang tidak taat kepada ketetapan pemerintah. *Keenam*, terdapat sejumlah katering yang merasa dirugikan, karena sudah ada yang memesan untuk berhari raya pada hari Selasa, tetapi akhirnya dibatalkan karena tidak jadi berhari raya.

Dari gambaran di atas ternyata perbedaan dalam menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal di Kota Padang khususnya, walau tetap aman dan damai dan tidak menimbulkan konflik, tetapi bila dilihat dari aspek syar'i, sosial, ekonomi, dan ilmu pengetahuan ternyata perbedaan itu berdampak serius dalam kehidupan keagamaan dan sosial kemasyarakatan umat. Bila hal tersebut dibiarkan berlarut-larut tentu akan dapat meruntuhkan sendi-sendi kehidupan kita dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Perpecahan yang belum mengemuka ini merupakan bom waktu yang pada suatu waktu dapat saja meledak menjadi perpecahan yang terbuka dan dapat memporakporandakan kesatuan bangsa kita.

### **Memahami Berbagai Upaya dalam Membangun Keharmonisan**

Berkaitan dengan hal tersebut diatas para tokoh dari berbagai golongan dan ormas yang berbeda, baik secara kelembagaan maupun perorangan, dan atas peran pemerintah daerah setempat

terus melakukan berbagai upaya untuk menyatukan umat dalam menjalan ibadah puasa dan Idul Fitri. Oleh karena itu, dalam membangun keharmonisan dalam kehidupan keagamaan untuk memahami orang lain yang berbeda menjadi amat penting. Sebagian upaya telah membawa hasil dan sebagian lagi masih belum berhasil. Adapun upaya-upaya tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama peran pemerintah setempat, dalam hal ini Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Hisab dan Rukyat (BHR), diketuai oleh Prof. Dr. H. Sasriwarni, MA juga selaku Ketua Rois Suriah NU Sumbar (Purek III IAIN Imam Bonjol), telah melaksanakan tugas-tugasnya dalam melakukan rukyat. Tugas BHR antara lain melakukan rukyat, dimana anggota tim terdiri dari para pimpinan ormas keagamaan, tokoh-tokoh tarekat yang ada di Kota Padang, BMKG Kota Padang, Antariksa, Angkatan Laut, dan Planetarium. Semua mereka hadir pada waktu itu dan mereka membuat keputusan bersama yang hasilnya diserahkan ke pusat sebagai penentu akhir dalam penetapan awal bulan. Satu bulan sebelum Ramadhan dan satu bulan sebelum 1 Syawal Kanwil Kemenag Prov. Sumbar mengundang seluruh unsur ormas Islam dan pimpinan tarekat untuk rapat dan musyawarah bersama dalam menentukan awal bulan. Tetapi kemudian dalam pelaksanaannya, mereka pada umumnya tetap mengikuti ketetapan pimpinan ormas dan tokohnya masing-masing.

Selain itu BHR juga sudah mengadakan kajian bersama dengan mengundang seluruh pimpinan ormas Islam, tokoh-tokoh tarekat, para ahli dan berbagai pemerhati pada tahun 2010. Topik kajian adalah mengenai "Hisab dan Rukyat" yang dibahas dari berbagai aspek keilmuan; fikih, tafsir dan IPTEK.

Dalam forum ilmiah semacam itu tidak ada respon yang berarti dari berbagai ormas dan kaum tarekat yang berbeda dalam menentukan awal bulan. Pada umumnya mereka lebih banyak menjadi *mustami'* (pendengar) saja. Acara yang semacam itu menurut Drs. H. Marzuki, MM selaku Kabid Urais adalah dalam upaya melakukan pendekatan dan sekaligus pencerahan kepada berbagai pihak.

Selain dari upaya yang dilakukan pemerintah daerah bekerjasama dengan Kanwil Kemenag Prov. Sumbar untuk mengajak Perkumpulan Tarekat-tarekat Muktabarah di Sumatera Barat untuk menyatukan pandangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Idul Fitri dalam berbagai forum. Pertemuan-pertemuan tersebut menekankan kepada seluruh warga tarekat agar dalam pelaksanaan ibadah Ramadhan dan Shalat Idul Fitri (khususnya) wajib mengikuti ketetapan pemerintah.

Menurut Prof. Dr. H. Salmadanis, MA pendekatan kepada kelompok-kelompok tarekat tidak dapat dilakukan melalui pendekatan akademis tetapi melalui pendekatan emosional dan kekuasaan, karena pada umumnya mereka tidak memiliki referensi-referensi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Fanatisme kepada guru dan para pendahulunya lebih dominan dibandingkan untuk belajar (menuntut ilmu). Pendekatan dari hati ke hati dan dilakukan berulang-ulang diharapkan membawa hasil. Bila pendekatan semacam itu belum/tidak juga membawa hasil, baru kemudian dilakukan dengan pendekatan kekuasaan. Beliau mengibaratkan seperti Rasul. Rasul itu adalah orang yang berwenang memberi kata putus bila timbul masalah dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah (*ulil amri*) adalah pemegang amanah Rasulullah yang juga harus diberi kewenangan untuk memberi kata putus.

Selanjutnya, para tokoh masyarakat dan tokoh agama juga memberikan kontribusi dalam menyatukan 1 Syawal. Misalnya yang dilakukan oleh Drs. H. Abdurrahman, MA (salah seorang tokoh Tarbiyah Kota Padang dan Dekan Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol Padang). Beliau melakukan pendekatan **emosional** dan pencerahan kepada masyarakat setempat. Beliau tinggal di komplek perumahan Nagari Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang. Di tempat tersebut terdapat dua buah masjid, satu di komplek perumahan dimana beliau tinggal dan satu lagi di luar komplek dimana masyarakat lainnya bertempat tinggal. Pada Idul Fitri 1432 h yang lalu, hampir seluruh warga, baik yang tinggal di komplek maupun yang tinggal di luar komplek melaksanakan Shalat Idul Fitri mengikuti ketetapan pemerintah. Termasuk H. Abdurrahman sebagai salah seorang tokoh di tempat beliau tinggal.

Menurut H. Abdurrahman, semula warga masjid yang di luar komplek telah mengumumkan kepada warganya bahwa Shalat pada hari Selasa (sama dengan Muhammadiyah). Kemudian setelah terjadi dialog dengan H. Abdurrahman, akhirnya pengumuman tersebut diralat dan akhirnya hampir seluruh warga di Nagari Gunung Sarik Kecamatan Kuranji melaksanakan Shalat Idul Fitri 1432 H mengikuti ketetapan pemerintah.

## Penutup

Kesulitan dalam menyatukan perbedaan dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan 1 Syawal (khususnya) selama ini peneliti menyimpulkan bahwa munculnya perbedaan tersebut adalah "*ego*" dan "*fanatik guru*". Kata "*ego*" mereka tujukan kepada Muhammadiyah dan NU, sedangkan kata "*fanatik guru*" mereka tujukan kepada kaum tarekat. Bila kedua kata kunci tersebut

dapat dihilangkan di kalangan tokoh dan pimpinan ormas dan kaum tarekat dengan mengedepankan kebersamaan yang dilandasi rasa keberagaman yang tinggi, mereka menjamin umat akan dapat bersatu khususnya dalam menentukan awal bulan.

Rasulullah hanya meninggalkan pesan singkat dalam menentukan awal bulan, lalu umat membuat kaedah berdasarkan pesan Rasulullah saw. Artinya bahwa kaedah (sistem) dalam menentukan awal bulan adalah buatan manusia. Apa sulitnya membuat kaedah baru yang dapat disepakati bersama dengan mengedepankan kepentingan persatuan umat dan menjauhkan rasa ego dan fanatik hanya karena kepentingan kelompok dan diri sendiri.

Solusi dan saran-saran dari studi ini diantaranya: a) Melalui edukasi (pendidikan), ilmu hisab dan rukyat jangan lagi dijadikan sebagai bidang ilmu yang eksklusif. Perlu di kembangkan ilmu menjadi pengetahuan orang banyak. Selama ini ilmu tersebut hanya diketahui oleh kalangan tertentu. Dengan demikian umat akan tercerahkan dan mereka tidak lagi akan fanatik buta kepada pimpinan ormas atau ulama tertentu. Badan Hisab dan Rukyat (BHR) diefektifkan dalam mensosialisasikan hasilnya kepada masyarakat; b) Melalui institusi, mengaktifkan kembali wadah komunikasi yang ada selama ini pada MUI dengan ormas-ormas keagamaan. Dengan membangun komunikasi yang baik antar

ormas-ormas keagamaan akan melahirkan suasana kehidupan yang lebih baik pula dalam masyarakat. Perlu di lakukan pendekatan dengan berulang-ulang, baik pendekatan emosional maupun melalui musyawarah/dialog untuk menemukan titik temu (kesamaan pandangan) antara ormas-ormas yang berbeda. Pendekatan melalui musyawarah/dialog tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadis serta ditopang dengan ilmu dan teknologi yang berkembang dengan kesadaran keberagaman yang tinggi untuk merumuskan sistem atau kaedah baru yang digunakan dalam menentukan awal bulan berdasarkan Hisab dan Rukyah; c) Dalam penentuan, seluruh ormas harus mempercayakan kepada pemerintah dalam memberikan kata putus dalam menentukan awal bulan baik Ramadhan maupun 1 Syawal; d) Pemerintah tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas dalam mengatur ormas-ormas keagamaan. Dengan sikap yang semacam itu kewibawaan pemerintah sebagai "*ulil amri*" di mata umat akan tampak dengan sendirinya; d) Dalam menetapkan awal bulan khususnya 1 Syawal, ditetapkan lintas instansi dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri atau Kementarian Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Agama sebagai koordinatornya; e) Para ulama dan mubaligh harus memperlihatkan keteladanan kepada umat, kekokohan dalam prinsip, dan berdiri di atas segala umat. Jangan mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.

### Daftar Pustaka

- Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama RI (*Studi tentang Efektifitas Keputusan Menteri Agama dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal*) oleh Syaflin
- Lajnah Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2006, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, Lajnah Falakiah PBNU, Jakarta

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Jakarta

Yusuf, Choirul Fuad dan Hakim A Bashori, (Ed), 2004, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, Puslitbang Kehidupan beragama, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta.

# Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Honorar di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

**M Taufik Hidayatullah**

Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor  
Komplek PEMDA Jl. Bersih No 7 Cibinong Kabupaten Bogor  
Email: taufikmtht@yahoo.co.id.

## Abstract

*This article focuses on explanation about the competency of The Volunteer Religious Educator. The research was conducted in November-Desember 2011 in Cibinong Subdistrict, Bogor Regency. The population were 27 Volunteer Religious Educator and 149 majelis taklim member under their guidance. Sampling process was by census procedure sampling for the Volunteer Religious Educator and by random sampling for majelis taklim member. Data collection techniques were questionnaire, observation, in-depth interview, and documentary study. The statistical analysis used was descriptive and Tau-b Kendall correlation. The findings indicated that Volunteer Religious Educator had a high level in communication competency and several factors influenced their job motivation and communication competency.*

**Key words:** *Volunteer Religion Educator, job motivation, competency.*

## Pendahuluan

Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa tidak cukup hanya dengan dipelajari di sekolah saja, tetapi juga perlu disambung dengan pendidikan di masyarakat. Bahkan pendidikan agama pada masyarakat bisa menjadi faktor penentu terlaksananya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan

## Abstrak

*Artikel ini fokus pada penjelasan mengenai kompetensi komunikasi para penyuluh agama honorar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Desember 2011 di Kecamatan Cibinong, kabupaten Bogor. Terdapat 27 penyuluh agama honorar dan 149 anggota majelis ta'lim dalam bimbingan mereka. Proses sampling yang digunakan yaitu census procedure sampling untuk para penyuluh agama honorar dan random sampling untuk anggota majelis ta'lim. Metode pengoleksian data yaitu questionnaire, observasi, wawancara kepribadian, dan pembelajaran sosial sehari-hari. Analisa Statistik yang digunakan adalah deskriptif dan korelasi Kendal Tau-b. Penelitian ini mengindikasikan bahwa para penyuluh agama honorar tersebut memiliki kompetensi tinggi dalam berkomunikasi dan beberapa faktor mempengaruhi motivasi pekerjaan dan kemampuan komunikasi mereka.*

**Kata kunci:** *penyuluh agama honorar, motivasi pekerjaan, kompetensi.*

sehari-hari (Romly 2003). Di mana pendidikan agama berkisar antara dua dimensi hidup: penanaman rasa taqwa kepada Allah dan pengembangan rasa kemanusiaan kepada sesama (Madjid 2010). Di sinilah peran penyuluhan agama mendapatkan momentumnya dengan adanya tantangan-tantangan baru dari hasil perkembangan masyarakat yang dinamis.

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat, maka saat ini penyuluhan agama dihadapkan pada beberapa tantangan seperti; proses globalisasi, gelombang demokratisasi, tuntutan penghormatan hak azasi manusia, perusakan lingkungan hidup, tuntutan penegakan supremasi hukum, goyahnya benteng rohaniah umat, penyalahgunaan NAPZA dan penularan penyakit berbahaya (Romly, 2003). Masalah lainnya yang bersentuhan dengan bimbingan masyarakat adalah masalah aliran sesat dan radikalisme (Umar, 2008).

Penyuluh agama akan berperan besar dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, mengingat fungsi strategisnya di bidang pembangunan keagamaan. Oleh sebab itu tugas dan tanggung jawab mereka di lapangan perlu ditunjang oleh kompetensi yang kuat untuk dapat mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat terhadap TuhanNya dan mengamalkan ajaran agama dalam berbakti kepada nusa dan bangsa melalui peningkatan partisipasinya dalam menyukseskan pembangunan. Tanpa kompetensi yang kuat maka tujuan penyuluhan agama terutama dalam; a) Membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dan b) Menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan bahasa agama serta meningkatkan kerukunan hidup beragama.

Kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer di tengah masyarakat Kecamatan Cibinong yang heterogen dan kosmopolit terlihat masih belum maksimal dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari jamaah, karena dalam penyuluhan agama yang menjadi materi dominan penyuluhan hanya berkisar pada pemahaman fiqh dan cara membaca Al-Qur'an. Berdasarkan hal itulah diperlukan suatu kajian hubungan berbagai faktor terhadap kompetensi

komunikasi penyuluh agama. Penelitian ini memiliki fokus untuk melihat hubungan faktor personal, dukungan lingkungan sosial dan motivasi kerja dengan kompetensi penyuluh agama honorer. Kompetensi penyuluh agama honorer yang akan dilihat hanya pada kompetensi komunikasi saja, dengan wilayah penelitian hanya di wilayah Kecamatan Cibinong.

### **Permasalahan Penelitian**

Rumusan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut: a) Bagaimana karakteristik pribadi, dukungan lingkungan sosial, motivasi kerja dan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer? b) Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan motivasi kerja penyuluh agama honorer? c) Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: a) Mendeskripsikan karakteristik pribadi, dukungan lingkungan sosial, motivasi kerja dan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer; b) Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi kerja penyuluh agama honorer; c) Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer ?

### **Kerangka Berpikir**

Semakin banyaknya minat masyarakat untuk memperdalam ajaran agama, maka semakin diperlukan peran penyuluh agama. Adanya sejumlah penyuluh agama fungsional tentunya tidak sebanding dengan banyaknya

tugas di lapangan. Oleh sebab itu bantuan dari penyuluh agama honorer mutlak sangat diperlukan. Semakin kritis dan interaktifnya masyarakat dalam mengikuti penyuluhan agama menyebabkan penyuluh agama honorer harus memiliki kompetensi komunikasi. Penelitian dari berbagai pakar tentang kompetensi yang perlu dimiliki seorang penyuluh salah satunya kompetensi komunikasi (Maddy, *et. al.* 2002; Culp, *et. al.* 2007; Cooper dan Graham 2001; Stone dan Coppennoll 2004; Marius, *dkk.* 2007; dan Winaryanto, *dkk.* 2011), hal inilah kemudian yang mendasari penelitian ini.

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer adalah kemampuan atau kecakapan bertindak yang dimiliki penyuluh agama honorer untuk menyampaikan pesan keagamaan melalui interaksi yang afektif dan sesuai demi mencapai tujuan jamaah majelis taklim.

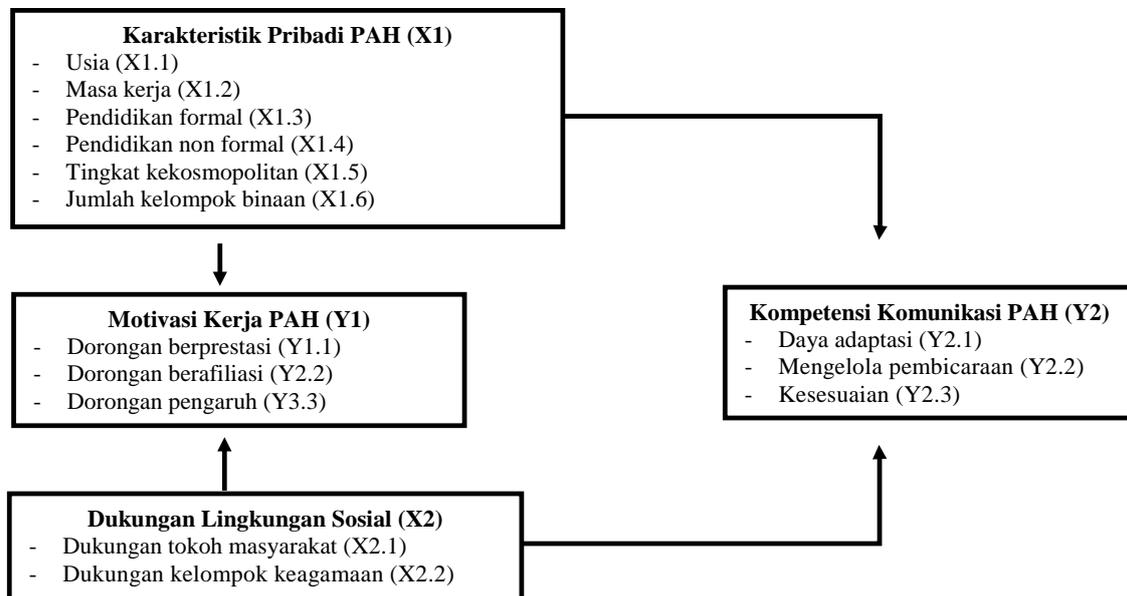
Sebagai fasilitator dan pembimbing proses belajar, penyuluh agama honorer bertugas untuk memberikan bantuan kepada jamaah majelis taklim dalam mengatasi masalah pemahaman ajaran keagamaan. Dengan perantaraan motivasi penyuluh agama honorer ini, diharapkan dapat mendorong kemauannya untuk terus menerus mengasah diri agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal tersebut sejalan dengan beberapa penelitian (Murfiyani dan Jahi 2006; Marius, *et. al.* 2007; Nuryanto 2008; Anwas 2009 dan Mustaqiem) 2010) menyebutkan bahwa motivasi berhubungan nyata positif dengan kompetensi.

Selain terkait dengan motivasi penyuluh agama honorer, maka kompetensi komunikasi juga terkait dengan dukungan lingkungan sebagaimana hasil beberapa penelitian. (Murfiyani dan Jahi 2006; Marius, *dkk.* 2007; Bartin 2010). Dengan dukungan lingkungan, maka kesiapan penyuluh agama honorer akan lebih baik dalam menjalankan tugasnya. Karakter individu adalah faktor personal yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan dan lingkungan seperti; umur, pendidikan dan karakteristik psikologis (Lionberger diacu dalam Bahua 2010). Penyuluh agama honorer sebagai salah satu agen pembangunan tentunya juga memiliki karakteristik pribadi yang menjadi ciri khasnya. Karakteristik ini merupakan ciri yang melekat pada diri seseorang. Sebagaimana halnya juga dikemukakan Kartono (1985) bahwa kualitas-kualitas dan nilai-nilai seorang konselor sangat menentukan apa yang terjadi di dalam konseling. Tentunya juga termasuk dalam hal kompetensi yang melatarbelakangi kinerja konselinya.

Dalam rangka meneliti kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor inilah, beberapa variabel dilihat pengaruhnya, yaitu; karakteristik pribadi penyuluh agama honorer yang terdiri dari—usia, pengalaman, pendidikan formal, pendidikan non formal, tingkat kekosmopolitan dan jumlah kelompok binaan. Variabel yang lain berupa dukungan lingkungan sosial dan motivasi kerja penyuluh agama honorer. Kerangka pikir penelitian sebagaimana skema berikut.

Gambar 1.

### Kerangka Pikir Hubungan Berbagai Faktor dengan Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Honorer di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor



#### Hipotesis Penelitian

Penelitian ini hendak menguji hubungan antar peubah, hipotesis yang dikemukakan diantaranya: a) Tidak adanya perbedaan nyata antara persepsi penyuluh agama honorer dengan persepsi jamaah majelis taklim tentang kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer; b) Karakteristik pribadi penyuluh agama honorer berhubungan nyata pada motivasi kerja penyuluh agama honorer; c) Karakteristik pribadi penyuluh agama honorer berhubungan nyata pada kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer; d) Dukungan lingkungan sosial penyuluhan agama berhubungan nyata pada motivasi kerja penyuluh agama honorer; e) Dukungan lingkungan sosial penyuluhan agama berhubungan nyata pada kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer; f) Motivasi kerja penyuluh agama honorer berhubungan nyata pada kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer.

#### Metode Penelitian

Penelitian ini berlangsung pada bulan November sampai Desember 2011 di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Populasi penelitian ini adalah Penyuluh agama honorer dan jamaah majelis taklim yang ada di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Responden primer yang berasal dari Penyuluh Agama Honorer sejumlah 27 orang dan responden sekunder yang berasal dari jamaah majelis taklim berjumlah 149 orang.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu analisis statistik deskriptif, dan analisis statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum sebaran data setiap variabel penelitian yang diperoleh. Sementara itu, analisis statistik inferensial digunakan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat sekaligus untuk menguji hipotesis penelitian. Untuk menguji berbagai variabel dalam penelitian, maka penulis

akan menganalisis dengan menggunakan *Korelasi Tau-b Kendall* (Agresti dan Barbara Finlay 1986). Alat analisis ini dipilih disebabkan Tau-b Kendall bersifat lebih umum dan dapat dihitung seperti sebaran normal (Siegel 1985).

**Karakteristik Pribadi Penyuluh Agama Honorer**

Hampir separuh dari penyuluh agama honorer di Kecamatan Cibinong berusia muda. Tentang kategori usia, Bakir dan Maning (1984) menyatakan bahwa usia produktif untuk bekerja di negara-negara berkembang berada pada kisaran usia antara 14 hingga 55 tahun. Dilihat dari sisi usia mereka berada pada usia yang sangat produktif dan penuh idealisme dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini merupakan aset sumber daya manusia yang potensial untuk dikembangkan, mengingat penyuluhan agama memerlukan terobosan baru dalam meraih tujuannya. Adapun masa kerjanya sebagai penyuluh agama honorer juga

masih terbilang rendah berkisar di bawah 10 tahun masa kerja (lihat tabel 1).

Sebagai akibat hal tersebut, berdampak menghambat peningkatan efektifitas penyuluhan agama yang dilakukan karena dapat berimplikasi pada kurangnya respon penghargaan dari jamaah majelis talim sebagai peserta penyuluhannya.

Berdasarkan data, lebih dari setengah penyuluh agama honorer berpendidikan di bawah harapan sebagai orang yang dianggap lebih berpengetahuan dibandingkan dengan peserta penyuluhan, yaitu berpendidikan di bawah SMA (sekitar 63 %). Namun demikian rata-rata mereka telah mengenyam pendidikan di pesantren sebagai penyeimbang persyaratan pengetahuan yang diperlukan sebagai seorang penyuluh agama honorer. Rendahnya pendidikan formal dapat berimplikasi pada keterbatasan wawasan dan daya analisa yang diperlukan untuk memecahkan masalah keseharian yang dihadapi peserta penyuluhan.

Tabel 1. Karakteristik Pribadi Penyuluh Agama Honorer

No	Variabel	Kategori	Rentang skor	Jumlah	%
1	Usia (X1.1) (Jumlah tahun)	Muda	25-40	13	48
		Sedang	41-55	8	30
		Tua	56-70	6	22
		Jumlah		27	100
2	Masa kerja (X1.2) (Jumlah tahun menjadi PAH)	Rendah	≤ 10	16	59
		Sedang	11-20	5	19
		Tinggi	≥ 21	6	22
		Jumlah		27	100
3	Pendidikan formal (X1.3) (Jumlah tahun tempuh)	Dasar	≤ 06	3	11
		Menengah	07-12	14	52
		Tinggi	≥ 13	10	37
		Jumlah		27	100
4	Pendidikan non formal (X1.4) (Jumlah frekwensi mengikuti)	Rendah	≤ 05	19	70
		Sedang	06-10	6	22
		Tinggi	≥ 11	2	8
		Jumlah		27	100
5	Tingkat kekosmopolitan (X1.5) (Jumlah skor)	Rendah	≤ 07	9	33
		Sedang	08-14	16	59
		Tinggi	≥ 15	2	8
		Jumlah		27	100
6	Jumlah kelompok binaan (X1.6) (Jumlah kelompok)	Rendah	01-02	5	19
		Sedang	03-04	13	48
		Tinggi	05-06	9	33
		Jumlah		27	100

Bila dilihat dari pendidikan non formal penyuluh agama honorer, mayoritas responden dalam dua tahun terakhir sangat jarang mengikuti pendidikan non formal. Hal ini semata-mata disebabkan selama ini hampir tidak ada pendidikan non formal yang berkaitan dengan penyuluhan agama bagi penyuluh agama honorer. Selama ini mengindikasikan bahwa pihak terkait belum memberi perhatian pada pentingnya meningkatkan kemampuan penyuluh agama honorer dalam melaksanakan tugasnya.

Dari sisi tingkat kekosmopolitan, sepertiga responden cenderung lokalit dibandingkan dengan kosmopolit yang jauh lebih kecil jumlahnya. Kelokalitas responden disebabkan oleh interaksi responden masih belum bisa jauh meninggalkan wilayah kecamatan, selain juga disebabkan mereka kebanyakan berbasis di pesantren sehingga biasanya pihak yang berkepentinganlah yang mendatangi, bukan sebaliknya. Selanjutnya lebih dari separuh responden membina paling banyak 4 kelompok binaan. Dengan demikian, bisa dikatakan

bahwa kegiatan ini masih dianggap layak, karena masih dapat terfokuskan dalam membina keberagaman peserta penyuluhan baik di majelis taklim maupun di lembaga pengajian. Idealnya, jumlah kelompok binaan tersebut dapat berimpikasi pada peningkatan perencanaan penyuluhan sehingga akan menghasilkan penyuluhan agama yang berkualitas.

### Dukungan Lingkungan Sosial

Dilihat dari tabel 2, dukungan lingkungan sosial terhadap kegiatan penyuluhan agama dapat dikategori tinggi. Adapun dukungan yang didapatkan berasal dari tokoh masyarakat dan kelompok keagamaan. Sebagian besar tokoh masyarakat misalnya mendukung kegiatan penyuluhan agama dalam bentuk moril, ide, gagasan, tenaga maupun bantuan material (dana). Tingginya bentuk dukungan disebabkan, kebanyakan tokoh masyarakat setempat juga sekaligus merupakan aktivis keagamaan sehingga dukungan yang diberikan sangatlah wajar.

Tabel 2. Dukungan Lingkungan Sosial Penyuluhan Agama

No	Variabel	Kategori	Rentang skor	Jumlah	%
1	Dukungan tokoh masyarakat (X2.1) (Jumlah skor) Jumlah	Rendah	01-07	2	8
		Sedang	08-13	8	30
		Tinggi	14-20	17	62
				27	100
2	Dukungan kelompok Keagamaan (X2.2) (Jumlah skor) Jumlah	Rendah	01-07	2	8
		Sedang	08-13	8	30
		Tinggi	14-20	17	62
				27	100
3	Dukungan lingkungan Sosial (X2) (Jumlah skor) Jumlah	Rendah	01-14	1	4
		Sedang	15-26	10	37
		Tinggi	27-40	16	59
				27	100

Sedangkan sebagian besar kelompok keagamaan dalam hal ini kelompok pengajian memberikan dukungan lewat kehadiran dalam kegiatan penyuluhan. Berkumpulnya

berbagai kelompok pengajian biasanya dilakukan pada saat perayaan hari besar Islam di mana mereka diundang secara resmi kepada kelompok. Adapun secara keseharian, kehadiran kelompok

keagamaan diwakili secara langsung atau tidak dengan kehadiran para anggota kelompok keagamaan yang berafiliasi dengan banyak kelompok keagamaan lainnya.

### Motivasi Kerja Penyuluh Agama Honoror

Motivasi penyuluh agama honorer, secara umum berada pada kategori tinggi (lihat tabel 3), baik pada motivasi kerja total maupun motivasi parsialnya.

Tabel 3. Motivasi Kerja Penyuluh Agama Honoror

No	Variabel	Kategori	Rentang skor	Jumlah	%
1	Dorongan berprestasi (Y1.1) (Jumlah skor)	Rendah	01-07	0	0
		Sedang	08-13	13	48
		Tinggi	14-20	14	52
	Jumlah			27	100
2	Dorongan berafiliasi (Y1.2) (Jumlah skor)	Rendah	01-07	1	4
		Sedang	08-13	6	22
		Tinggi	14-20	20	74
	Jumlah			27	100
3	Dorongan pengaruh (Y1.3) (Jumlah skor)	Rendah	01-07	1	4
		Sedang	08-13	11	41
		Tinggi	14-20	15	55
	Jumlah			27	100
4	Motivasi kerja (Y1) (Jumlah skor)	Rendah	01-20	0	0
		Sedang	21-40	10	37
		Tinggi	41-60	17	63
	Jumlah			27	100

Tingginya motivasi responden tersebut berasal dari adanya keyakinan yang tinggi, terhadap tugas memberikan penyuluhan agama yang dilandasi oleh amal ibadah dan amar makruf nahi munkar yang merupakan kewajiban setiap muslim.

### Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Honoror

Dilihat dari kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer, terdapat dua penilaian, yaitu berasal dari persepsi penyuluh agama honorer itu sendiri dan yang berasal dari persepsi

jamaah Majelis Taklim. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditemukan bahwa pada semua aspek penilaian, persepsi jamaah dalam menilai kompetensi penyuluh agama honorer selalu lebih tinggi dari penyuluh agama honorer itu sendiri (tabel 4). Hal tersebut tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa hal: a) penyuluh agama honorer rata-rata guru dari majelis taklim; b) kompetensi penyuluh agama honorer dalam hal komunikasi yang dirasakan oleh jamaah memang merupakan penilaian apa adanya, karena rata-rata penyuluh agama honorer memiliki kelebihan dalam hal komunikasi.

Tabel 4. Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Honorer

No	Variabel	Kategori	Rentang skor	Persepsi PAH/% (n=27)	Persepsi Jamaah/% (n=149)
1	Daya adaptasi (Y2.1) (Jumlah skor)	Rendah	01-05	0	0
		Sedang	06-10	48	25
		Tinggi	11-15	52	75
	Jumlah			100	100
2	Mengelola pembicaraan (Y2.2) (Jumlah skor)	Rendah	01-05	4	1
		Sedang	06-10	33	21
		Tinggi	11-15	63	78
	Jumlah			100	100
3	Kesesuaian (Y2.3) (Jumlah skor)	Rendah	01-05	0	1
		Sedang	06-10	37	33
		Tinggi	11-15	63	66
	Jumlah			100	100
4	Kompetensi komunikasi (Y2) (Jumlah skor)	Rendah	01-15	0	0
		Sedang	16-30	33	18
		Tinggi	31-45	67	82
	Jumlah			100	100

Di samping itu, ada satu hal yang mengemuka bahwa kompetensi penyuluh agama menurut persepsi penyuluh agama honorer yang terlemah terletak pada kompetensi daya adaptasi. Berbeda dengan persepsi jamaah yang menilai bahwa kompetensi terlemah dari penyuluh agama honorer terletak pada kompetensi kesesuaian. Hal ini disebabkan oleh karena kebutuhan utama penyuluh agama honorer terletak pada upaya penyampaian, namun sebaliknya pada jamaah, kebutuhan mereka terletak pada kesesuaian materi penyuluhan yang disuluhkan oleh penyuluh agama honorer terhadap kebutuhan jamaah.

Hal lainnya yang bisa dianalisis dari tabel 4 adalah antara penyuluh agama honorer dengan jamaah majelis taklim secara relatif memiliki kesamaan pendapat tentang kompetensi kesesuaian komunikasi yang dimiliki oleh penyuluh agama honorer. Hasil uji u (uji beda Mann Witney) tentang rata-rata persepsi penyuluh agama honorer dan jamaah majelis taklim tentang kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer yang menunjukkan bahwa 95 % terdapat perbedaan antara median dua populasi dengan nilai terbesar atau sama dengan

0,0002 dan nilai terkecil atau sama dengan 0,0001. Dengan demikian, secara umum terdapat perbedaan persepsi tentang kompetensi komunikasi yang dimiliki oleh penyuluh agama honorer di Kecamatan Cibinong. Hal ini membuktikan bahwa layanan penyuluhan melalui kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer belum sesuai dengan kebutuhan jamaah majelis taklim sebagai peserta penyuluhan agama.

### Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Motivasi Kerja Penyuluh Agama Honorer

*Hubungan antara Karakteristik Pribadi dengan Motivasi Kerja Penyuluh Agama Honorer*

Hasil uji koefisien korelasi Tau-b Kendall menunjukkan bahwa sebagian besar variabel karakteristik pribadi penyuluh agama honorer yang meliputi variabel usia (X1.1), pengalaman sebagai penyuluh agama honorer (X1.2), pendidikan formal (X1.3), pendidikan non formal (X1.4), tingkat kekosmopolitan (X1.5) dan jumlah kelompok binaan (X1.6) tidak berhubungan nyata dengan variabel

motivasi kerja Penyuluh Agama Honorer (Y1). Hanya dua variabel, yaitu usia (X1.1) dan masa kerja (X1.2) yang berhubungan nyata positif dengan motivasi kerja penyuluh agama honorer (Y1). Adapun nilai korelasi semua variabel dapat dilihat pada tabel 5.

Hubungan secara nyata positif antara usia (X1.1) dengan motivasi kerja penyuluh agama honorer (Y1) disebabkan dengan umumnya mereka masih dalam usia produktif maka motivasi untuk berkarir di masyarakat cenderung semakin menguat. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Pakpahan, *dkk* (2006) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan nyata positif antara usia dengan motivasi kerja nelayan.

Dengan usia produktif ini, maka harapan penyuluh agama honorer untuk berkarir di masyarakat semakin tinggi. Hal ini dibuktikan bahwa dari berbagai jenis motivasi, ternyata hanya berkorelasi dengan motivasi dimensi dorongan berafiliasi (Y1.2) dan motivasi dimensi dorongan pengaruh (Y1.3). Kondisi ini bisa dipahami bahwa perilaku memperluas silaturahmi kepada

masyarakat luas diharapkan akan dapat memperkuat peran penyuluh agama honorer dalam bidang keagamaan selain juga dengan harapan untuk meluaskan pengaruh di masyarakat setempat.

Hubungan secara nyata positif juga terjadi antara masa kerja (X1.2) dengan motivasi kerja penyuluh agama honorer (Y1) terutama pada motivasi dimensi dorongan berprestasi (Y1.1) dan motivasi dimensi dorongan pengaruh (Y1.3). Terjadinya hubungan ini disebabkan bahwa meski masa kerja penyuluh agama honorer sebagian besar berada pada kategori baru. Namun kondisi tersebut diiringi dengan pembinaan yang lebih terarah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor beberapa tahun belakangan ini (meski masih jarang) melalui *workshop* atau sosialisasi isu bidang agama. Dengan demikian dorongan penyuluh agama honorer untuk meraih prestasi semakin meningkat. Hasil penelitian ini bersesuaian dengan hasil penelitian dari Pakpahan, *dkk* (2006) bahwa terdapat hubungan nyata positif antara pengalaman dengan motivasi kerja nelayan.

Tabel 5. Hubungan Karakteristik Pribadi Penyuluh Agama Honorer dengan Motivasi Kerja Penyuluh Agama Honorer

No	Variabel	Dorongan Berprestasi (Y1.1)	Dorongan Berafiliasi (Y1.2)	Dorongan Pengaruh (Y1.3)	Motivasi Kerja (Y1)
1	Usia (X1.1)	0,342 (0,066)	<b>0,426*</b> (0,020)	<b>0,515**</b> (0,015)	<b>0,496**</b> (0,008)
2	Masa kerja (X1.2)	<b>0,465*</b> (0,013)	0,173 (0,349)	<b>0,403*</b> (0,029)	0,363 (0,053)
3	Pendidikan formal (X1.3)	0,183 (0,332)	0,227 (0,221)	0,040 (0,831)	0,169 (0,372)
4	Pendidikan non formal (X1.4)	0,122 (0,525)	0,155 (0,410)	0,271 (0,149)	0,281 (0,141)
5	Tingkat kekosmopolitan (X1.5)	0,048 (0,802)	0,137 (0,467)	-0,026 (0,890)	0,165 (0,386)
6	Jumlah kelompok binaan (X1.6)	0,089 (0,635)	0,181 (0,324)	0,216 (0,239)	0,346 (0,063)

Sumber: Data diolah dari hasil survei (2011)

Keterangan:

\* Signifikan pada taraf kepercayaan 95 %

\*\* Signifikan pada taraf kepercayaan 99 %

Masa kerja tersebut juga berkaitan dengan dorongan menjadi orang berpengaruh di masyarakat. Makin tinggi masa kerja sebagai penyuluh agama honorer di masyarakat, prestise di tengah masyarakat juga akan naik dan semakin disegani. Hal inilah yang kemudian semakin mendorong penyuluh agama honorer untuk terus berkarya sebagai penyuluh agama honorer.

Kenyataan yang umum terjadi bahwa motivasi kerja penyuluh agama honorer (Y1) bervariasi. Artinya motivasi kerja penyuluh agama honorer lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti reward ataupun kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini dibuktikan dengan tidak berhubungannya secara nyata antara pendidikan formal (X1.3), pendidikan non formal (X1.4), tingkat kekosmopolitan (X1.5) dan jumlah kelompok binaan (X1.6) dengan motivasi kerja penyuluh agama honorer.

Keragaman motivasi ini bisa dimaklumi karena tumbuhnya berbagai motivasi seseorang pada umumnya berbarengan dengan pertumbuhan fisik, psikis dan intelektual. Perkembangan itu dipengaruhi pula oleh lingkungan serta medan komunikasinya (Mangunsuwignyo 2004). Juga penelitian Strong dan Harder (2010) ditemukan bahwa orang dewasa yang ikut program Master Gardeners ternyata dimotivasi oleh beberapa tujuan, yaitu; memperoleh keuntungan praktis, memuaskan dahaga pengetahuan, memuaskan rasa keingintahuan intelektual, dan memuaskan pengembaraan pikiran.

Pendidikan formal (X1.3) tidak berhubungan nyata dengan motivasi (Y1) karena sebagian besar pendidikan formal yang ditempuh penyuluh agama honorer sampai tingkat SMA. Dengan pendidikan formal seperti tersebut, penyuluh agama honorer kurang dapat menemukan

cara untuk meningkatkan efisiensi bekerja. Hal inilah yang menyebabkan motivasi penyuluh agama honorer tidak meningkat.

Pendidikan non formal (X1.4) tidak berhubungan nyata dengan motivasi kerja penyuluh agama honorer (Y1) karena beberapa hal, yaitu; pendidikan non formal penyuluh agama honorer sebagian besar dalam kategori rendah dan hal lainnya yang terjadi bahwa pendidikan non formal yang diikuti penyuluh agama honorer sebagian besar tidak berhubungan dengan kepenyuluhan sehingga ke dua hal tersebut yang menyebabkan motivasi penyuluh agama honorer tidak meningkat.

Tingkat kekosmopolitan (X1.5) tidak berhubungan nyata dengan motivasi kerja penyuluh agama honorer (Y1). Hal ini disebabkan karena tingkat kekosmopolitan penyuluh agama honorer dalam kategori sedang cenderung ke lokalit. Dengan kurang kosmopolitnya responden tersebut, maka kesediaan untuk menerima hal baru juga semakin terbatas selain berinteraksi dengan hal-hal baru juga semakin berkurang yang berdampak pada menurunnya tingkat motivasi penyuluh agama honorer.

Jumlah kelompok binaan (X1.6) tidak berhubungan nyata dengan motivasi kerja penyuluh agama honorer (Y1). Kondisi ini tidak terlepas dari kondisi sebagian besar penyuluh agama honorer mengelola antara satu sampai empat majelis taklim, yang sebenarnya sudah cukup ideal namun karena karakteristik majelis taklim yang dibina relatif sama menyebabkan tidak meningkatnya tantangan yang dihadapi penyuluh agama honorer, akibatnya motivasi penyuluh agama honorer tidak meningkat dengan baik.

### Hubungan antara Dukungan Lingkungan Sosial dengan Motivasi Kerja Penyuluh Agama Honorer

Hasil uji korelasi Tau-b Kendall sebagaimana tabel 6 menunjukkan bahwa dukungan lingkungan sosial (X2) secara nyata positif berhubungan dengan motivasi kerja penyuluh agama honorer (Y1). Hal ini terjadi pada semua jenis dukungan, baik dukungan dari tokoh masyarakat maupun dukungan

dari kelompok keagamaan. Sebagaimana terlihat, bahwa dukungan tokoh masyarakat (X2.1) berhubungan nyata positif dengan motivasi dimensi dorongan berafiliasi (Y1.2) dan motivasi kerja secara umum (Y1). Dukungan lingkungan sosial, terutama dukungan tokoh masyarakat yang tinggi merupakan faktor kunci yang begitu besar peranannya dalam mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan yang dilakukan penyuluh agama honorer.

Tabel 6. Hubungan Dukungan Lingkungan Sosial dengan Motivasi Kerja Penyuluh Agama Honorer

No	Variabel	Dorongan Berprestasi (Y1.1)	Dorongan Berafiliasi (Y1.2)	Dorongan Pengaruh (Y1.3)	Motivasi Kerja (Y1)
1	Dukungan tokoh masyarakat (X2.1)	0,163 (0,393)	<b>0,378*</b> (0,044)	0,281 (0,140)	<b>0,403*</b> (0,034)
2	Dukungan kelompok keagamaan (X2.2)	0,353 (0,064)	<b>0,427*</b> (0,023)	0,337 (0,077)	<b>0,461*</b> (0,016)
3	Dukungan lingkungan sosial (X2)	0,130 (0,499)	0,362 (0,057)	<b>0,405*</b> (0,036)	<b>0,392*</b> (0,042)

Sumber:  
Data diolah dari hasil survai (2011)

Keterangan:  
\* Signifikan pada taraf kepercayaan 95 %  
\*\* Signifikan pada taraf kepercayaan 99 %

Besarnya dukungan tokoh masyarakat tersebut, akan mendorong besarnya dukungan dari masyarakat secara umum untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, khususnya jamaah majelis taklim. Seperti dalam hal adopsi inovasi pada suatu komunitas, masyarakat akan lebih cepat menerima bila diadopsi oleh pemimpin lokal terlebih dahulu. (Valera, *et. al.* 1987). Hal inilah yang sangat mendukung bagi terbentuknya rasa percaya diri yang tinggi dan keyakinan yang besar penyuluh agama honorer untuk terus berafiliasi dan menjalin silaturahmi dengan seluruh lapisan masyarakat setempat dan menjalin kemitraan dengan organisasi keagamaan lokal.

Dukungan kelompok keagamaan (X2.2) juga berhubungan nyata positif dengan motivasi dimensi dorongan berafiliasi (Y1.2) dan motivasi kerja secara umum (Y1). Kelompok keagamaan yang sifatnya sangat fleksibel dalam melakukan aktivitasnya akan sangat selektif dalam menentukan akan berafiliasi pada majelis taklim mana saja dalam melakukan pengajian. Kehadiran kelompok keagamaan ini saja sudah merupakan suatu dukungan, apalagi bila ditambah dengan bentuk dukungan lainnya. Situasi akan semakin menambah keyakinan penyuluh agama honorer bahwa apa yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan peserta penyuluhan dari kelompok keagamaan. Indikator lain

yang mencerminkan besarnya dukungan kelompok keagamaan dalam kegiatan penyuluhan terlihat dari seberapa banyak kelompok keagamaan yang menjadi anggota suatu majelis taklim. Semakin banyak kelompok keagamaan dalam suatu majelis taklim tentunya akan semakin baik. Itulah sebabnya bahwa tingginya dukungan kelompok keagamaan ini akan mendorong penyuluh agama honorer untuk mempertahankan bahkan terus meningkatkan perannya di masyarakat dalam rangka menjaring kelompok keagamaan lainnya yang belum memberikan dukungan.

### **Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Honorer**

*Hubungan antara Karakteristik Pribadi dengan Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Honorer*

Sebagaimana terlihat pada tabel 7, dari enam variabel karakteristik pribadi penyuluh agama honorer, ternyata hanya tiga variabel, yaitu; usia (X1.1), masa kerja (X1.2) dan jumlah kelompok binaan (X1.6) yang berhubungan nyata positif dengan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer (Y2).

Usia (X1.1) berhubungan secara nyata positif dengan kompetensi komunikasi secara umum (Y2). Adapun kompetensi komunikasi yang berkontribusi terhadap adanya hubungan merupakan kompetensi komunikasi dimensi mengelola pembicaraan (Y2.2). Dengan semakin tingginya usia penyuluh agama honorer yang ditopang dengan cukupnya baiknya pendidikan formal mereka, menjadikan penyuluh agama honorer semakin memiliki wawasan keagamaan dan wawasan kemasyarakatan yang mencukupi untuk selalu mengembangkan diri menjadi lebih baik. Penyuluh agama honorer juga makin matang dalam mengembangkan

kemampuan retorika. Itulah sebabnya usia (X1.1) berhubungan secara nyata positif dengan kompetensi mengelola pembicaraan (Y2.2) dan kompetensi komunikasi secara umum (Y2).

Adapun masa kerja (X1.2) secara nyata positif berhubungan dengan kompetensi komunikasi dimensi daya adaptasi (Y2.1) dan kompetensi komunikasi dimensi kesesuaian (Y2.3). Namun tidak cukup kuat untuk menyatakan berhubungan secara nyata positif dengan kompetensi komunikasi secara umum (Y2). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi masa kerja penyuluh agama honorer, maka semakin tinggi sub variabel kompetensinya, yaitu kompetensi komunikasi dimensi daya adaptasi dan kompetensi komunikasi dimensi kesesuaian. Adanya masa kerja yang tinggi dari para penyuluh agama honorer pada dasarnya akan semakin memperkaya cara penyuluh agama honorer dalam menghadapi kejenuhan peserta penyuluhan agama dan juga melakukan komunikasi dialogis dalam rangka beradaptasi dengan situasi dan kondisi jamaah sebagai peserta penyuluhan. Melalui masa kerja yang semakin tinggi pula lah, penyuluh agama honorer semakin dapat merasakan kebutuhan jamaah sebagai peserta penyuluhan dan menyesuaikan jenis informasi, banyaknya materi dan solusi yang ditawarkan kepada penyuluh agama honorer. Hal ini bersesuaian dengan kondisi peserta penyuluhan di tempat lain dalam konteks pertanian bahwa salah satu jenis informasi yang diharapkan petani adalah informasi yang relevan dengan usahataniannya (Hakim dan Sugihen 2009).

Hasil penelitian tersebut sejalan pula dengan beberapa penelitian tentang penyuluhan pertanian yang menyatakan bahwa pengalaman penyuluh ternyata pengaruhnya secara nyata positif terhadap kompetensi penyuluh pertanian (Ridwan

dan Jahi 2005; Murfiani dan Jahi 2006; Huda 2010). Penelitian Marius, *et. al.* (2007) juga menemukan bahwa pengalaman berpengaruh nyata positif terhadap kompetensi penyuluh petanian di Nusa Tenggara Timur sebelum masa otonomi daerah. Penelitian Sudirah (2009) tentang kompetensi tutor Universitas Terbuka menemukan sangat berhubungan nyata positif dengan pengalaman kerja.

Jumlah kelompok binaan (X1.6) berhubungan nyata positif hanya dengan kompetensi komunikasi dimensi kesesuaian (Y2.3). Hal ini menandakan bahwa semakin besar jumlah kelompok

yang dibina penyuluh agama honorer, maka akan semakin tinggi kompetensi komunikasi bidang kesesuaian penyuluh agama honorer. Sebagaimana terlihat pada tabel 1 bahwa sebagian besar penyuluh agama honorer (67 %) membina antara 1 sampai dengan 4 majelis taklim. Hal ini bisa dikategorikan sebagai jumlah ideal dalam melakukan penyuluhan sehingga berdampak terhadap pada meningkatnya kompetensi penyuluh agama honorer. dampaknya adalah penyuluh agama honorer secara leluasa dapat fokus memberikan penyuluhan pada jamaah.

Tabel 7. Hubungan Karakteristik Pribadi Penyuluh Agama Honorer dengan Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Honorer

No	Variabel	Daya Adaptasi (Y2.1)	Mengelola Pembicaraan (Y2.2)	Kesesuaian (Y2.3)	Kompetensi Komunikasi (Y2)
1	Usia (X.1.1)	0,342 (0,066)	<b>0,493**</b> (0,007)	0,283 (0,128)	<b>0,435*</b> (0,019)
2	Masa kerja (X1.2)	<b>0,465*</b> (0,013)	0,260 (0,158)	<b>0,417*</b> (0,026)	0,252 (0,179)
3	Pendidikan formal (X1.3)	-0,305 (0,106)	1,000 (0,000)	-0,011 (0,955)	0,043 (0,819)
4	Pendidikan non formal (X1.4)	-0,023 (0,904)	1,000 (0,000)	-0,018 (0,925)	-0,067 (0,724)
5	Tingkat kekosmopolitan (X1.5)	0,351 (0,065)	0,177 (0,345)	0,066 (0,729)	0,107 (0,574)
6	Jumlah kelompok binaan (X1.6)	0,089 (0,635)	0,015 (0,935)	<b>0,367*</b> (0,049)	0,146 (0,434)

Sumber:

Data diolah dari hasil survei (2011)

Keterangan:

\* Signifikan pada taraf kepercayaan 95 %

\*\* Signifikan pada taraf kepercayaan 99 %

Selain itu karena kelompok binaan memiliki kebutuhan yang berbeda dan mengharapkan materi yang berbeda dari penyuluh agama honorer, menyebabkannya senantiasa disibukkan dengan upaya pemenuhan kebutuhan materi jamaah penyuluhan melalui peningkatan kompetensinya terutama dalam menyesuaikan jenis informasi, besarnya materi yang disampaikan dan solusi yang ditawarkan. Hal-hal sebagaimana telah disebutkan itulah

yang rupanya menyebabkan terjadinya hubungan yang nyata positif antara jumlah kelompok binaan (X1.6) dengan kompetensi komunikasi dimensi kesesuaian (Y2.3).

Keterhubungan antara karakteristik pribadi penyuluh agama honorer dengan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer menyisakan beberapa variabel yang tidak berhubungan. Seperti pendidikan

formal (X1.3) ternyata tidak berhubungan nyata dengan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer (Y2) karena sebagian besar pendidikan formal yang ditempuh penyuluh agama honorer sampai tingkat SMA sedangkan mereka yang berpendidikan tinggi rata-rata tidak berkaitan dengan penyuluhan agama (bukan jurusan dakwah) karena berkaitan dengan umum. Cenderung rendahnya pendidikan formal serta tidak adanya kaitan antara pendidikan formal dengan penambahan keterampilan menyuluh agama menyebabkan tidak meningkatnya kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer.

Pendidikan non formal (X1.4) tidak berhubungan nyata dengan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer (Y2) karena beberapa hal, yaitu; pendidikan non formal penyuluh agama honorer sebagian besar dalam kategori rendah dan pendidikan non formal yang diikuti penyuluh agama honorer sebagian besar tidak berkaitan dengan bidang kerja sebagai penyuluh, menyebabkan peningkatan keterampilan kepenyuluhan khususnya kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer tidak meningkat.

Tingkat kekosmopolitan (X1.5) tidak berhubungan nyata dengan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer (Y2). Terdapat dua hal penyebab tidak adanya hubungan tersebut, yaitu; tingkat kekosmopolitan penyuluh agama honorer cenderung rendah mengakibatkan keterampilan berbicara dan bernegosiasi dengan seluruh *stakeholders* di lingkungan Kecamatan Cibinong tidak meningkat.

### **Hubungan antara Dukungan Lingkungan Sosial dengan Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Honorer**

Sementara itu pada tabel 8 diperoleh informasi bahwa dukungan

lingkungan sosial secara umum (X2) maupun dukungan lingkungan sosial secara khusus atau parsial (X2.1 dan X2.2) tidak berhubungan nyata dengan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer (Y2). Berkaitan dengan dukungan tokoh masyarakat, ternyata terdapat beberapa kondisi: a) Dukungan tokoh masyarakat yang diwujudkan dengan kehadiran dalam penyuluhan terbatas hanya pada pengajian di tingkat desa dan kecamatan saja; b) Dukungan tokoh masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk bantuan material ternyata tidak terjadi pada seluruh kegiatan penyuluhan, namun terbatas hanya pada kegiatan penyuluhan di waktu-waktu tertentu yang bersamaan dengan perayaan hari besar Islam saja.

Ke dua hal tersebut yang berkaitan dengan kondisi dukungan tokoh masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan agama belum merupakan dukungan menyeluruh terhadap segenap kegiatan penyuluhan agama. Hal inilah sebenarnya yang menyebabkan tidak terjadinya hubungan nyata antara dukungan lingkungan sosial dari tokoh masyarakat (X2.1) dengan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer (Y2).

Sementara itu dilihat dari dukungan kelompok keagamaan maka kondisinya: a) Kelompok keagamaan (kelompok pengajian) pada dasarnya bersifat flaksibel sehingga tidak ada ikatan yang mengikat untuk mengekang anggota-anggotanya dalam melakukan kegiatan berhubungan dengan kelompok lain di luar kelompoknya. Dengan demikian anggota kelompok keagamaan dapat menghadiri banyak sekali kegiatan pengajian yang merupakan kegiatan penyuluhan agama yang dilaksanakan oleh penyuluh agama honorer. Namun sifat kehadiran anggota kelompok keagamaan tersebut rupanya tidaklah mencerminkan dukungan utuh kelompok

keagamaan karena bersifat pribadi; b) Dukungan kelompok keagamaan terhadap kegiatan penyuluhan yang diwujudkan melalui pemberian saran pada kegiatan penyuluhan lebih banyak ditekankan pada masalah logistik yang sebenarnya sangat jauh dari upaya peningkatan kompetensi penyuluh agama honorer; c) Dukungan kelompok keagamaan terhadap kegiatan

penyuluhan dalam hal menyediakan sarana dan prasarana ternyata hanya dilakukan oleh seorang atau beberapa anggota saja dari kelompok keagamaan terutama pada mereka sebagai pihak yang menjadi tuan rumah pengajian. Sehingga dukungan tidak dapat disebutkan sebagai dukungan kelompok karena kelompok keagamaan tidak menerapkan sistem inventaris propertis milik kelompok.

Tabel 8. Hubungan Dukungan Lingkungan Sosial dengan Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Honorer

No	Variabel	Daya Adaptasi (Y2.1)	Mengelola Pembicaraan (Y2.2)	Kesesuaian (Y2.3)	Kompetensi Komunikasi (Y2)
1	Dukungan tokoh masyarakat (X2.1)	-0,163 (0,393)	0,127 (0,497)	0,138 (0,462)	0,197 (0,302)
2	Dukungan kelompok keagamaan (X2.2)	0,109 (0,569)	0,279 (0,137)	0,138 (0,462)	0,056 (0,768)
3	Dukungan lingkungan sosial (X2)	-0,071 (0,714)	0,109 (0,565)	0,106 (0,576)	0,174 (0,366)

Sumber:

Data diolah dari hasil survai (2011)

Keterangan:

\* Signifikan pada taraf kepercayaan 95 %

\*\* Signifikan pada taraf kepercayaan 99 %

Beranjak dari ke tiga hal di atas tentang dukungan kelompok keagamaan, maka dapat dijelaskan lebih jauh bahwa dukungan yang diberikan kelompok keagamaan bukan secara kelompok dan saran yang diberikan juga tidak pada kompetensi yang harus diperbaiki oleh penyuluh agama honorer, melainkan kepada hal lain yang tidak berkaitan dengan kompetensi penyuluh agama honorer. Itulah sebabnya sampai tidak terjadi hubungan nyata antara dukungan lingkungan sosial dari kelompok keagamaan (X2.2) dengan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer (Y2).

### Hubungan antara Motivasi Kerja dengan Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Honorer

Tabel 9, menyajikan motivasi kerja penyuluh agama honorer (Y1) berhubungan nyata positif dengan motivasi kerja penyuluh agama honorer. Hubungan ini lebih dikontribusikan oleh kompetensi komunikasi dimensi pengelolaan bicara (Y2.2).

Hasil uji Tau-b Kendall menunjukkan bahwa motivasi kerja penyuluh agama honorer (Y1) berhubungan nyata positif pada taraf kepercayaan 95 % dengan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer

(Y2). Hal ini berarti semakin tinggi motivasi penyuluh agama honorer, maka akan semakin tinggi pula kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer.

Terjadinya hubungan nyata positif antara motivasi kerja penyuluh agama honorer (Y1) dengan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer (Y2) didukung oleh beberapa hal; a) Dorongan berafiliasi (Y1.2) dan dorongan pengaruh (Y1.3) yang berhubungan nyata positif dengan kompetensi komunikasi dimensi mengelola pembicaraan (Y2.2); b) Adanya motivasi yang tinggi pada penyuluh agama honorer yang disebabkan oleh dimilikinya pengetahuan agama yang dapat disuluhkan kepada jamaah majelis taklim. Hal tersebut sedikit banyaknya telah memberikan rasa percaya diri dan keyakinan yang kuat untuk meneruskan kegiatan penyuluhan. Paalanen dan Hypia (2008) menyebutkan bahwa berbagai pengetahuan adalah salah satu faktor motivasi yang menjadi pemicu bagi tindakan berbagi pengetahuan dengan konsumen; c) Melalui motivasi kerja penyuluh agama honorer maka diharapkan dapat membangkitkan kekuatan individu penyuluh untuk mengusahakan sebaik-baiknya segala potensi untuk diimplementasikan dalam

kegiatan penyuluhan sebagai bentuk beribadah. Hal ini sesuai pula dengan pendapat O'Connor dan Vallerand (2001) yang menyatakan bahwa motivasi beragama menimbulkan kekuatan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan beragama.

Ke tiga faktor tersebut secara langsung maupun tidak langsung rupanya telah menjadi sebab yang dapat mempengaruhi upaya penyuluh agama honorer dalam melakukan kegiatan penyuluhan agama.

Penyuluh agama honorer akan lebih fokus pada penggalakan silaturahmi sekaligus menambah pengaruh melalui berbagai pengetahuan agama di masyarakat yang secara jangka panjang mendukung terhadap fungsi tugasnya. Alasan ini sesuai dengan hasil analisis di mana dorongan berprestasi (Y1.1) ternyata tidak berhubungan nyata dengan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer (Y2), tetapi dorongan lainnya seperti dorongan berafiliasi (Y1.2) dan dorongan pengaruh (Y1.3) yang berhubungan nyata positif dengan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer (Y2).

Tabel 9. Hubungan Motivasi Kerja Penyuluh Agama Honorer dengan Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Honorer

No	Variabel	Daya Adaptasi (Y2.1)	Mengelola Pembicaraan (Y2.2)	Kesesuaian (Y2.3)	Kompetensi Komunikasi (Y2)
1	Dorongan berprestasi (Y1.1)	0,110 (0,575)	1,000 (0,000)	0,182 (0,354)	-0,052 (0,789)
2	Dorongan berafiliasi (Y1.2)	0,282 (0,144)	<b>0,470*</b> (0,013)	0,051 (0,793)	0,312 (0,106)
3	Dorongan pengaruh (Y1.3)	0,343 (0,075)	<b>0,449*</b> (0,018)	0,200 (0,300)	0,341 (0,077)
4	Motivasi kerja (Y1)	0,335 (0,087)	<b>0,527**</b> (0,006)	0,365 (0,063)	<b>0,434*</b> (0,027)

Sumber:

Data diolah dari hasil survei (2011)

Keterangan:

\* Signifikan pada taraf kepercayaan 95 %

\*\* Signifikan pada taraf kepercayaan 99 %

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian dari Murfiani dan Jahi (2006) Marius, *et. al.* 2007), Nuryanto (2008), Anwas (2009) yang menyebutkan bahwa motivasi berhubungan nyata positif dengan kompetensi penyuluh pertanian. Demikian juga penelitian lain yang menyebutkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kompetensi profesional guru (Mustaqim 2010). Motivasi berpengaruh nyata positif dengan kompetensi kewirausahaanpeternak sapi perah (Muatuf, *dkk* 2009). Dalam penelitian Fritz. *et. al.* (2003) di Arkansas tentang bentuk penghargaan dan motivasi pemimpin sukarela ternyata ditemukan bahwa motivasi yang menonjol dari pemimpin sukarela adalah kebutuhan berafiliasi kemudian diikuti oleh kebutuhan pencapaian dan kebutuhan kekuasaan. Hasil ini menggambarkan pentingnya jaringan kerja kemitraan dengan seluruh stakeholders penyuluhan di lapangan.

Namun hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian dari Vijayaragavan dan Singh (tt) yang menemukan bahwa motivasi kerja dan moral staf penyuluh dalam laporan terakhir sangat rendah di banyak negara. Alasannya karena struktur birokrasi dari administrasi penyuluhan, kurangnya reward dan insentif, kurangnya fasilitas dan promosi serta rendahnya penghargaan kepada mereka.

## Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan; a) Identitas responden hampir setengahnya berusia muda, masa kerja rendah, pendidikan formal sedang dan cenderung ke tinggi yang berlawanan dengan pendidikan non formal yang rendah; Tingkat kosmopolitan sedang

cenderung ke rendah dan jumlah kelompok binaan sedang; Dukungan lingkungan sosial, motivasi kerja dan kompetensi komunikasi masing-masing penyuluh agama honorer tinggi; b) Karakteristik pribadi yang berhubungan dengan motivasi kerja penyuluh agama honorer adalah usia dan masa kerja. Dukungan lingkungan sosial melalui dimensi dukungan tokoh masyarakat dan kelompok keagamaan berpengaruh secara nyata pada motivasi kerja penyuluh agama honorer; c) Karakteristik pribadi yang berhubungan dengan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer adalah; usia, masa kerja dan jumlah kelompok binaan. Semua faktor karakteristik pribadi tersebut berpengaruh nyata pada peningkatan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer. Motivasi kerja penyuluh agama honorer melalui dimensi dorongan berafiliasi dan dorongan pengaruh berpengaruh secara nyata pada kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer.

Dalam rangka peningkatan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer, peneliti merekomendasikan: a) Meningkatkan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer dengan memperhatikan kondisi yang berpengaruh pada usia, masa kerja dan jumlah kelompok binaan dari karakteristik pribadi dan motivasi penyuluh agama honorer; b) Perlu adanya strategi pengembangan penyuluhan agama yang lebih memperhatikan peran penyuluh agama honorer dengan meningkatkan anggaran penyuluhan dan perhatian yang lebih yang akan berdampak pada peningkatan kompetensi komunikasi penyuluh agama honorer; c) Perlu dilakukan penelitian sejenis, dengan melibatkan variabel lain yang belum diteliti sehingga akan diperoleh model penelitian yang lebih komprehensif.

### Daftar Pustaka

- Agresti, A dan Finlay, B. 1986. *Statistical Methods for The Social Sciences*. California: Dellen Pub.
- Anwas, EOM. 2009. Pemanfaatan Media dalam Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian: Kasus di Kabupaten Karawang dan Garut Provinsi Jawa Barat. [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Bakir, Z dan Maning. 1984. *Angkatan Kerja di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. 2009. *Panduan Tugas Penyuluh Agama Masyarakat dan Kumpulan Naskah Khutbah Jum'at, Idul Fitri dan Idul Adha, Membentuk Generasi Qur'ani*. Bandung: Bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Kanwil Provinsi Jawa Barat.
- Fritz, S, Karmazin, D, Barbuto Jr J and Burrow, S. 2003. "Urban dan Rural 4-H Adult Volunteer Leaders Preferred Forms of Recognition and Motivation". *Journal of Extension* June 2003 // Volume 42 // Number 3 // dalam <http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=aglecfacpub> [Diunduh Tanggal 4 November 2011].
- Hakim, L dan Sugihen, BS. 2009. "Keberdayaan Petani Sayuran dalam Mengakses Informasi Pertanian di Sulawesi Selatan". Prosiding Simposium PAPPI ISBN 978-602-98680-0-5 November 2009
- Huda, N. 2010. Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Lulusan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Terbuka. [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Intitut Pertanian Bogor.
- Mangunsuwignyo, WS. 2004. *Self Empowerment: Persepsi, Paradigma dan Motivasi Salesman*. Jakarta: Grasindo.
- Marius, JA, Sumardjo, Slamet, M dan Asngari, PS. 2007. "Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Penyuluh terhadap Kompetensi Penyuluh di Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Penyuluhan* ISSN: 1858-2664 September 2007, Vol. 3 No. 2.
- Mustaqim, M. 2010. *Pengaruh Motivasi, Latar Belakang Pendidikan dan kemampuan menggunakan Media terhadap Kompetensi Profesional Guru IPS Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah*. [tesis]. Surabaya: Program Pascasarjana, IAIN Sunan Ampel.
- Murfiani, F dan Jahi, A. 2006. "Kompetensi Penyuluh dalam Pengembangan Modal Agribisnis Kecil, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat". *Jurnal Penyuluhan* ISSN: 1858-2664 Desember 2006, Vol. 2, No. 4.
- Nuryanto, BG. 2008. Kompetensi Penyuluh dalam Pembangunan Pertanian di Provinsi Jawa Barat. [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Intitut Pertanian Bogor.
- O'Connor, BP and Vallerand, RJ. 2001. "Religious Motivation in The Elderly: A French Canadian Reflication andan Extension" *The Journal of Social Psychology* 130 (1) 53-59 dalam [http://www.psych.rochester.edu/SDT/documents/1990\\_OConnorVallerand\\_JSocPsy.pdf](http://www.psych.rochester.edu/SDT/documents/1990_OConnorVallerand_JSocPsy.pdf) [Diunduh Tanggal 4 November 2011]

- Pakpahan, HT, Lumintang, RWE dan Susanto, D. 2006. "Hubungan Motivasi Kerja dengan Perilaku Nelayan pada Usaha Perikanan Tangkap" *Jurnal Penyuluhan* ISSN: 1858-2664 Maret 2006, Vol. 2, No. 1.
- Paalanen, A and Hyypia, M. 2008. "Enhancing Employees' Innovation Activity Through Motivational Factors" dalam [http://my.haaga-helia.fi/~tk/Insightful\\_Encounters/Material/Text/Full%20Papers/4.Action/4.Action\\_Paalanen\\_Hyypia.pdf](http://my.haaga-helia.fi/~tk/Insightful_Encounters/Material/Text/Full%20Papers/4.Action/4.Action_Paalanen_Hyypia.pdf) [Diunduh Tanggal 4 November 2011].
- Romly, AM. 2003. *Penyuluhan Agama Menghadapi Tantangan Baru*. Jakarta: Bina Rena Pariwara
- Siegel, S. (Ptj. M. Sudrajat SW). 1985. *Statistika Non-parametrik*. Bandung: Armico
- Strong, R and Harder, A. 2010. "Motivational Orientations of Adults Participating in a Cooperative Extension Master Gardener Program". *Journal of Extension*, August 2010//Volume 48//Number 4//Research in Brief//4RIB2 [Diunduh Tanggal 5 November 2011].
- Umar, N. 2008. "Mempertajam Visi Bimas Islam". *Jurnal Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia* Vol. 1, No. 1
- Valera, JB, Martinez, VA, Plopino, RF [ed]. 1987. *An Introduction to Extension Delivery Systems*. Manila: Island Publishing House. Inc
- Vijayaragavan, K and Singh, YP. tt. "Managing Human Resources within Extension" *FAO Corporate Document Repository* dalam <http://www.fao.org/docrep/W5830E/w5830e0g.htm> [Diunduh Tanggal 4 November 2011]

## Survei Keberagamaan Pelajar SLTA (Paham Ke-Islaman Pelajar SMA dan MA dalam Kehidupan Sosial)

**Suprpto**

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  
Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta  
Email: taufikmtht@yahoo.co.id

### **Abstract**

*Within this last decade many people/institution/media launch the height of religious intolerance action in Indonesia. Religious intolerant attitude has also been growing among students, Wahid Institute released the results of their research finding that religious intolerance attitude of students increasingly flourished, reflected in 49.5% Of respondents rejected the worship house existence of other religion near their residences. Religious intolerant attitude among students is thought to have led to the movement of radicalism. It can be said that religious "piety" level of high school muslim students affected the intolerance attitude, if the religious piety of high school Muslim student became stronger, resulting in stronger of intolerant behaviour among muslim high school students. This study used a quantitative approach.*

*Keyword: tolerance, intolerance, social life, Islamic knowledge*

### **Abstrak**

*Dalam satu dekade terakhir ini banyak kalangan/lembaga/media melansir tingginya sikap intoleransi beragama di Indonesia. Perilaku intoleransi beragama juga telah tumbuh di kalangan pelajar, Wahid Institut merilis hasil temuan penelitiannya menyatakan bahwa sikap intoleran semakin tumbuh subur, tercermin dari 49,5% responden menolak keberadaan rumah ibadah agama lain di dekat tempat tinggalnya. Perilaku intoleransi beragama di kalangan pelajar diduga telah mengarah pada gerakan radikalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat "kesalehan" beragama di kalangan pelajar muslim SLTA berpengaruh terhadap perilaku intoleran. Ini berarti jika tingkat ketaatan beragama pelajar muslim SLTA semakin menguat, mengakibatkan makin menguatnya perilaku intoleran di kalangan pelajar muslim SLTA, demikian sebaliknya. Perilaku toleran di kalangan pelajar SLTA dapat didorong melalui peningkatan wawasan dan pemahaman Islam yang moderat, secara bersama-sama dengan upaya penciptaan suasana percaya terhadap kehidupan sosialnya.*

**Keyword:** toleran, intoleran, kehidupan sosial, keilmuan Islam

### **Latar Belakang**

Kuatnya pengaruh globalisasi, menuntut masyarakat Indonesia menyadari bahwa kehidupan masa depan semakin berat dan diperlukan adanya kemampuan adaptasi yang tinggi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memicu gejolak baru dan

perubahan sosial budaya yang cukup memprihatinkan, seperti munculnya kelompok fundamentalis maupun teroris di kalangan pelajar. Kelompok tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang mempunyai hubungan atau pengaruh terhadap keterlibatan pelajar dalam ajaran keagamaan. Faktor internal, berasal

dari diri pelajar sendiri yaitu antara lain minat beragama, sikap, motivasi pengendalian diri dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan faktor eksternal, adalah hal-hal yang berhubungan dengan keterlibatan yang berasal dari luar pelajar, antara lain lingkungan belajar, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan dan organisasi. Riset yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta (Desember 2008) berhasil mengungkap fakta bahwa 87% GPAI di pulau Jawa, menganjurkan agar tidak perlu belajar agama lain dan hanya 3% yang menganggap bahwa menjadi tugas mereka untuk menghasilkan pelajar yang toleran. Selanjutnya hasil survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) yang dimuat dalam harian Media Indonesia dikatakan bahwa ada kecenderungan radikalisme, kekerasan dan intoleransi menyelimuti guru pendidikan agama Islam (PAI) dan pelajar SMP-SMA di Jabodetabek, menyangkut toleransi, misalnya 62,7% guru PAI keberatan non muslim membangun tempat ibadah di lingkungan tempat tinggal mereka sedangkan pelajar yang berkeberatan 40,7% dan 57,2% guru PAI tidak setuju non muslim menjadi kepala sekolah sedangkan siswa yang berkeberatan 45,2%. (Harian Media Indonesia, Toleransi Guru dan Pelajar Mencemaskan, 27 Februari 2011, hal. 1). Fenomena kelompok radikalisme dan kekerasan di kalangan pelajar, apakah dipengaruhi oleh faham keagamaan yang dimilikinya? Melihat fenomena di atas mendorong dilakukan penelitian tentang Survei Keberagaman Pelajar SLTA (Faham Ke-Islaman Pelajar sekolah/madrasah).

### Rumusan Masalah

Ada tiga masalah yang akan diteliti, yakni; a) Bagaimana persepsi siswa tentang peran Islam dalam kehidupan sosial?; b) Bagaimana keyakinan siswa

tentang peran Islam dalam kehidupan sosial?; c) Bagaimana sikap siswa tentang peran Islam dalam kehidupan sosial?

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengukur paham ke-Islaman pelajar SMA dan MA menyangkut persepsi, keyakinan, dan sikap tentang bagaimana seharusnya Islam berperan dalam kehidupan sosial. Hasil penelitian ini dimanfaatkan untuk memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan unit operasional di lingkungan Kementerian Agama dalam pembinaan pelajar pada sekolah/madrasah di masa mendatang.

### Kajian Teoretik

#### *Faham Keagamaan*

Bentuk implementasi faham keagamaan adalah corak berfikir keagamaan, yaitu suatu bentuk, pola, model atau struktur berfikir seseorang yang dihasilkan dari proses belajar berlandaskan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya sehingga pemikiran tersebut menjadi landasan untuk beraktivitas. Bentuk berfikir keagamaan, menurut Azyumardi Azra dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu: pertama, *Eksklusivisme ekstrim* adalah jenis *eksklusivisme* yang sangat tertutup, dikotomi (benar-salah), dan radikal. Kelompok ini hanya membenarkan mazhabnya sendiri dengan serta merta menyalahkan, menyesatkan, dan mengkafirkan mazhab lain. Kedua, *Inklusifisme*, adalah *liberalisme* moderat, plus keyakinan adanya sejumlah non muslim yang bisa selamat (masuk surga) karena beriman kepada Allah, kepada hari akhir dan beramal saleh. Kelompok ini memandang siapapun dapat masuk surga karena memiliki keyakinan kepada Allah dan percaya kepada hari akhir dan beramal saleh; ketiga, *Liberalisme*

*ekstrim* adalah kelompok yang tidak membeda-bedakan lagi agama. Menurut kelompok ini, semua agama, terutama agama-agama besar, pada hakikatnya adalah Islam. Karena itu, semua agama karena sama-sama Islam adalah benar. Yang membedakan antara agama Islam dengan agama lainnya hanyalah dalam segi kualitasnya. (Azra. 224).

Eksklusivitas beragama dapat mendorong seseorang memiliki pandangan untuk mengkafirkan kelompok Islam lainnya. Bahkan dapat melakukan pengrusakan fasilitas dan gangguan keamanan terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan (walau satu agama). Pengrusakan sarana dan fasilitas kaum Ahmadiyah akhir-akhir ini merupakan bentuk eksklusivitas beragama. Kelompok inklusif, memandang bahwa kebenaran berfikir religius (Islam) bersifat relatif. Yang benar-benar mutlak hanyalah al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Islam yang dipahami umat Muhammad, termasuk yang dipahami para ulama, bersifat relatif. Kelompok inklusif menghendaki umat Islam bersatu dalam beragama. Adapun dasar pemikirannya, bahwa seluruh ulama Islam sepakat adanya satu al-Quran sebagai referensi yang mutlak benar, adanya satu keteladanan Nabi Muhammad SAW, adanya satu sunah Nabi yang mutlak benar, adanya keyakinan-keyakinan dan peribadatan-peribadatan pokok yang sama, dan adanya kesepahaman ketidakmungkinan adanya satu pendapat tentang tata cara beragama yang sama.

Sedangkan kelompok Islam "liberal", menganggap bahwa semua agama adalah baik. Pemikiran liberalis diperkenalkan oleh beberapa ulama dan cendekiawan muslim, seperti: Cak Nur, memandang bahwa semua agama adalah baik, tetapi Islam adalah agama yang terbaik. Selanjutnya Ulil Abshar Abdala, tokoh muda NU, mendirikan jaringan Islam Liberal (JIL) dan mensosialisasikan

Islam Liberal. Pemikiran liberal sangat menekankan pada akal dan berusaha memahami wahyu secara kontekstual.

#### *Norma Keagamaan dalam Hubungan Sosial*

Islam merupakan sistem keyakinan (*belief system*) serta sistem kaidah (*normative system*) yang mengatur kehidupan manusia, baik mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia maupun manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Islam sebagai sistem norma dan sistem nilai memuat kaidah aturan pada berbagai kehidupan. Kaidah-kaidah tersebut meliputi: kaidah ibadah, kaidah muamalah dan kaidah akhlak yang kemudian menjadi dasar muamalah, kaidah politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya.

Dalam aspek hubungan sosial (*social relation*), terutama yang berkaitan dengan pola komunikasi antar pribadi, penghargaan terhadap hak-hak orang lain, kepedulian terhadap lingkungan, atau kepedulian terhadap orang lain. Hubungan sosial tersebut termanifestasikan dalam perilaku yang sepenuhnya sesuai norma agama yang dianutnya. Pola interaksinya cenderung transaksional berdasarkan prinsip untung rugi. Hubungan sosial atau hubungan antar pribadi, dalam prosesnya, mengacu pada motif untuk memperoleh keuntungan, baik keuntungan materi maupun keuntungan sosial berupa penghargaan atau penghormatan. Seharusnya pola interaksi sosial berdasarkan pada nilai keiklasan dan cinta kasih sebagaimana diajarkan agama.

Beberapa faktor perilaku masyarakat yang cenderung kurang sesuai dengan norma agama, di antaranya: *pertama*, tumbuhnya sikap menerima nilai budaya yang modern secara berlebihan, sehingga menggeser nilai budaya yang bersumber dari agama atau adat istiadat

yang dipersepsikan. Dalam konteks ini, masyarakat cenderung mengembangkan individualitas, mengembangkan prinsip-prinsip dasar efisiensi, praktibilitas dan "economic values". Dampak sosial dari perwujudan nilai-nilai dasar tersebut, di antaranya adalah tumbuhnya sikap "selfistik", kurang peka dan peduli pada kepentingan orang lain jikalau tak menguntungkan serta menurunnya intensitas dialog antara warga. *Kedua*, faktor kesibukan kerja sehingga melahirkan sikap enggan untuk melakukan komunikasi dengan sesama warga. Seseorang warga lingkungan kelas tersebut melukiskan fenomena sosial yang terjadi di lingkungan hunian. (Yusuf, 2001: 138-139).

Islam sebagai sistem nilai dan norma juga memberikan acuan dasar yang seharusnya diendomi dalam perilaku sosial. Selain itu, Islam juga banyak menekankan nilai-nilai dasar moralitas yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat pemeluknya. Nilai-nilai moralitas atau akhlak tersebut merupakan perintah atau larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan kesehariannya. Perintah dan larangan tersebut (yang semuanya difirmankan dalam al-Qur'an) antara lain perintah menghargai waktu, berbuat kebaikan, meninggalkan kejahatan, saling kasih sayang, mencintai perdamaian, menyingkalakan permusuhan, menjaga persatuan, bersabar, menjaga amanat, bersyukur atas nikmat Allah, taat pada Allah serta larangan untuk: membenci, bermusuhan, marah, merusak, menipu dan lain-lain.

### **Organisasi Keagamaan dalam Hubungan Paham Keagamaan Masyarakat**

Organisasi merupakan entitas yang memberi peluang masyarakat (kelompok) untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi, dengan demikian

ditandai oleh perilaku anggotanya ke arah pencapaian tujuan, yang tidak bisa dicapai sendiri. Organisasi keagamaan merupakan entitas yang memwadhahi aktivitas keagamaan dalam upaya mencapai suatu tujuan. Sebagai institusi keagamaan maka organisasi keagamaan ini di satu pihak bisa dipahami sebagai wadah yang mengatur/mengelola aktivitas keagamaan sebagai kebutuhan dasarnya dan pihak lain dapat dikonsepsikan pula sebagai cara bertindak yang mengikat. Institusi agama dipandang sebagai keseluruhan komponen yang dipadukan dan nilainya merupakan bentuk cara hidup dan cara bertindak yang mengikat. Konsekuensinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam institusi harus disesuaikan dengan peraturan institusi. Dalam institusi, keterikatan norma dan pola tersebut diperankan begitu penting bahkan diperkuat dengan sanksi demi tercapainya kelestarian dan ketahanan secara berkesinambungan.

Paham keagamaan seperti sufisme, aliran eksklusif dan paham yang tampak ekstrim dan fundamentalistik walau kecil dinamikanya, kian diminati. Walau dalam kenyataannya paham-paham universal masih tetap kuat dan kian tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Munculnya paham-paham keagamaan dalam Islam pada dasarnya merupakan reaksi terhadap sosio-kultural masyarakat yang berkembang.

Partisipasi organisasi keagamaan masyarakat berkaitan dengan indikator-indikator, seperti: partisipasi (masyarakat) dalam solat berjamaah, partisipasi dalam pengajian, partisipasi dalam pendidikan keagamaan termasuk aspirasi dan motivasi, keaktifan dalam pelaksanaan pendidikan dan keterlibatan dalam aktifitas sosial keagamaan lainnya.

### *Sikap Keberagamaan*

Menurut Azwar, istilah sikap pertama kali diperkenalkan pada tahun

1862 oleh Spencer, sikap diartikan sebagai status mental seseorang. (Azwar, 1995: 3). Selanjutnya dikatakan tentang sikap dapat dikelompokkan dalam tiga kategori besar kerangka pemikiran. Pertama, sikap dimaksudkan sebagai suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Kedua, sikap diartikan sebagai semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Ketiga, sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek. (Azwar, 1995: 5).

Keberagamaan sebagai bagian dari religiositas, oleh Glock and Stark. Menurutnya terdapat 5 (lima) dimensi keberagamaan, yaitu: keyakinan, praktek agama, pengalaman, pengetahuan dan dimensi konsekuensi. (Fadhal, 2005: 10).

Dimensi keyakinan diindikasikan dengan berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin teologis tersebut. Dimensi praktik agama diindikasikan dengan mengerjakan atau adanya perilaku ritual dan ketaatan terhadap agama yang dianut. Dimensi pengalaman diindikasikan dengan perasaan-perasaan atau persepsi-persepsi yang dialami yang mengkomunikasikan esensi ketuhanan. Dimensi pengetahuan, diindikasikan dengan pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan. Dimensi konsekuensi, diindikasikan sebagai akibat dari keyakinan, kegamaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan seseorang dalam bentuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari.

## Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Sedangkan target populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelajar SMA dan MA di seluruh wilayah Jawa dan Sulawesi. Pemilihan

responden dilakukan secara acak bertingkat (*stratified random sampling*) dengan sasaran 12 propinsi seluruh pulau Jawa dan Sulawesi, 133 kabupaten/kota (103 kabupaten dan 30 kota), 201 sekolah (SMA dan MA), dan sejumlah 804 pelajar terpilih secara acak proporsional, dengan toleransi kesalahan margin error (MoE) sebesar 3,45% pada tingkat kepercayaan 95%.

## Profil Sosio-Demografi Responden

Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pelajar SLTA seluruh pulau Jawa dan Sulawesi yang tercatat dalam *database* sekolah di website Dapodik Kemendiknas RI pada bulan Juni 2011 sebagai panduan primary sampling survei. Berikut akan dijelaskan karakteristik responden berdasarkan sosio-demografi yang ada, dan sekaligus data dimaksud menjadi cerminan populasi pelajar SLTA secara lebih luas (Jawa dan Sulawesi).

Karakteristik pertama, adalah pada usia responden yang berkisar antara 16-17 tahun sebesar 73,7%, selebihnya pada  $\geq 18$  tahun sejumlah 19%, dan usia  $\leq 15$  Tahun sejumlah 7,1%. Sasaran responden survei ini memang ditujukan khusus untuk pelajar SLTA kelas 11 (dua) dan kelas 12 (tiga), karenanya terlihat sebagian besar adalah pada usia 16-18 tahun. Tetapi, sehubungan kendala teknis lapangan dan keunikan masing-masing sekolah/madrasah maka didapatkan beberapa responden yang terpilih dari kelas 10 (satu) sehingga ditemukan dalam hasil kategori usia pelajar yang berusia 15 tahun atau kurang.

Karakteristik pelajar SLTA kedua adalah pada aspek kedekatan dengan suku bangsa tertentu di Indonesia. Pengakuan responden survei ini umumnya selain sebagai warga negara Indonesia, adalah juga merasa dekat sebagai suku Jawa dinyatakan oleh sejumlah 44,8%, sebagai suku Sunda 22,7%, Madura sejumlah 6%,

Bugis 5,1%, Betawi 3,4%, Gorontalo 1,2%, Buton sejumlah 1,2%, Makassar 1,2%, Luwu, 0,9%, Toraja, 0,9%, Tionghoa 0,9%, Melayu 0,9%, Kaili 0,7%, Minahasa 0,7%, serta lainnya 9,4%.

Karakteristik pelajar SLTA ketiga adalah berdasarkan agama yang ia anut. Survei ini mendapatkan data sejumlah 92,8% adalah beragama Islam, sejumlah 5,2% menyatakan beragama Protestan, beragama Katholik 1,1% , Hindhu

0,6%, dan Konghucu sebanyak 0,2%. Keterbatasan survei ini adalah tidak mampu menjangkau sebaran pelajar SLTA yang beragama Buddha sehubungan sekolah terpilih yang kebetulan bercirikan agama Buddha menolak untuk disurvei.

Karakteristik pelajar SLTA keempat adalah pada aspek latar belakang pekerjaan orang tua (wali murid). Berdasarkan karakteristik dimaksud diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pekerjaan Orang Tua Peserta Didik SLTA (%)

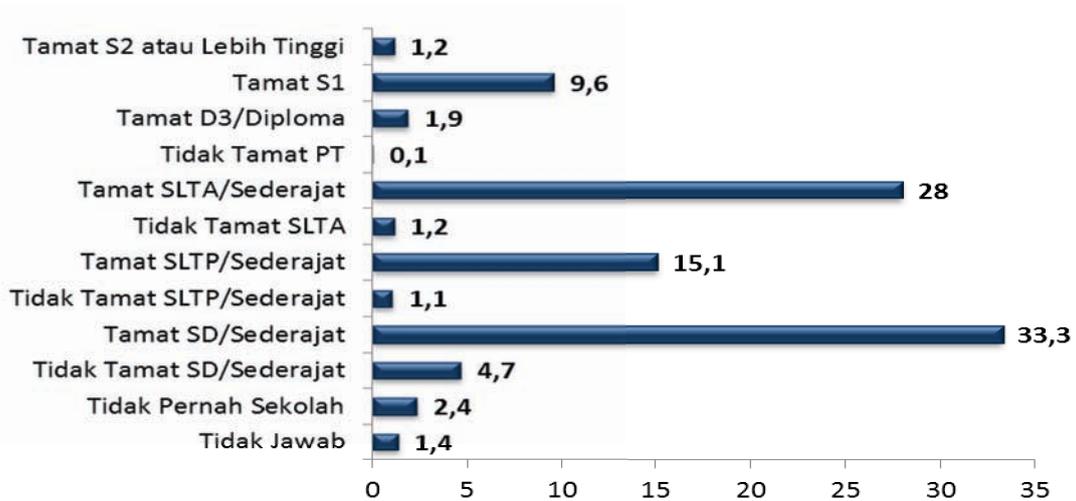
KATEGORI	%	F
<b>PEKERJAAN ORTU</b>		
Pertanian	32	257
Industri	20.7	166
Perdagangan	22.7	182
Jasa	17	137
Lainnya	7.6	61

Sebagaimana tertuang dalam tabel di atas diperoleh latar belakang orang tua pelajar umumnya adalah masih dominan bekerja sebagai petani/peternak/nelayan sejumlah 32%. Selanjutnya bekerja di sektor perdagangan 22,7%, bidang industri 20,7% dan Jasa sebanyak 17%, serta selebihnya lainnya 7,6%. Bidang pekerjaan orang tua yang terungkap dalam survei ini secara umum telah memiliki kesesuaian dengan data yang dirilis BPS (Badan Pusat Statistik) untuk pulau Jawa dan Sulawesi.

Data yang terungkap dari survei ini menyebutkan bahwasanya orang

tua pelajar yang berpendidikan sekolah dasar (SD)/ sederajat sejumlah 33,3%, berpendidikan SLTA/ sederajat sejumlah 28%, berpendidikan SLTP/ Sederajat sejumlah 15,1%, berpendidikan perguruan tinggi/ tamat S1 sejumlah 9,6%, bahkan ada juga yang tidak sekolah sejumlah 2,4%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa selain atensi orang tua pelajar SLTA terhadap pendidikan sangat tinggi, barangkali adalah dampak dari program wajardikdas 9 tahun, yaitu wajib belajar hingga SLTA.

Grafik 2.1. Latar Belakang Pendidikan Orang tua (%)



### Paham Ke-Islaman Pelajar Dalam Kehidupan Sosial

Pelajar SLTA dalam hal ini dimintakan pandangannya terkait Islam dalam lingkup keluarganya, lingkungan sosial dan lingkup politik nasional.

Dalam lingkungan keluarga misalnya ditanyakan terkait bagaimana relasi antara suami-isteri atau bapak ibu dalam keseharian di rumah tangganya, keluarga berencana (KB), pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan dan seterusnya.

Grafik 2.2. Apakah Anda Setuju dengan Pandangan-pandangan di bawah ini? (1)... (%)



- Selama masih ada bapak, ibu tidak boleh menjadi kepala keluarga;
- Hanya bapak yang bertanggungjawab untuk mencari nafkah bagi keluarga;
- Ibu cukup di rumah melayani suami dan mengurus anak;
- Bapak boleh beristri lebih dari satu jika bisa bersikap adil terhadap istri-istrinya;

5. Keluarga berencana bertentangan dengan ajaran agama;
6. Anak laki-laki harus didahulukan dalam hal pendidikan dibandingkan anak perempuan;
7. Hak waris bagi anak laki-laki harus dua kali lebih besar dari hak waris anak perempuan;

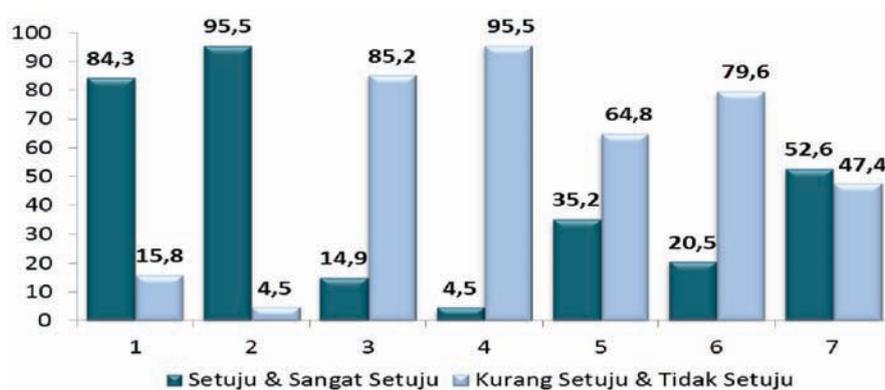
Survei ini mengungkap pandangan pelajar tentang posisi ibu sebagai kepala keluarga selama masih ada bapak dinyatakan kurang disetujui atau tidak disetujui disampaikan oleh 27,6%, sementara selebihnya menyatakan setuju atau sangat setuju sebanyak 72,4%. Ini berarti pelajar menempatkan bapak sebagai kepala keluarga yang paling utama dan belum memberikan persetujuan secara penuh (tidak boleh) jika ibu bertindak sebagai kepala keluarga semasih ada bapak.

Tetapi tidak demikian ketika pelajar ditanya tentang boleh tidaknya seorang ibu bekerja atau turut mencari nafkah. Penilaian pelajar yang menyatakan kurang setuju atau tidak setuju jika hanya bapak yang mencari nafkah sebesar 45,6%, sementara yang

menyatakan setuju atau sangat setuju sejumlah 54,4%. Ini berarti pelajar SLTA masih memberikan apresiasi atau masih membolehkan seorang ibu bekerja atau turut mencari nafkah. Pernyataan ini cukup konsisten ketika dibandingkan dengan pertanyaan "Ibu cukup di rumah melayani suami dan mengurus anak". Dalam penilaian pelajar, seorang ibu cukup melayani suami dan anak disetujui oleh 61,1%, selebih menyatakan kurang setuju sejumlah 38,9%. Artinya kurang lebih antara 38,9%-45,6% pelajar SLTA yang menyatakan mengizinkan seorang ibu turut mencari nafkah, sekaligus itu ia harus melayani suami dan anak-anaknya.

Uniknya meskipun bapak sebagai kepala keluarga sepenuhnya, tetapi pelajar SLTA umumnya menolak jika bapak memiliki istri lebih dari satu, yaitu dinyatakan oleh 68,6%. Pelajar SLTA juga menolak jika keluarga berencana adalah bertentangan dengan ajaran agama Islam (66,3%), termasuk menolak jika anak laki-laki harus didahulukan dibanding anak perempuan (70,8%). Termasuk kategori berimbang pandangan terkait pembagian hak waris perempuan dan laki-laki.

Grafik 2.3. Apakah Anda Setuju dengan Pandangan-pandangan di bawah ini? (2)... (%)



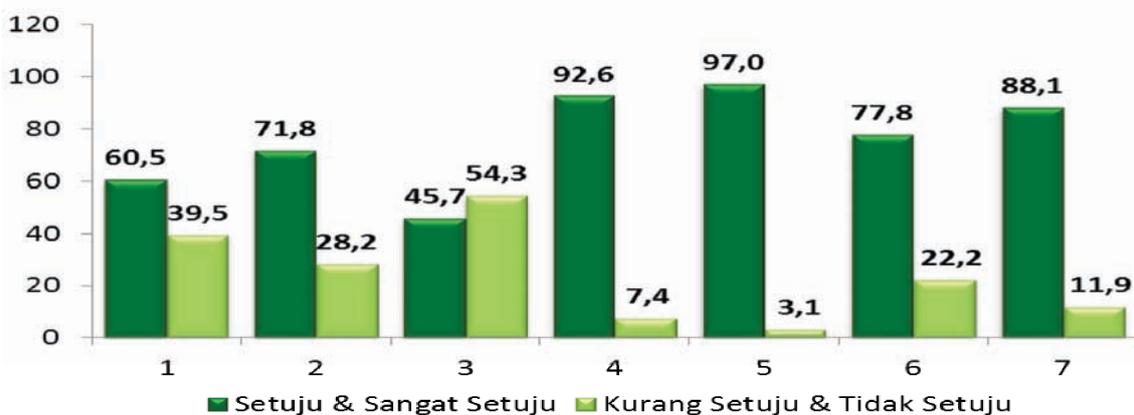
- 1 Anggota keluarga tidak boleh menikah dengan pemeluk agama lain kecuali pasangannya tersebut masuk agama yang sama;
- 2 Kriteria utama bagi calon istri atau suami bagi anak adalah ketaatan dalam menjalankan perintah agama;
- 3 Sebaiknya berteman hanya dengan orang yang se-agama;
- 4 Tidak boleh membantu orang yang bukan se-agama;
- 5 Hanya agama saya yang benar dan karena itu agama lain harus masuk agama saya;
- 6 Orang yang berpindah agama harus diperangi;
- 7 Sebaiknya kita mendukung organisasi keagamaan.

Konsistensi pendapat pelajar dapat ditelusur kembali pada penjelasan grafik di atas. Dua hal yang disetujui atau masih diterima oleh pelajar yaitu pada aspek “*Anggota keluarga tidak boleh menikah dengan pemeluk agama lain kecuali pasangannya tersebut masuk agama yang sama*” dan *kriteria utama bagi calon istri atau suami bagi anak adalah ketaatan dalam menjalankan perintah agama*”. Sementara pada aspek pertemanan hanya dengan yang seagama, tidak boleh membantu orang yang berlainan agama, hanya agamanya yang benar dan karena itu yang lain harus masuk agama yang dianutnya, orang yang berpindah agama harus diperangi, kesemuanya disikapi dengan tidak setuju atau

kurang setuju. Ini artinya, secara umum pelajar SLTA memberikan toleransi pada hubungan sosial, kecuali dalam hal perjdodohan dan kriteria pasangan (suami-isteri).

Sementara pandangan terkait boleh-tidaknya terlibat atau mendukung organisasi masyarakat berbasis keagamaan terlihat adanya pandangan yang berimbang. Artinya, pelajar SLTA memberikan apresiasi kepada semua jenis organisasi masyarakat, baik yang bersifat keagamaan dan non keagamaan. Pertanyaan lanjutannya survei ini juga mengurai bagaimana Islam bernuansa kehidupan sosial lainnya hubungannya dengan praktik keseharian pelajar dalam persepsi pribadi yang bersangkutan.

Grafik 2.4. Apakah Anda Setuju dengan Pandangan-pandangan di bawah ini? (3)... (%)



- 1 Bunga bank dilarang oleh agama Islam;
- 2 Perempuan tidak boleh melakukan perjalanan jauh tanpa disertai mahramnya;
- 3 Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin organisasi sosial/politik selama masih ada laki-laki;
- 4 Khamar atau minuman beralkohol yang memabukkan tidak boleh diperjual-belikan dalam masyarakat;
- 5 Setiap makanan yang diperjualbelikan harus dijamin halal;
- 6 Orang berzina harus dirajam;
- 7 Semua Muslimah yang telah dewasa wajib memakai jilbab;

Secara berurutan beberapa hal yang dipandang paling penting untuk diperhatikan adalah terkait a). terjamin halal-tidaknya setiap masakan yang diperjualbelikan, b). larangan minuman keras, c). kewajiban muslimah dewasa menggunakan jilbab, d). orang berzina harus dirajam, e). Perempuan wajib ditemani muhrimnya, dan f). Bunga Bank dilarang.

Uniknya, pelajar SLTA memberikan apresiasi terhadap boleh-tidaknya perempuan terlibat dalam partai politik atau organisasi sosial. Pendapat ini sejalan dengan pandangan pelajar sebelumnya yang masih memberikan apresiasi atau membolehkan seorang ibu turut mencari nafkah. Ini berarti relasi Islam dan pekerjaan (mencari nafkah) bagi perempuan dipandang tidak bertentangan dengan Syariat atau ajaran.

Grafik 2.5. Apakah Anda Setuju dengan Pandangan-pandangan di bawah ini? (4)... (%)



- 1 Pemerintahan yang didasarkan atas tuntunan kitab suci (al-Quran, Injil, dst) adalah yang terbaik bagi bangsa ini;
- 2 Negara seharusnya mewajibkan pelaksanaan ajaran agama bagi pemeluknya.
- 3 Dalam pemilihan umum, seharusnya memilih partai yang memperjuangkan agama yang dianut.

Persepsi pelajar SLTA tentang syariat Islam semakin menarik untuk dikaji ketika ditanyakan hubungan Islam dengan negara. Dalam hal ini responden ditanyakan persetujuannya terhadap penerapan syariat Islam atau ajaran agama dalam lingkup pemerintahan nasional, dan jawabnya adalah 81,6% menyetujui

jika pemerintahan didasarkan atas dasar ajaran agama, dan negara mewajibkan pemeluk agama melaksanakan ajaran agama bagi pemeluknya (91,2%). Tampak jelas pemikiran pelajar SLTA yang agamis dan sekaligus moderat. Agamis dimaksud, adalah setuju jika praktik kehidupan sosial berasaskan ajaran agama.

Grafik 2.6. Apakah Anda Setuju dengan Pandangan-pandangan di bawah ini? (5)... (%)



- 1 Hukum potong tangan bagi pencuri Muslim yang diajarkan dalam al-Qur'an harus ditegakkan pelaksanaannya oleh pemerintah negeri ini.
- 2 Cita-cita dan perjuangan gerakan atau organisasi Islam untuk menegakkan Syariat Islam dalam pemerintahan dan masyarakat Indonesia harus didukung.
- 3 Pemerintah (polisi) harus mengawasi apakah seorang Muslim menjalankan puasa pada bulan Ramadhan.
- 4 Pada umumnya laki-laki lebih unggul dibanding perempuan dalam berbagai hal.
- 5 Perempuan, tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk dipilih menjadi wakil rakyat (DPR)
- 6 Dalam satu keluarga ada dua anak, anak laki-laki dan anak perempuan, sementara kemampuan untuk menyekolahkan hanya untuk satu anak.  
Dalam situasi seperti ini, yang harus disekolahkan adalah anak laki-laki.
- 7 Perempuan tidak boleh menjadi presiden.
- 8 Perempuan terlalu lemah untuk jadi hakim di pengadilan.
- 9 Dalam pembagian harta waris dari orang tua, anak perempuan harus mendapat bagian separuh dari bagian anak laki-laki.

Berdasarkan grafik di atas terungkap bahwa persepsi pelajar tentang penerapan ajaran agama Islam dalam kehidupan sosial dan politik sangat didukung. Namun demikian pemaknaannya tidak selalu dalam bentuk simbolik dengan menegakkan ajaran Islam yang Islamis. Dapat dilihat

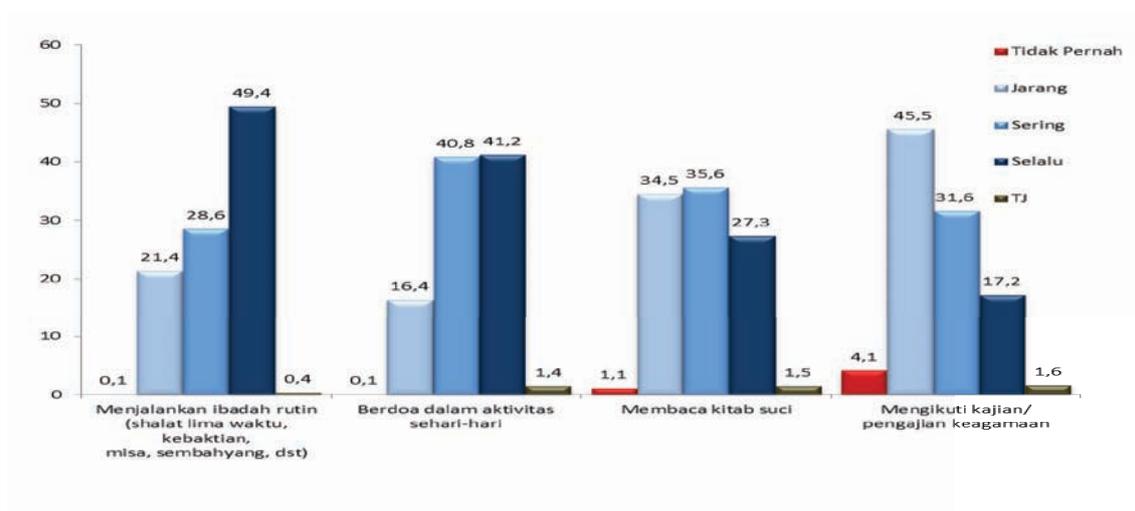
dari kecenderungan jawaban tentang boleh-tidaknya presiden dari perempuan, sejumlah 76,3% menyatakan tidak setuju atau kurang setuju. Artinya meskipun sejumlah 87,1% mendukung cita-cita dan perjuangan gerakan atau organisasi Islam untuk menegakkan Syariat Islam dalam pemerintahan dan masyarakat Indonesia,

bukan berarti menegakkan khilafah Islam di Indonesia.

Dengan menggunakan intensitas menjalankan ibadah rutin (wajib) dan tambahan (sunnah) sebagai ukuran kesalehan, penelitian ini menemukan bahwa secara umum para pelajar SLTA tergolong pelajar yang cukup saleh. Sebanyak 78% pelajar mengaku sering dan selalu menjalankan ibadah rutin/wajib (shalat lima waktu, kebaktian,

sembahyang, dst), meski masih 20% lebih yang perlu dicatat mengaku jarang atau tidak pernah beribadah rutin/wajib. Demikian pula bagi pelajar muslim, sebesar 76% mengaku selalu menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Pada aspek ibadah lainnya, intensitas pelajar juga cukup baik. Sebesar 82% misalnya pelajar yang mengaku sering dan selalu berdoa, dan 62% sering membaca kitab suci.

Grafik 2.7 Rutinitas dalam Ibadah ... (%)



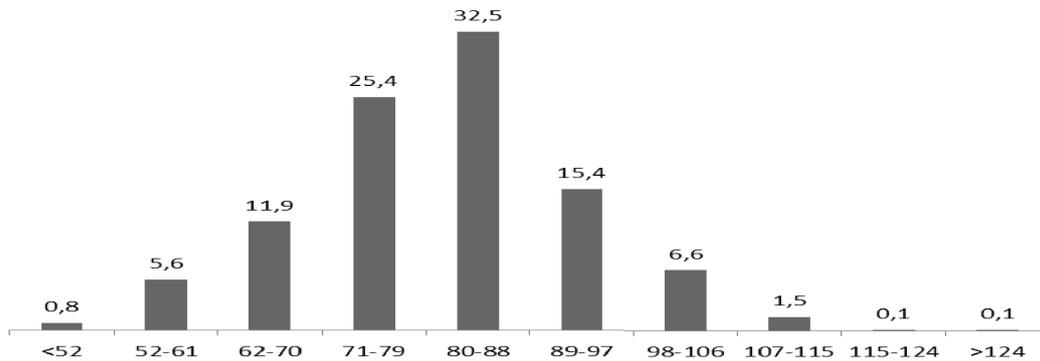
Bagi pelajar Muslim, intensitas mereka yang menjalankan ibadah sunnah juga cukup tinggi. Sebesar 66% pelajar mengaku cukup sering shalat berjamaah, 35% mengaku sering shalat sunnah dan 30% mengaku cukup sering puasa sunnah.

Untuk mengukur tingkat pemahaman Ke-Islaman pelajar SLTA dalam kehidupan sosialnya diukur melalui kuisioner yang terdiri dari 33 butir pertanyaan/pernyataan. Adapun bobot skor setiap butir pertanyaan/pernyataan adalah antara 1 sampai dengan 4. Secara teoritis skor pemahaman keislaman akan bervariasi antara skor minimal 33 sampai

skor maksimal 132. Melalui pengolahan statistik diperoleh daftar distribusi frekuensi dengan banyaknya kelas yang dihitung dengan menggunakan aturan Sturges ( $K = 1 + 3.3 \log n$ ), diperoleh 10 kelas dengan skor maksimum 131 dan skor minimum 45, rentang skor 86, sehingga intervalnya sama dengan 9.

Dari hasil analisis data diperoleh bahwa paham ke-Islaman pelajar SLTA mempunyai nilai mean ( $\mu$ ) sebesar= 80.75 dengan standar deviasi = 12.024, median= 81.00 dan modus= 83. Hasil pengolahan data yang dituangkan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi disajikan dalam tabel berikut:

Grafik 2.8 Skor Paham Islam Peserta Didik SLTA



Data di atas menunjukkan bahwa nilai skor paham islamis pelajar dengan frekuensi/jumlah responden terbanyak adalah berkisar antara 80 sampai 88 (kelas interval kelima) sebanyak 32,5% dari sampel 745 (pelajar beragama Islam). Untuk menetapkan rendah atau tingginya paham islamis pelajar, dikelompokkan dengan tiga kriteria sebagai berikut :

1. Tingkat atas : dari mean + 1 SD ke atas
2. Tingkat sedang : dari mean – 1 SD sampai mean + 1 SD
3. Tingkat rendah : dari mean – 1 SD ke bawah

Dengan metode tersebut diperoleh hasil perhitungan pengelompokan skor untuk variabel paham islamis pelajar dalam kategori atas atau konservatif sejumlah 17,3% atau 129 orang responden. Sementara selebihnya sejumlah 518 orang atau 69,5% berada dalam skor distribusi sedang atau klasifikasi moderat, dan sejumlah 98 orang atau 13,2% dalam pengelompokan frekuensi skor kategori rendah atau dikatakan liberal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kecenderungan paham islamis pelajar SLTA berada pada kondisi “sedang” atau moderat” dan cenderung menguat menjadi konservatif atau kategori atas.

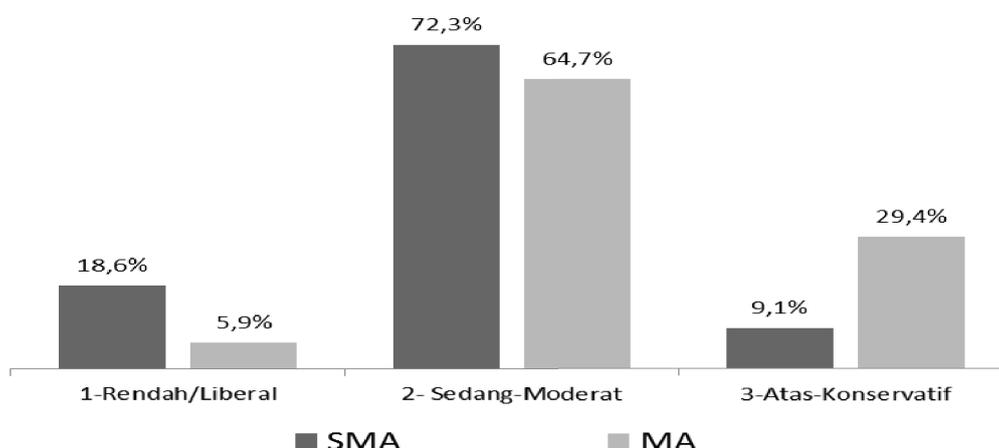
Tabel 2.2. Tingkat Pemahaman Ke- Islaman Pelajar SLTA

Kategori	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1- Rendah/Liberal	98	13.2	13.2	13.2
2- Sedang/Moderat	518	69.5	69.5	82.7
3- Atas/Konservatif	129	17.3	17.3	100.0
Total	745	100.0	100.0	

Guna mengetahui secara mendalam sebaran kondisi pemahaman tentang Islam di kalangan pelajar, maka penting mengkaji perbandingan antar jenis

sekolah, yaitu: Sekolah SMA kategori sekolah 1 dan Madrasah Aliyah dalam kategori sekolah 2. Berikut disajikan grafik dari masing-masing sub kategori sekolah dimaksud:

Grafik 2.9 Paham Islam Peserta Didik SLTA Menurut Kategori Sekolah (%)



Dari grafik di atas, diperoleh data lapangan bahwa berdasarkan kategori satuan pendidikan atau jenis sekolah SMA dan MA, didapatkan perbandingan bahwasanya pelajar SMA cenderung berpaham Islam sedang atau moderat dan cenderung ke rendah atau liberal. Sementara pelajar Madrasah Aliyah (MA) berpaham Islam yang sedang atau moderat dan cenderung ke kategori atas atau Islam konservatif. Dengan bahasa lain dapat dikatakan bahwa pelajar SMA lebih berpaham moderat dibanding Madrasah Aliyah (MA).

## Kesimpulan dan Saran

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Terdapat pandangan dari pelajar SLTA terhadap peran Islam dalam kehidupan sosialnya, jika upaya pengembangan paham Islam di lingkungan sekolah mengarah semakin moderat, mengakibatkan perilaku toleran makin tumbuh kembang atau lebih baik. Sebaliknya jika upaya pengembangan paham Islam di lingkungan SLTA makin mengarah ke paham Islam konservatif, maka mengakibatkan perilaku intoleran

makin menguat; b) Tingkat kesalehan beragama di kalangan pelajar muslim SLTA berpengaruh terhadap perilaku intoleran. Ini berarti jika tingkat ketaatan beragama pelajar muslim SLTA semakin menguat, mengakibatkan makin menguatnya perilaku intoleran di kalangan pelajar muslim SLTA, demikian sebaliknya; c) Perilaku toleran di kalangan pelajar SLTA dapat didorong melalui peningkatan wawasan dan pemahaman Islam yang moderat, secara bersama-sama dengan upaya penciptaan suasana percaya terhadap kehidupan bermasyarakat

Beberapa saran strategis yang perlu diperhatikan di antaranya: a) Dalam rangka pengembangan pendidikan agama berwawasan moderat dan keindonesiaan maka dipandang penting melakukan analisis standar isi pada materi pendidikan agama di sekolah/madrasah; b) Dalam rangka pengembangan strategi pembelajaran pendidikan agama pada sekolah/madrasah maka dipandang penting melakukan analisis standar proses pendidikan agama. Di antaranya permasalahan kurikulum, silabus, RPP dan pelaksanaan proses pembelajaran; c) Dalam rangka pengembangan budaya sekolah/madrasah yang toleran penting dilakukan pembinaan secara intensif

terhadap kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler baik yang berbentuk akademik dan non akademik, atau yang bersifat keagamaan dan non keagamaan; d) Agar terjadi kesinambungan antara pengembangan pendidikan agama di sekolah yang moderat dan toleran dengan

pendidikan agama di luar sekolah, maka dipandang penting melakukan optimalisasi peran komite sekolah/madrasah, dan membangun komunikasi yang intens dengan persatuan orang tua pelajar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azwar, Saifudin. 1995. *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagong Suyantio Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial, (Berbagai Alternatif Pendekatan)'*, Jakarta: Kencana Prenada media Group,
- Bafadal AR Fadhal, Drs. 2001. *Pengalaman Agama Di Kalangan Pemuda*, Jakarta: Sekjen Departemen Agama
- Choirul Fuad Yusuf. 2001. *Peran Agama Dalam Masyarakat*, penerbit Proyek Peningkatan dan Pengembangan Perumusan kebijakan Departemen Agama.
- Farha, Ciciek, 2005. *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Farha, Ciciek, 1999, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Penerbit Perserikatan Solidaritas Perempuan, Jakarta 1999
- Harian Media Indonesia, *Toleransi Guru Dan Pelajar Mencemaskan*, 27 Februari 2011, hal. 1
- Lakip, 2011, *Survey Report October 2010–January 2011*, Religious Education and Radicalism (Laporan Survei Oktober 2010 – Januari 2011, Pendidikan Agama dan Radikalisme), report submitted to the ParliamenT.

# Dinamika Perkembangan Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu

**Nuhrison M Nuh**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  
Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta  
Email: nuhrison\_mnuh@yahoo.com

## Abstract

*The focus of the discussion of this research is the development of Dayak Hindu Budha Bumi Segandu followers' community, government policy and social relations between this community and the surrounding society. This study used a qualitative approach in the form of case study on a local community, which has its own teaching and identity. This community was established by Takmad, initiated with establishing the martial-arts (silat) residence and ilmu ngaji rasa. The concept of teaching is not based on the holy book, any religious sect, religion or cultural roots, but to take the attitude model and behavior of Semar and Pendawa Lima characters.*

**Keywords:** self-purification, puppet stories, local beliefs, religious services.

## Pendahuluan

Penelitian ini terkait dengan perkembangan komunitas yang disebut *Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandhu* Indramayu, Jawa Barat. Komunitas tersebut hingga kini masih eksis, meskipun senantiasa mengalami berbagai tantangan. Tantangan untuk mempertahankan identitas dan ajaran, serta tantangan untuk tetap bertahan di tengah situasi sosial yang terus berubah. Karena itu, sebagaimana komunitas-komunitas yang lain, komunitas ini terus melakukan resistensi dan negosiasi agar keberadaannya mempunyai relevansi

## Abstrak

*Fokus pembahasan penelitian ini adalah perkembangan komunitas penganut Dayak Hindu Budha Bumi Segandu, kebijakan pemerintah dan relasi sosial antara komunitas ini dengan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk studi kasus atas sebuah komunitas lokal, yang memiliki ajaran dan identitas tersendiri. Komunitas ini didirikan oleh Takmad, diawali dengan mendirikan padepokan silat dan ilmu ngaji rasa. Konsep ajarannya tidak didasarkan pada kitab suci, aliran kepercayaan, agama, maupun akar budaya, melainkan mengambil teladan sikap dan perilaku tokoh Semar dan Pendawa Lima*

**Kata kunci:** pemurnian diri, cerita pewayangan, kepercayaan lokal, pelayanan keagamaan.

dengan situasi sosial. Dalam kerangka inilah, penelitian terhadap komunitas Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu ini penting untuk dilakukan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan komunitas lokal adalah Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu yang merupakan sebuah kelompok masyarakat yang mempunyai identitas dan ajaran yang berbeda dari komunitas masyarakat di sekitarnya, yang berlokasi di Desa Krimun, Kecamatan Losarang Indramayu.

Sedangkan istilah "lokal" yang dimaksud dalam penelitian ini

menunjukkan *locus* dimana ajaran tersebut berada yang diikuti oleh masyarakat yang terbatas, relatif kecil dan biasanya terkonsentrasi pada suatu tempat tertentu. Ajaran yang dikembangkan oleh komunitas ini bisa terkait dengan etnis tertentu dan ajarannya bisa ada kemiripan dengan ajaran agama mainstream. Dalam diskursus antropologi ajaran yang bersifat lokal ini mengacu pada konsep *native religion/belief* atau *local belief* atau *folk religion*.

Studi terhadap sistem kepercayaan Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu masih jarang dilakukan. Adapun tulisan yang berkaitan dengan komunitas tersebut antara lain: “*Sekilas mengenai Suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu-Indramayu*” dilakukan oleh Toto Sucipto. “*Hubungan Komunitas Aliran Takmad dengan Masyarakat di Krimun, Losarang Indramayu*” oleh Budi Hartawan, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan beberapa tulisan singkat seperti: “*Sesatkah Komunitas Suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu di Indramayu*” oleh Suket; “*Kaum Minoritas Yang Hidup Damai di Bumi Losarang*,” oleh Ingrid Dwi Wedhaswari; “*Dayak Indramayu*” oleh Darmadi; “*Aliran Bumi Segandu Indramayu Resmi di bekukan*” (NU on line, 6 November 2007); “*Menengok ke Khasan Komunitas Dayak di Indramayu*” (Ekorisanto. Blogspot.com); “*Dayak Indramayu Kemandirian Pemikiran*” (budpar.go.id, 26 Juli 2010); “*MUI: Dayak Losarang Sesat*” (<http://www.pikiran-rakyat.com>); “*Pepe dan Blegiran Dayak Losarang*” (Pikiran Rakyat, 23 November 2007). “*Ketika Keyakinan Diatur Fatwa: Polemik Fatwa sesat MUI terhadap suku Dayak Indramayu*,” oleh Marzuki Rais ([http://...fahmina.org/fi\\_id/index.php?...eltemid=27](http://...fahmina.org/fi_id/index.php?...eltemid=27)).

Namun semua studi ini tidak ada yang secara detail fokus pada perkembangan kebijakan pemerintah yang menyangkut hak-hak sipil, dan relasi sosial komunitas penganut Dayak

Hindu Budha Bumi Segandu dengan masyarakat sekitarnya. Studi mengenai Dayak Hindu Budha Bumi Segandu masih sangat terbatas yang sudah dipublikasikan. Jika ada pun belum menyinggung mengenai kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak sipil.

Penelitian ini akan memfokuskan pada pembahasan tentang *Perkembangan Komunitas penganut Dayak Hindu Budha Bumi Segandu, kebijakan pemerintah dan relasi sosial antara komunitas ini dengan masyarakat sekitar*. Meskipun demikian yang menjadi perhatian utama dari ketiga aspek itu adalah masalah kebijakan pemerintah daerah terhadap komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu pimpinan Takmad Diningrat.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: a) Bagaimana perkembangan komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu, baik menyangkut perkembangan ajaran, pengikut, maupun lembaganya. b) Bagaimana perkembangan kebijakan pemerintah daerah dan lembaga keagamaan terhadap pengikut komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu, terutama menyangkut pelayanan hak-hak sipilnya, baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU Adminduk No. 23 tahun 2006? c) Bagaimana relasi sosial pengikut paham keagamaan lokal dengan masyarakat di sekitarnya, terutama pengikut agama *mainstream*?

Penelitian ini bertujuan untuk: a) Menggali informasi tentang perkembangan komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu, baik menyangkut ajaran, pengikut, maupun organisasinya. Dari sini akan diketahui aspek-aspek yang tetap dan yang berubah dari komunitas ini. b) Menelusuri kebijakan pemerintah daerah terhadap komunitas pengikut Dayak Hindu Budha Bumi Segandu, terutama terkait dengan keberadaan komunitas tersebut dan pelayanan hak-hak sipilnya sebagai

warga Negara, baik sebelum maupun sesudah lahirnya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. c) Menelusuri bentuk-bentuk relasi sosial antara komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu dengan masyarakat di sekitarnya, terutama dengan pengikut agama *mainstream*.

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi kepada pimpinan Kementerian Agama dan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah terhadap hak-hak sipil pengikut komunitas minoritas.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbentuk studi kasus atas sebuah komunitas lokal yang memiliki ajaran dan identitas tersendiri. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan realitas sosial tentang ajaran dan pengikut komunitas lokal secara apa adanya, kebijakan pemerintah dan relasi sosial dengan masyarakat sekitar. Pengumpulan data dilakukan melalui: a) kajian pustaka dengan mempelajari beberapa dokumen, literatur yang mendukung; b) wawancara mendalam (*indepth interview*); c) observasi lapangan terbatas. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, klasifikasi data, verifikasi dan pengambilan kesimpulan.

### Gambaran Umum Wilayah Indramayu

Kata Indramayu berasal dari kata Darma Ayu yang diambil dari nama Nyi Endang Darma yang Ayu yaitu orang kedua pendiri Indramayu. Kabupaten Indramayu mempunyai visi "Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera" yang disingkat dengan REMAJA. Kondisi wilayah Kabupaten Indramayu sangat diuntungkan secara ekonomis dengan letak geografisnya yang berada dijalur utama pantura yang merupakan urat nadi perekonomian

nasional dan membentang sepanjang pesisir pantai utara pulau Jawa dengan panjang garis pantai 114 km. Kabupaten Indramayu saat ini memiliki desa sebanyak 305 buah dan 8 kelurahan. Desa/kelurahan tersebut tersebar di 31 Kecamatan. Pada tahun 2008 telah terjadi pemekaran wilayah yang menghasilkan 3 desa baru, yaitu Desa Tambak, Wanantara dan Karanglayung.

Adapun batas wilayah Kabupaten Indramayu adalah: Sebelah Utara dengan Laut Jawa, Sebelah Selatan: dengan Kabupaten Majalengka, Sumedang dan Cirebon, Sebelah Barat: dengan Kabupaten Subang dan Sebelah Timur dengan Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon.

Kabupaten Indramayu memiliki luas wilayah 204.011 Ha atau 2.040.110 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Pada akhir tahun 2007 berdasarkan hasil Registrasi Penduduk jumlah penduduk Kabupaten Indramayu tercatat sebanyak 1.717.793 jiwa. Sedangkan pada akhir tahun 2008 angka tersebut telah berubah menjadi 1.732.674 jiwa. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indramayu tahun 2008 sebesar 0,86%. Pertumbuhan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (*Lihat Fauziah: 2010*).

Sebagai Indikator dari keberhasilan pembangunan manusia disebuah daerah dapat dilihat dari kemajuan di bidang pendidikan. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu pada tahun ajaran 2007/2008 tercatat jumlah SD sebanyak 880 buah, dengan jumlah murid 193.959 orang dan 1.247 orang guru. Kemudian Tingkat SLTP jumlah sekolah tercatat sebanyak 148 buah, dengan jumlah murid 63.301 orang dan 3.385 orang guru. Sedangkan di tingkat SLTA jumlah sekolah sebanyak 52 buah, dengan jumlah murid 16.528

orang dan 1.378 orang guru. Dan untuk Sekolah Kejuruan tercatat memiliki sekolah sebanyak 45 sekolah, murid 15.645 orang dan guru 1.144 orang. (*Kabupaten Indramayu Dalam Angka: 2007, dikutip dari Fauziah: 2010*).

Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, pada bulan Januari 2010 penduduk Indramayu berjumlah 1.711.422 orang dengan komposisi pemeluk agama: Islam 1.703.731 orang, Katolik 2.835 orang, Kristen 4.386 orang, Hindu 160 orang, Buddha 297 orang dan Khonghucu 13 orang, disini tidak ada data tentang jumlah penganut kepercayaan lokal. Sedangkan jumlah tempat peribadatan untuk umat Islam data pada tahun 2008 tercatat sebanyak 761 buah Masjid, 4229 buah Langgar dan 549 buah Musholla. Sedangkan tempat peribadatan untuk pemeluk agama lainnya berupa Gereja berjumlah 19 buah dan Vihara 2 buah. (*Kemenag Kabupaten Indramayu, Data Keagamaan 2010, dikutip dari Fauziah: 2010*).

Menurut keterangan dari berbagai informan dulunya kehidupan beragama di Indramayu tergolong abangan, oleh sebab itu pada masa Orde Lama, daerah Losarang khususnya merupakan daerah basis PKI. Setelah peristiwa G.30.S/PKI kebanyakan eks anggota simpatisan PKI masuk agama Kristen. Oleh sebab itulah pernah muncul kasus perusakan gereja di Jatibarang, yang ketika itu mencuat ke tingkat nasional. Kasus ini, dan kasus-kasus di Meulaboh dan Makassar kemudian dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengeluarkan SKB Menag-Mendagri No 1 tahun 1969. (*Wawancara dengan Kepala KUA Losarang: 4 April 2011*)

Ketika Orde Baru daerah ini merupakan pertarungan antara Golkar dan PDI (kemudian PDI Perjuangan) dalam memperebutkan massa. Karena daerah ini dulunya merupakan daerah

merah, maka partai PPP kurang mendapat dukungan massa. Pada masa reformasi pertarungan antara Golkar dan PDIP terus berlanjut, juga dalam hal PILKADA. Dalam pertarungan tersebut, selalu dimenangkan oleh Golkar. Sebagai contoh Bupati yang dulu H. Irianto MS Syafiudin (Yance), dan yang sekarang Hj Ana Shofanah (isteri Yance) berasal dari partai Golkar. (*Wawancara dengan Kepala KUA Losarang: Ibid*).

Dalam Pemilu dan pemilihan presiden awal reformasi kelompok Takmad mendukung PDIP dan Megawati, dengan pertimbangan dia akan menang menurut ramalannya dan dia seorang wanita. Sebab ajaran Takmad sangat menekankan tentang penghormatan terhadap wanita. Tetapi pada pemilu berikutnya kelompok mereka tidak menggunakan hak pilihnya dengan pertimbangan berdasarkan ajaran Aji Rasa, kalau memilih berarti ada keberpihakan, dan hal tersebut berarti bersifat diskriminatif. Kebijakan ini mendapat sorotan dari masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar, bila menjelang pemilu maupun Pilkada banyak pengurus partai atau calon bupati yang datang ke Padepokan Takmad memberikan bantuan berupa beras dan dana untuk memperoleh dukungan, karena jumlah pengikut komunitas ini cukup besar (potensial). (*Wawancara dengan Ketua RT 13 RW 03 Desa Krimun, 5-4-2011*).

### **Dinamika Perkembangan Komunitas Suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu**

#### *Riwayat Hidup Tokoh dan Kelompoknya*

Komunitas Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu dipimpin oleh Takmad, sekarang berumur 67 tahun, kelahiran Jatibarang Indramayu. Semasa hidupnya dia tidak pernah mengenyam pendidikan. Ia menikah dengan Sarinih

(ketika itu berumur 18 tahun), sekarang berumur 53 tahun, pekerjaan dagang, dan bertempat tinggal di Desa Krimun RT 13 RW 03 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, alamat padepokannya sekarang. Setelah menikah dia tinggal di rumah mertuanya kemudian membangun rumah tinggal yang dia tempati hingga sekarang.

Dari perkawinannya dengan Sarinih ia memperoleh lima orang anak yaitu; Warsinih (alm) lahir pada tahun 1975, meninggal dunia dalam usia 1 minggu; Nuryati lahir pada tahun 1977 (sudah berumah tangga); Sarifudin lahir pada tahun 1979 (sudah berumah tangga); Darto lahir tahun 1981 dan Nyi Dewi Ana Mustika Ratu lahir pada tahun 1996. Selain itu dia juga mempunyai seorang anak angkat bernama Tri Penganten Gumilang Sari Nyi Ajeng (umur 9 tahun).

Pada tahun 1974 sekelompok masyarakat yang berasal dari Indramayu mencari ikan disekitar kepulauan seribu Jakarta, kemudian perahu mereka berlabuh di Cilincing Tanjung Priuk Jakarta Utara. Salah seorang dari mereka bernama Takmad yang pada saat itu berumur 28 tahun, memiliki ilmu bela diri Silat dan ilmu kebatinan. Selama dalam perjalanan sebagai nelayan rekan-rekannya sering mendapat gangguan dari alam maupun dari orang-orang sekitar pelabuhan tempat dia berlabuh, tetapi Takmad dapat mengatasi itu semua dengan kebatinan dan ilmu pengobatan yang ia miliki. Ketika waktu luang Takmad mengajarkan ilmu bela diri (silat), latihan kanuragan dan ilmu kebatinan kepada rekan-rekannya dengan memanfaatkan gudang kosong tempat pengolahan ubur-ubur.

Pertengahan tahun 1974 atas dasar permintaan para murid (rekan-rekan nelayan), ia diminta pulang ke Indramayu dan menetap di Desa Krimun RT 13 RW 03 Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, 400 meter dari tempat

padepokan sekarang. Hal ini dengan harapan agar Takmad lebih serius lagi dalam melatih mereka. Semula yang mereka pelajari adalah ilmu silat dan ilmu ngaji rasa. Ilmu silat yang mereka pelajari adalah aliran yang dinamakan SS (Silat Serbaguna - Aliran putih). Selain sebagai guru silat, dia juga dikenal sebagai paranormal, dengan keahliannya itu dia didatangi oleh banyak orang untuk berobat dari berbagai macam penyakit. Dalam pengobatan tersebut dia tidak pernah menentukan biayanya, berapapun diberi diterimanya. Para tamu yang datang berasal dari berbagai kalangan dengan keperluan yang berbeda-beda.

Ilmu yang dimiliki oleh Takmad diperoleh melalui guru yang bernama Alidan berasal dari Banten, ketika ia tinggal di daerah Tomang Atas Jakarta Barat, menurut informasi yang lain gurunya bernama Midun berasal dari Aceh. Ketika itu ada beberapa orang murid Alidan yang lulus dengan baik dan memiliki kelebihan (indera ke 6) yang dapat menerawang secara batin dengan baik. Pada awal berdirinya murid-murid Takmad memakai pakaian biasa, kemudian memakai pakaian hitam-hitam, dan sekarang murid utamanya yang berjumlah 90 orang, tidak pakai baju (bertelanjang dada), hanya memakai celana sampai ketulut, dengan warna hitam dan putih. (*Kodim 0616; Padepokan Aliran Kepercayaan Suku Dayak Losarang:2007, hal 2-3*).

Pada awal tahun 1998 perguruan Silat Serbaguna (SS) berubah fungsi menjadi "Padepokan Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu" dengan mengembangkan ajarannya yang disebut Ilmu Ngaji Rasa dengan wakilnya Warlan. Saat ini jumlah pengikutnya di klaim sebanyak 7000 orang dengan murid inti sebanyak 90 orang. Jumlah ini diragukan oleh berbagai pihak, sebab yang datang kepadepokan biasanya tidak sebanyak itu, jumlah tersebut lebih digunakan

untuk kepentingan tertentu (politik dan ekonomi). Murid inti komunitas ini tidak memakai baju dan hanya memakai celana pangsi sebatas betis, memakai asesoris (kalung, gelang, ikat pinggang, parang dan gelang kaki terbuat dari bambu/kayu), 900 orang murid pemula dengan ciri berpakaian celana dan baju warna hitam, dan 7000 orang calon murid berpakaian seperti umumnya masyarakat biasa, diantara murid-muridnya sebanyak 1800 orang berdomisili secara menyebar di wilayah Kabupaten Indramayu dan yang lainnya berdomisili di luar wilayah Kabupaten Indramayu seperti Subang, Majalengka, Sumedang, Sumber dan Cirebon. (Kodim 0616: *Ibid*, hal 4).

Lokasi padepokan mereka terletak tidak jauh dari Pantai Eretan Wetan, disepanjang lajur sebelah kanan jalan by pass dari arah Jakarta ke Cirebon (jalur Pantura), terdapat sebuah jalan kecil yang bila ditelusuri dapat sampai ke lokasi pemukiman Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu. Orang luar sering menyebutnya dengan istilah "Dayak Losarang" atau "Dayak Indramayu". Di dalam padepokan terdapat beberapa bangunan yang terdiri atas: rumah pemimpin suku, pendopo, pesarean, dan pesanggrahan. (Toto Sucipto: *Sekilas mengenai Suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu Indramayu*, hal 1).

### Asal Usul Penamaan

Menurut penjelasan warga komunitas ini, Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu mengandung makna sebagai berikut: Kata suku berarti kaki, yang mengandung makna bahwa setiap manusia berjalan dan berdiri di atas kaki masing-masing untuk mencapai tujuan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kata dayak berasal dari kata "ayak" atau "ngayak" yang artinya memilih atau menyaring, dalam arti menyaring dan memilah dan

memilih mana yang benar dan mana yang salah. "Hindu" artinya kandungan atau rahim. Filosofinya bahwa setiap manusia dilahirkan dari kandungan sang ibu (perempuan). Sedangkan kata Budha asal dari kata "wuda" yang artinya telanjang, maksudnya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan telanjang. Selanjutnya kata "Bumi Segandu Indramayu". "Bumi" mengandung makna wujud, sedangkan "segandu" bermakna seujur badan. "Bumi Segandu" bermakna sebagai kekuatan hidup. Adapun kata "Indramayu" mengandung pengertian "In" maknanya inti, "darma" artinya orang tua, dan kata "ayu" artinya perempuan. Makna filosofinya bahwa ibu (perempuan) merupakan sumber hidup, karena dari rahimnya-lah kita semua dilahirkan. Itulah sebabnya mereka sangat menghormati kaum perempuan, yang tercermin dalam ajaran dan kehidupan mereka sehari-hari. (Toto Sucipto; *Ibid*, hal 3-4)

Pemimpin komunitas ini menjelaskan, meskipun mereka menggunakan kata "Hindu dan Budha" bukan berarti mereka penganut agama Hindu atau Budha. Penggunaan kata Hindu karena komunitas ini meneladani kehidupan kelima tokoh Pendawa yang terdiri atas: Yudistira, Bima (Wrekudara), Arjuna (Permadi), Nakula, dan Sadewa, serta tokoh Semar yang dipandang sebagai seorang guru yang sangat bijaksana. Adapun penyebutan kata "Budha" karena mereka mengambil inti ajaran "Aji Rasa" (tepek seliro) dan kesahajaan yang merupakan inti ajaran agama Budha. (Toto Sucipto: *Ibid*, hal 5).

### Konsep-Konsep Ajaran Sajarah Alam Ngaji Rasa

Ajaran yang dikembangkan oleh Takmad Diningrat disebut dengan *Sajarah Alam Ngaji Rasa*. *Sajarah* adalah perjalanan hidup (awal, tengah, dan akhir)

berdasarkan ucapan dan kenyataan. Sementara "alam" adalah sebuah ruang lingkup kehidupan atau sebuah wadah kehidupan. Adapun "ngaji rasa" adalah tatacara atau pola hidup manusia yang didasari dengan adanya rasa yang sepuas mungkin harus dikaji melalui kajian antara salah dan benar, dan dikaji berdasarkan ucapan dan kenyataan yang sepuas mungkin harus bisa menyatu dan agar bisa menghasilkan sari atau nilai-nilai rasa manusiawi, tanpa memandangi ciri hidup, karena pandangan salah belum tentu salahnya, pandangan benar belum tentu benarnya. " Oleh karena itu, kami sedang belajar ngaji rasa dengan prinsip-prinsip jangan dulu mempelajari orang lain, tapi pelajarilah diri sendiri antara salah dengan benarnya dengan proses ujian mengabdikan diri kepada anak dan isteri". ( Toto Sucipto, Ibid, hal 6-7).

Konsep-konsep ajaran ini tidak didasarkan pada kitab suci, aliran kepercayaan, agama, maupun akar budaya tertentu. Mereka berusaha mencari *pemurnian diri* dengan mengambil teladan sikap dan prilaku tokoh pewayangan Semar dan Pendawa Lima yang dianggapnya sangat bertanggung jawab terhadap keluarga.

Proses menuju pemurnian diri, menurut Takmad melalui beberapa tahap yang harus dijalani dengan menjauhkan diri dari keramaian dunia yang mengejar kesenangan duniawi. Tahap-tahap tersebut adalah:

**Wedi → sabar → ngadirasa (ngajirasa) → memahami benar-salah**

Pada awalnya, setiap manusia *wedi-wedian* (takut, penakut) baik terhadap alam maupun lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, manusia harus mengembangkan perasaan *sabar* dan *sumerah diri* dalam arti berusaha selaras dengan alam tanpa merusak alam. Prinsipnya adalah jangan merusak alam apabila tidak ingin terkena murka alam.

Itulah yang disebut dengan *ngaji rasa* atau *ngadirasa*. Setelah bersatu dan selaras dengan alam, dalam arti mengenal sifat-sifat alam, sehingga bisa hidup dengan tenteram dan tenang karena mendapat lindungan dari *Nur Alam* (pencipta alam), manusia akan memahami benar-salah dan selanjutnya dengan mudah akan mencapai pemurnian diri; manusia tidak lagi memiliki kehendak duniawi. Cerminan manusia yang telah mencapai pemurnian diri, yaitu manusia yang telah memahami benar-salah, tampak dalam kehidupannya sehari-harinya. Manusia yang telah mencapai tahap tersebut, akan selalu jujur dan bertanggung jawab. (Ibid, hal 7).

*Ngajirasa*, ajaran yang diakui sebagai jalan menuju pemurnian diri, mendidik setiap pengikutnya untuk mengendalikan diri dari "TIGA TA" (harta, tahta, dan wanita). Bagi para pengikut yang telah menikah, suami harus sepenuhnya mengabdikan diri pada keluarga. Suami tidak boleh menghardik, memarahi, atau berlaku kasar terhadap anak isterinya. Oleh karena itu, perceraian merupakan sesuatu yang dianggap pantang terjadi. Demikian juga, hubungan di luar pernikahan sangat ditentang. "Jangan coba-coba berzinah apabila tidak ingin terkena kutuk sang guru," demikian salah seorang pengikut Takmad mengungkapkan.

*Ngajirasa* juga mengajarkan untuk saling mengasihi kepada sesama umat manusia. Misalnya, menolong orang yang sedang kesulitan walaupun berbeda kepercayaan, tidak menagih utang kepada orang yang diberi pinjaman. Yang terbaik adalah membiarkan orang yang berutang tersebut untuk membayar atas kesadarannya sendiri. Demikian juga dalam hal mendidik anak, sebaiknya tidak terlalu banyak mengatur karena yang bisa mengubah sikap dan prilaku adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Jalan menuju pemurnian diri juga ditunjukkan dengan hidup yang sederhana, menjauhi

keinginan mengejar kesenangan duniawi, menghilangkan perasaan dendam, penasaran, dan iri kepada orang lain.

Konsepsi tentang alam tampak dari keyakinan bahwa dunia berasal dari *bumi segandu* (bumi yang bulat) bernama Indramayu. Bumi segandu kemudian menimbulkan lahar menjadi daratan, kekayon, dan air. Setelah itu muncul alam gaib, yang mengendalikan semua itu adalah *Nur Alam*. (*Ibid*, hal 8).

### Ritual

Ritual yang dijalankan oleh anggota Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu dilakukan pada setiap Malam Ju'mat Kliwon, bertempat di Pendopo Nyi Ratu Kembar. Beberapa puluh orang laki-laki bertelanjang dada dan bercelana putih-hitam, duduk mengelilingi sebuah kolam kecil di dalam pendopo. Sementara itu kaum perempuan duduk berselonjor di luar pendopo. Ritual diawali dengan melantunkan Kidung Alas Turi dan Pujian Alam secara bersama-sama. Salah satu bait dari Pujian Alam, artinya berbunyi sebagai berikut:

"Ada (pada) saya ada (pada) kamu, lahirnya aku tumbuhnya kamu, jumlahnya ada berapa, jumlahnya ada lima.

Adanya di badan kita, Rohbana ya rohbana (2X), rubahnya batin kita.

Di dunia sabar, jujur, nerima, hidup, sembuh (sadar), tumbuh, dirawat, (supaya) bagus."

Selesai melantunkan Kidung dan Pujian Alam, Takmad Diningrat memberikan cerita pewayangan tentang Kisah Pendawa Lima dan guru spritual mereka, Semar. Usai paparan wayang, Takmad memberikan petuah-petuah kepada para pengikutnya. Paparan wayang dan petuah ini berlangsung hingga tengah malam. Usai itu, para

lelaki menuju sungai yang terletak di belakang benteng padepokan. Di sungai dangkal itu mereka berendam dalam posisi terlentang, yang muncul hanya bagian mukanya saja. Mereka berendam hingga matahari terbit. Ritual ini disebut *kungkum*.

Siang harinya, disaat sinar matahari sedang terik, mereka berjemur diri, yang berlangsung dari sekitar jam 9 hingga tengah hari, ada juga yang menyebut dari jam 12 hingga terbenam matahari. Ritual berjemur diri ini disebut *pepe*.

Medar (menceritakan) cerita pewayangan, *kungkum* (berendam), *pepe* (berjemur), dan melantunkan Kidung dan Pujian Alam, adalah kegiatan ritual mereka yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok ini sehari-hari. Kegiatan secara massal hanya dilakukan pada setiap malam Jumat Kliwon.

Ritual-ritual ini pada dasarnya adalah sebagai upaya mereka menyatukan diri dengan alam, serta cara mereka melatih kesabaran. Semua ini dilakukan tanpa ada paksaan. "Bagi yang mampu silakan melakukannya, tapi bagi yang tidak mampu, tidak perlu melakukan, atau lakukan semampunya saja", ungkapnya. (wawancara dengan Takmad: 4-4-2011, Toto Sucipto: *ibid*, hal 8-11).

### Perkembangan Kebijakan Pemerintah tentang Pelayanan Publik

Berdasarkan GBHN tahun 1978, Aliran Kepercayaan bukan agama, oleh sebab itu pembinaan Aliran Kepercayaan dilakukan agar mereka kembali kepada agama induknya. Dalam pasal 29 UUD 1945 disebutkan: (1) Negara didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memilih agamanya, dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kata "kepercayaan"

dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945 itu telah memiliki multi interpretasi yang dampaknya tidak sederhana. Bagi aliran kepercayaan seperti: Sapto Dharma, Paguyuban Sumarah, Subud dan Pangestu, yang merupakan aliran kepercayaan utama yang keberadaannya jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan, pasal 29 yang memuat kata "kepercayaan" dianggap merupakan pengakuan negara terhadap aliran kepercayaan setaraf dengan agama-agama besar lainnya. Dengan pengertian seperti itu mereka meminta dilayani dan diakui eksistensinya sebagaimana pemerintah melayani agama. Sebaliknya, bagi kelompok Islam orthodox, aliran kepercayaan semacam itu harus "dibina" dan dikembalikan pada agama induknya. (Anas Saidi: 2004;7-8).

Dengan mengacu kepada GBHN tersebut, maka keluarlah kebijakan pemerintah, agar penganut kepercayaan lokal bergabung dengan salah satu agama dari lima agama yang ada pada waktu itu. Karena dianggap ada kedekatan antara agama Hindu dengan beberapa kepercayaan lokal, maka beberapa kepercayaan lokal digabungkan kedalam Hindu, seperti Kaharingan di Kalimantan Tengah, Aluk Todolo di Tana Toraja, kepercayaan masyarakat Tengger di Tengger dan Towani Tolotang di Sulawesi Selatan. Demi untuk menyelamatkan diri, maka dengan terpaksa kelompok-kelompok kepercayaan lokal ini mengikuti kebijakan tersebut. Maka ditulislah didalam KTP, Akte Kelahiran dan surat-surat penting lainnya dengan mencantumkan agama yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut.

Melalui kebijakan tersebut pemerintah tidak memberikan pelayanan dan bantuan terhadap penganut kepercayaan-kepercayaan lokal. Setelah era reformasi, arus keterbukaan informasi dapat diakses oleh kelompok-kelompok ini. Kalangan aktifis HAM-

pun menyuarakan dukungan terhadap eksistensi kelompok-kelompok ini. Dengan dikeluarkannya UU tentang HAM, dan tekanan dari para pejuang HAM, maka pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam UU Adminduk ini, tidak ada lagi kewajiban bagi pemeluk kepercayaan lokal dan aliran kepercayaan untuk mencantumkan agamanya. Bagi mereka boleh tidak mencantumkan nama agama cukup diberi dengan tanda strip (-).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyani Wongso, Kasi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, pemerintah daerah sudah memberikan pelayanan kepada komunitas kepercayaan lokal dan aliran kepercayaan sepanjang mereka melaporkan diri. Selama ini baru ada satu orang yang mengurus administrasi kependudukannya dengan menggunakan sebuah aliran kepercayaan (Wawancara tgl 6-4-2011). Menurut keterangan Camat Losarang Ahmad Mihdan, selama ini mereka telah memberikan pelayanan kepada komunitas Takmad. Mereka umumnya baru mengurus KTP kalau mau menikah. Umumnya mereka menikah menurut agama Islam, karena pihak perempuannya beragama Islam. Dia memberikan contoh Safrudin (Udin) dan adiknya mengurus KTP ketika mau menikah dengan orang Eretan. Takmad tidak mempunyai KTP karena merasa tidak perlu, sebab dia sudah menikah (Wawancara tgl 4-4-2011). Kepala KUA pun melayani pernikahan mereka sepanjang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Ada satu kali pernikahan dibatalkan, karena penganten pria tetap tidak mau pakai baju, sesuai dengan kebiasaan mereka. Jadi sebenarnya mereka sendiri yang merasa tidak berkepentingan untuk mempunyai KTP.

Kelompok Dayak Hindu Budha Bumi Segandu ini, pada tahun 2004 sempat menghebohkan masyarakat, karena pimpinannya mengeluarkan pernyataan menjadi Golput dalam pemilu 2004. Pada hal pada pemilu 2009 mereka mendukung PDIP dan Megawati. Dengan mencuatnya kasus tersebut, maka kelompok ini menjadi perhatian pemerintah.

Dalam menyikapi masalah Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi segandu ini nampaknya, masih ada sikap aparat pemerintah dan masyarakat yang memakai kebijakan pada masa Orde Baru, dimana kelompok semacam ini harus dikembalikan kepada agama induknya dalam hal ini Islam. Hal ini terlihat dari *surat Kepala Kepolisian Wilayah Cirebon yang mengharap agar Kapolres Indramayu mengambil langkah-langkah pembinaan dan pengawasan agar mereka kembali menganut agama yang dipercaya dan kembali ke peradaban yang berkembang dewasa ini. Bahkan Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan ajaran Takmad tergolong sesat (Lihat Telaah dan Kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu tentang Suku Dayak Losarang, 24-9-2007).*

Untuk menyelesaikan masalah Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu ini pada tanggal 25 Oktober 2007, tidak lama setelah keluarnya fatwa MUI, diadakan pertemuan Tim PAKEM Kabuapten Indramayu. Rapat PAKEM membuat kesimpulan: (1) Kegiatan kelompok Takmad dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, oleh karenanya demi kemandirian, ketertiban dan ketenteraman masyarakat, Bupati Kabupaten Indramayu berdasarkan UU No 32 tahun 2004, pasal 27 ayat 1 berwenang untuk mengambil kebijakan membekukan kegiatan, melarang atau membubarkan kelompok Aliran Kepercayaan Dayak Losarang yang dipimpin oleh Takmad; (2) Aliran

Kepercayaan yang dipimpin oleh Takmad tidak berdasarkan pada ketuhanan, sehingga dapat menyesatkan masyarakat (meresahkan umat Islam) dan termasuk perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. (3) Kelompok Takmad telah bertentangan dengan Pancasila (Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 27 UUD 1945). Berdasarkan pertimbangan tersebut Tim PAKEM merekomendasikan agar Bupati membekukan Aliran Kepercayaan/ Padepokan Dayak Hindu Budha Bumi Segandu pimpinan Takmad. (Lihat Surat Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Nopember 2007). Keputusan ini mendapat protes dari pihak Kelompok Takmad, sehingga mencuat kepermukaan.

Pihak Takmad melaporkan hal ini ke Komnas HAM. Maka diutuslah Ahmad Baso ke Indramayu. Diadakan pertemuan antara pihak pemerintah dan kelompok Takmad. Komnas HAM, meminta agar pemerintah daerah menunda keputusannya, menunggu kajian dari pihak Komnas HAM. Dengan pertimbangan untuk kepentingan politik (Pilkada), Bupati belum mengeluarkan keputusannya, dengan alasan hal ini telah diserahkan kepada pemerintah pusat. Kebijakan ini nampaknya cukup elegan, karena dengan alasan itu, maka Bupati terhindar dari tuntutan masyarakat. Sampai sekarang kelompok ini masih dengan bebas dapat menjalankan kegiatannya.

### **Relasi Sosial dengan Masyarakat Sekitar**

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan melalui wawancara dengan Ketua RT 013 Bapak Sudirman dan seorang warga tetangga Takmad, Riyanto, ternyata informasi yang berkembang dalam masyarakat tidak seluruhnya benar.

Dikatakan bahwa kelompok mereka eksklusif, tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat setempat, ternyata menurut kedua orang tersebut adalah sebaliknya.

Menurut Riyanto, Takmad selalu hadir dalam acara tahlilan di lingkungan warga meski duduk di luar. Kalau ada orang membangun mushalla ia menyumbang semen. Kalau ada acara pada malam Jumat Kliwon anak-anak pada senang, karena kalau datang ke tempat Takmad selalu diberi uang. Kalau ada gotong royong, dia mengirim wakilnya, dia sendiri tidak datang karena merasa sudah tua. Kalau hari lebaran banyak tetangga yang datang ke rumah Pak Tahmad. Kalau ada orang hajatan, dia datang, bahkan dia kadang-kadang dicantumkan sebagai turut mengundang. Karena Takmad dalam masyarakat setempat dianggap tokoh masyarakat. Sebagai bukti dia merupakan tokoh masyarakat banyak orang yang datang ke tempat Takmad mulai dari masyarakat biasa sampai para tokoh nasional, seperti Ratu Hemas (Isteri Sultan HB X), Ahmad Baso (Komnas HAM), Aliansi Bhineka Tunggal Ika, calon legislator dan calon Bupati. Menurutnya menjelang pemilu atau pemilukada banyak yang datang, dengan membawa bantuan. (Wawancara dengan Ketua RT 13 RW 03 Desa Krimun: Sudirman dan Riyanto, tanggal 5 April 2011).

Menurut SDM (Ketua RT) masyarakat disini dapat menerima keberadaan Takmad, dan mereka dapat bergaul, apalagi orangnya suka membantu walau tanpa diminta. Soal paham terserah masing-masing saja, yang penting jangan saling mengganggu. Menurutnya selama ini tidak ada pengaduan dari masyarakat tentang hal yang negatif dilakukan oleh kelompok Takmad. Pada tahun 2005 memang ada tuduhan dari MUI dan NU bahwa ajaran Takmad sesat. Ketika mau diadakan klarifikasi yang dimediasi oleh

Aliansi Masyarakat Bhineka Tunggal Ika (AMBTI), kelompok tersebut tidak datang, pada hal Takmad ingin menjelaskan bahwa ia tidak sesat. (Wawancara, tgl 5-4-2011).

Menurut Kanit Intel Polsek Losarang (STR), masyarakat sekitar tidak mempermasalahkan keberadaan Dayak Segandu. Selama mereka tidak mengganggu keamanan, kepolisian tidak mempermasalahkan keberadaan mereka. Selama ini belum ada komplain dari masyarakat. Banyak masyarakat yang datang ke Padepokan, untuk berobat atau meminta hajat sesuatu. (wawancara, tgl 5-4-2011)

Pihak MUI pun nampaknya sudah melunak., sebagaimana dikatakan oleh ketuanya (KH.JM):" selama dia tidak mengganggu atau menjelek-jelekan Islam, tidak apa-apa. Kalau sekarang tidak lagi menjelek-jelekan Islam tidak ada masalah, kita menjaga situasi yang kondusif. Tugas MUI hanya mengajak, karena mereka tidak beragama. Kalau tidak mau terserah mereka." (wawancara tanggal 5 April 2011).

Memang yang sekarang menjadi persoalan bagi masyarakat adalah komunitas ini kalau datang ke Kantor Pemerintahan atau bertamu ketempat warga, tidak pakai baju, sehingga masyarakat merasa risih. Selain itu mereka kalau naik motor tidak mau pakai helm, hanya memakai topi dari kukusan. Hal tersebut dianggap masyarakat sebagai tindakan diskriminatif oleh kepolisian, mengapa mereka dibiarkan sedangkan masyarakat lainnya kalau tidak pakai helm ditangkap oleh polisi.

### Dinamika Ajaran Takmad

Ajaran yang dikembangkan oleh Takmad Diningrat mengalami perkembangan, karena faktor situasi dan kondisi pengikutnya. Pada mulanya dia

mendirikan perguruan silat yang diberi nama Padepokan Silat Serbaguna (SS). Pada mulanya anggotanya memakai pakaian biasa saja, kemudian anggotanya harus memakai pakaian hitam-hitam untuk membedakan perguruanannya dengan perguruan lainnya. Menurut informasi dibubarkannya Padepokan Silat Serbaguna karena ilmu yang diajarkannya, banyak disalahgunakan oleh muridnya. Murid padepokannya lambat laun berkurang semakin sedikit. Kemudian dia banyak bersemedi dan merenung, maka dikembangkannya ajaran yang disebutnya Sajarah Alam Ngaji Rasa. Maka terhadap anggotanya bagi yang mau, harus memakai pakaian khusus, yaitu celana sampai ketulut berwarna hitam dan putih yang merupakan simbol bumi dan langit. Kemudian dikembangkan pula ritual berupa Kungkum dan Pepe, selain itu dia juga melakukan pengobatan dan melayani permintaan seseorang tentang sesuatu. Nampaknya hal ini menarik bagi masyarakat, sehingga jumlah anggotanya semakin berkembang. Kebetulan dia tinggal di dekat pantai yang pada umumnya masyarakat pantai hidup sebagai nelayan yang sangat memerlukan bantuan supranatural dalam menghadapi dahsyatnya gelombang laut. Nampaknya hal inilah yang mempertemukan kebutuhan kedua pihak ini.

Kebijakan pemerintah terhadap kelompok kepercayaan lokal atau aliran kepercayaan, nampaknya belum dapat berubah. Hal ini nampak dari hasil kajian MUI dan keputusan Tim PAKEM Kabupaten Indramayu. Walaupun demikian Bupati sebagai pejabat yang mengambil keputusan, nampaknya mempertimbangkan beberapa faktor sehingga jabatannya berakhir dia tidak mengeluarkan keputusan membubarkan dan melarang kegiatan kelompok Dayak Hindu Budha Bumi Segandu. Dari segi politis dia memerlukan dukungan dari kelompok ini bagi partainya dalam

Pemilu tahun 2009 dan Pemilukada yang diikuti oleh isterinya pada tahun 2010. Selain itu karena adanya tekanan dari kelompok pejuang HAM, dia khawatir kalau keputusan yang dibuatnya dianggap melanggar HAM.

Dalam masalah hak-hak sipil, mereka sudah dilayani, walaupun mereka menggunakan agama Islam. Pada hal sebenarnya walaupun mereka menggunakan identitas aliran kepercayaan mereka akan dilayani, sayangnya mereka tidak mau mengaku kelompok mereka sebagai agama maupun aliran kepercayaan. Dalam masalah relasi sosial, terjalin hubungan yang baik diantara kelompok ini dengan masyarakat sekitar. Hal ini karena mereka mengenal Takmad sebagai orang yang baik, bisa bergaul, dan suka membantu. Beda pemahaman bagi mereka tidak masalah selama mereka dapat hidup berdampingan secara damai, dan tidak saling mengganggu. Kalau terjadi riak-riak kecil dalam hubungan mereka dengan komunitas luar, hal itu lebih disebabkan persaingan ekonomi dan politik.

## Penutup

Dari paparan di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal berikut; a) Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu sejak berdirinya telah mengalami dinamika internalnya, baik dari segi namanya maupun ajarannya. Perubahan tersebut dilakukan untuk menghadapi tantangan yang terjadi karena kondisi sosial yang berubah; b) Pada umumnya kebijakan pemerintah di daerah masih menganut pola lama, yaitu dalam rangka menjaga stabilitas. Dengan kebijakan tersebut maka setiap kelompok keagamaan atau aliran kepercayaan yang dianggap dapat mengganggu harmoni sosial cenderung untuk dilarang dan dibubarkan. Meskipun demikian sudah

ada pelayanan hak-hak sipil terhadap kelompok kepercayaan lokal dan aliran kepercayaan; c) Hubungan Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu dengan masyarakat sekitar terjalin baik, karena adanya saling pengertian. Jika ada persoalan biasanya berangkat dari masalah politik dan ekonomi.

Penulis merekomendasikan beberapa hal berikut; a) Dalam rangka mendapat pelayanan hak-hak sipil, sebaiknya Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu menyebut dirinya sebagai aliran kepercayaan. Mereka tidak jelas

mengelompokkan dirinya pada agama, aliran kepercayaan atau masyarakat adat; b) Pemerintah daerah dalam membuat keputusan terhadap suatu aliran keagamaan, aliran kepercayaan, atau suatu komunitas tertentu, hendaknya memperhatikan hak-hak asasi manusia dan kebebasan, sehingga kebijakan yang dibuat tidak diskriminatif; c) Untuk lebih meningkatkan relasi sosial dengan masyarakat luas, Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu perlu diperhatikan kritik-kritik yang dilakukan oleh masyarakat seperti dalam penggunaan helm dan cara berpakaian ketika berada di tempat umum.

### Daftar Pustaka

- Afia, Neng Darol, (Ed), (1998): *Tradisi dan Kepercayaan Lokal pada Beberapa Suku di Indonesia*, Jakarta, Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI.
- Budi Hartawan, *Hubungan Komunitas Aliran Takmad Dengan Masyarakat di Krimun Losarang Indramayu*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Fauziah: *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Komunitas Islam: Dalam Realitas Perkawinan Monogami, Poligami dan Sirri di Kabupaten Indramayu*, Makalah Seminar, 2011.
- Geertz, Clifford, (1981), *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Jaya).
- Inggried Dwi Wedhaswary: *Kaum Minoritas yang Hidup Damai di Bumi Losarang*.
- Komando Distrik Militer 0616; *Padepokan Aliran Kepercayaan Suku Dayak Losarang*, 2007.
- Kasi Penamas Kementerian Agama Kabupaten Indramayu; *Penanggulangan Kelompok Suku Dayak Indramayu*, 2005.
- Mas'ud, Abdurrahman (2009): *"Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan"*; Dialog, Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan.
- Noorsalim, Mashudi, M.Nurkhoiron, Ridwan al-Makassary,(ed), (2007), *Hak Minoritas, Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*, Jakarta, Interseksi Foundation.
- Pepe dan Blegiran Dayak Losarang (Pikiran Rakyat, 23 November 2007).
- Parekh, Bikhu, (2000), *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, (London: Macmillan)
- Rumadi dkk, (2009), *Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Problematika Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia*, Jakarta: the WAHID Institute.

Suket, *Sesatkah Komunitas Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu*.tt.

Saidi, Anas (Ed.), Abdul Aziz dkk. (2004): *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijakan Agama Orde Baru)*, Cet. 1, Penerbit Desantara.

Spivak, Gayatri C, *Can Subaltern Speaks: Speculation on Widow Sacrifice*, 1985.

Tim Kordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Indramayu: *Rekomendasi atas Kegiatan Aliran Kepercayaan Yang dipimpin Takmad di desa Krimun Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu*, 2007.

### **Publikasi Media**

*Aliran Bumi Segandu Indramayu Resmi di Bekukan* ( NU on line, 6 November 2007).

*Dayak Indramayu: Kemandirian Pemikiran* (budpar.go.id, 26 July 2010).

MUI: *Dayak Losarang Sesat*, <http://www.pikiran rakyat.com>.

*Menengok Kekhasan Komunitas Dayak di Indramayu* (Ekorisanto.blogspot.com).

Marzuki Rais: *Ketika Keyakinan Diatur Fatwa: Polemik Fatwa Sesat MUI terhadap Suku Dayak Indramayu* ([http://www.fahmina.org/fi\\_id/index.php?...eltemid=27](http://www.fahmina.org/fi_id/index.php?...eltemid=27)).

Toto Sucipto, *Sekilas Mengenai Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu*: <http://www.budpar.go.id.com>.

# Dinamika Sosial Keagamaan Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) Pusat di Kota Surakarta Jawa Tengah

**Wakhid Sugiyarto**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  
Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta  
Email: wakhid.sugiyarto@gmail.com

## **Abstract**

*In Surakarta city occur the dynamics which lead to tensions and conflicts caused by the incessant propaganda by Tafsir Qur'an Assembly (MTA). This research is necessary, to understand and manipulate the social condition in order to create harmonious and tolerant situation. Focuses of the research are the historical development of MTA, propagation models, developed basic teachings and religious leaders and the government's responses to MTA. Social religious fidgetiness and tension due to the appearance of MTA indicated caused by the immature attitude and horizon of thinking of the society, especially the bottom stream of society (grassroots). They would hear the appeal of religious scholars (kyai) rather than to forward the reasoning of logical thinking. The conflict was caused by the self-defense expression, backed into a corner and then hit back with physical and rhetoric. This study used a qualitative approach.*

**Keywords:** *Tafsir Al-Qur'an Assembly (MTA), inclusivity, concept of congregation, khilafiyah problem.*

## **Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk menjunjung tinggi kebebasan beragama dan memberikan perlindungan penuh terhadap pemeluk agama dalam mengamalkan keyakinan agamanya. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD)

## **Abstrak**

*Di Kota Surakarta terjadi dinamika yang mengarah pada ketegangan dan konflik akibat gencarnya dakwah oleh Majelis Tafsir Al Qur'an. Penelitian ini sangat diperlukan, untuk memahami dan merekayasa kondisi sosial agar tercipta situasi yang harmonis dan toleran. Fokus penelitian adalah sejarah perkembangan MTA, model dakwah, ajaran pokok yang dikembangkan dan respon tokoh agama dan pemerintah terhadap MTA. Keresahan dan ketegangan sosial keagamaan akibat muncul MTA terindikasi disebabkan oleh belum matangnya sikap dewasa dan cakrawala berfikir masyarakat, khususnya masyarakat arus bawah (grassroot). Mereka lebih mendengar seruan ulama (kyai) daripada mengedepankan nalar berfikir logis. Konflik disebabkan oleh ekspresi membela diri merasa dipojokkan kemudian menyerang balik baik dengan fisik maupun retorika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.*

**Kata kunci:** *Majelis Tafsir Al-Qur'an, sikap inklusif, konsep jama'ah, masalah khilafiyah.*

dijelaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya), setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (Amandemen pertama UUD 1945 pasal 28 E ayat

1 dan pasal 28E ayat 2). Disamping itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 8 & 9 Tahun 2006 Tentang Kerukunan dan Keharmonisan Antarumat Beragama.

Munculnya kasus kekerasan atas nama agama atau konflik tidaklah terjadi serta merta atau muncul secara tiba-tiba tetapi melalui proses sosial panjang. Konflik agama ini dapat muncul kapan saja jika kesadaran masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati kebebasan beragama tidak ditanamkan dalam masyarakat. Kesadaran akan fakta sosial bahwa Indonesia ini memiliki keragaman beragama sangat penting untuk menciptakan perdamaian dan pengingkaran akan keragaman adalah kekeliruan fatal. Berbagai varian penyebab konflik kekerasan yang terjadi di Indonesia, membutuhkan kajian serius sehingga kemajemukan masyarakat Indonesia tidak berada dalam bayang-bayang konflik kekerasan.

Berbagai kasus yang muncul di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat masih rentan terhadap konflik bernuansa agama. Di Kota Surakarta misalnya, yang dipandang relatif aman dan jauh dari konflik *sara*, sudah muncul ketegangan sosial terkait dengan perbedaan pemahaman keagamaan setelah semakin gencarnya dakwah yang dilakukan oleh Majelis Tafsir Al Qur'an (MTA). Ketegangan dan keresahan itu bermula dari Radio MTA dan MTATV di Kota Surakarta yang mengungkap kembali pertikaian lama, yang sekaligus menyebabkan sebagian umat Islam tidak menyukai MTA. Penelitian dinamika sosial keagamaan MTA ini sangat diperlukan, untuk memahami dan upaya rekayasa sosial keagamaan yang lebih harmonis dan agar toleransi semakin tinggi. Harus dipahami jika agama masih mengutamakan formalitas, maka agama

akan syarat dengan muatan konflik, karena ajaran agama memiliki keterikatan emosional menyangkut nilai kebenaran yang diyakini dan mengandung nilai kebenaran absolut serta menjadi pandangan hidup bagi pemeluknya yang tidak bisa diganggu gugat.

### **Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian berkaitan dengan dinamika sosial keagamaan masyarakat Kota Surakarta ini memfokuskan pada permasalahan; a) Bagaimana sejarah perkembangan MTA?; b) Bagaimana model dakwah keagamaan MTA?; c) Apa ajaran pokok yang dikembangkan dan menimbulkan keresahan?; serta d) Bagaimana respon tokoh agama dan pemerintah terhadap gerakan dakwah oleh MTA?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu; a) Mengetahui sejarah perkembangan MTA?; b) Mengetahui model dakwah MTA?; c) Mengetahui ajaran pokok yang dikembangkan sehingga menimbulkan keresahan?; d) Mengetahui respon tokoh agama, dan pemerintah terhadap gerakan dakwah MTA?

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kebijakan pemerintah dalam mencegah konflik dan kekerasan atas nama agama yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kota Surakarta dan sekitarnya.

### **Kerangka Konsep**

Sampai hari ini, sebenarnya belum ada definisi agama yang secara resmi dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam rangka mengatur kehidupan keagamaan di Indonesia, meskipun para ilmuwan sosial sudah mengkajinya. Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada

Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Pada intinya agama adalah sistem kepercayaan yang didalamnya memuat aturan moral dan ritual yang mampu membentuk sebuah ikatan (komunitas) dan diwariskan.

Dalam kehidupan sosial keagamaan, kekuatan agama diketahui terbangun dari sistem kepercayaan yang diyakini memiliki kebenaran absolut sebagai bentuk peneguhan keyakinan. Implementasi dari keyakinan dan ajaran moral inilah yang membentuk perilaku agama dalam bentuk ritual dan sikap hidup. Agama sebagai satu kesatuan keakuan yang terbangun dari tiga dimensi, yaitu dimensi keyakinan, dimensi ajaran dan dimensi perilaku sosial. Agama tidak akan memiliki makna apabila tidak mampu memberikan warna pada kehidupan menganutnya. Kekuatan agama sebagai sistem keyakinan dan sistem sosial melahirkan dinamika sosial, karena menuntut para pengikutnya patuh pada ajaran. Pola-pola tertentu pengamalan ajaran agama yang dilaksanakan oleh penganut, akan melahirkan sebuah gerakan keagamaan. Gerakan keagamaan dapat bersifat inklusif atau eksklusif tergantung pada sikap dan penerimaan sebuah agama pada kebenaran-kebenaran lain diluarnya. Dalam sikap gerakan keagamaan yang bersifat inklusif, penganut agama mampu menerima keyakinan kebenaran dari agama lain. Kebenaran ajaran keagamaan tidak menjadi monopoli agama tertentu, tetapi setiap agama memiliki kebenaran sesuai dengan yang diyakini penganutnya.

Perbedaan menurut penganut faham inklusif adalah niscaya, tidak perlu menjadi dasar perbedaan, perpecahan atau pertikaian. Sikap inklusif dalam menyakini agama akan tetap menghargai dan menghormati adanya kebenaran lain. Sebaliknya, sikap keberagaman

eksklusif menilai bahwa kebenaran adalah tunggal, tidak ada kebenaran lain diluar agama yang diyakini. Kebenaran agama merupakan kebenaran absolut yang tidak bisa disandingkan dengan keyakinan agama lain. Penganut paham eksklusif ini menganggap ajaran agamanya adalah yang paling benar.

Di Surakarta terdapat lembaga dakwah yang secara sosial keagamaan dipandang meresahkan karena peneguhan keimanan sebagaimana di atas, dilakukan tidak sesuai dengan norma toleransi masyarakat Jawa, utamanya masyarakat Surakarta yang dikenal sangat toleran. Kebenaran agama seperti menjadi monopolinya, dan yang lain dipandang salah karena tidak sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Lembaga dakwah itu disebut dengan Majelis Tafsir Al Aqur'an (MTA) sebuah lembaga dakwah yang didirikan tahun 1970-an. Bentuk keorganisasiannya adalah yayasan bukan organisasi sosial keagamaan (ormas). Meskipun menyandang sebutan majelis tafsir, tetapi merasa tidak menafsirkan ajaran, hanya menyampaikan yang sudah ada, utamanya Al Qur'an tejemahan Departemen Agama dan buku-buku agama yang sudah ada di toko-toko buku agama, sebagaimana kemudian terbukti dari hasil wawancara dengan banyak informan di Kota Surakarta.

## Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subyek penelitian adalah perilaku keagamaan masyarakat Kota Surakarta (yang diwakili oleh elit agama, masyarakat dan pejabat pemerintah) berkaitan dengan fenomena gerakan keagamaan MTA. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam sumber data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, pengamatan lapangan dan informasi dokumenter.

## Sejarah Perkembangan MTA di Surakarta

Di kalangan muslim, Islam adalah jalan dan pandangan hidup bagi yang percaya kehidupan setelah kematian. Sayangnya, sering disalah pahami, agama tidak lagi menjadi jalan tetapi menjadi tujuan, sehingga banyak yang tidak dapat menemukan hakekat beragama sebagai penghambaan kepada Tuhannya. Penampilan fisik dan tradisi keagamaan yang menjadi simbol identitas sebuah paham, kelompok, aliran atau gerakan keagamaan cenderung dibela mati-matian, tanpa kritik, dan menanyakan apakah tradisi itu sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Pada konteks masyarakat Islam Indonesia, banyak pengamalan agama tidak didasarkan pada ajaran yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian sering disebut dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat (TBC) yang ditentang oleh MTA. (Endang Saefuddin Anshori, 1983).

Majelis Tafsir Al Qur'an (MTA) Surakarta adalah yayasan yang bergerak dalam bidang dakwah, didirikan Abd. Tufail Saputra, 19 September 1972 dan dilatarbelakangi oleh kondisi umat Islam yang menurutnya tidak menjadi baik kecuali kembali kepada Al-Qur'an. (MTA Press:2010). MTA kemudian berkembang ke berbagai propinsi di Indonesia. Dewasa ini memiliki 23 perwakilan, 248 cabang dan 1.259 pengajian gelombang. (MTA Press: 2011).

Dalam pengajian, peserta membentuk kelompok-kelompok pengajian, setelah besar mengajukan permohonan agar dikirim guru, sehingga kelompok pengajian itu berubah menjadi cabang atau perwakilan baru. Ustadz Medi menjelaskan, pendirian sebuah perwakilan/cabang harus memenuhi syarat yaitu : a) ada pengurus yang siap mengelola pengajian; b) ada anggota yang istiqomah mau belajar mengaji; c) adanya kegiatan yang terus menerus dilakukan;

d) ada tempat yang disesuaikan dengan kemampuan, dan diharapkan suatu saat dapat memiliki tempat sendiri. Kedudukan organisasi perwakilan pada prinsipnya berada di tingkat kabupaten, dan cabang berkedudukan di tingkat kecamatan, kecuali di Yogyakarta. Untuk mendirikan kepengurusan sesuai hirarki kepemimpinan, kepengurusan tingkat perwakilan harus didirikan dahulu meski hanya satu cabang. MTA terdaftar tanggal 23 Januari 1974 dengan akte notaris R. Soegondo Notodirejo. MTA bukanlah majelis penafsir al Qur'an, tetapi merupakan lembaga dakwah yang mencita-citakan Islam dilaksanakan sebagaimana *salafusshalih*, mengajak kembali ke al-Qur'an dan as-Sunnah. MTA hanya mensosialisasikan al-Qur'an tafsiran Kementerian Agama dan kitab himpunan yang tersebar di toko buku seperti; Bulughulmaram, Riyadushalihin, soal jawab agama Islam A. Hassan dan sebagainya.

MTA dipimpin seorang imam yang sekaligus sebagai pimpinan tertinggi yang tidak diganti sampai wafatnya, sesuai komitmen organisasi yang berdasar al-Qur'an dan As Sunnah. Dicontohkan oleh ustadz Medi bahwa Rasulullah jadi pemimpin, begitu juga sahabat, tidak ada penggantian sebelum mereka meninggal. Dalam mengaji yang terpenting adalah untuk membenahi diri agar selamat. Oleh karena itu setiap warga MTA memiliki kewajiban; *pertama* sanggup mengamalkan pada tingkat pribadi; *Kedua* sanggup mengamalkan dengan keluarga; dan *Ketiga* sanggup mengamalkan ditingkat masyarakat. Al-quran dan sunnah yang kita pelajari harus diamalkan pada diri masing-masing warga jamaah kemudian keluarga, sebagai upaya bagi seluruh jamaah MTA untuk bisa mengamalkan sesuai dengan Qur'an dan Sunnah. (Wawancara dengan Ahmadi, 12 Juli 2011)

### Model Dakwah Majelis Tafsir Al Qur'an (MTA)

Setiap ormas atau yayasan keagamaan memiliki cara sendiri untuk membangun solidaritas. Di MTA, semua pendukung simpatisan disebut dengan istilah warga yang dimaksudkan supaya bernuansa kekeluargaan. Sebelum menjadi anggota, calon diberi kesempatan mengenal MTA melalui pengajian dan disebut "*mustami*". Seorang "*mustami*" yang telah 3-4 kali mengikuti pengajian akan ditanya kesediaan untuk aktif. Apabila bersedia maka, diberi formulir pendaftaran yang berisi peraturan organisasi yaitu : niat ikhlas *thalabul ilmi*; bermujahadah untuk memahami pelajaran; menyakini dan mengamalkan secara perorangan, rumah tangga dan masyarakat; tertib dalam berpakaian, sopan dalam pembicaraan; menjaga dan menghindari pergaulan bebas; dan menyebarkan pada keluarga dan masyarakat tanpa pamrih.

Selain anggota yang disebut warga, terdapat anggota yang disebut khusus. Sesuai dengan namanya, keanggotaan ini bersifat khusus dan tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang, hanya arang-orang pilihan saja. Warga khusus memiliki kriteria yang ditetapkan pimpinan pusat MTA dan syarat cukup berat, dan dilihat dari keaktifan selama menjadi anggota, pengorbanan (jihad), tingkat pengamalan ajaran Islam dalam organisasi maupun keseharian di masyarakat.

Warga khusus wajib mengikuti pengajian khusus di Solo setiap hari jum'at, apabila tidak bisa datang wajib menyampaikan ijin terlebih dahulu. Ijin itu harus didapatkan terlebih dahulu, baru setelah diijinkan diperbolehkan, tercuai wargaq cabang yang jauh seperti Jakarta dan luar Jawa. Warga khusus wajib mengikuti pendidikan khusus jamaah dan imamah. Hal ini dimaksudkan memberikan perbekalan tentang pembinaan jamaah, jika hasil

pendidikan dapat dipahami, warga khusus diperintahkan untuk melakukan kajian terhadap apa yang telah didapatkan selama mengikuti pendidikan.

Warga khusus memiliki posisi strategis dalam MTA dan diberikan hak dalam pemilihan pengurus. Untuk pemilihan pengurus pada tingkat perwakilan, harus warga yang menduduki pengurus perwakilan atau cabang. Pengurus perwakilan melakukan *fit and properties* yang secara teknis dilakukan oleh perngurus perwakilan. Calon pengurus datang satu persatu ditanya segala hal terkait kesiapan mereka. Hal ini dilakukan karena tanggungjawabnya yang berat, sebab konsekwensinya sampai mati mengabdikan pada agama Islam lewat jalur organisasi MTA.

### Pokok Pengajaran Keagamaan MTA

Paham keagamaan yang dikembangkan adalah paham yang merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. MTA terikat dengan konsep-konsep Islam, seperti konsep agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a.w dan perintah menyiarkan kepada umat manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya. Dari sisi aqidahnya tidak lepas dari keyakinan dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah yang diwujudkan dalam pernyataan tauhid, yaitu: *Asyhadu Anla Illaha Illallah, Wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasululllah*. Karena itu enam unsur pokok keimanan harus ditanamkan pada setiap umat Islam. Unsur keimanan diyakini semua, sebagai satu kesatuan yang utuh. Enam unsur itu adalah mata rantai yang menjadi keharusan keberadaan dan keutuhannya dalam mencapai kesempurnaan Iman. Keimanan kepada Allah, berarti mengimani, membenarkan, dan melaksanakan segala ajaran-Nya dalam al-Qur'an. Keimanan pada

Muhammad berarti mengikuti segala yang dicontohkannya. (Wawancara dengan Ahmad Sukino di Kantor Pusat MTA, 13 Juli 2011).

Doktrin di atas menjadi landasan ideologis MTA agar warga terhindar dari semua kesalahan dalam beragama, yang disebut dengan madzhab al Qur'an dan as Sunnah yang lengkap dan memberikan bimbingan pada manusia mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Ketika orang berpaling dari Al Quran, ia pasti tersesat. Dengan Al-Quran manusia bisa mengambil pelajaran-pelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dasarnya adalah; "Ini adalah sebuah kitab (Al-Qur'an) yang Kami turunkan, penuh berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. (QS. Shaad : 29). "Dan (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain) karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. (QS. Al-An'aam : 153).

Kewajiban ibadah yang mendasar dalam Islam termuat dalam lima rukun Islam. Dalam pengertian rukun, maka ibadah itu harus dipenuhi dan ada dalam pribadi-pribadi muslim yang memenuhi persyaratan. Yang utama yaitu membaca *Ashadu Allah ilahailallah wa asyhadu anna muhammadarrasulullah*". Dua kalimat syahadat merupakan anak kunci memasuki ruang rukun Islam yang lain, seperti shalat, puasa, zakat dan haji di tanah suci. Syahadat adalah doktrin tauhid yang menjadi sumber kehidupan jiwa manusia selama dirinya mengabdikan diri kepada Allah. Tauhid berarti komitmen manusia kepada Allah sebagai fokus dari segala rasa hormat, rasa syukur, dan segala bentuk ibadah di tujukan.

Al-Qur'an adalah tuntunan sempurna yang meliputi seluruh hal-ikhwal kehidupan manusia. Dalam Al-Qu'an disebutkan: "kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa". Sehingga sangatlah jelas bahwa orang muslim yang bertakwa kepada Allah, harus berpedoman kepada Al-Qur'an. Fungsi As-Sunnah dalam padangan MTA berkedudukan sebagai penjelasan isi kandungan al-Qur'an, menjelaskan kesimpulan, membatasi kemutlakkannya, menguarakan kemusykilan (kesulitan) nya. MTA mengambil penjelasan tentang kedudukan Al-Qur'an dengan merujuk pendapat Imam Asy-syathiby sebagai berikut :

*Pertama*, karena Al-qur'an itu diyakini kebenarannya dengan tegas, sedang As-Sunnah keberadaannya masih di dalam. *Kedua*, As-Sunnah itu adakalanya untuk menjadi penjelasan Al-Qur'an semata. Maka dengan sendirinya As-Sunnah terkemudian setelah Al-Qur'an. *Ketiga*, beberapa hadits dan atsar menunjukkan kedudukan hadits sebagai sumber hukum Islam berada setelah al-Qur'an. Diantara petunjuk itu misalnya: Nabi SAW bertanya : "dengan apa engkau menghukumi?" Jawab Mu'adz : dengan Kitab Allah. Nabi SAW berkata : "jikalau tidak kamu dapati? Jawab Mu'adz : dengan sunnah Rasulullah". Tanya Nabi SAW: "jika tidak kamu dapati?" Jawab Mu'adz : "saya berijtihad dengan pikiran saya".

Konsekuensi dari doktrin yang diyakini itu, ada beberapa hal yang menjadi penyebab keresahan. *Pertama* MTA menolak semua praktik ibadah yang tidak pernah dilakukan dan di contohkan oleh nabi. Menurut, Ustad Medi Islam sebelum meniunggalnya nabi sudah sempurna, tidak perlu tambahan hal ibadah. Dalam brosur dijelaskan seseorang yang beribadah hendaknya memahami dengan benar apa dasar atau

dalil dan landasan dalam beribadah, kalau tidak tahu dalilnya jangan sekali-kali melakukan ibadah tersebut, sebab hal itu akan sia-sia. Dalilnya yaitu: Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bahwasanya ada dua perkara (yang penting), perkataan dan petunjuk. Sebaik-baiknya perkataan ialah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad. Ketahuilah, jauhkanlah kalian dari perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya sejelek-jelek perkara itu yang diada-adakan, dan tiap-tiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat.

*Kedua*, MTA tidak bermadzab. Fiqh sebagai panduan praktis dalam beribadah sudah jadi satu dengan tuntunan yang ada dalam Alquran dan Sunnah. Disinilah pimpinan mengarahkan anggota untuk memahami agama dalam versi MTA. Bermadzab adalah bentuk taqlid yang dilarang. Ustad Medi mengatakan: "MTA tidak menganut salah satu madzab yang ada, tetapi menghormati mereka dan mengambil ajaran mereka yang sesuai dengan Al Quran dan Sunnah dan meninggalkan yang tidak sesuai. Madzab yang dianut adalah Madzab Al Quran dan as Sunnah. Oleh sebab itu umat Islam jika ingin beragama yang benar dan lurus harus kembali pada Al Quran dan as Sunnah". MTA menegaskan, tidak terikat dengan ijthid para imam madzab, apapun yang berkaitan dengan ibadah dan kehidupan sosial lainnya, warga MTA harus berpegang pada Al Quran dan as Sunnah. *Ketiga*, menolak praktik Islam bercampur dengan budaya lokal seperti yasinan, tahlilan, manaqiban, selamatan dan sebagainya. (wawancara dengan Ustadz Sukino, Agus, dan Ustadz Medi di kantor MTA 12 Juli 2011).

Pengajian Ahad pagi diperuntukan untuk umum dan disiarkan langsung radio MTA FM frekuensi 109,7 MHZ dan TV MTA. Cakupan radio MTA ini cukup luas bisa mencapai seluruh kabupaten

di sekitar Surakarta, DIY dan diterima dengan baik di Semarang. (wawancara dengan Suhendi dan Umar Rusmanto di Surakarta pada 16 Juli 2011)

## **Respon Tokoh Agama dan Pemerintah Surakarta**

### *Respon Tokoh Agama*

Menurut KH. Abdul Rojak, mengatakan bahwa Sakino kalau bicara bagus dan meyakinkan, tetapi sebenarnya dasar agamanya sangat kurang, tidak bisa bahasa Arab, dan hanya belajar dari al Qur'an dan al Hadits terjemahan. Ajarannya banyak dipengaruhi Wahabi, seperti membid'ahkan semua ajaran yang arif kepada budaya lokal, dan yang mengikuti Sunnah seolah-olah hanya MTA. Bagi Abdul Rojak, belajar melalui terjemahan tidak masalah karena merupakan bagian dari usaha memahami agama, tetapi jangan disiarkan melalui radio, karena dampaknya sangat besar. Apalagi dalam ceramah dan tanya jawab soal agama di radio itu juru bicara MTA sering kelewatan dalam tata bahasa maupun substansi. Warga MTA di mana-mana sering menimbulkan keresahan, seperti kasus di Berruk, Tawangmangu, dimana masyarakat yang melakukan *sadranan* (bersih desa) dibubarkan oleh MTA. Ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Kasus yang sama muncul pula di Purworejo dan Ngawi Jawa Timur. Dewasa ini MTA berkembang pesat di mana-mana, khabarnya hampir setiap bulan meresmikan cabang baru berbagai daerah di Indonesia. Yang mengherankan adalah terjadinya rekrutmen anggota yang cepat dan militan. Situasi seperti ini meresahkan hati KH Abdul Razak, yang menurutnya jika ikut MTA, anggota diperas, seperti harus bayar zakat, infak, shadaqah dan seterusnya. (Wawancara dengan KH. Abdur Rojak, dan Muhammad Faishal, Pengasuh Ponpes Al- Muayyad, tanggal 13 Juli 2011)

Sementara menurut Abdul Karim, selama ini pemerintah menganakemaskan MTA, dan menganaktirikan yang lain, sehingga MTA berkembang pesat di mana-mana. Secara politis, keberadaan MTA tidak berbahaya, meskipun sering menimbulkan keresahan. Sukino memang orang terdidik, pensiunan guru agama di salah satu madrasah Kementerian Agama. Sukino saat ini adalah rohaniawan rumah sakit Yarsis, milik Muhammadiyah. (Wawancara dengan Ahmad Solekhan, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Surakarta di Surakarta, 17 Juli 2011).

Dalam mengembangkan agama, tidak seperti Abdullah Tufail yang awalnya tidak membicarakan khilafiah, tetapi melawan upacara hari senin dan tirakatan. Setelah diganti Sukino, terjadi pro dan kontran dalam keluarga Tufail. Di Purworejo ada adik Tufail yang memiliki pesantren, maka ketika MTA mau membuka Cabang di Purworejo, keluarga Tufail yang ada di Purworejo marah. Semangat penolakan ini ditangkap PCNU Purworejo sebagai peluang penolakan secara massal di Purworejo. (Wawancara dengan Abdul Karim, di Surakarta pada 14 Juli 2011). Rumah di mana warga MTA belajar, disegel masyarakat dan didukung oleh NU Cabang Purworejo. Apabila ada pengajian MTA, selalu diadakan pengajian tandingan oleh non MTA dan *laud spekernya* dihadapkan ke rumah tersebut. Kejadian ini berlangsung cukup lama, kemudian warga MTA melapor kepada Polres untuk membuka segel rumah karena akan digunakan. Ketika disegel sempat terjadi keributan, tetapi karena warga MTA didampingi polisi akhirnya rumah itu bisa dibuka dan dimanfaatkan oleh pemiliknya yang memang warga MTA. Menurut Abd. Karim, ajaran Sukino bertolak belakang dengan Abdullah Tufail. Abdullah Tufail tidak mengungkit khilafiah melalui radio dan tv. Perkembangan MTA sangat pesat karena menguasai semua lini kehidupan

klas bawah sampai elit. Memiliki KBIH, ambulans, balai klinik, sekolah *boarding school*, korban hewan musim haji luar biasa. Namun akhir-akhir Sukino ini sudah berubah sehingga tidak segalak dulu, dan yang dulu dibid'ahkan sekarang terserah saja. (Wawancara dengan Abdul Karim, di Surakarta pada 14 Juli 2011).

Secara sosiologis, orang yang mengikuti ajaran agama model MTA, menjadi merasa lebih besar dari pada kelompok lain, meskipun fakta sosialnya ternyata kecil. Hal ini adalah karena mereka selalu berkumpul dalam jumlah besar dan heboh mengikuti pengajian ahad (jihad) pagi di kantor pusat Jln. Mangkunegaran. Para ulama mengatakan bahwa dakwah dan tarbiyah serta transfer ilmu agama adalah indikasi menguatnya individu. Individu ini kemudian tidak menyadari ketika perasaan seolah komunitas adalah asset penting untuk jangka pendek dan panjang. Transfer ilmu agama yaitu mengantarkan para santri menjadi lebih kuat agamanya, kesatriaan, dan memiliki kebanggaan moralitas. Ketika manusia merasa tidak ada hubungan roh dengan Tuhan maka yang terjadi adalah *adigang adigung adiguno* (jumawa). Kondisi seperti inilah yang dipertontonkan warga MTA saat ini, tidak menghormati orang lain. (Wawancara dengan Dian Hanafi -Radio Gema Suaraku- di Surakarta, 14 Juli 2011)

Sementara Kyai Abdullah Fakhri mengatakan bahwa akibat dakwah model MTA, masyarakat menjadi terkotak-kotak dan kearifan lokal yang menjadi ujung tombak kerukunan dalam masyarakat tergerus. MTA dalam dakwahnya hanya menuruti hawa nafsu, tidak mempertimbangkan akibat lebih jauh dari dakwah yang disampaikan. Masyarakat awam menjadi bingung karena hampir semua elit agama tidak bersatu dan seperti mencari menang sendiri saja. (Wawancara dengan Kyai A. Fakhri, Guru Tafsir Masjid Agung di Surakarta, 14 Juli 2011)

Sementara Omar Rosyidi, mengatakan ajaran MTA memiliki kecenderungan menuju pendangkalan aqidah, dan terlalu berani menyederhanakan pemahaman agama Islam, sehingga muncul anggapan bahwa pendapat ulama dan mujtahid tidak kuat (delegitimasi ulama). Menurutnya agama Islam itu mudah jika mau mudah dan akan kesulitan jika menganggap Islam itu agama yang sulit. Islam kelompok yang telah mapan dianggap MTA sebagai pemahaman agama yang berat dan berat pula dijalankan. (wawancara dengan Omar Rosyidi di Surakarta, 17 Juli 2011). Seorang guru SMK I Solo mengatakan bahwa MTA telah menimbulkan keresahan dan kegundahan umat karena penyudutan terhadap peribadatan yang tidak sesuai dengan fahamnya. Tetapi diakui bahwa MTA dalam menjalankan dakwah dengan cara modern, yaitu melalui radio dan tv, sehingga jangkauan informasi keagamaan masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Disiplin keanggotaan MTA sangat tinggi, sehingga dengan mudah MTA berkonsolidasi organisasi dan mengembangkan sayap ke seluruh Indonesia. (wawancara dengan Trimo Guru Agama SMK I Surakarta, Mantan anggota PP MTA yang mengundurkan diri di Surakarta bersama dengan 21 temannya pada tanggal 15 Juli 2011).

### **Respon Pemerintah Surakarta**

Geger masalah dakwah MTA masuk juga ke Kantor Kementerian Agama Surakarta, dalam bentuk beberapa surat pengaduan sebagai ungkapan kegelisahan atas sepak terjang dakwah MTA. Namun, para pegawai di kantor tersebut juga terbelah dalam memahami sepak terjang MTA. Bagi mereka yang pahamnya cenderung modernis mengatakan bahwa dakwah model MTA tidak perlu dipersoalkan, karena harus seperti itulah Islam. Para da'i MTA tidak salah karena tidak memaksa orang lain untuk

mengikuti model ajaran atau pemahaman keagamaan yang dikembangkan. Kalau tidak bersedia mendengar atau melihat, maka tidak perlu mendengarkan radio dakwah MTA atau nonton MTA TV. Sementara itu yang berkecenderungan tradisional tentu saja mempersoalkan model dakwah MTA yang dianggapnya meresahkan masyarakat.

### **Dinamika Sosial Keagamaan Majelis Tafsir Al-Qur'an**

Dari sejumlah kasus yang ada, salah satu faktor yang menyebabkan konflik adalah pemimpin agama telah memunculkan faham keagamaan tertentu sebagai sebuah wacana yang meminggirkan wacana-wacana lain, sehingga faham tersebut tidak sekadar merupakan faham keagamaan, namun juga merupakan kekuasaan. Karena faham keagamaan berjalanan dengan kepentingan kekuasaan, maka mudah dipahami bahwa konflik dan kekerasan adalah merupakan pilihan cara yang seringkali digunakan. Selain itu dari sisi sejarah, konflik teologis dalam umat Islam tidaklah semata-mata berawal dari cara pandang keagamaan semata-mata, namun juga berawal dari ekspresi politik yang muncul pada dekade awal perkembangan Islam. Ekspresi politik muslim dalam perkembangannya memuat kompetisi dan persaingan sampai dengan penafsiran simbol-simbol demi penguasaan atas institusi-institusi formal dan informal untuk mendukung penafsiran simbol dan kekuasaan. Penggunaan Islam sebenarnya sekadar merupakan jembatan dan bahasa politik untuk mendapatkan legitimasi. Bahasa tersebut dikelola oleh para mediator, yaitu mereka yang modifikasi dan mengelola Islam pada keadaan tertentu dan untuk tujuan tertentu, sebagaimana diperlihatkan dalam kasus penolakan masyarakat Purworejo Jawa Tengah. (Suara Banyumas, 1 April 2011).

Hasil temuan lapangan terkait dengan dinamika kehidupan sosial keagamaan, nampak jelas dari pola ibadah dan dakwah yang dilakukan MTA. MTA berupaya untuk mengembalikan praktek pemahaman agama dan ibadah umat Islam pada masa-masa awal kenabian, sehingga MTA sebenarnya tidak jauh beda dengan Salafiyah, Muhammadiyah, Persis, LDII, dan sebagainya. Beberapa pihak mengemukakan bahwa satu atau dua dekade terakhir telah mencuat istilah gerakan salaf. Ungkapan salaf sebenarnya sudah dikenal di kalangan ulama. Al-Salaf adalah ungkapan yang mengarah ke arah tiga generasi umat Islam awal yaitu sahabat, *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in*. Dakwah salafiyah sendiri kalau dalam konteks bahasa kita bisa diartikan dakwah yang mengacu pada metodologi para ulama salaf. Dalam arti itu, maknanya sama dengan *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, namun berbeda dengan *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dalam pandangan NU. Sebagaimana juga istilah *Ahlussunnah* yang diakui oleh berbagai kalangan yang berbeda-beda.

Penjelasan tentang prinsip Aqidah dan Syariah yang menjadi pegangan MTA menunjukkan bahwa implementasi sikap keimanan kepada Allah seorang muslim adalah melalui praktek ibadah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SWA. Sebaik apapun ibadah jika tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maka ibadah tersebut termasuk dalam kategori bid'ah, dan semua bid'ah dalam pandangan MTA adalah sesat yang tidak akan berfaedah, bahkan diancam masuk neraka. Meskipun kelompok lain, misalnya kelompok tradisional yang diekspresikan oleh Kyai Abdul Radjak dan kawan-kawan sebagai informan, menolak jika apa yang dituduhkan MTA itu bid'ah. Jadi masalah bid'ah ini sebenarnya masih *debatable*. Itulah sebabnya perbedaan dalam memahami isi kandungan Al-Qur'an dan As Sunnah, berakibat seringnya terjadi perselisihan pendapat dalam amalan ibadah di

kalangan umat Islam, karena perbedaan praktek pelaksanaannya berbeda dengan yang dipraktekkan masyarakat muslim umumnya. Pengertian umum dalam konteks penelitian ini menggunakan pendekatan *mainstream* agama Islam di Indonesia yaitu praktek peribadatan yang dilakukan oleh kelompok tradisional, sehingga praktek-praktek ibadah yang dianggap sama dengan kelompok ini tidak dikaji paparkan lagi dalam penelitian ini.

Posisi yang diperlihatkan MTA jelas mendorong konflik keagamaan karena ajaran MTA yang menolak segala bentuk peribadatan yang dicampurkan dengan budaya lokal, sebab hal tersebut menjadikan Islam tidak murni lagi. Oleh karena itu meskipun MTA menyatakan tidak mengganggu masyarakat yang menjalankan ibadah tersebut namun kelompok lain menilai MTA telah memojokkannya, menjelek-jelekan dan membid'ahkannya. Doktrin MTA kemudian dipraktikkan penganutnya dengan jalan menghindari tradisi masyarakat yang dianggap sebagai bid'ah. Dalam konteks masyarakat Surakarta persinggungan dengan munculnya problem keagamaan juga didasari pada perbedaan pemahaan ajaran agama, karena secara sosiologis masyarakat Solo adalah berpaham sebagaimana dikembangkan oleh muslim tradisional.

Dalam pandangan MTA orang yang beragama secara murni adalah orang yang beragama Islam tanpa mencampur agama dengan tradisi. Islam harus dipahami sebagaimana apa adanya, sebagaimana yang telah ada dalam Al Quran dan Hadist Nabi. MTA menyatakan dengan tegas Islam dikatakan sebagai agama yang sempurna, paling unggul dan tidak ada yang mengungguli. Jalan keselamatan yang diajarkan Al Quran dan Sunnah telah lengkap dan mutlak dijalankan tanpa ditambahi, penambahan budaya lokal oleh sebagian kalangan umat Islam adalah bentuk bid'ah yang nyata.

Karena bid'ah ini akan menjurus pada perbuatan syirik yang dilarang oleh Agama. Ustad Ahmad Sukino menganjurkan jama'ah agar semua amal ibadah yang dilakukan diketahui dengan baik apa dasarnya, baik dalam Al Quran maupun dalam Hadist. Jika ia tidak mengetahuinya maka sebaiknya ia tidak menjalankan ibadah tersebut, karena itulah taqlid.

Selama ini berberapa ibadah yang berbaur dengan tradisi lokal yang dipandang bertentangan dengan Islam dan tidak ada dasarnya dalam Al Quran antara lain praktik membaca tahlilan 7 hari, 40 hari dan 100 hari bagi orang yang meninggal dunia, kenduri, slametan, sedekah bumi, ruwatan, ziarah kubur dengan menabur bunga dikubur, mitoni dan berbagai praktik sosial lainnya. MTA melihat kesemua praktik tersebut sebagai bentuk sinkritisme ajaran Islam dengan budaya lokal Jawa. Semua persoalan di atas dalam pandangan MTA adalah persoalan yang baru yang diada-adakan, sebab pada masa nabi belum pernah mengadakan hal tersebut, yang kemudian disebut dengan bid'ah yang mesti harus di jauhi oleh seorang muslim.

Potensi kedua yang rentan terhadap konflik adalah persoalan ibadah yang tidak diajarkan oleh Islam seperti dzikir bersama, tahlilan, membaca manaqib, dan membaca al Berzanji serta Sholawatan. Mengenai persoalan membaca kitab manaqib, MTA menjustifikasi bahwa membaca manaqib para wali, terutama Syeikh Abdul Qadir Jailani adalah perbuatan yang sia-sia sebab hal ini bukan ibadah yang tidak dicontohkan. Mengenai persoalan yasinan, tahlilan dan dzikir bersama, MTA sangat keras melarangnya, karena perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh nabi. Dalam pandangan MTA, nabi merupakan sosok sempurna, juga semua ajarannya. Mengadakan ibadah yang tidak dilakukan oleh nabi, sama artinya dengan mengatakan

bahwa ajaran nabi tidak sempurna dan kita dilihat lebih pandai dari pada Nabi Muhammad. (HR. Tsalatsah, disahihkan oleh Ahmad).

Dalam berbagai pengajian para ustad MTA dengan tegas menjelaskan persoalan tersebut sebagai persoalan yang diada-adakan. Persoalan yang sebenarnya "*laisa min Islam*" yang digunakan dalam Islam. Ustadz Sukino, tidak pernah melarang orang tahlilan, yasinan, mitoni dan lainnya. "Tetapi ketahuilah bahwa hal tersebut tidak ada dalilnya dari Al Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada dalilnya maka saya mengatakan itu bukan ajaran Islam. Hal ini tidak bermaksud MTA melarang kelompok lain untuk menjalaninya, tetapi kalau ada yang mengundang kami, mohon maaf saya tidak bisa datang. Kedatangan kami pada acara yang menurut kami tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu artinya kami setuju. Maka yang terbaik adalah. bagimu amalmu dan bagiku amalku". Begitulah kira-kira makna doktrin MTA.

Fakta sosial keagamaan yang melahirkan konflik diatas itu harus diredam dan menyadari bahwa toleransi sejati adalah bisa menerima kehadiran orang lain, siapaun dia. Manusia tidak bisa mengklaim dirinya paling benar, karena ada kebenaran pada orang lain. Kebenaran absolut ada ditangan Allah (Tuhan). Manusia tidak bisa semena-mena menjustifikasi kesalahan pada kelompok agama lain. Pluralitas adalah fitrah dan keharusan sejak awal manusia dan alam diciptakan. Al-Qur'an sebagai kalam Allah mengakui bahwa perbedaan adalah sesuatu yang wajar, dan bahkan merupakan rahmat. Islam mengakui perbedaan bahasa dan warna kulit, kemajemukan suku-suku dan bangsa-bangsa, penciptaan segala sesuatu berpasang-pasangan dan tidak tunggal, mengakui perbedaan pemikiran dalam kapasitas intelektualitas masing-masing manusia, mengakui kebebasan

berkeyakinan, untuk masuk dan keluar dari agama tertentu. Allah melalui al-Qur'an mengingatkan: Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan yang salah. Karenanya itu barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia berpegang pada tali kokoh yang tidak putus. Allah Maha Mendengar dan Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 256).

Dalil-dalil Al-Quran juga menunjukkan bahwa kemajemukan atau pluralitas ummat manusia adalah kenyataan yang telah menjadi kehendak Tuhan. Dalam Kitab Suci Al-Qur'an kembali Allah mengingatkan: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antar kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13). "Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan kalian satu umat (saja), tetapi dia memasukkan orang-orang yang dikehendaki-Nya kedalam rahmatnya. Dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dan tidak pula seorang penolong".

Pluralitas pemahaman keagamaan merupakan Sunnatullah, sebagai sebuah hukum alam yang tidak akan berubah, tidak bisa dilawan atau diingkari. Islam adalah agama yang Kitab Suci-nya dengan tegas mengakui hak agama-agama lain, kecuali yang berdasarkan paganisme, untuk hidup dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Setiap kelompok manusia dibuatkan oleh Tuhan jalan dan tatanan hidup, agar manusia dengan sesamanya berlomba dalam kebaikan. Firman Allah: "Dan Kami telah

turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (QS. Al Maa'idah: 48). Jadi tidak ada dalam pandangan Islam suatu masyarakat yang monolitik dan mendasarkan pada satu asas. Doktrin Islam menganggap perbedaan sebagai fitrah, seharusnya masyarakat yang berbeda keyakinan diberikan kebebasan menjalani agamanya dan menjalani kehidupannya dengan tenang dan damai.

## Penutup

Dari deskripsi diatas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan MTA yang berdiri tahun 1972 oleh Abdullah Tufail Saputra cukup pesat, memiliki 23 perwakilan (wilayah), 248 cabang dan 1.759 pengajian gelombang. Adapun Model dakwah MTA Surakarta yaitu pengajian khusus, pengajian umum, pengajian gelombang, pengajian, kelompok dan melalui elektronik dalam bentuk tausiah dan tanya jawab agama Islam melalui radio MTA dan MTA TV. Ajaran pokoknya adalah kembali pada al Qur'an dan al Hadits dan membersihkan ajaran Islam dari taqlid, bid'ah dan churafat. Jaringan kerja dakwah dan pengembangan organisasi dilakukan

dengan multi level marketing (mlm), yaitu dengan pembinaan sebanyak-banyaknya di level akar rumput umat Islam di seluruh Indonesia, kemudian membentuk pengajian gelombang atau kelompok-kelompok kecil, membentuk cabang, daerah dan kemudian perwakilan. Penggalan dana dilakukan melalui infaq, shadaqah, jariyah, dan sebagainya. Sistem kepemimpinan di MTA adalah imamah, sehingga seorang imam menduduki jabatan tersebut seumur hidup.

Sementara respon tokoh agama, yaitu bagi kelompok tradisional memandang MTA itu bermasalah dan meresahkan, karena mudah membid'ahkan dan merasa benar sendiri. Bagi kelompok modernis, MTA adalah teman seperjuangan kembali pada al Qur'an dan as Sunnah. Keresahan dan ketegangan sosial keagamaan sebenarnya disebabkan oleh sikap kekurangdewasaan umat Islam saja, jadi yang berseberangan merasa dipojokan, dijelek-jelekan dan disalahkan melalui pengajian khusus, pengajian umum dan elektronik, meskipun tidak demikian sebenarnya.

Dakwah melalui radio sangat bagus, tetapi jangan sampai menunjuk kelompok lain sebagai pengamal bid'ah. Lebih arif jika, MTA cukup menyatakan amalan-amalan yang dimaksud belum ditemukan dalilnya. MTA perlu menjelaskan secara terus menerus pengertian bid'ah dengan khilafiyah, karena sebagian besar umat Islam masih belum bisa membedakannya. MTA adalah organisasi dakwah dan juga melakukan pengumpulan dana, maka sebaiknya MTA berubah menjadi ormas keagamaan, tidak boleh sebuah yayasan seperti sekarang ini. Hendaknya respon dilakukan dengan tabyyun dan usahakanlah untuk dialog, karena dialog adalah jalan membangun kesepahaman dalam menjaga kerukunan hidup beragama. Sebaiknya Kantor Kementerian Agama memfasilitasi dialog intern umat beragama agar terjaga keharmonisan hidup beragama dan memantapkan syi'ar Islam. Pemerintah perlu mensosialisasikan bagaimana cara berdakwah di tengah masyarakat yang pluralis, sehingga pola-pola dakwah yang humanis, tidak memaksa dan menyalahkan dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2001.
- Ariyanto, Nur (1105047), Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2010 "*Strategi Dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Melalui Radio MTA 107,9 FM Surakarta*"
- Asqalani, Ibn Hajar. HR. *Bulughul Maram*, Tsalatsah dan disahihkan oleh Ahmad.
- Barton, Greg, dalam Barry Rubin (Ed.), *Guide to Islamist Movement Volume I*, New York: ME. Sharpe, 2010.
- Darmanto, *Peranan MTA dalam Perubahan Sosial, mengetahui dan mempelajari peranan Majelis tafsir Al-Qur'an (MTA) dalam perubahan sosial di Desa Ngrombo*.
- Jamil, M. Mukhsin et.al., Semarang: Walisongo Mediation Center, 2009
- Jamhari dan J. Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Jinan, Mutohharun, "*Dinamika Gerakan Islam Puritan di Surakarta: Studi tentang Perluasan Gerakan Majelis Tafsir Al-Quran*," 581-602, dalam Panitia ACIS, "*The 11<sup>th</sup> Annual Conference on Islamic Studies: Merangkai Mozaik Islam dalam Ruang Publik untuk Membangun Karakter Bangsa*," Bangka Belitung, 10-13 Oktober 2011.
- Khalimi, MA, *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*, Jakarta: Gaung Persada Muhammad Sulthon (dkk) Semarang: Walisongo Mediation Center, 2009
- MTA, *Riwayat Hidup Abdullah Tufail Saputra*, Majelis Tafsir Al Qur'an (MTA) Solo, 2010
- Mufid, Ahmad Safi'i (Ed), *Gerakan Keagamaan Transnasional: Kasus Gerakan Syi'ah dan Hizbut Tahrir Indonesia (HT)*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010.
- Sugiyarto, Wakhid (Ed), *Gerakan Keagamaan Transnasional: Kasus Gerakan Salafi, Ikhwanul Muslimin dan Jama'ah Tablig*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010
- Sulthon, Muhammad dan Solihan. Walisongo Mediation Center, 2008
- Wahid, Abdurrahman (Ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, The Wahid Institute dan Maarif Institute, 2009.
- Wiktorowicz, Quintan, *Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach*, USA: Indiana University Press, 2004.

Dokumen dan Media Cetak

Dokumen MTA, Thaharah Tanpa Tahun.

Dokumen: *Kumpulan Brosur Ahad Pagi tentang Sunnah dan Bid'ah diambil dari Kitab Al-Muwafaqaat*

Dokumen *Kumpulan Brosur Ahad Pagi tentang Sunnah dan Bid'ah*, hal 27, diambil dari HR. Ibnu Majah juz 1).

Dokumen *Kumpulan Pengajian Ahad Pagi*, oleh Ustad Budi Harjani pada pengajian *ahad pagi*

Republika, 12 Januari '99

Tekad No. 18/ 1-7 Maret '99

Media Indonesia, 11 maret'99

Kompas, April'99

Haedar Nashir dalam Republika 8/1'99

Suara Banyumas, 1 April 2011

# Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): *Studi Kasus Pelaksanaan PBM No.9 dan No.8 Tahun 2006 di Jakarta Utara*

**Asnawati**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  
Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta  
Email: asnawati\_icha@yahoo.com

## **Abstract**

The Government has issued a Joint Ministerial Regulation (PBM) Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs No. 9 and 8 Year 2006 on Guidelines for the Implementation of Regional Head of Maintenance Tasks for Religious Harmony, Empowerment Forum for Religious Harmony and the Construction of Houses of Worship on March 21, 2006. The FKUB was born among the people, by the community and to society. The birth had been preceded by the agency FKKUB which is used as a tool for communication, acknowledgement, aspiration, and contribution towards the community. FKUB can also be a forum for social action together and build together a lasting social relationship. North Jakarta FKUB formation is facilitated by the government as the implementation of the publication of PBM in 2006 which preceded smoothly at the end of 2007 the number of board 17.

**Keywords:** Joint Ministerial Regulation, Inter Religious Harmony Forum, Society and Funding

## **Pendahuluan**

Perhatian pemerintah terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama telah ditetapkan melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret Tahun 2006 (selanjutnya disingkat PBM). Produk ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan

## **Abstrak**

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat pada tanggal 21 Maret 2006. FKUB lahir dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kelahiran FKUB telah didahului oleh lembaga FKKUB yang digunakan sebagai wahana dialog, menerima, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. FKUB juga dapat menjadi wadah untuk aksi sosial bersama membangun kebersamaan dan silaturahmi yang langgeng. Pembentukan FKUB Jakarta Utara difasilitasi oleh pemerintah sebagai implementasi dari terbitnya PBM Tahun 2006 berjalan dengan lancar.

**Kata Kunci:** Peraturan Bersama Menteri, Forum Kerukunan Umat Beragama, Masyarakat dan Dana.

Kerukunan Umat Beragama, dengan membentuk Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat. Produk hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerah.

Lahirnya regulasi tersebut, adalah hasil kesepakatan para pemuka agama tingkat pusat, yakni MUI, KWI, PGI,

PHDI dan WALUBI, yang menyadari betapa pentingnya pengaturan pendirian rumah ibadat. Ini didasari oleh munculnya banyak kasus pendirian rumah ibadat menjadi sumber konflik antarumat beragama. Rumah ibadat menjadi simbol kekuatan dan sekaligus hegemoni agama, sehingga ketika rumah ibadat dibangun, di situ pula kekuatan umat terepresentasikan. Pendirian rumah ibadat dengan sendirinya bukan semata-mata pembangunan fasilitas untuk beribadah, tetapi menjadi representasi kehadiran sekelompok umat beragama. Akibatnya, rumah ibadat dalam seringkali menjadi sumber gesekan sosial, ketika kaum minoritas berada dalam hegemoni mayoritas. Di sinilah perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi penting, terutama dalam mengatur pendirian rumah ibadat.

Konflik yang peristiwa-peristiwa tragis di Indonesia simbol-simbol keagamaan seringkali digunakan dan rumah-rumah ibadat seperti gereja, masjid atau bangunan-bangunan publik yang terkait dengan suku atau kelompok agama tertentu dibakar atau dirusak. Ada banyak contoh konflik yang melibatkan komunitas religius, misalnya konflik di Jakarta dan Jember (Jawa) tahun 1992; konflik di Medan (Sumatera Utara) tahun 1994; dan di Pekalongan (Jawa Tengah) tahun 1995. Pada periode 1992 sampai 1997, 145 bangunan gereja dirusak (Sidel 2006, 1, 73). Antara 1996 sampai 1998 terjadi konflik serius di Situbondo, Tasikmalaya, Solo dan Jakarta (Jawa). Tentu kita masih dapat menyebut konflik-konflik lain yang terjadi di seluruh Indonesia. Secara langsung maupun tidak langsung, banyak konflik yang terjadi seperti contoh di atas melibatkan agama dan atau komunitas agama. Oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam mengeliminasi konflik bernuansa agama. Salah satunya dengan membentuk FKUB.

Ketetapan pemerintah membentuk FKUB tentu tidak semata-mata berperan dalam pengaturan pendirian rumah ibadat. Lebih dari itu adalah menjadi katalisator sosial antarumat beragama, sehingga konflik dapat dicegah sedini mungkin. FKUB dibagi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga forum inilah yang sangat diharapkan oleh pemerintah dapat menjembatani hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang terkait pada masalah kerukunan antar dan intern umat beragama.

Terbentuknya FKUB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi wajib setelah dikeluarkannya PBM, paling lambat pada 21 Maret Tahun 2007. Bagi daerah yang masih belum membentuk FKUB, disarankan pada semua tingkat kabupaten/kota membentuk FKUB. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah kongkrit untuk memberdayakan dan mensosialisasikannya agar PBM dapat dipahami oleh para pejabat atau masyarakat. Lebih dari 5 tahun setelah terbentuk FKUB, beberapa daerah banyak mengalami hambatan, terutama dalam menjalankan peran pada pasal 8, 9 dan 10 PBM No.9 dan 8 Tahun 2006. Daerah yang mengalami hambatan antara lain adalah Jakarta Utara.

Jakarta Utara merupakan salah satu kota yang ada di provinsi DKI Jakarta yang memiliki wilayah dengan keragaman etnis, budaya dan bahasa serta agama. Kehidupan beragama di wilayah Jakarta Utara selama ini berjalan dengan baik dan tetap terpelihara untuk tidak sampai terjadi konflik yang dapat merugikan semua lapisan masyarakat. Konflik besar memang pernah terjadi, yakni Kasus Makam Mbah Priok, tetapi konflik ini tidak berkaitan langsung dengan persoalan agama. Meskipun demikian, peran FKUB di daerah ini dirasa perlu dilakukan riset, mengingat belum sepenuhnya lembaga ini berperan secara optimal.

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: a). Bagaimana proses pembentukan FKUB di Jakarta Utara? b) Bagaimana fungsi dan peran FKUB dalam melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat di Jakarta Utara? c) Bagaimana peran FKUB dalam menampung aspirasi ormas dan aspirasi masyarakat? Bagaimana peran FKUB dalam membuat rekomendasi sebagai bahan kebijakan? dan d) apa yang menjadi faktor pendukung serta penghambat FKUB dalam melaksanakan tugasnya?

Sesuai dengan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan adalah: pertama untuk mengetahui proses pembentukan FKUB di Jakarta Utara; kedua untuk mengetahui fungsi dan peran FKUB dalam melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat di Jakarta Utara dan ketiga untuk mengetahui peran FKUB dalam menampung aspirasi ormas dan aspirasi masyarakat; keempat untuk mengetahui bagaimana peran FKUB dalam membuat rekomendasi sebagai bahan kebijakan dan kelima untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat FKUB dalam melaksanakan tugasnya.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Kasus yang dijelaskan dalam kajian ini terkait dengan peran FKUB sesuai dengan tugas dan fungsinya yang tersebut dalam pasal 8, 9, dan 10, dari PBM. Sebagaimana karakteristik studi kasus, maka dari sisi penetapan wilayah penelitian pun terbatas di Jakarta Utara.

Dalam pengumpulan data dengan metode wawancara yang dilakukan kepada para pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, Pimpinan dan staf sekretaris FKUB

di wilayah Jakarta Utara, pimpinan majelis-majelis agama, pemuka agama dan pemuka masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, melalui tahap-tahap klasifikasi data, reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan kesimpulan. Untuk melengkapi data wawancara ditelusuri dokumentasi yang terkait dengan permasalahan.

### Definisi Operasional

Secara epistemologis “peran” diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan peran adalah aktivitas yang diperankan oleh seseorang atau suatu lembaga/organisasi yang diatur oleh satu ketetapan untuk melakukan pemeliharaan dalam hal ini kerukunan umat beragama sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah disepakati lembaga tersebut.

Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Peran FKUB Dalam Mewujudkan Kerukunan Antar Umat di Kota Tanjung Priok Jakarta Utara dalam pelaksanaan pasal 8, 9 dan 10 PBM No.9 dan 8 Tahun 2006 adalah peranan yang harus dilaksanakan oleh FKUB sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal-pasalnya tersebut.

Salah satu karakteristik masyarakat sebagaimana masyarakat wilayah Indonesia lainnya termasuk di Jakarta Utara adalah heterogen, baik dari segi pemeluk agama, maupun etnis dan

budaya yang terangkum dalam pengertian multikultural. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Dalam konteks ini, multikulturalisme dipandang sebagai pengayaan terhadap konsep kerukunan umat beragama yang dikembangkan secara nasional.

Suparlan mengutip Fay (1996), Jary dan Jary (1991), Watson (2000) dan Reed (ed. 1997) menyebutkan bahwa multikulturalisme ini akan menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural, karena multikulturalisme sebagai sebuah ideologi akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.

### **Sekilas Kota Tanjung Priok**

Menurut Lembaran Daerah No.4/1966 ditetapkanlah lima wilayah Kota Administratif di DKI Jakarta, yaitu: Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai luas 139,56 Km<sup>2</sup> yang membentang dari Barat ke Timur sepanjang ± 35 Km menjorok ke darat antara 4 s/d10 Km. Wilayah kota ini merupakan pantai beriklim panas dengan suhu rata-rata 28,9 C°. Mengingat kondisi wilayah ini merupakan daerah pantai dan tempat bermuaranya 9 (sembilan) sungai dan 2 (dua) banjir kanal, menyebabkan wilayah ini merupakan daerah rawan banjir, baik banjir kiriman maupun banjir karena air pasang laut.

Kota Jakarta Utara pada tahun 1973 masih merupakan kota administratif yang terdiri dari 4 kecamatan dan 24 kelurahan yaitu: kecamatan Kepulauan Seribu, Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Tanjung Priok dan Kecamatan Koja. Setelah mengalami beberapa

perubahan dalam pemekaran wilayah, maka saat ini kotamadya Jakarta Utara terdiri dari 6 kecamatan, 31 kelurahan, 405 RW dan 4.706 RT. Keenam kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, Kecamatan Kelapa Gading dan Kecamatan Cilincing.

Data BPS Jakarta Utara Dalam Angka Tahun 2008, menyebutkan bahwa pada tahun 2007 jumlah penduduk di Jakarta Utara mencapai 1.197.970 jiwa terdiri dari 51,12 persen laki-laki dan 48,88 persen perempuan. Sebagian besar penduduk Jakarta Utara tinggal di Kecamatan Tanjung Priok (26,07 persen) dan Cilincing (19,99 persen). Kecamatan Koja merupakan kecamatan terpadat di Jakarta Utara, dengan kepadatan 17.626 jiwa/Km<sup>2</sup>, diikuti Kecamatan Tanjung Priok dengan kepadatan 12.432 jiwa/Km<sup>2</sup>. Padatnya penduduk di wilayah Jakarta Utara yang mencapai 8.548 jiwa/Km<sup>2</sup> dapat menimbulkan masalah-masalah sosial seperti masalah perkelahian antar warga.

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, selalu dihadapkan pada berbagai masalah sosial. Sesungguhnya, masalah-masalah sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri karena masalah-masalah sosial telah terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri, sebagai akibat dari hubungan-hubungannya dengan sesama manusia lainnya, dan juga sebagai akibat dari tingkah lakunya.

Keberhasilan pendidikan masyarakat sangat ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai seperti sekolah dan jumlah guru. Pada tahun 2007 di Jakarta Utara terdapat 432 SD dengan 121.155 murid dan 4.957 guru. SLTP sebanyak 182 sekolah dengan 55.817 murid dan 4.054 guru, SMU sebanyak 79

sekolah dengan 24.555 murid dan 2.356 guru, serta 73 sekolah kejuruan berbagai jenis.

Data kepemelukatan agama penduduk kota Tanjung Priok Jakarta Utara yang beragama Islam merupakan mayoritas dengan jumlah 952.623 jiwa, penganut Katolik berjumlah 81.850, Kristen 105.407, yang beragama Hindu berjumlah 14.542, Buddha 41.969 dan lainnya mencapai 1.579 jiwa. Kemudian untuk menunjang kegiatan peribadatan bagi umat beragama di Jakarta Utara terdapat 476 masjid, 951 mushollah, 197 gereja, 22 pura dan 33 vihara.

### **FKUB Jakarta Utara**

Setelah terbitnya PBM tahun 2006 dan Surat Edaran yang berisi Instruksi Gubernur DKI Jakarta yang ditujukan kepada Kepala Kanwil Depag (saat ini Kementerian Agama) Kabupaten/Kota untuk melakukan rapat koordinasi dengan Kesbang. Hasil koordinasi diimplementasikan pada tingkat wilayah agar Provinsi DKI segera terbentuk FKUB. FKUB dibentuk karena kebersamaan yang merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Walikota Jakarta Utara merekomendasikan kepada pengurus FKKUB untuk memroses pembentukan FKUB Jakarta Utara, mengingat FKKUB telah lama terbentuk oleh Kanwil Departemen Agama pada tahun 1995, dengan jumlah pengurus mencapai 30 orang. Namun, dengan terbitnya PBM Tahun 2006, FKKUB dilebur menjadi FKUB pada akhir Tahun 2007 dengan jumlah pengurus sesuai PBM hanya 17 orang.

Jauh sebelumnya FKKUB telah beberapa kali melakukan rapat di tingkat provinsi dalam rangka persiapan sebelum

PBM diterbitkan, karena diketahui akan adanya perubahan dari FKKUB (ketika itu ketuanya H. Abu Bakar) untuk dilebur menjadi FKUB, dan menurutnya dalam perjalanan proses pembentukannya di DKI tidak ada kesulitan.

Sesuai dengan rekomendasi Walikota Jakarta Utara H. Effendi Anas yang ditujukan kepada FKKUB untuk segera memandu proses pembentukan FKUB, dengan instruksi itu terbentuklah FKUB. Disini peran pemerintah hanya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi terbentuknya FKUB. Dari serangkaian pertemuan pembahasan persiapan untuk membentuk FKUB, maka peran FKKUB yang sudah terbentuk jauh sebelum ada instruksi Gubernur DKI Jakarta untuk membentuk FKUB. Kemudian dilakukan penyesuaian dari jumlah personil pengurus yang sebelumnya mencapai 30 orang. Melalui proses musyawarah bersama dengan utusan dari masing-masing perwakilan tokoh majelis-majelis agama, secara aktif pengurus FKKUB yang membidani kelahiran dan pembentukan FKUB.

Berawal dari Surat Edaran Instruksi Walikota, menurut Ketua FKUB Jakarta Utara H. Maburur, yang berisi tentang PBM dan Pergub No.64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama. Kemudian dilaksanakan rapat-rapat koordinasi untuk diimplementasikan pada tingkat bawah, yang difasilitasi oleh Adkesmas (Administrasi Kesehatan Masyarakat) Walikota Jakarta Utara, untuk sesegera mungkin dibentuk FKUB. Dalam rapat pembentukan pengurus FKUB Jakarta Utara hadir wakil dari para majelis-majelis agama masing-masing sebanyak 2 (dua) orang, yang sebelumnya telah diseleksi melalui presentasi perwakilan agama yaitu seperti dari MUI, KWI, PGI, WALUBI, PHDI dan MAKIN.

Wilayah Jakarta Utara, yang tidak memiliki perwakilan di tingkat kota, kewenangannya diatur ditingkat provinsi, seperti organisasi PGI. Demikian pula dengan perwakilan agama Khonghucu di tingkat wilayah kota tetap diatur di tingkat provinsi (Matakin). Sementara perwakilan dari Katolik (KWI) yang ada di wilayah kota disebut dengan Dekanat, sama dengan yang lainnya yaitu tetap kewenangan diatur ditingkat provinsi dengan nama tetap Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) sebagai bahan kebijakan dan diturunkan ke kota.

Setelah terbentuk FKUB, dilakukan pengukuhan di tingkat kota dan menyusul pengukuhan FKUB provinsi pada Tahun 2008 yang di ketuai oleh Ahmad Syafi'i Mufid (satu paket secara keseluruhan) yang dilantik oleh Gubernur DKI dan bertempat di Balai Agung Jakarta. Semua perwakilan yang diundang telah sesuai dengan PERGUB No. 64 Tahun 2007, dan juga berdasarkan PBM Tahun 2006.

Menurut Sekretaris FKUB Jakarta Utara, dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan, di tahun 2006-2007, PBM 2006 sudah disosialisasikan beberapa kali dan didiskusikan di tingkat majelis-majelis agama. Misalnya pada PGI ada 7 aras (tingkatan) yang tidak mungkin kesemuanya dikirim sebagai utusan, sehingga sebelumnya dilakukan sosialisasi dan rapat koordinasi antar aras di lingkungan PGI seperti PGII, PGPI, Advent, Ortodok yang berkaitan karena masuknya KWI. Dilakukannya sosialisasi dengan tujuan untuk menyaring siapa yang tepat untuk dikirim atau yang bisa direkomendasikan atas nama PGI (khusus Kristen).

Perwakilan Katolik direkrut dari anggota majelis melalui seleksi di tingkat Dekanat. Dalam seleksi itu dipilih dua (2) orang sebagai utusan dalam perwakilan di FKUB.

Secara proporsional susunan komposisi pengurus FKUB di wilayah Jakarta Utara yang terbentuk pada bulan Mei 2007 berjumlah 17 orang tidak mengalami kesulitan, dengan direkomendasikan nama-nama tersebut, berdasarkan aturan Pergub No. 64 Tahun 2007 disepakati komposisi pengurus, antara lain ketua, wakil sekretaris dan anggota. Jadi terbentuknya FKUB yang ada sekarang ini sudah sesuai dengan PBM meskipun masih dalam konsep yang lama yaitu berdasarkan FKKUB. Berdasarkan kesepakatan bersama, H. Maburr Abduh terpilih sebagai ketua, menyusul formatur berikutnya dari perwakilan masing-masing majelis agama.

### **Peran dan Tugas FKUB**

FKUB Jakarta Utara telah melakukan serangkaian dialog dengan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama di Tanjung priok dengan menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah agama dan memberikan pertimbangan rekomendasi. Diberikannya pertimbangan rekomendasi karena FKUB kota tidak otonom, kewenangannya hanya melakukan verifikasi lapangan/peninjauan lapangan, karena yang otonom itu di provinsi. Dan hasil peninjauan disampaikan ke provinsi sebagai pemberitahuan telah melakukan verifikasi.

Berkaitan dengan program atau dana dari FKUB Jakarta Utara, baik Walikota/Kesbang tidak bisa mengambil keputusan, terlebih lagi bila terkait dengan pengambilan anggaran yang tidak jelas. Dan uniknya, FKUB Jakarta Utara dimana setiap kali ada honor bagi pengurus, maka honor tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pribadi tapi justru untuk kegiatan keluar FKUB. Bahkan lebih banyak pengurus

mengeluarkannya berdasarkan swadaya, karena dasarnya keikhlasan dari anggota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menggunakan dan mengelola anggarannya sendiri.

FKUB Jakarta Utara dalam menjalankan tugasnya hanya memberikan pertimbangan/masukan kepada pemerintah dalam hal pendirian rumah ibadat dan bukan memberikan rekomendasi. Mengenai pertimbangan dari FKUB Kota, hal tersebut menjadi data FKUB provinsi untuk memberikan rekomendasi kepada Gubernur guna mengeluarkan izin prinsip pendirian rumah ibadat.

Sementara itu untuk wilayah Jakarta Utara ada sedikit perbedaannya dengan wilayah lain yaitu dengan melakukan crosscek ke lapangan disertai pengisian data Lembar Konfirmasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ini tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, bahkan perlu di legalisir oleh kelurahan sebagai pernyataan kebenaran domisili penduduk sesuai KTP. Sebagai petugas lapangan yang berjumlah 17 orang itu melakukan peninjauan ke lapangan untuk memastikannya yang terkait dengan surat menyurat yang asli, harus di dukung oleh 90 umat yang berhak membangun gereja dan bagi 60 warga sekitar yang berbeda agama. Biasanya dukungan Pendirian Rumah Ibadat disertai tandatangan sebagai pernyataan dukungan bermaterai Rp. 6.000,- dan diketahui/tandatangan identitas dari petugas lapangan.

FKUB Jakarta Utara dalam menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian dan Peninjauan Lapangan Atas Permohonan Pendirian Rumah Ibadat dan Penggunaan Rumah Tinggal Sebagai Tempat Ibadat Sementara. Menurut

sekretaris FKUB Jakarta Utara, sedang melakukan klarifikasi terhadap salah satu Jemaat Gereja Reformasi Injil Indonesia (GRII) Kelapa Gading berkaitan dengan persyaratan pendirian tempat ibadat. Kemudian dengan melakukan peninjauan lapangan secara faktual atas pembangunan tempat ibadaat Gereja Kristen Injil Indonesia (GKII) Penjarinagn Jakarta Utara. Dan menyalurkan aspirasi pemukan agama dan tokoh masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan walikota Jakarta Utara.

Pada Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2007 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 berisi 12 point, sementara pada peraturan FKUB Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 01 Tahun 2008 pada Bab I Ketentuan Umum terdiri dari 3 Pasal. Pada Pasal 1, ada kelebihan 2 poin yang isinya antara lain: a) Panitia pembangunan rumah ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadah, dan b) Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat (IMB Rumah Ibadah). IMB tersebut diterbitkan oleh Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Bab II mengenai Persyaratan Mendapatkan Izin Pembangunan Tempat Ibadah terdiri dari 2 Pasal. Bab III tentang Penelitian Administratif Persyaratan dan Peninjauan Lapangan Pendirian Tempat Ibadat terdiri dari 9 Pasal (Pasal 6, pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14).

Wilayah Jakarta Utara dalam memberikan rekomendasi setelah berdirinya FKUB ini telah memberikan pertimbangan rekomendasi tertulis pada walikota sebanyak 7 rumah ibadat, 6 gereja dan satu vihara. Dari keenam rumah ibadat tersebut tidak satupun yang dieleminir. Termasuk juga oleh Walikota yang sering mengatakan ketika FKUB kota sudah melakukan Verifikasi, baik menyangkut surat menyurat dan kebenaran dokumen maupun verifikasi faktual.

Sesuai dengan PBM dan Pergub terdapat sedikit perbedaan terkait dengan masalah pertimbangan rekomendasi. Pada Pergub tingkat kota berupa pertimbangan, dan kalau PBM langsung rekomendasi. Untuk memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat itu FKUB provinsi, tapi kewenangan untuk melakukan Verifikasi di lapangan/peninjauan lapangan itu FKUB kota. Dimana hasil peninjauan di sampaikan ke provinsi yang sebelumnya di berikan/di laporkan ke Walikota yang kemudian tembusannya ke provinsi sebagai pemberitahuan telah melakukan verifikasi lapangan.

Setelah melakukan pengecekan ulang data, kemudian FKUB kota membuat pertimbangan-pertimbangan yang disebut dengan rekomendasi pertimbangan yang mungkin saja berbeda dengan FKUB provinsi karena otonominya berbeda. Maksudnya ketika di lakukan kegiatan pengecekan ulang kembali kepada warga, kemungkinan menurut FKUB kota, data yang ada adalah valid, tidak sesuai dengan ketentuan, tapi bisa saja FKUB provinsi mengatakan tidak valid, sehingga bisa di lakukan verifikasi ulang.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor pendukung FKUB dalam menjalankan tugasnya adalah dengan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan. Menurut ketua FKUB H. Mabrur mengatakan minimal mereka tahu kalau FKUB telah melakukan sosialisasi. FKUB tugasnya jelas, gajinya yang tidak jelas, karena yang terlibat dalam kepengurusan di FKUB dasarnya keikhlasan. Ruang kerja FKUB difasilitasi oleh Kesbang Walikota Jakarta Utara yang terletak dilantai delapan bersebelahan dengan ruangan kerja Kesbang, sekaligus disediakan fasilitas untuk sarana pertemuan yang sangat sederhana seperti kursi, meja kerja, pesawat telepon dan komputer.

Antara pengurus FKUB terjalin kerjasama yang baik, karena secara intensif mereka melakukan pertemuan setiap hari di kantor FKUB. Jadwal pertemuan pun diatur sesuai kebutuhan. FKUB Jakarta Utara misalnya, menjadi ujung tombak kinerja walikota untuk tingkat *grassroot*, sebab FKUB tidak punya garis komando di luar Walikota. Untuk wilayah Jakarta Utara sejauh ini belum pernah terjadi gesekan yang mengarah pada benturan terkait dengan pendirian rumah ibadat, padahal masyarakatnya sangat kompleks.

Terkait dengan faktor penghambat dengan pelaksanaan program atau dengan biaya operasional FKUB, pihak walikota/wakil/kesbang tidak bisa mengambil keputusan. Terlebih lagi terkait dengan mengambil dana/anggaran selain honor pengurus satu bulan Rp. 500.000,- maka akan terkena masalah bila anggaran yang diajukan itu tidak jelas penggunaannya. Terkait dengan peninjauan ke lapangan merupakan kewenangan dari FKUB kota, dan bila data itu valid, maka tidak perlu di lakukan peninjauan ulang.

### **Penutup**

Penelitian ini menyimpulkan diantaranya: a) Pembentukan FKUB Jakarta Utara difasilitasi oleh pemerintah, didahului sebelumnya telah ada forum kerukunan, yakni FKKUB. FKUB Jakarta Utara terbentuk sebagai implementasi dari terbitnya PBM Tahun 2006 dapat berjalan lancar pada akhir tahun 2007. Kepengurusannya berjumlah 17 orang; b) dalam menjalankan tugas, pengurus FKUB Jakarta Utara memperoleh honor, akan tetapi honor tersebut digunakan untuk dana operasional FKUB; c) FKUB Jakarta Utara telah memberikan pertimbangan rekomendasi tertulis kepada Walikota, diantaranya mengenai permasalahan rumah ibadat. Sebanyak 7 (tujuh) rumah ibadat ( 6 gereja dan 1

vihara) dan telah dilakukan verifikasi, dapat berdiri karena telah sesuai dengan PBM; d) Pengurus FKUB Jakarta Utara senantiasa melakukan *crosscheck* lapangan mengenai pengisian data Lembar Konfirmasi dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti domisili yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Namun demikian, masih dilakukan lagi peninjauan lapangan ulang dari FKUB Provinsi atau dari lembaga lain misalkan Dinas Bintal Kesos.

Rekomendasi dari studi ini adalah: a) Pemerintah Kota Jakarta Utara perlu memberikan fasilitas yang memadai, seperti kebutuhan sarana prasarana dan mobilitas untuk menunjang kinerja FKUB. Hal tersebut karena FKUB sekarang

masih menempati ruang kerja Kesbang Walikota Jakarta Utara; b) perlu membuat terobosan agar masyarakat mengetahui dan mengerti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006 diprioritaskan kepada pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa rumah ibadat sebagai fasilitas peribadatan sangat di butuhkan umat beragama. Dengan demikian bila fungsi rumah ibadah ditingkatkan, akan lebih bermakna dan signifikan dalam membangun tata kehidupan sosial yang rukun dan damai. Dan sebaiknya pemerintah memfasilitasi kegiatan FKUB dengan mengagendakan anggaran sebagai dana operasional untuk lebih meningkatkan kualitas kerja FKUB.

### Daftar Pustaka

- Abdullah Ali, Prof.Dr.H.MA, Agama Dalam Ilmu Perbandingan, Nuansa Ilmu, Bandung, 2007
- BPS Jakarta Utara Dalam Angka Tahun 2008.
- Editor Widjaja A.W Drs. dalam Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat, Penerbit Akademika Pressindo Jakarta, 1985.
- Laporan Kegiatan Acara Silaturahmi dalam Keberagaman antar Tokoh Agama, Etnis dan Budaya, Selayang Pandang Jakarta Utara, Tahun 2005.
- Laporan Lokakarya Peningkatan Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama se-Jabodetabek, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Tahun 2008.
- Mudzhar. Atho. H..M.Dr.Prof dalam "Peran Pemuka Agama Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Melalui Peningkatan Kemandirian FKUB, yang disampaikan pada Lokakarya Nasional Pola Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama melalui Peran Kelembagaan FKUB, Bogor 21 Maret 2009.
- Suhatmansyah, Is, Ir.Dr. M.Si disampaikan pada Semiloka Penguatan Kelembagaan dan Aktifitas Kerukunan Umat Beragama di Daerah (Bogor, 23-25 Juli 2007).
- Sidel J.T. (2006). Riots, Pogroms, Jihad. Religious Violence in Indonesia. New York: Cornell University Press.

# Potensi Kerukunan dan Konflik Umat Beragama di Kota Madiun Jawa Timur

**Suhanah**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  
Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta  
Email: suhanahhh@yahoo.com

## **Abstract**

*This study used a qualitative approach in the case of harmony, conflict and religious conflict solutions in the city of Madiun. The study concludes that: the potential for harmony in the City of Madis on emerged due to the solidarity of public awareness, where people are ready to be different and agree to maintain the unity and integrity. Given that awareness, religious issues are submitted to the respective religious community through each interfaith leader. In addition, the presence of FKUB and Islamic boarding school has been very effective to support the proper development of living in harmony and effective communication (silaturahmi) among interfaith leaders. Law enforcement and government agencies have promoted the creation of inter-faith harmony in the society. The issue that caused the conflict was recognized by the authorities and wider public. Strategic measures to overcome the internal and inter-religious conflicts through mediation and dialogue with the principle of kinship.*

**Key words:** *harmony, conflict, FKUB, religious solidarity society.*

## **Abstrak**

*Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada kasus kerukunan, konflik dan solusi konflik umat beragama di kota Madiun. Studi ini menyimpulkan antara lain: potensi kerukunan di Kota Madiun muncul dikarenakan adanya solidaritas kesadaran masyarakat. Dimana Masyarakat siap berbeda dan bersepakat menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan adanya kesadaran itu, permasalahan keagamaan diserahkan kepada masing-masing umat beragama melalui tokoh-tokohnya. Di samping itu keberadaan FKUB dan Pondok Pesantren dirasakan sangat efektif untuk mendukung kehidupan harmoni, komunikasi efektif (silaturahmi) tokoh lintas agama terbangun dengan baik. Penegak hukum dan institusi pemerintah turut mendorong terciptanya kerukunan masyarakat lintas agama. Persoalan yang memicu konflik pun disadari sepenuhnya oleh aparat dan masyarakat umum. Langkah-langkah strategis untuk mengatasi konflik intern dan antar umat dilakukan melalui mediasi dan dialog dengan prinsip kekeluargaan.*

**Kata kunci:** *kerukunan, konflik, FKUB, solidaritas umat beragama.*

## **Latar Belakang Masalah**

Dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, tiap-tiap pemeluk agama mendapatkan kesempatan untuk menjalankan agama dan menciptakan kehidupan beragama yang sesuai dengan ajaran agamanya

masing-masing. Akan tetapi setiap pemeluk agama juga harus menjaga agar kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan masing-masing umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh mengganggu dan menyinggung perasaan kelompok agama lainnya. Dengan kata lain, pengembangan agama

dan kehidupan keagamaan disatu pihak tidak boleh menjurus kearah tumbuhnya pemikiran dan pemahaman agama yang sempit. Sedangkan dipihak lain, toleransi umat beragama juga tidak boleh mengorbankan keyakinan agama masing-masing penganutnya.

Masyarakat kota Madiun tergolong masyarakat majemuk, bukti kemajemukannya itu terlihat dari beragamnya etnis, budaya, bahasa dan agama. Realitas keberagaman agama, yang pada suatu sisi menonjolkan perbedaan-perbedaan dalam berbagai dimensi yang dapat memunculkan peluang timbulnya konflik bernuansa agama. Agama-agama yang dilayani pemerintah di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Agama dalam hal ini dapat diuraikan menjadi tiga aspek yaitu aspek pemikiran, aspek praktis dan aspek sosiologis. Aspek pemikiran yaitu agama merupakan suatu sistem kepercayaan bagi pemeluknya; aspek praktis yaitu agama merupakan suatu sistem peribadatan yang dilakukan bagi masing-masing umat beragama; aspek sosiologis yaitu agama merupakan sistem yang memiliki hubungan dan interaksi sosial.

Agama-agama yang ada pada hakikatnya mengajarkan kepada seluruh umatnya agar bisa hidup rukun dan damai terhadap sesama manusia, walaupun berbeda agama. Hanya saja agama yang ada sering difahami secara sempit sehingga mengakibatkan terjadinya konflik di masyarakat. Selain itu sikap fanatisme yang berlebihan di kalangan pemeluk agama masih sangat dominan, sehingga dapat mengakibatkan ketidak harmonisan di antara sesama umat beragama. Ketidakharmisan hubungan antar umat beragama merupakan salah satu dinamika dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dikarenakan adanya interaksi sosial di antara masing-masing umat beragama yang mempunyai

nilai atau acuan berbeda-beda sesuai dengan latar belakang etnis, budaya dan agama masing-masing.

Usaha mewujudkan suasana kerukunan umat beragama yang harmonis dan dinamis, bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab semua lapisan masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (a) Apa saja potensi yang dapat menimbulkan kerukunan dan faktor-faktor pemicu konflik di Kota Madiun; (b) kasus-kasus keagamaan yang pernah terjadi di kota Madiun; (c) model-model penyelesaian konflik.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: (a) Untuk mengetahui potensi-potensi kerukunan dan faktor-faktor pemicu konflik; (b) Untuk mengetahui konflik keagamaan yang pernah terjadi di kota Madiun; (c) Untuk mengetahui model-model penyelesaian konflik.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi pimpinan Kementerian Agama dalam menetapkan kebijakan bagi pemeliharaan kerukunan umat beragama

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Tehnik yang digunakan untuk menggali data ini adalah :1) wawancara dengan para informan yang dipandang berkompeten dalam masalah tersebut. Para informan terdiri dari sejumlah pejabat pemerintah setempat seperti Kepala Kantor Kementerian Agama, Kasi Penamas, ketua FKUB, ketua MUI, ketua BAMAG, ketua NU, ketua Muhammadiyah, tokoh agama dari berbagai agama yang berbeda, dan Kabid

Ketahanan Bangsa, 2) pengamatan; dan studi kepustakaan serta dari buku-buku hasil penelitian.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Madiun Jawa Timur dengan pertimbangan bahwa di Kota Madiun secara sosial keagamaan adanya keragaman agama, budaya dan etnis. Juga muncul berbagai fakta sosial berupa potensi kerukunan dan pemicu konflik sosial keagamaan serta munculnya kasus-kasus keagamaan.

### Definisi Konsep

*Rukun*, secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti tiang, dasar, dan sila. (Ridwan Lubis, 2004:21). Perkembangannya dalam bahasa Indonesia, kata rukun sebagai kata sifat yang berarti cocok, selaras, sehati atau tidak berselisih.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, disebutkan bahwa Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (PBM, Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006, 2006: 36).

Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan atau ketidakberselisihan. Selain itu Ridwan Lubis mengatakan bahwa kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta

dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit (unsur-unsur/sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan saling menghargai serta sikap saling memaknai kebersamaan.

Konflik berbeda dengan kerukunan, dimana konflik memiliki pengertian yang beragam tergantung pada paradigma yang dipergunakannya. Secara sosiologi konflik diartikan sebagai pertikaian, perseteruan atau pertarungan, yaitu proses pencapaian tujuan yang dilakukan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan nilai atau norma yang berlaku. (Soekanto, 1969 : 60).

Pendapat lain mengatakan bahwa konflik sosial adalah perjuangan pencapaian nilai status, kekuasaan atau sumber-sumber langka (*scarce resources*) dimana tujuan pihak yang berkonflik bukan semata untuk memperoleh tujuan/maksud yang diinginkan, namun juga bertujuan menetralsir, melukai, atau mengeliminasi pesaingnya.

Konflik sosial bisa terjadi antar individu-individu, antar kelompok (kolektivitas) atau antar individu-individu dengan kelompok etnis, budaya dan ekonomi. Sebagai realitas sosial, konflik dipandang sebagai unsur penting dalam interaksi sosial. Terlepas dari akibatnya, konflik dalam kenyataannya berkontribusi dalam proses pemeliharaan kelompok atau kolektivitas serta memperkuat terbangunnya hubungan interpersonal.

Weber, salah seorang sosiolog Jerman, dalam terjemahan yang ditulis oleh A. Shill, Edawar dan H.A. Finch (1949 : 26-27), mengungkapkan bahwa melihat pentingnya konflik sosial dalam proses kehidupan. Menurutnya konflik tidak mungkin dapat dipisahkan

dari kehidupan itu sendiri. Bahkan perdamaian itu sendiri sebenarnya tidak lain dari pada suatu bentuk perubahan dalam bentuk konflik. (Titik Suwaryati, 2011 : 92).

George Simmel, Lewis Coser, Ralf Dahrendorf dan Max Gluckman, melihat konflik sebagai bentuk interaksi sosial, dalam kenyataannya memiliki nilai fositif dan fungsional bagi terbentuknya kelompok yang kuat. Terlepas dari apapun bentuk konflik yang terjadi, harus dicarikan solusinya, karena konflik berdampak rusaknya tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. (Reslawati, 2011 : 104).

Sedangkan yang dimaksud dengan *umat beragama*, adalah penganut suatu agama yang berkembang di masyarakat seperti: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Agama itu sendiri pada hakikatnya dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek kepercayaan, aspek peribadatan dan aspek sosiologis. Dari ketiga aspek tersebut, aspek sosiologislah yang memiliki hubungan antar sesama umat beragama. Ronald Robertson mengatakan bahwa agama merupakan suatu sistem kesatuan dari keyakinan dan praktek-praktek yang bersifat relatif terhadap hal-hal yang *secret* yakni segala sesuatu yang dihindari atau dilarang.

Penelitian tentang potensi kerukunan dan potensi konflik umat beragama bukan pertama kali dilakukan, tetapi telah beberapa kali dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, seperti dengan judul *Peta Kerukunan Umat Beragama di Berbagai Komunitas di Indonesia, Potret Kerukunan Umat Beragama di Jawa Barat* dan dalam penelitian ini penekanannya melihat potensi kerukunan dan potensi konflik serta kasus-kasus yang terjadi dan model-model penyelesaiannya.

## Kehidupan Keagamaan

Masyarakat Kota Madiun termasuk masyarakat heterogen, baik dari segi budaya, ekonomi, tingkat pendidikan, politik dan agama. Bukti heterogenitasnya terdapat multi agama dan terdapat beragamnya rumah ibadat. Agama-agama yang ada di Kota Madiun meliputi: agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Dari agama-agama yang ada hanya agama Khonghucu yang jumlah penganutnya tidak terdaftar secara administratif, padahal rumah ibadatnya ada. Jumlah sarana ibadat yang ada meliputi: masjid 187 buah, gereja Kristen 21 buah, gereja Katolik 2 buah, pura 3 buah, vihara 3 buah dan klenteng 1 buah. (Laporan Tahunan kota Madiun, 2010). Organisasi keagamaan yang ada di Kota Madiun meliputi: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persis, Muslimat NU, Fatayat NU, Nasiyatul Aisyiah dan Al-Wasliyah. Dari organisasi yang ada mayoritas adalah NU. Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Sedangkan NU bergerak di bidang Pondok Pesantren dan dakwah.

Kota Madiun terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Mangunharjo, Kecamatan Taman dan Kecamatan Kartoharjo. Dari ketiga kecamatan yang ada, jumlah penduduknya dilihat berdasarkan agama adalah umat Islam sebanyak 180.336 jiwa, umat Kristen sebanyak 11.717 jiwa, umat Katolik sebanyak 9.455 jiwa, umat Hindu sebanyak 266 jiwa dan umat Buddha sebanyak 1.038 jiwa. Dilihat dari jumlah penduduk yang ada, mayoritas beragama Islam.

Aktivitas keagamaan dari berbagai agama yang ada, dapat dilakukan secara efektif, seperti umat Islam aktif melakukan shalat dan pengajian-pengajian (majelis taklim) yang tempatnya di masjid-masjid, mushalla-mushalla dan di rumah-rumah. Umat Kristen dan umat Katolik melakukan kebaktian di gereja-gereja

yang ada. Bagi umat Hindu melakukan persembahyangan baik di rumah dan di Pura pada hari-hari tertentu. Begitu pula bagi umat Budha melakukan persembahyangan di rumah dan di vihara pada hari-hari tertentu. Sedangkan bagi umat Khonghucu juga melakukan persembahyangan di rumah maupun di klenteng.

Masing-masing umat beragama yang ada saling mengakui dan saling menghargai keberagaman agama, dan tidak saling mencela ataupun mencaci cara ibadat yang dilakukan agama lainnya. Namun demikian masalah kerukunan umat beragama seringkali terganggu oleh beberapa hal yaitu penyiaran agama, perkawinan antar agama, perayaan hari besar keagamaan, kegiatan kelompok sempalan baik dari kalangan Islam maupun non Islam dan masalah rumah ibadat.

### Potensi Kerukunan

Dalam rangka menciptakan kerukunan antarumat beragama di kota Madiun, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Madiun telah melaksanakan fungsi dan tugasnya, yaitu melaksanakan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat serta menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota Madiun dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat serta memberi rekomendasi tertulis terhadap permohonan pendirian rumah ibadat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang tokoh agama menyatakan bahwa Kerukunan Umat Beragama di kota Madiun cukup

kondusif. Hal tersebut dikarenakan : *Pertama*, adanya kesadaran masyarakat yang cukup tinggi dalam memahami perbedaan, bahwa setiap agama memiliki ajaran yang berbeda-beda. *Kedua*, solidaritas masyarakat yang cukup tinggi, sebagai contoh: sebagian umat Islam dalam merayakan Idul Qurban, membagi-bagikan daging qurban kepada seluruh warga tanpa melihat identitas agama. *Ketiga*, masing-masing umat beragama tidak saling mencampuri urusan agama orang lain. *Keempat*, peran FKUB yang efektif. *Kelima*, silaturahmi para tokoh lintas agama dengan mengunjungi tempat-tempat ibadat. *Keenam*, peran dari lembaga-lembaga pemerintah, seperti Kementerian Agama, Polsek, Polres, dan juga Kesbangpollinmas serta Majelis-majelis Agama yang cukup sigap dalam menangani peristiwa-peristiwa yang terjadi. *Ketujuh*, peran masyarakat dalam melakukan bakti sosial antar umat beragama seperti membersihkan selokan jalan, menjual sembako murah bagi rakyat miskin. *Kedelapan*, saling ketergantungan antar warga dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. (Wawancara dengan Ketua NU, 24 November 2010).

Kyai Dimiyati juga mengatakan bahwa perkembangan agama di kota Madiun cukup baik, hal tersebut dilakukan melalui metode *tawazun dan tasammuh (berlapang, toleran dan berimbang)*. Sebagai contoh di lingkungan kami ada seorang warga yang memiliki anjing yang berkeliaran di sekitar masjid. Tetapi kami tidak langsung menghajar anjing tersebut, melainkan melalui prosedur dengan melapor ke RT, RW dan ke Pak Lurah, tentang bagaimana keberadaan anjing itu, karena kita masih mempunyai rasa toleransi yang cukup tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas walaupun keadaannya demikian, peran pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat dalam memelihara

kerukunan umat beragama cukup efektif, terutama dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

### **Faktor-Faktor Pemicu Konflik**

Menurut ketua FKUB Kota Madiun situasi dan kondisi masyarakatnya cukup kondusif, namun demikian bukan berarti tidak ada pemicu konflik, hal ini disebabkan banyaknya bermunculan sekte-sekte baik dari kalangan Islam maupun non-Islam. Dalam Kristen misalnya, terdapat sekte-sekte Saksi Yehova yang dipandang oleh mainstream Kristen tidak sesuai dengan ajaran agama gereja. Saksi-saksi Yehova memiliki penafsiran berbeda terhadap kitab suci.

Dalam internal umat Islam, di Madiun juga muncul gerakan-gerakan keagamaan seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir (HTI), Fron Pembela Islam (FPI) dan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA). Kelompok yang rawan memunculkan persoalan menurut Ketua MUI Kabupaten Madiun H Sutoyo adalah MTA yang seringkali mengeluarkan pernyataan kontroversi seperti amalan tahlilan dan dzikir adalah bid'ah. (Wawancara dengan ketua MUI kota Madiun, H. Sutoyo, 24 November 2010).

Persoalan lain diantaranya adanya perkawinan antar agama, muslim menikah dengan non-muslim. Perkawinan antar agama berdampak konversi agama mengakibatkan kontroversi. (Wawancara dengan Hj. Najahah).

### **Kasus-Kasus Keagamaan yang Pernah Terjadi di Kota Madiun:**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang tokoh agama dan tokoh masyarakat mengatakan bahwa di kota Madiun pernah terjadi kasus-

kasus keagamaan. Contoh kasus yakni rumah tempat tinggal dijadikan tempat kebaktian umat Kristen, pernah terjadi di Jalan Anggrek Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo. Kasus lain yaitu aksi penolakan pembangunan Gereja di pemukiman Muslim, di Kecamatan Kartoharjo Kelurahan Rejomulyo RT.16/RW 5. (Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, 2006). Juga adanya keresahan warga Muslim disebabkan oleh anjing piaraan yang berkeliaran di sekitar masjid seperti yang terjadi di Kecamatan Kartoharjo. (Wawancara dengan Ketua NU, H. Dimiyati, 25 November 2010).

Semua peristiwa tersebut dapat diatasi dengan baik oleh aparat, masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga peristiwa tersebut tidak sampai mencuat kepermukaan,

### **Model-Model Penyelesaian Konflik**

Berdasarkan keterangan Ketua FKUB dan ketua MUI, bahwa semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kota Madiun dapat ditangani dengan baik oleh aparat pemerintah dan masyarakat.

#### *Kasus rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadat*

Cara penyelesaiannya dengan melakukan pertemuan bertempat di rumah Ketua RW 3 Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo, dengan mengundang Camat Kartoharjo; Lurah Oro-Oro Ombo; Perwakilan Kementerian Agama Kota Madiun; Perwakilan MUI kota Madiun; Perwakilan Polsek Kartoharjo; Perwakilan Koramil, Polresta dan FKUB kota Madiun; Ketua RT dan Perwakilan Islam di wilayah RW 3; Perwakilan Kristen ; Perwakilan Warga RT 12 RW 3. (Wawancara dengan Dr. Hadi Suprpto, 27 November 2010)

### *Penolakan Pembangunan Gereja di Pemukiman Muslim*

Cara penyelesaiannya adalah warga muslim setempat membuat surat pernyataan yang disertai tanda tangan menolak rencana pembangunan Gereja Pantekosta bagi umat Kristen, kasus ini terjadi pada tahun 2006 di Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Rejomulyo RT.16 RW 5. (Wawancara dengan ketua MUI kota Madiun, 27 November 2010)

### *Keresahan umat Muslim karena binatang anjing*

Kasus yang terjadi, anjing-anjing piaraan warga non-muslim dibiarkan berkeliaran di sekitar masjid. Kasus ini membuat umat Islam ribut. Cara penanganannya, warga yang bertempat tinggal disekitar masjid melapor kepada RT, RW, Lurah dan Ketua FKUB. Setelah Lurah dan Ketua FKUB menerima laporan itu, kemudian memanggil sipemilik anjing itu dan memberikan keterangan-keterangan dan pada akhirnya masalah tersebut dapat diselesaikan pada tingkat kelurahan. (Wawancara dengan Ketua NU kota Madiun Kyai Dimiyati, 26 November 2010).

## **Dinamika Sosial Keagamaan**

Masyarakat Kota Madiun dikenal sebagai masyarakat yang cukup solid dan toleran. Namun toleransi yang dimaksudkan disini adalah toleransi dalam hal kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan bukan dalam kegiatan keagamaan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan agama bagi mereka tidak bisa dikompromikan. Kegiatan-kegiatan yang bisa dikerjasamakan antar umat beragama, meliputi: kerja bakti, ronda malam, peringatan hari-hari besar nasional, membantu warga yang mendapatkan kesusahan karena kebakaran atau terkena bencana banjir.

Kerukunan antar umat beragama di Kota Madiun cukup baik, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat yang dapat memahami bahwa setiap agama memiliki perbedaan-perbedaan, oleh karena itu dalam perbedaan tersebut, mereka saling menghargai, saling menghormati dan tidak saling mencela apalagi mengganggu.

Di kota Madiun walaupun hubungan antarumat beragamanya cukup kondusif, bukan berarti tidak terjadi konflik, karena dimanapun kita berada konflik pasti ada tergantung bagaimana kita bisa menyikapinya.

Kasus yang pernah mencuat seperti disebutkan di atas seperti tempat tinggal, yang dijadikan tempat ibadat dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Solusi yang ditempuh oleh aparat pemerintah bersama tokoh-tokoh agama merujuk pada peraturan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 bahwa rumah tinggal tidak boleh dijadikan sebagai rumah ibadat. Dengan mentaati ketentuan itu, semua pihak dapat menerima dengan kesadaran hati.

Penolakan terhadap pendirian rumah ibadat (Gereja Pantekosta) yang terjadi di Kecamatan Kartoharjo. Kasus ini membuat resah masyarakat Muslim sekitar, karena di wilayah ini mayoritas dihuni oleh masyarakat Muslim. Hal tersebut dapat dibuktikan dari jumlah warga yang ada di RT 16 Rw 5 yang jumlah warganya ada 86 KK atau 200 jiwa, yang terdiri dari: umat Islam sebanyak 81 KK atau 181 jiwa, Katolik 2 KK atau 7 jiwa, Kristen 2 KK atau 8 jiwa, umat Budha 1 KK atau 3 jiwa. Selain itu, rencana pembangunan gereja tersebut dan tidak didasarkan atas keperluan nyata dan sungguh-sungguh. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006.

Kasus-kasus yang pernah terjadi pada umumnya dapat diselesaikan dengan cara, melakukan dialog antar umat beragama, dengan menghadirkan unsur pemerintah, FKUB, Majelis-majelis Agama dan pihak-pihak terlibat. Semua unsur-unsur tersebut saling bekerjasama dalam menangani peristiwa-peristiwa yang terjadi.

## Penutup

Studi ini menyimpulkan dalam beberapa poin berikut: a) Potensi-potensi yang dapat menimbulkan kerukunan antar umat beragama di Kota Madiun adalah adanya kesadaran dari masing-masing umat beragama terhadap keberagaman agama yang memiliki ajaran yang berbeda-beda dan sikap toleransi yang cukup tinggi, seperti contoh dalam perayaan hari raya qurban, daging kurban di bagi-bagikan kepada seluruh warga tanpa melihat identitas agamanya; b) Pemicu konflik yang terjadi di Kota Madiun, antara lain adanya sekte-sekte dari agama Kristen, dan timbulnya gerakan keagamaan dalam Islam yang memiliki perbedaan

pemahaman dan pengamalan; c) Kasus-kasus keagamaan yang pernah terjadi di Kota Madiun antara lain berupa protes atau penolakan terhadap rumah tempat tinggal dijadikan tempat ibadat bagi umat Kristen yang terdapat di Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo dan adanya penolakan Pembangunan Gereja Pantekosta di Kelurahan Rejomulyo RT 16 /RW 5 Kecamatan Kartoharjo, keberadaan binatang piaraan (anjing) yang berkeliaran di sekitar masjid; d) Model penyelesaian kasus-kasus keagamaan yang terjadi di Kota Madiun melalui jalan musyawarah dengan azas kekeluargaan dan jalan dialog dengan melibatkan tokoh lintas agama, tokoh tokoh masyarakat, FKUB, unsur pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat.

Peneliti merekomendasikan beberapa hal, diantaranya: a) Sebaiknya sosialisasi tentang PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 perlu ditingkatkan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, agar masyarakat dapat memelihara kerukunan dengan baik; b) Tokoh agama dari masing-masing agama, perlu meningkatkan pembinaan keagamaan kepada umatnya, sehingga mereka dapat memahami ajaran agamanya dengan baik.

## Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat, *Kerjasama Antarumat Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, 2008.
- Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009, *Potret Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat*.
- Kementerian Agama Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009, *Efektifitas Sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*.
- Lubis, H.M.Ridwan, dkk. (eds), 2004, *Buku Penuntun Kerukunan Hidup Umat Beragama*, diterbitkan kerjasama antara LPKUB Medan dan Ciptapustaka Media Bandung.
- Laporan kegiatan FKUB Kota Madiun, *Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)*, 2010.
- Ronald Robertson, *Agama Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta, 1992.

Saefuddin, A. Fedyani, 1986, *Konflik dan Integrasi, Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, Penerbit Rajawali, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2003, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, UI Press, Jakarta.

Sekretariat Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, *Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006*.

# Membangun Peradaban Dunia yang Damai: Pentingnya Pembaharuan Islam dan “Kearifan” Barat (Tinjauan Buku “Masa Depan Islam” Karya John L. Esposito)

**Asep Saefullah**

Peneliti Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  
Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta  
Email: asepfm@yahoo.com

## **Abstract**

*The Islamic transformation should have not occurred if it remained consistency with its assessment. Any movements or groups of extremist, terrorist, fundamentalist, radical, or whatever its name is considered a hard act towards its teachings and implementations, must be separated from the mainstream Muslims and should be seen throughout their contexts. It should also be understood as the teaching of Islam and Islam as practiced. The capital pluralism should be used as a basis for strengthening the unity and integrity, not seen as barriers. Muslims are in need of conflict management to resolve issues that are faced by the Muslims.*

**Keywords:** religious practices, modernization, religious diversity

## **Pendahuluan**

Islam sebagai *rahmatan li al-‘âlamîn* tidak dapat dijelaskan kepada dunia Barat dalam waktu yang singkat. Watak kolonial yang ada pada sebagian masyarakat di dunia Barat merupakan salah satu faktor penghambatnya, di samping kecurigaan dan ketakutan sebagian mereka terhadap Islam. Sesungguhnya, umat Islam masih beruntung dibandingkan dengan Barat, karena Islam tidak pernah menawarkan solusi *double standard*.

Berbeda dengan barat, misalnya Amerika Serikat pada masa pemerintahan

## **Abstrak**

*Pembaharuan Islam seharusnya tidak terjadi jika ia tetap konsiste dengan penilaiannya. Setiap gerakan atau kelompok ekstrimis, teroris, fundamentalis, radikal, atau apapun namanya yang dipandang garis keras, hal itu harus dipisahkan dari kaum Muslim arus utama dan harus dilihat konteksnya. Juga harus dipahami Islam sebagai ajaran dan Islam sebagaimana yang diamalkan. Kemajemukan mesti dijadikan modal dasar bagi menguatkan persatuan dan kesatuan, bukan dipandang sebagai hambatan. Umat Islam sangat memerlukan management conflict untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh umat Islam.*

**Kata kunci:** praktik keberagamaan, modernisasi, keragaman religius

Bush sangat kental dengan *double standard*-nya dalam setiap kebijakannya. John L. Esposito (2010: 23) sendiri sangat menyadari itu, dan ia menulis—dalam Pendahuluan bukunya, *The Future of Islam*—demikian: “... Andai sekelompok Yahudi atau Kristen bertanggung jawab atas pengeboman gedung WTC, hanya sedikit yang akan mengaitkannya dengan keyakinan Yahudi atau Kristen arus utama. Pembunuhan PM Israel Yitzak Rabin oleh seorang fundamentalis Yahudi tidak lantas dikaitkan dengan sesuatu di dalam agama Yahudi arus utama; tidak pula skandal pelecehan seks pendeta diatributkan ke jantung Katolikisme. Kejahatan paling keji

*yang dilakukan ekstrimis Yahudi atau Kristen tidak dilabeli sebagai cerminan Kristen atau Yahudi militan atau radikal. Individu yang melakukan kejahatan itu sering disangkal dan dianggap fanatik, ekstrimis, atau orang gila ketimbang dicap sebagai fundamentalis Kristen atau Yahudi. Sebaliknya, pernyataan dan tindakan ekstrimis dan teroris Muslim sering digambarkan sebagai bagian integral dari Islam arus utama..."*

*Double standard* dapat dikatakan sebagai kunci utama kemandegan dalam membangun hubungan harmonis Islam-Barat. Dari situlah kemudian muncul berbagai pandangan di kalangan masyarakat Barat yang pada intinya menaruh kecurigaan dan ketakutan terhadap Islam. Umat Islam sebagai pelaku dan Islam sebagai ajaran tidak pernah dilihat sebagai kenyataan sosio-kultural (konteks), untuk yang pertama, dan sebagai gagasan samawi (teks), untuk yang kedua. Oleh karena itu, patut diduga bahwa pemahaman masyarakat Barat terhadap Islam tidak seindah pemahaman mereka terhadap demokrasi, HAM, Jender, dan lain-lain (Mernissi, 1993; Fazlurrahman Ansari, dalam Haidar Bagir [Ed.], 1989: 140-141).

Bahkan Islam dipandang sebagai ancaman hanya karena melihat segelintir orang melakukan kekerasan atau teror. Itu pun tidak pernah dilihat sebab musababnya mengapa muncul kelompok-kelompok kecil yang militan dan munculnya tindakan ekstrim yang dilakukan oleh segolongan kecil di dalam kelompok mayoritas Islam arus utama yang begitu besar (tentang standar ganda Amerika Serikat antara lain lihat Esposito, 2010: 220 dan 288-291).

Faktor-faktor yang dapat memunculkan ekstrimitas menurut Yusuf Al-iQaradhawi antara lain: a) lemahnya pemahaman terhadap hakikat agama, b) Mengikuti yang tersamar dan meninggalkan yang jelas, c) mengambil ilmu tidak dari ahlinya, d) jauh dari

ulama, e) lemahnya pengetahuan tentang sejarah, hukum alam, dan kehidupan, f) peminggiran Islam di Negara Islam, g) Penindasan terhadap Umat Islam, h) Pembelengguan Islamisasi, dan ) menangani ekstrimitas dengan kekerasan pula.

Kehadiran buku Esposito, *The Future of Islam*, yang sedang ditinjau kali ini dapat dijadikan salah satu bahan perenungan bagi semua pihak untuk membangun hubungan Islam-Barat yang lebih harmonis. Lebih dari itu, bagi kaum Muslim sendiri, buku ini dapat dijadikan salahsatu bahan introspeksi dan autokritik atas praktik-praktik keberagamaan di tengah-tengah masyarakat dunia dewasa ini.

### Isi Ringkas dan Penulis Buku

Buku *The Future of Islam*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Masa Depan Islam, Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat", diterbitkan oleh Penerbit Mizan, Bandung, Desember 2010. Selain pengantar dan pendahuluan, buku ini dibagi menjadi empat bagian, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan. Secara ringkas, penulis buku telah menjelaskan cakupan buku ini secara sangat jelas sehingga dapat memandu pembaca untuk menelaah lebih lanjut pada setiap bagiannya. Keempat bagian tersebut adalah: Bab 1, Multiwajah Islam dan Muslim; Bab 2, Tuhan dalam Politik; Bab 3, Manakah Para Pembaharu Muslim?, dan Bab 4, Amerika dan Dunia Muslim: Membangun Jalan Baru ke Depan.

Bab 1, Multiwajah Islam dan Muslim, secara garis besar menjelaskan "tentang Islam dan Muslim, tentang Islam di Barat, dan tentang Islam dan Barat. Penting dipahami masa depan Islam adalah keragaman, religiositas, kultural, dan politiknya. Siapa dan di manakah Muslim? Apa yang diyakini Muslim,

dan mengapa? Apakah perbedaan antara Muslim Sunni dan Syi'ah, pentingkah hal itu?" (Esposito, 2010: 24).

Bab 2, Tuhan dalam Politik, menyajikan latar belakang dan konteks untuk memahami Islam politik, peran agama dalam politik dan masyarakat, serta pengaruhnya terhadap masyarakat Muslim dan Barat (Esposito, 2010: 25).

Bab 3 menjelaskan tentang pembaharuan dalam Islam. "Sejak akhir abad kesembilan belas, para pembaharu Islam telah berkuat dengan hubungan Islam dan realitas kehidupan modern yang terus berubah. Bab ini mengkaji akar pembaharuan dan sejauh mana hal itu berlanjut sekarang, dari Mesir sampai Indonesia, ketika sederet pemuka agama dan kalangan intelektual Muslim, pria dan wanita, berdiskusi dan berdebat dalam proses dinamis penafsiran kembali dan pembaharuan" (Esposito, 2010: 26).

Bab terakhir, yakni Bab 4, menjelaskan tentang "islamofobia, kegagalan kebijakan luar dan dalam negeri Amerika, peran Zionis Kristen dan media massa, serta ancaman terus menerus dari ekstrimisme dan terorisme. Adakah kebutuhan akan paradigma baru dalam hubungan Muslim-Barat? Bagaimana pemerintahan Obama bisa membangun kembali citra, peran, dan pengaruh Amerika di dunia Muslim?" (Esposito, 2010: 28).

Buku ini diberi pengantar oleh Karen Amstrong, yang menurutnya, "Dengan menulis buku ini, Prof. Esposito telah memberikan kontribusi yang besar untuk menumbuhkan apresiasi yang lebih berimbang dan informatif tentang Dunia Islam". Ia juga menjelaskan bahwa, "masa depan Islam tidak bergantung pada keefektifan segelintir pembaharu Muslim semata, tetapi bahwa Amerika dan Eropa juga memainkan peranan besar. Apabila kebijakan-kebijakan Barat yang berpandangan picik telah

membantu menciptakan kebuntuan sekarang ini, kebijakan-kebijakan itu, jika tidak diperbaiki, akan terus berdampak negatif terhadap wilayah tersebut, akan melemahkan alasan reformasi, dan jatuh ke tangan ekstrimis..." (Esposito, 2010: 13-14).

Penjelasan di atas juga sebagai salah satu alasan mengapa tulisan ini diberi anak judul "Pentingnya Pembaharuan Islam dan 'Kearifan' Barat" dalam "Membangun Peradaban Dunia yang Damai". Umat Islam harus menyadari betul posisi dan peran mereka di kancah internasional sehingga harus direformulasikan, Islam yang bagaimana yang akan dilaksanakan di tengah gelombang modernisasi, globalisasi dan di era informasi ini. Selain itu, masihkah ada "kearifan" dari para elit politik Barat, dalam konteks buku ini adalah Amerika Serikat, khususnya dalam menerbitkan dan memberlakukan kebijakan-kebijakannya baik dalam maupun luar negeri terhadap Islam dan kaum Muslim. Oleh karena itu, kata "kearifan" diletakkan di antara dua tanda petik.

John L. Esposito sendiri adalah seorang profesor hubungan internasional dan kajian Islam di Georgetown University, USA. Pernah menjabat sebagai Presiden Middle Eastern Studies Association of North America dan konsultan bagi pemerintahan berbagai negara. Kini ia tinggal di Washington DC, dengan istrinya, Jeanette P. Esposito, Ph.D. Di dunia Barat dan di kalangan Ilmuwan Muslim, John L. Esposito tidak asing lagi. Bahkan bagi cedeikian Muslim sekelas Azyumardi Azra pun, Esposito dipandang sebagai pakar dari Barat yang obyektif dan empatik dalam melihat Islam dan umatnya. "Karena itu, ia sering menjadi sasaran kemarahan kalangan Barat yang fobia terhadap Islam dan Muslim. Padahal, dengan pendekatan seperti itu, Esposito tidak kehilangan kritisisme terhadap Islam

dan kaum Muslimin, baik dalam konteks negara Muslim tertentu maupun dalam hubungan antara dunia Muslim dan Barat” (Azra, 2011).

### **Masa Depan Islam: Pembaharuan Muslim dan “Kearifan” Barat ?**

Buku ini tidak saja menggugah umat Islam secara internal untuk segera bangkit menyongsong masa depannya, tetapi juga sekaligus menjelaskan kepada Barat bahwa Islam bukanlah ancaman. Sebagaimana dijelaskan penulisnya, bahwa motivasi utama menulis buku ini adalah “Pemasyarakatan Islam dan Mayoritas Muslim dengan tindakan segelintir teroris dan kebutuhan untuk membangun kembali hubungan dengan dunia Muslim—sebagaimana dinyatakan Presiden Barack Obama dengan tokoh lainnya... Saya ingin menuturkan penyebab kita sampai pada keadaan ini dan hal-hal yang harus kita pahami dan lakukan untuk menciptakan apa yang disebut Presiden Obama “jalan baru ke depan”. (Esposito, 2010: 24).

Buku ini berusaha untuk memahami perjuangan pembaharuan dalam Islam yang terkadang digambarkan sebagai perjuangan demi jiwa Islam; menjelajahi keragaman religius, kultural, dan politik kaum Muslim yang menghadapi tantangan menakutkan di negara-negara Muslim dan di Barat; untuk menjernihkan perdebatan dan dinamika pembaharuan Islam; untuk mempelajari upaya memerangi ekstremisme dan terorisme berlatar belakang keagamaan; serta meninjau masa depan hubungan Muslim-Barat.” (Esposito, 2010: 20; lihat juga Oliver Roy, 1996: 4) Serangkaian motif itu, menurutnya, didorong oleh perang besar-besaran Amerika melawan teroris, tindakan kekerasan dan terorisme yang terus dilakukan oleh segelintir ekstremis Muslim, tersebarluasnya anti-Amerika di seluruh dunia Muslim dan di banyak

negara non-Muslim, serta menyebarnya Islamofobia (*www.koran-jakarta.com*, 15 Januari 2011).

Dengan demikian, dalam memahami Islam dan kaum Muslim, Esposito tidak setuju dengan pandangan yang selalu mengaitkan perilaku Muslim dengan doktrin dan ajaran Islam. “Memahami keyakinan orang lain tidak hanya membutuhkan pengetahuan mengenai sumber-sumber suci agama itu, tetapi juga pengetahuan mengenai apa yang betul-betul dipercaya dan dilakukan orang-orang tersebut. Penghormatan terhadap hal-hal penting suatu agama tidak bisa tanpa mengikutsertakan kesadaran akan keragaman bentuk dan pengekspressiannya.” (Esposito, 2010: 20). Apalagi jika dikaitkan dengan pandangan dunia, khususnya Barat, yang tidak jarang apriori dan dikotomis. Esposito mengharuskan semua pihak melihat konteksnya pula, bukan pada teksnya semata. Ia mengatakan:

“Di dunia yang terlampau sering takluk pada dikotomi ‘kita’ dan ‘mereka’, kita semua ditantang untuk melampaui (meskipun bukan berarti mengingkari) perbedaan kita, memperkuat sisi kemanusiaan yang sama-sama kita miliki dan menyadari bahwa kita semua, suka atau tidak, saling terhubung dan saling membutuhkan, serta sama-sama menciptakan masyarakat dan dunia

... Jika Anda ingin mengetahui apa yang diyakini orang-orang, jika Anda ingin menangkap realitas kehidupan sehari-hari, Anda harus melihat, meminjam jargon akademis dewasa ini, “teks maupun konteksnya”. (Esposito, 2010: 22)

Sebagaimana dijelaskan oleh Azyumardi Azra (2011), menurut pandangan Esposito, Islam dan Muslim memiliki banyak wajah, yang tidak selalu menggembirakan. Esposito juga melihat Islam dan dunia Muslim menghadapi

berbagai kecenderungan yang tidak menjanjikan untuk masa depan. Setidaknya, Azra (2011) mencatat dua kecenderungan tersebut, yaitu:

*Pertama*, meningkatnya ultrakonservatisme Islam, yang terutama diwakili Wahabisme. Meski gerakan Wahabiyah sekarang tidak selalu menampilkan kekerasan, ia membuat Islam hadir sebagai agama yang serba tidak boleh: 'ini tidak boleh, itu tidak boleh'. Esposito menggunakan istilah "penebar kebencian Muslim" terhadap kelompok kecil yang khususnya berteologi ultrakonservatif eksklusif.

*Kedua*, meningkatnya berbagai kesulitan yang dihadapi para penganjur pembaharuan dan reformasi di dalam Islam juga masyarakat Muslim.

Terkait dengan kecenderungan pertama, sesungguhnya tidak hanya terjadi di tubuh umat Islam, tetapi juga terdapat di kalangan Yahudi dan Kristen. Dan, kita harus adil melihat fenomena ultrakonservatisme dan radikalisme dalam agama-agama tersebut.

Esposito, lewat buku ini, melihat bahwa telah terjadi krisis intra-umat Islam di satu sisi dan krisis apresiasi lintas peradaban, di sisi lain. Krisis intra-umat Islam mestinya menjadikan Islam kaya penafsiran dan di situlah rahmat mestinya pula bersemayam, walaupun kenyataannya kini menjadi tantangan pembaharuan. Sementara itu, krisis lintas peradaban telah menjadikan Islam semakin teguh menampilkan wajah ramahnya dalam menyemai peradaban baru dunia. Stigma terorisme yang sempat melekat pasca tragedi 11 September justru membuktikan Islam semakin solid meneguhkan diri sebagai kaum moderat. Umat Islam sendiri yang bermukim di Barat dan telah melakukan asimilasi dengan masyarakat Barat justru menjadi "juru bicara" yang membawa wajah moderatisme ajaran Islam. (Muhammadun, 2011)

Sedangkan tentang tantangan pembaharuan, Esposito menjelaskan berbagai pandangan para pembaharu Muslim dan perdebatannya dengan sekelompok ulama yang disebutnya konservatif. Misalnya, perdebatan antara Syaikh Yusuf al-Qardhawi dengan Syaikh Muhammad bin Sayyid Tantawi (mantan mufti Mesir) dan Syaikh Muhammad bin Abdullah al-Subail (Imam Masjid Makkah) dalam hal bom bunuh diri warga Palestina. Bagi Qardhawi, bom bunuh diri warga Palestina adalah syahid. Berbeda dengan kedua imam lainnya yang menyatakan bahwa Islam melarang membunuh warga sipil (Esposito, 2010: 161-165)..

Esposito memahami dengan baik wajah gerakan umat Islam di Barat yang semakin cepat dalam merespon berbagai tantangan modernitas. Karena itu, ia memperkenalkan kepada generasi saat ini para pemikir semisal Tariq Ramadhan, Amina Wadud, Mustafa Ceric, Khalid Abou el-Fadl, dan sebagainya. Mereka menjadi juru bicara yang fasih dalam menjabarkan ajaran Islam yang toleran, damai, dan suka persahabatan. Esposito memaparkan gagasan dan tindakan mereka dalam membela Islam dan kaum Muslim. Di samping mereka yang berada di Barat, umat Islam yang tersebar di Timur juga berkontribusi besar dalam merekatkan kembali dialog lintas peradaban. Pemikiran Sir Muhammad Iqbal, Fazlur Rahman, Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid dan sebagainya semakin membuat bunga Islam makin semerbak. Pemikiran dan gerak keilmuan yang mereka jalankan menjadi jembatan dialog yang sinergis, sehingga ide dan pemikiran mereka semakin dijadikan referensi berbagai kajian dan gerak perdamaian di masyarakat Barat (Muhammadun, 2011).

Dari penjelasan Esposito, Azra (2011), menarik kesimpulan bahwa tampaknya Esposito terkesan agak

pesimis dengan pambaruan di tubuh kaum Muslim. “Dalam tanggapan saya kepada Esposito, gambaran demikian muncul tidak lain karena penekanan pengamatan yang terpusat pada politik domestik dunia Islam dan *khilafiyah* di kalangan umat yang sejak awal masa pasca-Nabi Muhammad tidak pernah terselesaikan. Saya menganjurkan agar juga melihat dinamika Islam kultural, khususnya di Indonesia, yang lebih menjanjikan. Ini terlihat dalam pertumbuhan kaum terdidik dan kelas menengah Muslim; ormas dan *civil society* yang dinamis, dan seterusnya.”

Perlu disinggung tentang judul kecil dalam terjemahan bahasa Indonesia, yakni: “Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat”. Anak judul ini perlu mendapat perhatian. Di dalam buku ini, John L. Esposito juga memaparkan berbagai perdebatan internal kaum Muslimin, antara lain kaum modernis dan tradisional, fundamentalis/radikal dan moderat, konservatif dan pembaharu, dan lain-lain. Selain itu, ia juga menjelaskan pandangan stereotip dan penuh kecurigaan Barat terhadap Islam dan kaum Muslim, khususnya karena keengganan mereka.

Jika dapat disederhanakan, dua tema pokok dalam anak judul terjemahan tersebut adalah demikian, bahwa Islam menghadapi tantangan internal dan eksternal. Secara internal, umat Islam menghadapi tantangan kemajemukan, yaitu lahirnya berbagai kelompok dalam Islam dan perdebatan berkepanjangan yang tak kunjung selesai, khususnya antara kaum modernis dengan kaum tradisional, pembaharu dengan konservatif, fundamentalis dengan liberal, dan radikal dengan moderat—walaupun sesungguhnya, seperti ditegaskan berulang-ulang oleh Esposito, “minoritas ekstrimis, teroris, atau fundamentalis dalam Islam harus dibedakan dari kaum Muslim arus utama sebagaimana hal

itu dilakukan pula pada agama Yahudi dan Kristen; pelabelan ekstrimis, teroris, radikal, liberal, pluralis, pun harus ditinjau ulang karena bisa jadi hal itu semata terminologi dari suatu golongan yang menghendaki perpecahan dalam Islam atau upaya stigmatisasi terhadap Islam. Adapun tantangan eksternal adalah dugaan ketidaksesuaian Islam dengan sains dan teknologi modern (Esposito, 2010: 140-141) dan benturan dengan Barat, khususnya politik luar negeri yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya (Esposito, 2010: 218-220). Oleh karena itu dalam tinjauan ini tertera pula “perlunya pembaharuan” dan “kearifan Barat”. Hanya saja, “kearifan” Barat masih harus dipertanyakan, adakah mereka benar-benar mempunyai niat baik membangun dunia penuh keadilan sebagaimana pernah digagas oleh Ali Syari’ati. Sebab, keadilan tidak semata milik Islam atau milik satu agama. Keadilan adalah konsep universal yang semua orang, Muslim dan non Muslim wajib menegakkannya (Syari’ati, 1989: 50-53)

Sebelum menutup tinjauan ini, di luar gagasan Esposito yang cemerlang, obyektif dan empatik terhadap Islam, ada beberapa hal lain yang perlu dilihat untuk kesempurnaan buku ini. *Pertama*, sebagaimana disampaikan oleh Azyumardi Azra, bahwa Esposito, dalam buku ini, masih terpusat pada politik domestik negara-negara Islam dan perbedatan berkepanjangan dalam masalah *khilafiyah*, tetapi kurang melihat dinamika kultural umat Islam. Apa yang disebutnya sebagai “konteks” atau ajaran Islam yang membumi dan dipraktikkan oleh umatnya di berbagai belahan Dunia Islam kurang terelaborasi dalam buku ini. Juga tentang “apa yang diinginkan oleh mayoritas Muslim yang diam” belum sepenuhnya dijelaskan dalam buku ini.

*Kedua*, pandangan Esposito yang agak pesimistis terhadap pembaharuan

Islam tidak seharusnya terjadi seandainya ia tetap konsisten dengan penilaiannya, bahwa setiap gerakan atau kelompok ekstrimis, teroris, fundamentalis, radikal, atau apapun namanya yang dipandang garis keras, hal itu harus dipisahkan dari kaum Muslim arus utama dan harus dilihat konteksnya, serta harus pula dipahami Islam sebagai ajaran dan Islam sebagaimana yang diamalkan. Kemajemukan mestinya dijadikan modal dasar bagi menguatkan persatuan dan kesatuan, bukan dipandang sebagai hambatan. Di sinilah kaum Muslim memerlukan apa yang disebut *management conflict*.

*Ketiga*, dari segi teknis dan perwajahan, dalam beberapa paragraf, tampak ada sedikit kerancuan atau kurang tepat dalam memilih diksi atau frasa, apakah disebabkan karena kesalahan teknis atau kesalahan dalam penerjemahan, atau bisa jadi itulah yang dipilih penerbit. Misalnya pada halaman 293, tertulis "Namun, para pembaharu masih merupakan minoritas rintangan yang kukuh." Kalimat ini tidak dapat langsung dipahami tetapi harus "dipikirkan" dulu, apa yang dimaksud dengan "minoritas rintangan"? Apakah "para pembaharu" itu sebagai "kelompok kecil yang tangguh" di tengah rezim otoriter, atau "menjadi rintangan bagi rezim otoriter". Jika diterjemahkan agak bebas, bisa jadi berbunyi demikian: "Namun, para pembaharu masih merupakan minoritas yang tangguh menghadapi rintangan rezim otoriter."

*Keempat*, dalam hal catatan akhir (*end note*), bisa jadi lebih praktis dilihat dari segi pengerjaan tata letak (*lay out*) buku, tetapi agaknya merepotkan pembaca ketika hendak melihat rujukannya sebab ia harus membuka lembaran-lembaran di bagian belakang untuk mencarinya. Sekiranya rujukan tersebut dibuat dengan sistem catatan kaki (*footnote*), sehingga pembaca tidak disibukkan dengan

membuka halaman-halaman *end note*, dan pada akhirnya pun pemahaman atas bacaannya terhadap buku ini akan lebih utuh.

## Penutup

"Tantangan kemajemukan" dan "benturan dengan Barat" adalah dua anak kalimat yang tampaknya dipilih penerbit untuk melukiskan apa yang ingin disampaikan oleh John L. Esposito dalam membangun "Masa Depan Islam". Kedua hal tersebut antara lain tercermin dalam kesimpulannya sebagai berikut:

"Kaum Muslim abad kedua puluh satu ini berdiri di persimpangan jalan besar, karena mereka menghadapi dunia modernitas majemuk, dari Afrika Utara sampai Asia Tenggara, dari Amerika Utara hingga Eropa. Sebagaimana pemeluk agama lain, kaum Muslim berjuang menjalankan dan menerapkan keimanan mereka di dunia yang berubah dengan cepat ini. Sebagian orang ingin membatasi agama untuk kehidupan pribadi saja; banyak yang lain melihat Islam sebagai bagian integral dari semua aspek kehidupan mereka, tetapi sangat berbeda dalam cara menafsirkan dan menafsir-ulang iman dan sejarah mereka. Kalangan Muslim yang propembaharuan, ulama maupun orang awam, pria dan wanita, berusaha mewujudkan suatu kerangka Islam konstruktif. Dilengkapi pengetahuan mendalam tentang tradisi keagamaan mereka dan pendidikan modern di bidang hukum, sejarah, politik, kedokteran, ekonomi, dan sains, mereka siap menafsirkan kembali sumber-sumber dan tradisi keislaman untuk memenuhi tantangan modernisasi dan pembangunan, kepemimpinan dan ideologi, demokratisasi, pluralisme, serta kebijakan luar negeri." (Esposito, 2010: 293)

Islam yang multiwajah dalam pengertian Islam yang diamalkan oleh

umatnya menuntut kearifan seluruh pihak dalam menerima *sunnatullah* tersebut, yaitu adanya perbedaan di tengah-tengah umat. Demikian juga dengan para elit dan masyarakat Barat yang fobi terhadap Islam, sudah saatnya harus membukakan mata bahwa Islam yang diamalkan tidaklah tunggal; bahwa minoritas Muslim yang melakukan tindakan anarkis dan teror

berbeda dari kaum Muslim mayoritas yang diam; bahwa kebijakan luar negeri negara-negara Eropa dan Amerika harus melepaskan standar ganda; serta mengikis habis watak kolonial dari hati mereka. Membangun masa depan Islam sesungguhnya membangun peradaban dunia yang damai dan bermartabat. *Wa Allâh a'lam.*

### Daftar Bacaan

- Ansari, Fazlurrahman, "Islam Melawan Barat", dalam Haidar Bagir (Ed.), *Benturan Barat dengan Islam*, (Bandung: Mizan, 1989), Cet. III, h. 117-148.
- Azra, Azyumardi, "Esposito: Masa Depan Islam," dalam <http://republika.co.id:8080/koran/28/127042>, Kamis, 13 Januari 2011.
- Anas, Fatkhul "Islam Menjemput Masa Depan", <http://hminews.com/buku/islam-menjemput-masa-depan/>, 21 January 201
- "Masa Depan Islam di Mata Espisoto", dalam <http://koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=72757>, Sabtu, 15 Januari 2011
- Mernissi, Fatimah, *Islam and Democracy, Fear of the Modern World*, (New York: Addison-Wesley Publishing Company, 1993).
- Muhammadun**, "Merajut Dialog Antar Peradaban" dalam <http://m.kompas.com/iphone/read/data/2011.01.27.00371659>, Kamis, 27 Januari 2011
- Qardhawi, Yusuf, *Islam "Esktrem", Analisis dan Pemecahannya*, Terj. Alwi AM (Bandung: Mizan, 1991), cet. IV.
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1998), Cet. VIII.
- Roy, Oliver, *The Failure of Political Islam*, (Cambradge, Massachussetts: Harvad University Press, 1996), Cet. II.
- Syari'ati, Ali, *Membangun Masa Depan Islam*, (Bandung: Mizan, 1989), Cet. III.

### Identitas Buku:

Judul Buku: *Masa Depan Islam: Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat* (Judul Asli: *The Future of Islam*; terbitan Oxford University Press, New York, 2010); Penulis : John L. Esposito; Penerjemah: Eva Y. Nukman dan Edi Wahyu SM.; Penerbit: Mizan, Bandung; Cetakan/Tahun: I, Desember 2010; Tebal: 343 halaman.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL HARMONI PUSLITBANG KEHIDUPAN KEAGAMAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEAGAMAAN KEMENTERIAN AGAMA RI

1. Artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris disertakan abstrak dalam bahasa Inggris dan Indonesia.
2. Konten artikel mengenai: a) Pemikiran, Aliran, Paham dan Gerakan Keagamaan; b) Pelayanan dan Pengamalan Keagamaan; c) Hubungan Antar Agama dan Kerukunan Umat Beragama.
3. Penulisan dengan menggunakan MS Word pada kertas berukuran A4, dengan font Times New Roman 12, spasi 1,5, kecuali tabel. Batas atas dan bawah 3 cm, tepi kiri dan kanan 3,17 cm. maksimal 15 halaman isi di luar lampiran.
4. Kerangka tulisan: tulisan hasil riset tersusun menurut sistematika berikut:
  - a. Judul.
  - b. Nama
  - c. Alamat lembaga dan email penulis
  - d. Abstrak.
  - e. Kata kunci.
  - f. Pendahuluan (berisi latar belakang, perumusan masalah, teori, hipotesis- *opsional*, tujuan)
  - g. Metode penelitian (berisi waktu dan tempat, bahan/cara pengumpulan data, metode analisis data).
  - h. Hasil dan pembahasan.
  - i. Penutup (kesimpulan dan saran)
  - j. Daftar pustaka.
5. Judul diketik dengan huruf kapital tebal (**bold**) pada halaman pertama. Judul harus mencerminkan isi tulisan.
6. Nama penulis diketik lengkap di bawah judul beserta alamat lengkap. Bila alamat lebih dari satu diberi tanda asteriks \*) dan diikuti alamat penulis sekarang. Jika penulis lebih dari satu orang, kata penghubung digunakan kata “dan”.
7. Abstrak diketik dengan huruf miring (*italic*) berjarak 1 spasi maksimal 150 kata.
8. Kata kunci terdiri dari 5 kata, ditulis *italic*.
9. Pengutipan dalam artikel berbentuk body note.
  - a. Setelah kutipan, dicantumkan penulisnya, tahun penulisan dan halaman buku dimaksud. Contoh: ....(*kutipan*)...(Nurcholis Madjid, 1997: 98).
  - b. Buku yang dikutip ditulis secara lengkap pada bibliografi.

## 10. Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan nomor urut pustaka yang dikutip:

- a. Buku dengan penulis satu orang. *Contoh:*  
Hockett, Charles F. *A Course in Modern Linguistics*. New York: The Macmillan Company, 1963.
- b. Buku dengan dua atau tiga pengarang. *Contoh:*  
Oliver, Robert T., and Rupert L. Cortright. *New Training for Effective Speech*. New York: Henry Holt and Company, Inc., 1958.
- c. Buku dengan banyak pengarang, hanya nama pengarang pertama yang dicantumkan dengan susunan terbalik. *Contoh:*  
Morris, Alton C., et.al. *College English, the First Year*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1964.
- d. Buku yang terdiri dari dua jilid atau lebih. *Contoh:*  
*Intensive Course in English, 5 Vols*. Washington: English Language Service, Inc., 1964.
- e. Sebuah edisi dari karya seorang pengarang atau lebih. *Contoh:*  
Ali, Lukman, ed. *Bahasa dan Kasusastraan Indonesia sebagai Cermin Manusia Indonesia Baru*. Jakarta: Gunung Agung, 1967.
- f. Sebuah kumpulan bunga rampai atau antologi. *Contoh:*  
Jassin, H.B. ed. *Gema Tanah Air, Prosa dan Puisi*. 2 jld. Jakarta: Balai Pustaka, 1969.
- g. Sebuah buku terjemahan. *Contoh:*  
Multatuli. *Max Havelaar, atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda*, terj. H.B. Jassin, Jakarta: Djambatan, 1972.
- h. Artikel dalam sebuah himpunan. Judul artikel selalu ditulis dalam tanda kutip. *Contoh:*  
Riesman, David. "Character and Society," *Toward Liberal Education*, eds. Louis G. Locke, William M. Gibson, and George Arms. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1962.
- i. Artikel dalam ensiklopedi. *Contoh:*  
Wright, J.T. "Language Varieties: language and Dialect," *Encyclopaedia of Linguistics, Information and Control* (Oxford: Pergamon Press Ltd., 1969), hal. 243-251.  
"Rhetoric," *Encyclopaedia Britannica*, 1970, XIX, 257-260.
- j. Artikel majalah. *Contoh:*  
Kridalaksana, Harimurti. "Perhitungan Leksikostatistik atas Delapan Bahasa Nusantara Barat serta Penentuan Pusat Penyebaran Bahasa-bahasa itu berdasarkan Teori Migrasi," *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, Oktober 1964, hal. 319-352.

- Samsuri, M.A. *"Sistem Fonem Indonesia dan suatu Penyusunan Edjaan Baru,"* Medan Ilmu Pengetahuan, 1:323-341 (Oktober, 1960).
- k. Artikel atau bahan dari harian. *Contoh:*  
Arman, S.A. *"Sekali Lagi Teroris,"* Kompas, 19 Januari 1973, hal. 5. *Kompas*, 19 Januari 1973.
- l. Tesis dan Disertasi yang belum diterbitkan. *Contoh:*  
Parera, Jos. Dan. *"Fonologi Bahasa Gorontalo."* Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 1964.
- m. Bila pustaka yang dirujuk terdapat dalam prosiding. *Contoh:*  
Mudzhar, M Atho. *Perkembangan Islam Liberal di Indonesia*, Prosiding Seminar Pertumbuhan Aliran/Faham Keagamaan Aktual di Indonesia. Jakarta, 5 Juni, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009.
- n. Bila pustaka yang dirujuk berupa media massa. *Contoh:*  
Azra, Azyumardi. 2009, *Meneladani Syaikh Yusuf Al-Makassari*, Republika, 26 Mei: 8.
- o. Bila pustaka yang dirujuk berupa website. *Contoh:*  
Madjid, Nurcholis, 2008, *Islam dan Peradaban*. [www.swaramuslim.org](http://www.swaramuslim.org)., diakses tanggal ....
- p. Bila pustaka yang dirujuk berupa lembaga. *Contoh:*  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya*. LIPI, 2009. Jakarta.
- q. Bila pustaka yang dirujuk berupa makalah dalam pertemuan ilmiah, dalam kongres, simposium atau seminar yang belum diterbitkan. *Contoh:*  
Sugiyarto, Wakhid. *Perkembangan Aliran Baha'i di Tulungagung*. Seminar Kajian Kasus Aktual. Bogor, 22-24 April. 2007.
- r. Bila pustaka yang dirujuk berupa dokumen paten. *Contoh:*  
Sukawati, T.R. 1995. *Landasan Putar Bebas Hambatan*. Paten Indonesia No ID/0000114.
- s. Bila pustaka yang dirujuk berupa laporan penelitian. *Contoh:*  
Hakim, Bashori A. *Tarekat Samaniyah di Caringin Bogor*. Laporan Penelitian. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang Kementerian Agama Jakarta. 2009.
11. Kelengkapan tulisan: gambar, grafik dan kelengkapan lain disiapkan dalam bentuk file .jpg. Untuk tabel ditulis seperti biasa dengan jenis font menyesuaikan. Untuk foto hitam putih kecuali bila warna menentukan arti.
12. Redaksi: editor/penyunting mempunyai wenang mengatur pelaksanaan penerbitan sesuai format HARMONI.

ISSN 1412-663X

## INDEKS ABSTRAK JURNAL VOL. 11 NO 1 TAHUN 2012

INDONESIA

INGGRIS

1 **Merekonstruksi Gerakan Dakwah  
Masa Masa Depan****Reconstructing the Future Propagation  
(Dakwah) Movement****Oleh M. Yusuf Asry**

Staf Pengajar, Peneliti Sosial dan Agama

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta

Dakwah Islam perlu menggunakan metode yang tepat sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya, yakni menyampaikan pesan agama. Pada awal abad ke-20, di nusantara muncul beberapa organisasi sosial keagamaan yang menerapkan prinsip-prinsip organisasi modern, seperti Syarikat Dagang Islam (SDI), Sarekat Islam (SI), menyusul Persyarikatan Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Secara umum organisasi-organisasi tersebut mengusung empat hal yang menjadi spirit dan ideologi, yaitu: keagamaan, sosial, pendidikan dan ekonomi. Pengembangan manajemen dakwah Islam berbasis komunitas perlu ditempuh sebagai langkah baru untuk memfasilitasi masyarakat merumuskan program dakwah dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri.

**Kata kunci:** toleran, perubahan sosial, ajaran agama, rahmatan lil'alam

The Islamic Dakwah needs to seize on appropriate methods so it is well orientated and in line with its objectives, it is conveying religious messages. At the beginning of the 20th century in Indonesia has started appearing several social-religious organizations that apply the principles of modern organizations, such as the Syarikat Dagang Islam (SDI), Islam SI (SI), followed Persyarikatan Muhammadiyah and NU. In general, these organizations deliver four ideas that become the spirit and ideology, which are: religion, sociology, education and economy. The development of the community-based Islamic da'wah management was understood to be implemented as new measures to facilitate the community in order to formulate the principles of the missionary program, by and for the community itself.

**Keywords:** tolerance, social change, religion, rahmatan lil'alam

## 2      **Setelah Jihad dan Bom: Diskursus Dakwah pada Masyarakat Plural**

## **After Jihad and the Bomb: Preaching Discourse on Public Plurality**

**Ahmad Syafi'i Mufid**

Ahli Peneliti Utama Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat  
Kementerian Agama RI

Jihad adalah ajaran atau panggilan Allah untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Sebagian muslim mengkaji nash Al Qur'an dan Hadis untuk mengambil hukum karena belum tersedianya dalil qath'i. Upaya ini disebut ijthihad dan orangnya disebut mujtahid. Dalam komunitas Islam terdapat juga orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh agar jiwanya menjadi suci melalui serangkaian pertobatan dan zikir, mereka disebut mujahadah. Pada saat ini, kata jihad jauh lebih populer daripada kata ijthihad dan mujahadah. Padahal kata-kata tersebut merupakan bentuk penerapan ajaran Islam yang terbukti telah merubah mentalitas bangsa-bangsa muslim dari kejahiliah, ketidakadaban, dan saling bermusuhan menjadi umat yang unggul (khaira ummah) dan memberi sumbangan bagi kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan. Sehubungan dengan ajaran jihad seringkali tidak disertai dengan semangat ijthihad dan mujahadah sehingga dampaknya dan maslahatnya kurang dirasakan oleh umat Islam apalagi umat manusia. Pada era globalisasi dakwah adalah pilihan tepat untuk mewujudkan misi sebagai khalifatullah pada masyarakat plural. Dengan dakwah, umat Islam dapat melakukan perubahan seperti yang dikehendaki oleh Islam. terbukti paham dan gerakan Islam yang berjihad dengan pendekatan qital jauh tertinggal dari gerakan Islam yang mendahulukan pendekatan dakwah. Kemajuan demi kemajuan telah dicapai oleh gerakan dakwah, sedangkan kegagalan demi kegagalan dialami oleh gerakan jihadis. Sejarah adalah guru yang arif dan objektif.

**Kata kunci:** *jihad, ijthihad, mujahadah, dakwah dan pluralitas.*

Jihad is the doctrine or the call of God towards earnest accomplishment. A number of Muslims examine Qur'an and Hadith texts on order above law because of the unavailability of *qath'i* quotations. This effort is called *ijthihad* and the person undergoing thr process is called *mujtahid*. In Islamic communities there are also people who are trying earnestly to become pure through a series of repentance and remembrance, they are called *mujahadah*. At this time, the word jihad is much more popular than the word ijthihad and mujahadah. However, the fact is the words are a form of application of Islamic Teachings which has proved to change the mentality of the Muslim Nations from the act of unjust, immorality, and hostility towards each other to be the superior race (khaira umma) and contribute to humanity, justice and prosperity. In regards of the doctrine of jihad, it is often absent of the spirit of ijthihad and mujahadah, thus its impact and acknowledgement is less experienced by neither Muslims nor the whole human race. Preaching is the right choice for fulfilling the mission as khalifatullah in plural societies in the globalization era. By preaching, Muslims can make changes as required by Islam. It is proven that dogmas and Islamic Jihad movements with a qital approach is left behind as compared to Islamic movement which prioritizes the preaching approach. Progress after progress has been made by the missionary movement, while the failures have been experienced by the jihadist movements. History is a wise and yet objective teacher.

**Keyword:** *jihad, ijthihad, mujahadah, preaching and plurality.*

3 **Islam, Pluralitas dan  
Pembentukan Masyarakat Madani  
di Indonesia**

**Islam, Plurality and the Formation of  
Civil Society in Indonesia**

**Lukmanul Hakim**

Peneliti LaKIP (Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian) Jakarta

Di Indonesia, pluralitas merupakan hal yang tidak dapat disangkal. Pluralitas agama merupakan asset bangsa Indonesia. Pluralitas mencakup berbagai aspek dalam kehidupan sosial dan agama karena kedua berhubungan dan tidak dapat dipisahkan (integrated). Dalam realitasnya di masyarakat, kehidupan sosial keagamaan memiliki banyak ragam dan tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang positif. bahkan gesekan dan konflik juga kadangkala terjadi, baik antar pemeluk agama, dan juga sesama pemeluk agama yang berakhir dengan keributan. Karenanya agar pluralitas atau keragaman memberikan dampak positif, maka diperlukan manajemen konflik yang baik. Dalam kaitannya dengan pembentukan masyarakat madani di Indonesia, manajemen konflik yang baik akan memberikan ruang yang luas bagi tiap individu untuk mengembangkan kreativitas dan ide-ide mereka untuk kehidupan sosial dan keagamaan yang lebih baik.

**Kata kunci:** *Islam, Pluralitas Agama/Kepercayaan, Masyarakat Madani.*

Plurality is inevitable in Indonesia. Plurality of religions is an asset of Indonesia. Plurality covers various aspects of social and religious life for both are related and inseparable. The socio-religious life has had many variety and is not always associated with positive values based upon the reality in the society. Friction and conflicts also occasionally occur, both among religious followers, and also fellow believers which commonly ends with disagreements. In order to result in positive impacts upon plurality or diversity, a good conflict management is needed. In relation to the establishment of civil society in Indonesia, good conflict management will provide a wide range of sphere for each individual to develop their creativeness and ideas for a better social and religious life.

**Keywords:** *Islam, Plurality of Religion / Belief, Civil Society.*

4 **Peran Yayasan  
Pelayanan Pekabaran Injil  
Indonesia (YPPII) Batu Dalam  
Pengelolaan Dana dan Asset  
Sosial Keagamaan  
bagi Pemberdayaan Umat  
Beragama**

**The Role of Yayasan Pelayanan  
Pekabaran Injil Indonesia (YPPII) Batu  
on Funding Management and Religious  
Social Asset for the Empowerment for  
Religious Society**

**Agus Mulyono**

*Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*

Bidang yang dikelola oleh YPPII Batu dalam pengelolaan dana dan aset sosial keagamaan meliputi diantaranya bidang pendidikan, pelayanan diakonia dan pelayanan panti asuhan. Pendirian yayasan YPPII ini diantaranya terinspirasi oleh banyaknya anak-anak yang menderita akibat kerusuhan itu. Kasus Poso menyebabkan ± 20 ribu anak kehilangan orang tua dan masa depan mereka, dan YPPII mengambil peran mengasuh beberapa anak korban kerusuhan Poso. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam bentuk studi kasus. Penelitian kualitatif menekankan pada peneliti sebagai instrumen pokok pengumpulan dan analisis data.

**Kata kunci:** *donatur, pemberdayaan pendidikan, penyaluran dana, pelayanan diakonia.*

The area managed by YPPII Batu in funding management and religious social assets includes education area, diaconal service and orphanage care. The establishment of YPPII foundation was inspired by the many children who suffer from the violence. The case of Poso led to ± 20 thousand children loses their parents and their future, and so YPPII takes care of some children of Poso riot victims. This study used a qualitative approach in the form of descriptive case studies. Qualitative research emphasizes the researcher as the main instrument of the data collection and analysis.

**Keywords:** *donator, empowerment education, funding distribution, diaconal service.*

5 **Pengelolaan Dana Sosial  
Keagamaan Gereja (Paroki)  
Katedral Jakarta dalam  
Pemberdayaan Umat Katolik**

**The Religious Social Fund Management  
by the Church (PAROKI) Jakarta  
Cathedral in Religious People  
Empowerment**

**Abdul Jamil**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Lembaga keagamaan telah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui pengelolaan dana dan asset sosial. Salah satu lembaga keagamaan tersebut ialah Gereja (Paroki) Katedral di DKI Jakarta. Melalui penelitian dengan pendekatan kualitatif diketahui bahwa lembaga ini telah menerapkan sistem dan mekanisme pengelolaan dana sosial keagamaan secara efektif dan efisien, dengan sistem manajemen pengelolaan yang sehat, transparan dan accountable. Penyaluran dana kolekte untuk kegiatan sosial oleh Gereja dilakukan melalui Seksi Sosial Paroki (SSP) atau Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) dalam bentuk bantuan karitatif/konsumtif. dan pemberdayaan lembaga pendidikan di bawah perhimpunan Vincentius. Pemberdayaan melalui program pendidikan ini bisa dikatakan berhasil, karena dapat memenuhi indikator-indikator dalam pemberdayaan, sementara program yang lainnya baru sebatas stimulan karena masih bersifat karitatif/konsumtif.

**Kata Kunci:** *Katedral Jakarta, dana sosial keagamaan, pemberdayaan umat.*

Religious institutions have given much contribution to the society through fund management and social asset. One of the religious institutions is the Church (PAROKI) cathedral in Jakarta. Through the research with a qualitative approach, this institution has implemented a system and mechanism for social religious funding management effectively and efficiently, with healthy, transparent and accountable management system. The distribution of collected funds, for the social activities carried out by the church, was done through the Social Section of the Paroki (SSP) or Social-Economic Development (PSE) in the form of charitable/consumptive aid, and the empowerment of education institutions under the Vincent association. The empowerment through this education programs are considered successful, because it accomplishes the indicators of empowerment, while another program is merely a stimulant because it was charitable / consumptive.

**Keywords:** *Jakarta Cathedral, religious social funds, people empowerment.*

**6 Dampak Sosial Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal Terhadap Umat Islam di Kota Padang**

**The Social Impact of Defining Initial Determination of Ramadhan and 1st Shawwal toward Muslims in Padang City**

**Zaenal Abidin**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih jauh tentang dampak sosial yang disebabkan oleh penentuan awal ramadhan dan 1 syawal terhadap umat islam di Padang. Secara sosiologis kota Padang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat dan meskipun relatif modern tentu fenomena dari banyaknya kelompok jamaah disana yang tidak beragam dan meramaikan masyarakat, terutama dalam masyarakat islam. Sejauh ini penelitian dilakukan untuk mengungkapkan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat islam pada perbedaan dalam penentuan awal ramadhan dan 1 syawal.

***Kata kunci:** dampak sosial, umat islam, penentuan awal ramadhan dan 1 syawal, kota padang*

This research was aimed to explore more about the social impact caused by the initial determination of Ramadhan and 1st Syawwal towards the Muslims in Padang. Sociologically the city of Padang is composed of various groups of society and though relatively modern, of course the phenomenon of many congregation groups had no diversity and enlivening the community, particularly in the Muslim community. So far is to trace how much the positive and negative impact toward Muslims society on the difference in the initial determination of Ramadan and 1st Syawal.

***Keywords;** social impact, Muslim community, initial determination of the first Ramadhan and 1st Syawwal, the city of Padang*

7 **Kompetensi Komunikasi  
Penyuluh Agama Honorar di  
Kecamatan Cibinong Kabupaten  
Bogor**

**The Communication Competence of  
the Religious Honorary Educator in the  
Sub-district of Cibinong, Bogor District**

**Taufik Hidayatullah**

*Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor*

Artikel ini fokus pada penjelasan mengenai kompetensi komunikasi para penyuluh agama honorar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Desember 2011 di Kecamatan Cibinong, kabupaten Bogor. Terdapat 27 penyuluh agama honorar dan 149 anggota majelis ta'lim dalam bimbingan mereka. Proses sampling yang digunakan yaitu census procedure sampling untuk para penyuluh agama honorar dan random sampling untuk anggota majelis ta'lim. Metode pengoleksian data yaitu questionnaire, observasi, wawancara kepribadian, dan pembelajaran sosial sehari-hari. Analisa Statistik yang digunakan adalah deskriptif dan korelasi Kendal Tau-b. Penelitian ini mengindikasikan bahwa para penyuluh agama honorar tersebut memiliki kompetensi tinggi dalam berkomunikasi dan beberapa faktor mempengaruhi motivasi pekerjaan dan kemampuan komunikasi mereka.

**Kata kunci:** *penyuluh agama honorar, motivasi pekerjaan, kompetensi,*

This article focuses on explanation about the competency of The Volunteer Religious Educator. The research was conducted in November-Desember 2011 in Cibinong Subdistrict, Bogor Regency. The population were 27 Volunteer Religion Educator and 149 majelis taklim member under their guidance. Sampling process was by census procedure sampling for the Volunteer Religion Educator and by random sampling for majelis taklim member. Data collection techniques were questionnaire, observation, in-depth interview, and documentary study. The statistical analysis used was descriptive and Tau-b Kendall correlation. The findings indicated that Volunteer Religion Educator had a high level in communication competency and several factors influenced their job motivation and communication competency.

**Keywords:** *Volunteer Religion Educator (penyuluh agama honorar), job motivation, competency.*

**8 Survei Keberagaman Pelajar  
SLTA: Paham Ke-Islaman Pelajar  
SMA dan MA dalam Kehidupan  
Sosial**

**Religious surveys on High School  
Students: The Islamic Understanding of  
High School and MA students on the Social  
Life**

**Suprpto**

*Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian  
Agama RI*

Dalam satu dekade terakhir ini banyak kalangan/lembaga/media melansir tingginya sikap intoleransi beragama di Indonesia. Perilaku intoleransi beragama juga telah tumbuh di kalangan pelajar, Wahid Institut merilis hasil temuan penelitiannya menyatakan bahwa sikap intoleran semakin tumbuh subur, tercermin dari 49,5% responden menolak keberadaan rumah ibadah agama lain di dekat tempat tinggalnya. Perilaku intoleransi beragama di kalangan pelajar diduga telah mengarah pada gerakan radikalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat "kesalehan" beragama di kalangan pelajar muslim SLTA berpengaruh terhadap perilaku intoleran. Ini berarti jika tingkat ketaatan beragama pelajar muslim SLTA semakin menguat, mengakibatkan makin menguatnya perilaku intoleran di kalangan pelajar muslim SLTA, demikian sebaliknya. Perilaku toleran di kalangan pelajar SLTA dapat didorong melalui peningkatan wawasan dan pemahaman Islam yang moderat, secara bersama-sama dengan upaya penciptaan suasana percaya terhadap kehidupan sosialnya.

**Keyword:** toleran, intoleran, kehidupan sosial, keilmuan Islam

Within this last decade many people/institution/media launch the height of religious intolerance action in Indonesia. Religious intolerant attitude has also been growing among students, Wahid Institute released the results of their research finding that religious intolerance attitude of students increasingly flourished, reflected in 49.5% of respondents rejected the worship house existence of other religion near their residences. Religious intolerant attitude among students is thought to have led to the movement of radicalism. It can be said that religious "piety" level of high school muslim students affected the intolerance attitude, if the religious piety of high school Muslim student became stronger, resulting in stronger of intolerant behaviour among muslim high school students. This study used a quantitative approach.

**Keyword:** tolerance, intolerance, social life, Islamic knowledge

9      **Dinamika Perkembangan  
Komunitas Dayak Hindu Budha  
Bumi Segandu  
di Indramayu**

**The Dynamics of Development of  
Dayak Hindu Budha Bumi Segandu  
Community in Indramayu**

**Nuhrison M Nuh**

*Ahli Peneliti Utama Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat  
Kementerian Agama RI*

Fokus pembahasan penelitian ini adalah perkembangan komunitas penganut Dayak Hindu Budha Bumi Segandu, kebijakan pemerintah dan relasi sosial antara komunitas ini dengan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk studi kasus atas sebuah komunitas lokal, yang memiliki ajaran dan identitas tersendiri. Komunitas ini didirikan oleh Takmad, diawali dengan mendirikan padepokan silat dan ilmu ngaji rasa. Konsep ajarannya tidak didasarkan pada kitab suci, aliran kepercayaan, agama, maupun akar budaya, melainkan mengambil teladan sikap dan perilaku tokoh Semar dan Pendawa Lima.

**Kata kunci:** *pemurnian diri, cerita pewayangan, kepercayaan lokal, pelayanan keagamaan.*

The focus of the discussion of this research is the development of Dayak Hindu Budha Bumi Segandu followers' community, government policy and social relations between this community and the surrounding society. This study used a qualitative approach in the form of case study on a local community, which has its own teaching and identity. This community was established by Takmad, initiated with establishing the martial-arts (silat) residence and ilmu ngaji rasa. The concept of teaching is not based on the holy book, any religious sect, religion or cultural roots, but to take the attitude model and behavior of Semar and Pendawa Lima characters.

**Keywords:** *self-purification, puppet stories, local beliefs, religious services.*

10 **Dinamika Sosial Keagamaan  
Majelis Tafsir Al-Quran  
(MTA) Pusat di Kota Surakarta  
Jawa Tengah**

**The Social Religious Dynamics of  
Tafsir Al-Quran Assembly (MTA)  
Center in Surakarta City, Central Java**

Wakhid Sugiyarto

*Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat  
Kementerian Agama RI*

Di Kota Surakarta terjadi dinamika yang mengarah pada ketegangan dan konflik akibat gencarnya dakwah oleh Majelis Tafsir Al Qur'an. Penelitian ini sangat diperlukan, untuk memahami dan merencanakan kondisi sosial agar tercipta situasi yang harmonis dan toleran. Fokus penelitian adalah sejarah perkembangan MTA, model dakwah, ajaran pokok yang dikembangkan dan respon tokoh agama dan pemerintah terhadap MTA. Keresahan dan ketegangan sosial keagamaan akibat muncul MTA terindikasi disebabkan oleh belum matangnya sikap dewasa dan cakrawala berfikir masyarakat, khususnya masyarakat arus bawah (grassroot). Mereka lebih mendengar seruan ulama (kyai) daripada mengedepankan nalar berfikir logis. Konflik disebabkan oleh ekspresi membela diri merasa dipojokkan kemudian menyerang balik baik dengan fisik maupun retorika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

**Kata kunci:** *Majelis Tafsir Al-Qur'an, sikap inklusif, konsep jama'ah, masalah khilafiyah.*

In Surakarta city occur the dynamics which lead to tensions and conflicts caused by the incessant propaganda by Tafsir Qur'an Assembly (MTA). This research is necessary, to understand and manipulate the social condition in order to create harmonious and tolerant situation. Focuses of the research are the historical development of MTA, propagation models, developed basic teachings and religious leaders and the government's responses to MTA. Social religious fidgetiness and tension due to the appearance of MTA indicated caused by the immature attitude and horizon of thinking of the society, especially the bottom stream of society (grassroots). They would hear the appeal of religious scholars (*kyai*) rather than to forward the reasoning of logical thinking. The conflict was caused by the self-defense expression, backed into a corner and then hit back with physical and rhetoric. This study used a qualitative approach.

**Keywords:** *Tafsir Al-Qur'an Assembly (MTA), inclusivity, concept of congregation, khilafiyah problem.*

**11 Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Studi Kasus Pelaksanaan PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 di Jakarta Utara**

**The Role of Religious Harmony Forum (FKUB) in Achieving Harmony among Religions: PBM Implementation Case Study No. 9 and No. 8 of 2006 in North Jakarta**

Asnawati

*Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat pada tanggal 21 Maret 2006. FKUB lahir dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kelahiran FKUB telah didahului oleh lembaga FKKUB yang digunakan sebagai wahana dialog, menerima, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. FKUB juga dapat menjadi wadah untuk aksi sosial bersama membangun kebersamaan dan silaturahmi yang langgeng. Pembentukan FKUB Jakarta Utara difasilitasi oleh pemerintah sebagai implementasi dari terbitnya PBM Tahun 2006 berjalan dengan lancar.

**Kata Kunci:** PBM, FKUB, Masyarakat dan Dana.

The Government has issued a Joint Ministerial Regulation (PBM) Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs No. 9 and 8 Year 2006 on Guidelines for the Implementation of Regional Head of Maintenance Tasks for Religious Harmony, Empowerment Forum for Religious Harmony and the Construction of Houses of Worship on March 21, 2006. The FKUB was born among the people, by the community and to society. The birth had been preceded by the agency FKUB FKKUB which is used as a tool for communication, acknowledgement, aspiration, and contribution towards the community. FKUB can also be a forum for social action together and build together a lasting social relationship. North Jakarta FKUB formation is facilitated by the government as the implementation of the publication of PBM in 2006 which preceded smoothly at the end of 2007 the number of board 17.

**Keywords:** PBM, Inter Religious Harmony Forum (FKUB), Society and Funding

## 12 Potensi Kerukunan dan Konflik Umat Beragama di Kota Madiun Jawa Timur

## Harmony and Conflict Potentials for Religious Society in the City of Madiun East Java

Suhanah

*Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada kasus kerukunan, konflik dan solusi konflik umat beragama di kota Madiun. Studi ini menyimpulkan antara lain: potensi kerukunan di Kota Madiun muncul dikarenakan adanya solidaritas kesadaran masyarakat. Dimana Masyarakat siap berbeda dan bersepakat menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan adanya kesadaran itu, permasalahan keagamaan diserahkan kepada masing-masing umat beragama melalui tokoh-tokohnya. Di samping itu keberadaan FKUB dan Pondok Pesantren dirasakan sangat efektif untuk mendukung kehidupan harmoni, komunikasi efektif (silaturahmi) tokoh lintas agama terbangun dengan baik. Penegak hukum dan institusi pemerintah turut mendorong terciptanya kerukunan masyarakat lintas agama. Persoalan yang memicu konflik pun disadari sepenuhnya oleh aparat dan masyarakat umum. Langkah-langkah strategis untuk mengatasi konflik intern dan antar umat dilakukan melalui mediasi dan dialog dengan prinsip kekeluargaan.

**Kata kunci:** kerukunan, konflik, FKUB, solidaritas umat beragama.

This study used a qualitative approach in the case of harmony, conflict and religious conflict solutions in the city of Madiun. The study concludes that: the potential for harmony in the City of Madison emerged due to the solidarity of public awareness, where people are ready to be different and agree to maintain the unity and integrity. Given that awareness, religious issues are submitted to the respective religious community through each interfaith leader. In addition, the presence of FKUB and Islamic boarding school has been very effective to support the proper development of living in harmony and effective communication (silaturahmi) among interfaith leaders. Law enforcement and government agencies have promoted the creation of inter-faith harmony in the society. The issue that caused the conflict was recognized by the authorities and wider public. Strategic measures to overcome the internal and inter-religious conflicts through mediation and dialogue with the principle of kinship.

**Key words:** *harmony, conflict, FKUB, religious solidarity society*

- 13 **Membangun Peradaban Dunia yang Damai: Pentingnya Pembaharuan Islam dan "Kearifan" Barat**  
**Tinjauan Buku "Masa Depan Islam" Karya John L. Esposito**

**Building a Peaceful World Civilizations: The Importance of Islamic Transformation and Western "Wisdom": Book Review of "The Future of Islam" by John L. Esposito**

Asep Saifullah

*Peneliti Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*

Pembaharuan Islam seharusnya tidak terjadi jika ia tetap konsiste dengan penilaiannya. Setiap gerakan atau kelompok ekstrimis, teroris, fundamentalis, radikal, atau apapun namanya yang dipandang garis keras, hal itu harus dipisahkan dari kaum Muslim arus utama dan harus dilihat konteksnya. Juga harus dipahami Islam sebagai ajaran dan Islam sebagaimana yang diamalkan. Kemajemukan mesti dijadikan modal dasar bagi menguatkan persatuan dan kesatuan, bukan dipandang sebagai hambatan. Umat Islam sangat memerlukan management conflict untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh umat Islam

**Kata kunci:** praktik keberagamaan, modernisasi, keragaman religius

The Islamic transformation should have not occurred if it remained consistency with its assessment. Any movements or groups of extremist, terrorist, fundamentalist, radical, or whatever its name is considered a hard act towards its teachings and implementations, must be separated from the mainstream Muslims and should be seen throughout their contexts. It should also be understood as the teaching of Islam and Islam as practiced. The capital pluralism should be used as a basis for strengthening the unity and integrity, not seen as barriers. Muslims are in need of conflict management to resolve issues that are faced by the Muslims.

**Keywords:** religious practices, modernization, diversity religious

A

**Abdul Jamil**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

*Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Gereja (Paroki) Katedral Jakarta*

*Abdul Jamil* \_\_\_\_\_

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

**Agus Mulyono**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

*Peran Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia (YPPII) Batu Dalam Pengelolaan Dana dan Aset Sosial Keagamaan bagi Pemberdayaan Umat Beragama*

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

**Ahmad Syafi'i Mufid**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

*Setelah Jihad dan Bom: Diskursus Dakwah pada Masyarakat Plural*

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

**Asep Saefullah**

Peneliti Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

*Resensi ~ Membangun Peradaban DuÄnia yang Damai: Pentingnya Pembaruan dan "Kearifan" Barat.*

*Tinjauan Buku "Masa Depan Islam", karya John. L Esposito*

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

**Asnawati**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

*Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Studi Kasus Pelaksanaan PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006 di Jakarta Utara*

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

L

**Lukmanul Hakim**

Peneliti Lembaga Kajian Islam Perdamaian (LaKIP)

*Pandangan Islam tentang Pluralitas dan Kerukunan Umat Beragama dalam Konteks Bernegara*

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

M

**M. Yusuf Asry**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

*Merekonstruksi Gerakan Dakwah Masa Depan*

ISSN 1412-663X

N

**Nuhrison M Nuh**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

*Dinamika Perkembangan Komunitas Dayak Hindu Budha Bumi Segandu di Indramayu*

Volume 11, Nomor 1, Januari - Maret 2012

S

**Suhanah**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

*Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor*

Volume X, Nomor 4, Oktober-Desember 2011

**Suprpto**

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

*Survei Keberagamaan Pelajar SLTA: Paham Ke-Islam-an Pelajar SMA dan MA dalam Kehidupan Sosial*

Volume X, Nomor 4, Oktober-Desember 2011

T

**Taufik Hidayatullah**

Penyuluh Agama Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bogor

*Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Honorer di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor*

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

W

**Wakhid Sugiyarto**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

*Dinamika Sosial Keagamaan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Pusat di Kota Surakarta Jawa Tengah*

Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012

Z

**Zaenal Abidin**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

*Membangun Harmoni melalui Kebersamaan: Studi Kasus Dampak Sosial Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap Umat Islam di Kota Padang*

Volume 11, Nomor 1, Januari - Maret 2012

**Redaksi Jurnal Harmoni** mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Mitra Bestari atas peran serta dan selalu aktif demi meningkatkan kualitas Jurnal Harmoni. Selain itu juga telah memberikan perhatian, kontribusi, koreksi dan pengkayaan wawasan secara konstruktif. Mitra Bestari dimaksud adalah:

1. Rusdi Muchtar (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
2. Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
3. Endang Turmudzi (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
4. Dwi Purwoko (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
5. M. Ridwan Lubis (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
6. Lukmanul Hakim (LaKIP Jakarta)





# SERTIFIKAT

Nomor: 408/AU2/P2MI-LIPI/04/2012

## Akreditasi Majalah Ilmiah

Kutipan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Nomor 395/D/2012 Tanggal 24 April 2012

**Nama Majalah :** Harmoni

**ISSN :** 1412-663X

**Penerbit**

**: Pusat Penelitian dan Pengembangan  
Kehidupan Keagamaan, Kementerian Agama**

Ditetapkan sebagai Majalah Ilmiah

## TERAKREDITASI

Akreditasi sebagaimana tersebut di atas berlaku selama 3 (tiga) tahun

Cibinong, 24 April 2012

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Ketua Panitia Penilai Majalah Ilmiah-LIPI

Prof. Dr. Rochadi  
NIP 195007281978031001<sub>4</sub>



LEMBAGA  
ILMU PENGETAHUAN  
INDONESIA



Panitia  
Penilai  
Majalah  
Ilmiah

